

Bimo Sasongko, Mencetak Sejuta Habibie untuk Indonesia

Bimo Sasongko, satu dari tokoh pendidikan yang peduli terhadap nasib anak bangsa. Betapa tidak? Di tengah banyaknya negara yang berbondong-bondong mengirimkan tamatan SMA untuk kuliah di luar negeri, justru Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tertinggal jauh. Tak pelak, Bimo pun terpicu mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk pengiriman tamatan SMA keluar negeri. Kini, dari ide besarnya itu 2000 tamatan SMA sukses menimba ilmu di negara-negara maju. Seperti apa kiprahnya dan apa obsesinya ke depan?



Bimo Sasongko, sosok anak bangsa yang kiprahnya pantas diacungi jempol? Dari petjujuannya, lahir ribuan mahasiswa yang sukses menempuh pendidikan S-1 di luar negeri. Bimo mampu mengubah mindset banyak orang bahwa kuliah di luar negeri itu sulit dan biayanya mahal.

Lelaki dari seleksi Program Beasiswa STAIID 1 BPPT Menristek Prof. DR. B.J. Habibie tahun 1990, mengantarkan Bimo menjadi bagian dari mimpi besar membangun Indonesia. Apalagi setelah melihat hanya segelintir mahasiswa asal Indonesia di luar negeri. Bayangkan, dengan penduduk sebesar 252 juta jiwa, hanya 60.000 mahasiswa Indonesia yang bersekolah ke luar negeri. Sedih dan miris, perasaan itu bercampur aduk di hati Bimo. Sebab, Bimo merasakan sendiri bahwa program pengiriman tamatan SMA Indonesia sangat besar dampaknya bagi peningkatan kualitas SDM. Saat itulah, muncul gagasan Bimo untuk berinvestasi di bidang pendidikan.

Bimo pun terpicu mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk pengiriman tamatan SMA keluar negeri yang hingga kini sukses mengirimkan 2000 tamatan SMA untuk belajar ke negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Australia & Jepang.

Bimo melihat dari perjalanan sejarah yang menunjukkan ada 4 kejayaan, yaitu kejayaan Islam, kejayaan Eropa, kejayaan Jepang dan kejayaan Amerika Serikat. Islam maju karena ribuan orang dikirim untuk menerjemahkan buku-buku dari Yunani dan Romawi. Perlahan Eropa mulai bangkit dengan banyak mengirimkan ribuan orang ke Cordova, Turki, dan Baghdad untuk menyerap ilmu pengetahuan dari Islam hingga menjadi maju. Amerika Serikat pun maju dengan menyerap ilmu pengetahuan dari Eropa. Jepang juga mengirimkan ribuan bahkan ratusan ribu orang ke Amerika Serikat & Eropa tahun 1800-an. Bahkan hingga saat ini semua negara maju masih mengirimkan mahasiswanya ke negara-negara lain.

Jepang yang sangat maju sekalipun masih mengirimkan mahasiswanya sebanyak 20.000-an ke negara maju Amerika Serikat.

Untuk itu, Bimo pun ingin mewujudkan mimpinya, muncul jutaan Habibie - Habibie baru yang bisa membuat bangsa Indonesia disegani negara lain, minimal ASEAN atau bahkan di dunia. Berikut petjujuannya *The Politic* dengan tokoh muda pendidikan lulusan tiga universitas papan atas di Amerika dan Jerman ini.

Bisa diceritakan perjalanan Anda hingga bisa kuliah di luar negeri?

Saya lulus dari SMA 3 Bandung tahun 1990. Lalu ikut UMPTN dan masuk ITB Bandung Jurusan Teknik Informatika. Nah, baru sebelum di ITB saya ikut Program Beasiswa Prof. DR. B.J. Habibie yang waktu itu menjabat menteri riset dan teknologi (ristek). Program itu rutin tiap tahun mulai dari tahun 1982 yang mengirim mahasiswa ke-9 negara maju dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Jerman, Perancis, Belanda, Austria dan Australia, untuk bidang studi teknologi. Lebih dari 150.000 peserta pertama yang ikut seleksi, yang diterima berkisar sekitar 100 orang. Saya termasuk salah satu yang diterima untuk kuliah di Amerika



Bimo Sasongko bersama Presiden ke-3 Prof. DR. Ing. B.J. Habibie

Serikat dan mengambil jurusan sama seperti Prof. DR. B.J. Habibie dulu, yaitu teknik penerbangan atau aerospace engineering, di North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA.

Berapa lama Anda kuliah di luar negeri?

Saya kuliah S1 dari tahun 1991 - 1995. Lalu setelah lulus saya ambil S2 juga di Amerika Serikat mengambil program master di jurusan industrial engineering atau teknik industri di Arizona State University. Tahun 1996 saya pulang ke Indonesia dan berkarir sebentar di BPPT. Di tahun 2001 saya melanjutkan studi ke Jerman mengambil program MBA sampai lulus 2003, bekerja kembali di BPPT sambil mendirikan Euro Management Indonesia dan saat ini saya menjabat sebagai Sekjen IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie) yaitu suatu Ikatan Alumni yang terdiri dari para lulusan SMA terbaik di seluruh Indonesia yang berjumlah ± 1500 orang dari tahun 1982-1996, dikirim dari Kementerian Riset dan Teknologi dalam program OFR, STMDP, STAIID, IPTN dan PT PAL untuk melanjutkan studi S-1 di bidang Sains & Teknologi ke beberapa negara maju di dunia di antaranya: Jerman, USA, Prancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Austria, dan Jepang.

Apakah saat di luar negeri banyak juga mahasiswa yang berasal dari Indonesia?

Saat itu hanya segelintir orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Padahal Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak, dan sekolah ke luar negeri itu tidak susah, semut di semahal yang dibayangkan. Sungguh miris, di tengah banyak negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, China yang justru gencar mengirimkan puluhan ribu tamatan SMA untuk kuliah ke negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, Perancis & Belanda. Saya ingin sebanyak mungkin tamatan SMA bisa kuliah S1 ke negara - negara maju tersebut.

Jadi mahasiswa asal Malaysia, Vietnam, Kamboja, China sangat mendominasi jumlahnya di luar negeri ya?

Iya, statistik menunjukkan bahwa di Amerika jumlah mahasiswa asal Cina sekitar 157.000 orang, India 103.000, Jepang 21.000 orang, dan Indonesia sekitar 5000 - 6000 orang. Di Jerman,

mahasiswa asal Indonesia sekitar 2000 orang namun mahasiswa Cina di Jerman sampai 25.000 orang. Penduduk China itu 5 kali lipat penduduk Indonesia, jadi kalau mahasiswa Indonesia di Jerman hanya 2.000 orang artinya mahasiswa Cina di Jerman itu 10.000. Tapi nyatanya mahasiswa Cina di Jerman sampai 23.000.

Begitu juga di Australia, mahasiswa Indonesia 11.000 orang, sedangkan asal Vietnam 10.000 orang. Padahal penduduk Vietnam hanya sekitar 90 juta orang. Artinya kalau penduduk Indonesia 250 juta orang atau sekitar 3 kali Vietnam, idealnya mahasiswa Indonesia di Australia 30.000 orang, nyatanya hanya 11.000 orang. Artinya Indonesia masih tertinggal dalam mengirimkan mahasiswa Indonesia ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia & Jerman.

Sebenarnya apa keuntungan kuliah di negara maju bagi masyarakat Indonesia?

Banyak manfaat yang akan didapatkan jika kuliah ke luar negeri, tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga mental, percaya diri, kemandirian, dan keberanian dan itu yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk maju bersaing di tingkat global dengan Cina, Malaysia, Kamboja dan negara-negara di dunia lainnya. Indonesia yang sedang berkembang, seharusnya bisa lebih banyak lagi mengirimkan mahasiswanya ke negara-negara maju. Indonesia masih membutuhkan dan harus menyerap ilmu dari negara-negara maju untuk digunakan di Indonesia. Tetapi saat ini ketika Malaysia, Vietnam, Kamboja mengirimkan ribuan anak-anak SMA untuk kuliah di negara maju, justru mahasiswa dari Indonesia semakin berkurang. Di Amerika Serikat zaman saya kuliah ada 15.000 orang Indonesia, sekarang justru turun hanya tinggal 6.000 bahkan berhenti.

Di tahun 1980 sampai 1990 mahasiswa Indonesia di Jerman sekitar 7000 orang dan sekarang ini tinggal 2500 orang, apalagi di Perancis hanya 400 orang. Itu sangat menyedihkan, padahal saat ini zaman globalisasi dan informasi dimana-mana dan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia jauh sudah meningkat berkali-kali lipat juga daya belinya jauh dibandingkan 20 tahun yang lalu.

Karena sebaiknya untuk kuliah di luar negeri itu lulusan SMA

bukan S1?

Selama ini mindset orang Indonesia adalah ingin sekolah keluar negeri untuk program S2 mya saja, ini lah yang membuat Indonesia kalah tertinggal dengan negara lain. Kenapa bisa tertinggal, karna zaman dulu informasi tidak ada, keuangan keluarganya masih rendah, kuliah S1 di Indonesia masih murah sehingga banyak orang menganggap bahwa S2 saja keluar negeri nya. Namun zaman sekarang informasi sudah ada, globalisasi dimana-mana, teknologi sudah canggih, jarak tempuh pendek, mentalnya masih muda, mudah beradaptasi, kemampuan bahasanya lebih cepat untuk mempelajari bahasa asing, dan untuk S1 di luar negeri kuliah lebih lama mencapai 4 - 5 tahun dibandingkan dengan kuliah S2 hanya 1 - 2 tahun, sehingga proses adaptasi dan pengenalan budaya di negara tersebut lebih mudah sehingga saya merekomendasikan untuk tamatan SMA kesana sama halnya dengan Pak Habibie. Saya yakin untuk di sekolah tidak hanya dibutuhkan ilmunya saja, akan tetapi cara berfikir, mental, kepercayaan diri itulah tamatan SMA dibutuhkan.

Bagaimana Anda melihat peran Pemerintah?

Pemerintah Indonesia masa kalah dengan pemerintah Malaysia, Vietnam, atau Kamboja apalagi Cina. Di Kamboja penduduknya hanya 13 juta orang, se per 20 nya bangsa Indonesia, tetapi mahasiswanya yang kuliah negeri sekitar 18.000. Kondisi ini miris, kalau mengacu pada jumlah penduduk Kamboja dibanding Indonesia maka seharusnya Indonesia mengirim tamatan SMA untuk kuliah ke luar negeri sekitar 360.000-an, faktanya 60.000-an.

Untuk itu pemerintah perlu membuat program beasiswa yang dibayai dengan seleksi yang bagus dan seleksi yang ketat. Tamatan SMA yang cerdas, pintar, bermental baik, memiliki nasionalisme bisa dikirim sekolah ke luar negeri, baik pemerintah pusat, atau daerah seperti Gubernur, Walikota, kementerian - kementerian, BUMN, Bank - Bank Nasional, Institusi - Institusi sosial, Partai politik atau dukungan pinjaman dari perbankan. Saya yakin 20 tahun lagi bangsa Indonesia akan maju. Seperti pada era kejayaan Islam, banyak siswa dari negara Eropa dikirim ke negara-negara Islam seperti Syiria, Irak, dan Turki. Akhirnya setelah mereka menguasai ilmu, Eropa menjadi maju, begitu juga Amerika, Jepang, China. Tak heran jika percepatan teknologi China itu berkembang pesat.

Jadi perlu dukungan besar dari pemerintah, agar program pak

Habibie yang berhenti tahun 1997 bisa berjalan lagi. Apalagi menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) persaingan semakin ketat, seluruh masyarakat ASEAN bisa masuk ke Indonesia untuk bekerja dengan ijazah dari berbagai negara di dunia. Bangsa ini harus unggul berwawasan global internasional.

Bagaimana perkembangan Pengiriman Mahasiswa Indonesia ke Luar Negeri, pencapaian apa yang telah Anda raih?

Alhamdulillah, lebih dari 13 tahun Euro Management Indonesia berdiri. Hingga kini saya sudah mengirimkan sebanyak hampir dari 2000 tamatan SMA terbaik bangsa ini di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik laki-laki maupun perempuan berbagai jenis SMA dari berbagai suku di daerah. Bayangkan zaman Pak Habibie dulu, mengirimkan 1500 orang mahasiswa tamatan SMA, dan kini saya sudah mengirim 2000 orang. Saya cukup puas dan bangga dan akan terus berjuang mengirimkan lebih banyak lagi orang Indonesia untuk bersaing dengan Malaysia, Vietnam, Kamboja bahkan Cina.

Apa obsesi Anda ke depan?

Saya memiliki komitmen untuk men-drive pemerintah dan seluruh stake holdernya lain agar terus mengirimkan siswa-siswa tamatan SMA terbaik bangsa ini agar bisa kuliah ke luar negeri. Di era Pak Habibie dulu dengan uang masih terbatas bahkan pinjaman, masih bisa mengirim siswa Indonesia ke luar negeri sebanyak 1500-2000 orang. Itu karena Pak Habibie punya visi untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya siswa tamatan SMA terbaik bangsa ini ke luar negeri. Masih bisa mengirimkan siswa tamatan Indonesia ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Saat ini, Indonesia semakin maju, informasi ada dan semakin mudah didapat, teknologi maju, uang ada dan uang kuliah juga tidak mahal. Kenapa tidak mengirimkan ribuan bahkan jutaan orang kuliah ke luar negeri?

Saya ingin terus berjuang dan berjuang mengirimkan ribuan bahkan jutaan anak Indonesia untuk kuliah di negara maju, karna dengan ini banyak anak Indonesia yang pintar berwawasan global dan lulusan luar negeri di negara-negara maju. Dan saya yakin akan muncul sejuta Habibie baru yang akan menggetarkan dunia.

Sebagai penutup, saya cuplik ucapan yang paling menggetarkan bangsa ini dari Presiden Soekarno: "Berikan Aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari Akarnya. Beri aku 10 Pemuda niscaya akan aku Guncangkan Dunia" - Soekarno.



Foto Bersama Presiden ke-3 Prof. DR. Ing. B.J. Habibie

Bimo Sasongko, MSEIE, MBA, President Director & CEO EURO Management Indonesia

Tokoh Muda Pencetak 2000 Kader Bangsa, 2000 Anak Bangsa di Jantung Eropa

Kiprah Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA di dunia pendidikan sudah dirintis sejak tahun 2002. Saat itu ia mendirikan Euro Management Indonesia, sebuah konsultan pendidikan internasional untuk pengurusan studi di Uni Eropa, khususnya di Jerman dan Perancis. Berkat gebrakkannya hingga kini lebih dari 2000 siswa-siswi tamatan SMA dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia sukses menempuh studi program S1 dan S2 ke negara-negara tersebut dengan biaya relatif murah bahkan gratis. Seperti apa?



Kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan membuat Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA sebagai salah satu tokoh pendidikan yang sukses mengantarkan para kader bangsa untuk bisa kuliah di luar negeri dengan biaya terjangkau. Kuliah di luar negeri bagi banyak orang terkendala dengan mahalnya biaya pendidikan dan biaya hidup yang tidak sedikit. Namun Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA, melakukan gebrakan untuk menghapus stigma tersebut.

Setelah lulus S1 dan S2 di Amerika Serikat melalui program beasiswa Habibie, Bimo kuliah lagi untuk mengambil gelar MBA di Fachhochschule (University of Applied Sciences) Pforzheim, Jerman. Ia memilih Jerman karena sekolah di sana gratis. Karena itulah, ia beranggapan setelah pulang ke Indonesia akan membuka institusi konsultan pendidikan yang tahu persis kondisi di Eropa terutama Jerman. Di tahun 2002, pada kelahiran 4 Februari 1972, kemudian mendirikan institusi konsultan pendidikan untuk membantu calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin melanjutkan kuliah di Eropa, yang diberi nama Euro Management Indonesia. Saat itu Bimo menyusun business plan terlebih dahulu, dan setelah kembali ke Indonesia di tahun 2003, ia pun langsung menyewa sebuah kantor kecil merencanakan dan dibagi-bagikan ke SMA-SMA dan tempat-tempat lain.

Respon masyarakat sangat bagus, di tahun pertama, ada sekitar 20 siswa yang mendaftar. Tahun berikutnya, jumlah pendaftar melonjak menjadi 50 orang tahun 2005 ada 70 orang, dan tahun 2006 berjumlah 80 orang. "Sejak itu saya tak meragukan perkembangan Euro Management bisa seperti ini. Euro Management Indonesia saya dirikan dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon mahasiswa Indonesia untuk dapat melanjutkan studinya, baik program S1, S2, maupun S3 di Eropa. Saat saya belajar di Jerman, saya merasakan sekali bahwa kuliah di sana biayanya tidak besar bahkan gratis, dan saya beranggapan nanti kalau pulang ke Indonesia akan membuka Institusi Pendidikan yang tahu persis kondisi di Eropa terutama



Bimo Sasongko bersama Presiden ke-3 Prof. Ing. B.J. Habibie

Jerman & Prancis," jelas Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA ini.

Ayah dari lima anak dan suami dari Dwieska Novitia ini meyakini sendiri nilai plus kuliah di Jerman dan Prancis. Biaya pendidikan gratis di Jerman dan Prancis berlaku untuk semua tingkat pendidikan. Hal itu, karena Pemerintah di Jerman dan Prancis membebankan pajak yang tinggi kepada rakyat, hasilnya dikembalikan lagi dalam bentuk pendidikan dan kesehatan gratis. Sehingga mahasiswa hanya perlu menanggung biaya hidup, dan jumlahnya lebih kurang sama dengan di negara-negara lain, termasuk Indonesia, bahkan bisa lebih kecil.

"Biaya hidup selama kuliah di Jerman dan Prancis pun sebenarnya bisa lebih ringan jika mahasiswa mau mencari pekerjaan *part time* yang banyak tersedia. Misalnya kalau bekerja

maksimal 20 jam per minggu selama masa kuliah, kita bisa mendapatkan 325 Euro per bulan. Bahkan mahasiswa berhak mendapatkan pekerjaan full time selama masa liburan 3 bulan, 40 jam per minggu, dengan rata-rata pendapatan antara 750-1.000 Euro per bulan. Selain itu, universitas di Jerman dan Prancis mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti magang selama masa program kuliah di berbagai perusahaan Jerman dan Prancis minimal 2 semester penuh, dengan pendapatan antara 500 hingga 1.000 Euro per bulan, "terang pria yang hobi traveling dan hiking.

Tak hanya itu, setelah lulus kuliah dan kembali ke tanah air, para alumni bisa saja mendapat bantuan dari pemerintah Jerman berupa transportasi dan tiket pulang senilai maksimal 2.000 Euro, buku-buku senilai 100 Euro per tahun, gaji sebesar 450 Euro per bulan selama 18 bulan, dan bantuan peralatan kerja sebesar 10.000 Euro. Kualitas pendidikan di Jerman dan Prancis juga tak diragukan lagi karena Jerman dan Prancis adalah negara maju yang perkembangan teknologinya sangat pesat, dan saat ini bersaing ketat dengan negara Amerika Serikat dan Jepang.

Dan, tak kalah pentingnya adalah keamanan tinggal di Jerman dan Prancis, termasuk bagi umat Islam. Di Jerman dan Prancis banyak berdiri masjid, restoran halal, dan fasilitas-fasilitas lain yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam.

"Bahkan banyak perempuan di sana yang berlibat. Memang ketika peristiwa 9 September 2001, warga Jerman sempat curiga juga kepada warga muslim. Tapi

itu hanya sebentar. Setelah itu sikap mereka normal kembali. Sebab pada dasarnya masyarakat Jerman tidak punya masalah dengan umat Islam," jelas lulusan S1 Teknik Pesawat Terbang di North Carolina State University, dan S2 Teknik Industri di Arizona State University, keduanya di Amerika Serikat.

Fria ini menjelaskan bahwa untuk syarat studi di Jerman sangat gampang yaitu lulus SMA atau SMK dengan nilai rata-rata tidak kurang dari enam, memiliki dana yang memadai untuk pengurusan dokumen keberangkatan, dan biaya pendidikan untuk kursus bahasa Jerman dan beberapa materi lain.

Dengan biaya sebesar Rp. 59.700.000, peserta di Euro Management sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas berupa kursus bahasa Jerman atau Prancis selama 6 bulan dengan pengajar lokal dan native speaker, pengurusan dokumentasi-dokumentasi (pasport dan lain-lain), dan cultural workshop. "Memang tidak ada jaminan bahwa setiap peserta didik di Euro Management akan diterima kuliah di Jerman atau Prancis, tapi tidak perlu khawatir karena syarat penerimaan mahasiswa di Jerman dan Prancis itu sangat mudah. Pada prinsipnya di Jerman dan Prancis siapapun boleh menggap pendidikan. Yang paling penting hanya lulus dalam bahasa Jerman atau bahasa Prancis serta lulus dalam tes matematika dasar," ujar Bimo.

Bimo menilai bahwa melanjutkan sekolah ke Jerman merupakan pilihan yang paling ideal saat ini. Sekarang masih banyak orang berpikir bahwa kuliah S1 cukup dalam negeri saja. Setelah itu, baru cari beasiswa ke luar negeri. Padahal, biaya pendidikan di Jerman dan Prancis benar-benar gratis. "Jadi sebenarnya para lulusan SMA atau SMK kita bisa langsung melanjutkan S1 ke Jerman dan Prancis bahkan melanjutkan S2 dan S3 pun bisa, tanpa harus mengambil beasiswa. Selembayunya dari Jerman dan Prancis, mereka bebas bekerja dimana saja, karena tak ada ikatan, "tegas Bimo.

Tak hanya ke Jerman saja, mulai tahun ini lembaga yang dipimpin Bimo akan membuka kesempatan bagi siswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Australia dan Jepang. Dan akan dibuka pendaftaran ke Negara - Negara Skandinavia. Dalam jangka panjang, Euro Management akan terus membuka kesempatan pendidikan ke negara-negara Eropa lainnya.

Kini Euro Management Indonesia telah berkembang pesat menjadi sebuah konsultan pendidikan internasional terbesar di Indonesia yang secara terpadu dan terintegrasi membantu calon siswa-siswi Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi terbaik dan ternama di negara-negara Eropa khususnya di Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Australia dan Jepang.

Kreativitas Bimo Sasongko untuk membantu masyarakat belajar ke luar negeri patut dicungki jempol.

Bimo merasa miris, karena jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri lebih sedikit dibanding dengan Vietnam. "Contohnya, kalau ada 10 mahasiswa Indonesia belajar di Jerman, mahasiswa Vietnam bisa mencapai 70 orang. Sayangnya bagaimana keadaan negaranya 20 tahun ke depan dibandingkan kita, "ujarnya. Bahkan Jepang yang sudah amat maju masih juga menyekolahkan mahasiswanya ke Amerika.

Di bawah payung PT Euro Management Indonesia (EMI) Bimo kerap mendatangi berbagai institusi untuk menjelaskan pentingnya sekolah di Jerman dan Prancis ini. Saat berbicara di Konferensi Industri Negara Informasi dan Teknologi, banyak yang tertarik soal pendidikan gratis. "Institusi ini telah menetapkan pendidikan bagi karyawannya ke Australia dan Amerika. Jadi sulit untuk berubah," kata Bimo.

Bimo pun bergegas melakukan berbagai terobosan dalam menyosialisasikan EMI. Saat ini EMI intensif masuk ke berbagai sektor seperti kalangan BUMN. "Memang fasilitas sosial memang tak buruk tapi alangkah baiknya menyediakan dana *long term investment* bagi beasiswa ke Jerman atau Prancis yang bisa berasal dari dana *corporate social responsibility* (CSR) lembaga itu," jelasnya.

Bimo juga berharap ada dukungan pemerintah, seperti pernah dilakukan mantan presiden RI Prof. B.J. Habibie melalui program beasiswa kuliah negeri bagi mahasiswa Indonesia. Ukal mengernyem pendidikan tingkat S1 dan S2 ke atas, para lulusan banyak yang ditempatkan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sayangnya program ini hanya berjalan pada 1980-an sampai 1995.

Dukungan dari perbankan juga dibutuhkan, seperti Amerika dan Malaysia yang pencitaannya dibantu perbankan. Misalnya warga Amerika untuk sekolah S1 harus menyetor US\$2.000, sementara untuk pendidikan yang sama, orang asing harus menyediakan dana minimal US\$20 ribu. "Namun dalam yang sudah minim itu bagi sebagian orang Amerika masih juga terasa berat. Untuk menumbuhkan kemendirian, orang tua akan menyuruh anak yang hendak kuliah itu untuk menajam bekal. Nanti, setelah lulus dan bekerja, anak tadi wajib mencicil pinjamannya. Begitu juga di Malaysia. Negara ini memberikan pinjaman dengan jaminan ijasah SMA. Saat pembayaran dilakukan setelah anak tadi lulus dan bekerja. Kalau anak itu mampu langsung membayar lunas, ada diskon yang diberikan perbankan. Indonesia tidak atau belum melakukan hal itu," terangnya.

Demikian Indonesia yang lebih baik Bimo berharap seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan perbankan bersinergi dalam membangun skema pembiayaan pendidikan modal ini. Semogala

Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA (President Director and CEO)

SENTRI Kuliah di Jurusan Teknik Informatika, ITB Bandung pada tahun 1990 sebelum mendapatkan beasiswa dari BPPT untuk studi ke Amerika Serikat. Menamatkan studinya di North Carolina State University, USA, di Jurusan Mechanical and Aerospace Engineering, lulus pada tahun 1995 (S-1 BSAE), selanjutnya, menamatkan studi masternya di Arizona State University, USA, di Jurusan Industrial Engineering, lulus pada tahun 1996 (S-2 MSEIE). Setelah berkiprah di Indonesia dan bekerja di berbagai perusahaan asing, Bimo Sasongko melanjutkan lagi studi MBA di Pforzheim University of Applied Science Fachhochschule (FH), Pforzheim, Jerman, Lulus tahun 2003 (S-2 MBA). Mempunyai pengalaman di bidang keuangan, manajemen, konsultan pendidikan dan pengajar di berbagai universitas di Indonesia.

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).



Foto bersama di depan Brandenburger Tor, Berlin, Jerman



Foto bersama Presiden ke-3 Prof. Ing. B.J. Habibie



Foto bersama di Menara Eiffel, Paris, Prancis.

Merespons Tantangan Iptek di Masa Depan

Rabu, 03 Agustus 2016, 08:26 WIB

Red: M Akbar



Bimo Joga Sasongko bersama Habibie

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Bimo Joga Sasongko - Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie/IABIE

Pembangunan karakter bangsa merupakan megaprojek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apa pun dan berapa pun harganya tentu akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karakter bangsa yang diikuti oleh penguasaan iptek secara progresif. Sebagai anak intelektual Prof.DR.ing BJ Habibie, segenap anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) dituntut untuk memiliki karakter unggul dan inklusif atau merakyat dalam berkarya maupun dalam menggeluti profesinya.

Meraih keunggulan di bidang iptek dan nilai tambah di segala bidang, serta selalu digaris depan dalam transformasi teknologi dan industri. Semua itu menjadi karakter IABIE yang digariskan oleh BJ. Habibie.

Dengan modal alamiah berupa wadah perhimpunan alumni dengan bermacam portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi, visi itulah yang hendak dikeadepankan. IABIE ingin mewujudkan kepemimpinan unggul, khususnya kepemimpinan dalam domain iptek dan dunia usaha melalui sinergi yang kuat antar anggota dan sesama anak bangsa.

Terus berjuang bersama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan nasional di Indonesia. Khususnya strategi transformasi teknologi dan industri dengan wahana yang sesuai dengan semangat jaman.

Program kerja IABIE menekankan berbagai macam inisiatif kebangsaan dan kebudayaan seperti yang hingga kini masih dilakukan oleh Bapak BJ.Habibie.

Para anggota IABIE pada saat ini telah eksis berkarya dan berinovasi untuk bangsa. Sebagian besar masih terkait dengan aspek global brain circulation yang berkarya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung telah menyokong kemajuan bangsa. Masing-masing terkait dengan aspek global brain circulation.

IABIE juga memiliki program kerja terkait advokasi, promosi dan dukungan konkret terhadap segenap para ilmuwan, inovator dan teknologi yang tengah berkarya dan berinovasi tetapi ditengah jalan mengalami berbagai kendala teknis dan non teknis.

Kendala non teknis termasuk melakukan pembelaan hukum dan upaya politik bila ada anggota yang terkena masalah. Seperti misalnya kasus inovator alat kesehatan (alkes) dan kasus mobil listrik. Kondisi Indonesia saat ini ada irisan antara domain hukum dan domain inovasi teknologi yang masih abu-abu sehingga bisa berakibat yang merugikan kegiatan inovasi.

Pengurus IABIE memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, khususnya terhadap otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait domain abu-abu di atas. Sehingga otoritas hukum di negeri ini bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Supaya hukum tidak memakan anak bangsa yang melakukan proses inovatif.

IABIE memiliki program kerja membantu pemerintah mewujudkan poros teknologi global yang kini sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Membantu pemerintahan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta.

IABIE mengajak segenap bangsa untuk meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi di segala lini.

Indonesia perlu menerapkan seruan pemenang Hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik disuatu bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia.

IABIE berusaha menjadi Jembatan kolaborasi ABG yang erat dan konstruktif untuk mendorong proses inovasi. Mendorong terjadinya kolaborasi ABG (Academics, Businesses, Government) dalam riset dan inovasi.

Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.

IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analisis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan.

Juga mempunyai solusi konkret dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan.

Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Sebagai anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail.

Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim,

ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset.

Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.

IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analisis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan.

Juga mempunyai solusi konkret dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan.

Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Sebagai anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail.

Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset.

Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana perberlakuan offset yang ideal. Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset.

Kemudian memiliki data-base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alat/sistem yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirim SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.

MAHINKA GROUP

SABTU, 25 JUNI 2016
20 RAMADHAN 1437 H
HOMAH 1677/AHLUNE 26

REPUBLIKA

republika.co.id

Republika Online

Rp 3.500/24 Halaman
(LUAR P. JAWA Rp 4.500)
Ditambah ongkos kirim

80 Tahun MENGINSPIRASI BANGSA



● OLEH NUR HASAN MURTIJAJI

Bacharuddin Jusuf Habibie. Sosok sederhana nan berahaja, tapi penuh karisma dengan keberanian hati dan kecerdasannya. Di masa kini, tak mudah menemukan sosok sebagaimana karakter yang melekat pada diri Habibie.

Kepribadian tekad demi meraih yang dicita-citakan menjadi karakter yang menginspirasi sosok Habibie. Putra kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1935, ini juga dikenal mudah bergaul tanpa meleburkan jati dirinya sebagai orang Indonesia.

Sudah banyak hak cipta hasil kreasi Habibie di bidang teknologi dingintakan. Salah satunya adalah kesuksesan Habibie membuat rumus agar pesawat tempur Jerman tak jatuh saat mengudara.

Dari Habibie, kita bisa belajar bagaimana kecermatannya mengambil keputusan mengurai benang kusut krisis moneter 1998. Sukses membawa masa-masa sulit selama 17 bulan memerintah sebagai presiden ke-3 RI, Habibie merendahkan bahwa puitiknya perkenanan saat itu tak lepas dari ahli semua pihak.

Habibie mengaplikasikan kepuwatannya memecahkan rumus fisika dan matematika dengan mengahabikannya dalam mencari solusi perlawanan ekonomi. Dengan caranya, sejumlah indikator ekonomi makro pun menuju titik kestabilan saat krisis meragukan.

"Cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini, saya mencari *approximately* (rata-rata)," kata Habibie saat ditemui *Republika* di kediamannya di bilangan Pura Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (19/6) lalu.

Kecewaannya tak hanya terkait iptek, tapi juga dalam hal keimanan dan ketidayaan alias imtak. Dalam konteks ini, Habibie seolah sudah masuk dunia makrifat—memahami filsafat ilmu. Dengan wujud iptek dan imtak inilah, Habibie menemukan hakikat Tuhannya, cinta Ilahi.

Habibie tak hanya mendalami agama sebagai ritual, tapi juga sukses mempraktikkan kehidupan beragama dalam membangun bangsa. Habibie bisa menampung Islam yang *rahmanan* di dalam, Islam yang memberikan rahmat bagi seisi alam.

"Selamat ulang tahun, Habibie. ...Kiprah dan prestasimu menjadi peletak tami untuk berbuat yang terbaik lagi bangsa."



Habibie dan Impian Ibu Pertiwi

● BIMO JOGA SASONGKO

Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie (Iapie)

Ibu Pertiwi engkau pegangan. Dalam perjalanan. Janji pusaka dan sakti. Tanah tumpah darahku. Makmur dan suci.

Potongan puisi yang sangat menggugah hati di atas adalah karya presiden ketiga RI, BJ Habibie, yang pada 25 Juni usianya genap 80 tahun. Puisi ini menunjukkan bahwa BJ Habibie merupakan sosok yang sangat mencintai bangsanya. Baginya, Ibu Pertiwi adalah personifikasi jiwa kebangsaan yang terkandung cita-cita dan mimpi yang harus diwujudkan.

Habibie muda yang biasa dipanggil Rudy sejak 1950 sudah memikirkan bagaimana dirinya bisa mewujudkan impian alaminya Ibu Pertiwi. Terpici oleh sahabat karib semasa SMA di Kota Bandung yang bernama Lim Keng Kie, Rudy harus meninggalkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung lalu berjuang keras menjadi mahasiswa RWTW Aachen (Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen)—perguruan tinggi tertua di Jerman yang didirikan untuk menunjang tahapan revolusi industri.

Impian alaminya Ibu Pertiwi semakin mengkristal dalam sanubari Rudy. Terlebih, ketika pada 1955 dirinya bertemu Bung Karno dan menyimak gelora pidato presiden pertama RI itu. Saat itu Bung Karno menyatakan impian-impian Ibu Pertiwi terkait pentingnya kemandirian di sarana-prasarana perhubungan. Untuk itu, dibutuhkan kapal laut dan pesawat terbang yang dibuat di dalam negeri dengan kompetensi putra-putri bangsa sendiri.

Dalam perjalanan sang waktu, harapan dan keinginan Bung Karno ini telah diwujudkan oleh BJ Habibie dengan mendirikan bermacam wahana transformasi teknologi dan industri serta menyiapkan SDM unggul bangsa yang mampu bekerja sama mewujudkan impian alaminya Ibu Pertiwi.

Selain menyiapkan wahana dan SDM kelas dunia, BJ Habibie telah menyiapkan cetak biru pembangunan infrastruktur bangsa yang berbasis kemandirian dan proses nilai tambah optimal yang berarti bagi perekonomian bangsa. Pemerintahan saat ini seharusnya melanjutkan tahapan dan kerja detail dari BJ Habibie dalam membangun infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur selanjutnya dipersiapkan secara matang dari aspek SDM dan proses rancang bangunnya harus melibatkan pihak dalam negeri semaksimal

terbisa. Pembangunan infrastruktur jangan dilepaskan kepada investor luar negeri, sedangkan kita tinggal terima jadi.

Impian alaminya Ibu Pertiwi harus terus diwujudkan oleh generasinya. Impian alaminya yang antara lain terkait infrastruktur perhubungan, kebutuhan energi nasional, hingga industri pertahanan dan keamanan perlu persiapan SDM secara detail.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sebaiknya hanting setir menuju kemandirian secara totalitas. Dalam membangun infrastruktur harus menyiapkan SDM dalam negeri secara besar-besaran. Karena pembangunan infrastruktur tidak berhenti saat proyek selesai, tapi akan timbul persoalan teknis dan kontinuitas pengembangan infrastruktur.

Kita bisa menyimak bagaimana pada periode BJ Habibie menjabat menteri riset dan teknologi telah mengirimkan sekitar 4.000 pemuda belia lulusan SMA untuk kuliah di perguruan tinggi terkemuka dunia. Hampir semuanya berhasil menyelesaikan kuliah hingga strata S-2 dan S-3.

Kini mereka tersebar dalam berbagai lembaga pemerintahan dan swasta. Banyak di antara mereka kini menjadi pengembang dan inovator teknologi serta sukses melakukan transformasi proses dan model bisnis di berbagai perusahaan terkemuka.

Saatnya Presiden Joko Widodo menghimpun dan menyinergikan ribuan anak-anak intelektual BJ Habibie untuk mencurahkan pikiran dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri dan iptek nasional.

Betapa detailnya BJ Habibie menyiapkan SDM unggul untuk transformasi bangsanya. Bisa kita lihat, dalam mewujudkan impian alaminya Ibu Pertiwi untuk terwujudnya jembatan udara kepulauan nusantara telah dipersiapkan portofolio kompetensi sedemikian detailnya hingga dirumuskan *job description* yang paling dasar. Portofolio itu bisa kita simak pada SDM PT Dirgantara Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, negeri ini membutuhkan strategi yang tepat dalam pengadaan pesawat komuter sebagai jembatan udara. Berkat BJ Habibie, Indonesia telah memiliki strategi unggul pengadaan pesawat komuter dengan cara memproduksi sendiri. Warisan ini seharusnya dikembangkan secara optimal oleh pemerintahan saat ini.

Selain membangun infrastruktur berupa fasilitas pabrikasi, permesinan, dan laboratorium yang hampir setara dengan perusahaan dirgantara raksasa Amerika Serikat, yakni Boeing, Habibie juga sukses membentuk portofolio kompetensi sistem *job establishment* berkelas dunia. Meliputi postur SDM yang kompetensinya terdiri atas kelompok *engineering* terdapat 141 *job title*, kelompok *produksi* 65 *job title*, kelompok *human resources* 82 *job title*, dan kelompok *niaga* 21 *job title*.

Postur SDM dan portofolio kompetensi yang sangat detail dan sesuai perkembangan dunia ini juga terjadi di wahana maritim,

dalam hal ini PT PAL, wahana industri hankam PT Pindad, dan lainnya.

Para kader atau anak-anak intelektual Habibie dalam karier dan karyanya saat ini sudah mencapai tahap matang di bidangnya. Mereka kini dalam kisaran usia puncak produktivitas dan unggul dalam hal manajemen program atau proyek.

Dengan kondisi ini, jangan ada keraguan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera melibatkan dan memeras otaknya anak-anak intelektual Habibie demi kemajuan dan daya saing bangsa pada era globalisasi.

Mereka kini berhimpun dalam wadah Ikatan Alumni Program Habibie (Iapie). BJ Habibie selalu berpesan kepada anggota Iapie untuk bersikap inklusif dan selalu tampil di garis depan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Warisan Habibie yang berupa wahana industri dan kader intelektual juga sangat berguna untuk menyelesaikan program nasional kelistrikan 35 ribu megawatt yang kini menjadi perhatian Presiden Jokowi. Wahana itu berupa PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang SDM-nya memiliki kemampuan setara industri terkemuka dunia, yakni General Electric (GE) yang memproduksi berbagai turbin untuk pembangkit listrik, industri, dan turbin gas untuk mesin pesawat terbang.

Pemerintahan Jokowi perlu merevitalisasi industri nasional terkait infrastruktur kelistrikan, khususnya teknologi pembangkit, dengan menugaskan PT NTP sebagai ujung tombak program kelistrikan 35 ribu megawatt. Ternyata di negeri ini hanya ada satu *turbine manufacturer*, yakni PT NTP.

Itu pun hanya sanggup mengerjakan proyek PLTU dengan daya maksimum tujuh megawatt. Sedangkan, untuk membuat generator kalangan industri dalam negeri hanya mampu membuat dengan kapasitas maksimum 15 megawatt. Sedangkan, untuk rancang bangun *boiler*, ada beberapa perusahaan yang kemampuan produksinya cuma mengerjakan tipe *stocker* dengan kapasitas maksimum 15 megawatt.

Melihat kondisi itu, alangkah baiknya pemerintah menggariskan kembali strategi transformasi industri dan teknologi warisan BJ Habibie. Kita perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman transformasi teknologi dan industri di Eropa dan Amerika yang diawali dengan penguatan infrastruktur energi dan pembangkit listrik.

Dengan fokus memperkuat kapasitas industri nasional untuk memproduksi berbagai jenis turbin, kompresor, generator, pompa, dan berbagai perkakas permesinan. Jangan sampai pembangkit listrik sebagian besar komponennya diimpor dari Cina.

Begitu pula proses rancang bangun dan pabrikasi untuk instalasi pembangkit listrik di atas semuanya dilakukan oleh para insinyur dan teknisi dari Cina. Akibatnya para insinyur dan teknisi Indonesia harus gigit jari. ■



Masih pendatang jumlah lusinan, SMA yang melanjutkan kuliah di luar negeri memberikan tantangan tersendiri bagi Bimo Sasongko, ia merasa prihatin diantara negara-negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia apalagi dibandingkan Korea Selatan dan China, Indonesia masih kalah jauh dalam hal pengiriman mahasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri, jumlah penduduk Malaysia 30 juta orang dan penduduk Indonesia 250 juta, namun jumlah mahasiswa di Indonesia di luar negeri hanya 30 ribu, sementara jumlah mahasiswa di luar negeri asal Malaysia justru dua kali lipat jumlah mahasiswa Indonesia. Korea Selatan dengan jumlah penduduk 50 juta orang dan jumlah penduduk di Indonesia, faktanya 130 ribu orang penduduk Korea Selatan menimba ilmu di luar negeri. Tak heran Korea menjadi bangsa yang maju dengan cepat.

"Indonesia harus maju dengan cepat meski sementara ini belum ada dukungan dari siapapun. Kami berharap pemerintah, perbankan, bupati hingga walikota untuk segera mendukung agar semakin banyak mahasiswa kuliah ke luar negeri. Visi kita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya, sehingga banyak mahasiswa untuk kuliah ke luar negeri, dan untuk itu kami motivasi mereka harus dilakukan sedini mungkin. Pemerintah juga perlu menganggarkan program beasiswa kuliah ke luar negeri untuk tamatan SMA. Kita harap pemerintah baik level pusat dari Kementerian-kementerian sampai daerah dengan pendanaan yang dimiliki bisa mengulirkan program beasiswa untuk tamatan penda juga kita harap mengulirkan program beasiswa seperti dilakukan di negara lain. Mahasiswa China yang kuliah di luar negeri mencapai 1 juta orang dari jumlah penduduk 2 miliar. Dengan jumlah penduduk 8 kali lipatnya Indonesia, maka kalau mahasiswa Indonesia yang kuliah ke luar negeri sebanyak 30 ribu itu akan jadi 240 ribu orang. Tapi faktanya mahasiswa asal China yang kuliah ke luar negeri hanya 1 juta orang," tegas Bimo,

Untuk mempercepat penyerapan teknologi informasi dan kemajuan bangsa, menurut Bimo Indonesia harus memperlengkapi pengetahuan langsung dari penerapnya, dan itu diperoleh dari generasi ke generasi dari era Presiden Bung Karno dan Habibie sudah mengimpor siswa studi di luar negeri karena kita masih menjadi bangsa yang tertinggal. Dari report World Bank dan McKinsey menyatakan di tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara 6 besar dunia, dengan peringkat satu China, lalu Amerika, Jepang, Brasil, Rusia dan

Indonesia, artinya Jerman, Perancis dan Inggris akan bergeser, syaratnya tentu dengan SDM unggul. Satu-satunya cara untuk mempercepat adalah studi ke luar negeri. Kita berharap, di tahun 2030 orang-orang yang kuliah di luar negeri sudah kembali ke Indonesia untuk membangun negara.

Untuk itu, Bina kermawati membuat program *Business Indonesia 2030* (Sejuta Indonesia di Jantung Dunia). Program ini merupakan program beasiswa bahasa yang ditargetkan untuk 1000 pelajar SMA di Jabodetabek di tahun 2016 ini. Program ini pertama kalinya dilakukan oleh Euro Management Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Eropa Indonesia untuk meningkatkan bahasa Inggris, Bahasa Belanda, dan Jerman. Yayasan Pendidikan Eropa Indonesia dan Euro Management Indonesia mengeluarkan pendanaan untuk program ini sekitar Rp 10 miliar untuk target 1000 siswa per tahun. Hingga kini sudah ada 900 peserta dari 70 SMA di Jabodetabek baik negeri maupun swasta. Program yang sudah diluncurkan pada Januari 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Program ini berlangsung selama 60 jam dalam dua semester di luar Sabtu dan Minggu. Tak hanya itu, siswa juga mengikuti kegiatan workshop mengenai budaya di luar negeri, pelatihan dasar kepemimpinan, wawasan lokal, dan luar negeri, perjalanan, hingga pelatihan bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman mengikuti program beasiswa ini diharapkan sudah siap mental untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri.

*Terkadang calon mahasiswa

**Bimo Sasongko, MSEIE, MBA, President Director & CEO
EURO Management Indonesia**

'Indonesia 2030: Sejuta Indonesia di Jantung Dunia' Perlu Dukungan Pemerintah

Gaung semangat anak bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menuliskan Kuliah ke luar negeri membutuhkan dukungan berbagai pihak. Terutama peran aktif pemerintah baik material maupun moril. Bimo Sasongko berharap semua komponen bangsa dari level pusat sampai daerah memiliki gerakan yang sama agar mahasiswa bisa kuliah ke luar negeri. Ia pun memotivasi untuk mewujudkan program Beasiswa Indonesia 2030 (Sejuta Indonesia di Jantung Dunia). Seperti apa kiprahnya?

Tantangan

Berkelompok di dunia pendidikan memberikan tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia, karena kelompok di Indonesia untuk mengimigrasi mahasiswa ke luar negeri seharusnya bisa sampai seribu hingga dua ribu orang per tahun, namun fakta menunjukkan hanya sekitar seratus hingga dua ratus orang mahasiswa Indonesia yang melanjutkan kuliah ke luar negeri setiap tahun. "Sebenarnya kemampuan dan informasi serta motivasi ada, tapi banyak faktor lain yang tidak memungkinkan, dan anak tidak berani padahal di negara lain untuk bisa kuliah ke luar negeri merupakan sebuah kebanggaan. Dengan informasi lebih luas dan sosialisasi yang semakin masif ke program Indonesia untuk sekolah beasiswa Indonesia 2030 (Sajuta Indonesia di Jantung Dunia) maka prediksi kita bahwa Indonesia akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia, sehingga di tahun 2030 Indonesia benar-benar akan berwujud sebagai negara ranking 6 dunia," tegasnya.

Birno melihat antusias mahasiswa untuk kuliah S1 ke luar negeri sebenarnya tinggi namun ketika mengambil keputusan banyak yang mundur karena pandangan ketakutan, padahal seharusnya hal itu tidak jadi halangan. "Euro Management Institute menawarkan beasiswa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Harapan saya semua komponen bangsa dari level pusat sampai daerah memiliki gerakan yang sama agar mahasiswa bisa kuliah ke luar negeri. Ponds saya bahwa itu merupakan peluang yang panjang yang tidak kenal lelah. Sebuah kebanggaan kalau saya bisa melihat bahwa tidak hanya generasi saya yang bisa kuliah ke luar negeri tapi juga generasi-generasi berikutnya tidak pandang siapa mungkin bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Saya yakin bangsa ini membangun bangsa dengan lebih maju," tegas Birno semangat.

Banyak orang bersuara tak perlu kuliah ke luar negeri karena

universitas di Indonesia sudah maju menurut Bimo adalah sebuah kesalahan fatal. Pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Bahkan Jepang saja masih mengimpor mahasiswa kuliah ke luar negeri, Indonesia ini masih negara miskin. Kita butuh 1 juta orang saja dan penduduk Indonesia sebanyak 250 juta, untuk dikirim kuliah ke Amerika, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Korea, Jepang, dan lain-lain. Belajar di pusat pengetahuan dunia mahasiswa kita akan mengena cara berpikir masyarakat negara maju, mengetahui trik-trik cara bernegosiasi dan sebagainya, sehingga bisa mengambil manfaat yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Nah, program beasiswa Indonesia 2030 (Jepara Indonesia di Jantung Dunia) merupakan sarana untuk memajukan Indonesia. SMA agar nantinya bisa kuliah ke luar negeri. Setiap siswa baik kaya dan miskin termotivasi untuk mendaslar secara kreatif, terang Bimo.

Saat ini Euro Management Indonesia menaungi pendirian program beasiswa bahasa dalam rangka program beasiswa Indonesia 2010 (Seyuta Indonesia di Janjuti Dunia). Untuk itu ke depan dukungan pemerintah sangat penting dalam hal pendirian bagi pendirian beasiswa ke luar negeri karena SOM merupakan proses panjang yang tidak bisa ditiadakan dengan uang dan tingkat pendidikan juga meningkatkan kualitas hidup dan kualitas bangsa. Saat ini pemerintah memang memiliki program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) namun hanya untuk beasiswa ke luar negeri, bukan kuliah S1. "Lulusan SMA dinilai masih muda dan lebih tepat justru kuliah di luar negeri memberikan peluang lebih bagi lulusan SMA karena mereka lebih lama tinggal luar negeri hingga 4 atau 5 tahun yang membuat akan networking lebih banyak, lebih banyak pengalaman, dan lebih banyak S2 dan belum tentu belajar sehingga masih belum ada keterbatasan," terangnya Bimo.

Simo berharap peran nyata pemerintah untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa kuliah ke luar negeri, baik dari segi material atau moril karena bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti pendanaan dari pemerintah maupun BUMN dan program corporate social responsibility (CSR) yang ada. "Saya berharap bisa menggerakkan senibisa hingga duaribu orang siswa untuk mengikuti program beasiswa gratis, apalagi kalau ada dukungan pihak Kementerian, BUMN dan lainnya. Saya ingin senibisa mungkin orang mengenal bahasa apalagi keterampilan untuk membantu pertumbuhan dan kemampuan untuk berbisnis asing," pungkas Simo. (*)



Bimo Sasengko bersama murid-murid yang berfusi menerima beasiswa Indonesia 2030 Sejuta Indonesia di Jantung Dunia

Info Lebih Lanjut:
Euro Management Indonesia
Gedung Ir. H. M. Suseno
Jl. R.P. Soeroso No. 6 Menteng
Jakarta Pusat
Telp. 021-398 38 706, 314 0379
Website: euro.management.co.id

Foto: Dok. Staten-Akadem Program Heltids (VDC) dan lainnya

[illegible]

COMMUNITY



Selanjutnya, dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat diperoleh nilai α dan β sebagai berikut:



WABE di garda terdepan membangun kepercayaan bahwa kita mampu memusnahkan penyakit alaiupun teknologi canggih lainnya. F-60 hanya sebuah icon saja, tergantung



Hapus Stigma Mahalnya Kuliah di Luar Negeri

Bagi sebagian orang, kuliah di luar negeri masih dianggap mewah dan mahal. Bagi Bimo Sasongko, itu tak sepenuhnya betul. Lahir dari keluarga sederhana, ia mampu melewati tes program beasiswa kuliah di luar negeri gagasan mantan Presiden Habibie. Ini menginspirasi mendirikan Euro Management, lembaga pendidikan internasional yang memfasilitasi lulusan SMA yang ingin kuliah di luar negeri. Ia juga menginisiasi 'Gerakan Mencetak Sejuta Habibie' untuk beasiswa bahasa asing, beasiswa studi sarjana ke luar negeri, dan beasiswa belajar bahasa asing untuk seribu wartawan.

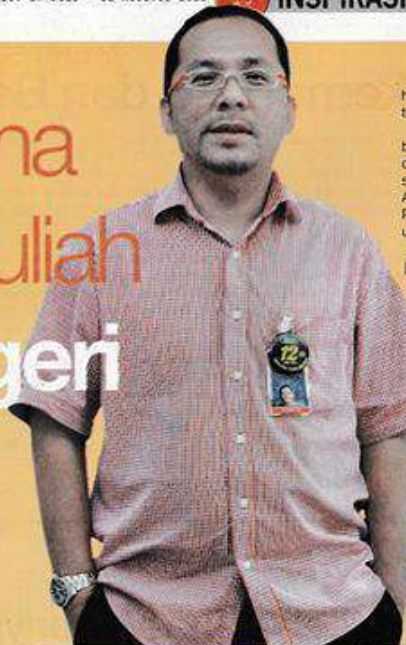


FOTO: FOTO DOK. WISATA

Sejumlah kertas menumpuk di meja kerja Bimo Sasongko. Pria berusia 44 tahun itu sudah 13 tahun memimpin Euro Management Indonesia, lembaga konsultasi pendidikan internasional yang memfasilitasi lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang berniat kuliah di luar negeri.

Sejumlah karyawan, datang silih berganti, membawa berkas yang hendak ia tanda tangani. Senin (18/7) siang, Meeki menjabat kursi CEO dan direktur, meja kerja Bimo, tak terlalu istimewa.

Jika sebagian besar ruang kerja CEO atau direktur terletak di ruang tertutup, rapat, dengan akses ketat, lain hal dengan ruang Bimo. Posisi mejanya justru berada di ruang tengah dan terbuka, bersinggungan dengan lalu lintas karyawan.

"Walaupun pernah kuliah di luar, saya terbuka dan open minded, ngapain harus ditutup-tutupin. Supaya mudah tatap muka (dengan karyawan)," ujarnya, sambil menguap senyum, mengomentari meja kerjanya yang 'tak biasa', di kantornya di Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Dengan gaya cepas-cepas dan humoris, ia menceritakan awal mula membangun lembaga yang terkait dengan pengalaman masa lalu. Jika



anak seusianya masih berpikir lurus, Bimo remaja sudah berpikir jauh ke depan. Saat duduk di kelas satu SMA di Bandung, ia sudah bercita-cita kuliah di luar negeri. Selama tiga tahun sekolah, ia giat belajar untuk menembus jalur beasiswa. Sebelumnya, sempat kuliah di Teknik Informatika di ITB Bandung, sejak Agustus-Desember 1990.

Suatu ketika, ia melihat informasi surat kabar, ada program beasiswa yang digagas BPPT dan Habibie, Menteri Riset dan Teknologi saat itu.

Loles Beasiswa

Setelah mengikuti sejumlah tes di Stadion Senayan (sekarang Gelora Bung Karno), ia lolos bersama 100 siswa lainnya. Saat itu, ada 200 ribu siswa yang mengikuti tes. Sementara, yang apply ada satu juta orang.

Setelah terpilih, ia melanjutkan S-1 Aerospace Engineering di North Carolina University, USA, tahun 1991-1995. Lalu, ke Advanced Quality Control and Reliability di Arizona State University, Tempe, Arizona, USA, pada 1995-1996. Terakhir, menempuh pendidikan S-3 di Fachhochschule Pforzheim, Jerman, tahun 2001-2003. Bimo tak menyangka bisa lolos tes. "Enggak terbayang, saya lahir dari

keluarga miskin dan enggak mampu. Ibu seorang ibu rumah tangga dan ayah tentara. Tapi saya mau maju dan memperbaiki diri.

Sebelumnya saya suka baca buku dan melihat keajaiban dunia, ingin melanglang buana. Level (kuliah) di Bandung sudah bukan target saya waktu itu," tambahnya. Praktis, selama kuliah di negeri Jerman dan Paris, ia hanya menanggung biaya hidup. Menurutny, biaya hidup di Jerman bisa lebih ringan jika mahasiswa bisa nyambi part time.

Mendirikan Kantor

Lulus kuliah 2003, ia kembali ke Indonesia dan bergerak. Menyewa kantor kecil di Jakarta dan mencetak brosur untuk dibagikan ke SMA dan tempat lain, sebagai inisiasi lembaga ini. Pernah merasakan program beasiswa ke luar negeri, ia menyadari pentingnya menyerap ilmu pengetahuan di negara-negara maju.

Ia satu di antara empat ribu orang yang pernah dikirim Habibie untuk kuliah S-1 di bidang sains dan teknologi di sembilan negara maju dunia. Seperti Jerman, USA, Perancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Austria, dan Jepang.

"Ini (Euro Management) adalah nazar saya. Saya mau, bukan cuma saya yang bisa kuliah ke luar, tapi orang lain juga," ungkapnya.

Sejak merintis 2003, lembaga ini sudah mengirim lebih dari 2.000 siswa ke luar negeri. Dengan akumulasi, 100-150 siswa per tahun yang dikirim ke Eropa, khususnya Eropa dan Amerika Serikat.

Selama enam bulan, siswa lulusan SMA dilatih sejumlah hal, Mulai dari mental, bahasa, budaya, motivation building, hingga bahasa. Termasuk pembuatan tiket, paspor, visa, aplikasi,

hingga penjemputan di bandara negara tujuan.

Awal mula, ia sempat merasakan beberapa komentar miris jika kuliah di luar negeri mewah dan mahal. "Kata siapa kuliah di luar mahal dan mewah? Ada beberapa negara di Eropa, seperti Perancis dan Jerman yang gratis," ujarnya.

Manfaat Kuliah di Luar Negeri

Seiken Ikatan Alumni Program Habibie menyatakan, banyak manfaat didapat jika kuliah di luar. Seperti mental tenai, mandiri, berani, dan percaya diri. Namun, ia tak bermaksud mengatakan jika kuliah di dalam negeri tak penting ketimbang di luar.

"Tapi kalau dibandingkan, Indonesia masih kalah dalam hal fasilitas dan sistem. Enggak akan ada lingkungan asing yang bisa dibeli saat kuliah di Indonesia. Enggak cuma dapat ilmu pengetahuan, tapi bersaing di tingkat global. Semakin tinggi pendidikan, SDM akan maju untuk bangun negeri," ujarnya.

Dari catatannya, orang Indonesia yang kuliah di luar negeri



masih terbatas dan baru mencapai 60 ribu orang. Ia membandingkan, saat Habibie masih menjadi menteri, ribuan pelajar dikirim ke luar negeri. Lalu berkurang, sejak program tersebut di-stop tahun 1996 pasca krisis ekonomi.

"Harusnya pemerintah ikut membantu dan terlibat. Banyak ormas, parpol, pemda, dan lembaga resmi lain, yang punya dana lebih yang bisa diharapkan untuk memberi program beasiswa ke luar negeri. Rasanya enggak cukup kalau (Euro) sendiri," tukasnya.

Sejuta Habibie

Tak ingin menyia-nyiakan impian Habibie, ia turut menginisiasi 'Gerakan Mencetak Sejuta Habibie'. Gerakan ini menyiapkan beasiswa untuk bahasa asing dan persiapan studi sarjana ke luar negeri bagi 1.000 lulusan terbaik SMA/SMK di Tanah Air. Bahkan, ia ikut peduli dengan mengirimkan beasiswa karyawannya yang berprestasi.

Tak hanya siswa SMA, beasiswa juga menasar kalangan wartawan. Enam bulan terakhir, lembaga ini memberikan beasiswa gratis belajar bahasa asing bagi 1.000 wartawan di Indonesia selama dua semester. Khususnya Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan Jepang, serta TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, dan GRE, periode 2016-2017.

Bimo mengklaim, ini pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. ☐

Copy: F. Bachtiar

BIMO SASONGKO

PENDIDIKAN UNTUK MAJU

Naskah: Ely Simanjuntak Foto: Rizky Arsy

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Penduduknya sekitar 255 juta jiwa dan menduduki urutan ke-4 terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Faktanya, generasi muda yang menuntut ilmu kuliah di negara-negara maju di pusat-pusat peradaban dunia ternyata sangat sedikit. Sementara, Malaysia penduduknya sekitar 30 juta jiwa, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu sekarang ini ada sekitar 60.000 pelajar. Sedangkan, mahasiswa Indonesia yang belajar di negara-negara maju hanya sekitar 60.000 orang.

Korea Selatan yang penduduknya juga sama dengan Malaysia sudah memiliki 120 ribu pelajar tersebar di berbagai negara. "Sebelum ini saya sempat adu domba di hati saya. Sebab, saya merasa sendiri bahwa program pendidikan anak muda Indonesia sangat banyak yang gagal untuk meningkatkan kualitas SDM. Saat itulah muncul gagasan saya untuk berinvestasi di bidang pendidikan dengan mendirikan sebuah konsultan pendidikan Euro Management Indonesia yang hingga kini sukses mengirimkan ribuan tamatan SMA untuk belajar ke negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang," ujar Presiden Direktur Euro Management yang pernah memegang beasiswa Science and Technology for Industrial Development (STADI) 1 Menteri BPPT RI Habibie ini serius. Indonesia bisa dilatih masih tertinggal dalam mengirimkan mahasiswa Indonesia ke berbagai negara maju.



PERLU DUKUNGAN PEMERINTAH

Persolan pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, sementara negara yang kaya akan sumber daya alam ini semakin dikuasai pihak asing. Tenaga profesional yang ahli dalam berbagai bidang masih minim, sementara tantangan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sudah berlangsung. Peraih Master Of Business Administration Fachhochschule Pforzheim, Jerman, jurusan International Marketing & Management tersebut melanjutkan, "Banyak manfaat yang akan didapatkan jika kuliah ke luar negeri. Tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga mental, percaya diri, kemandirian, dan keberanian semakin tinggi. Itulah yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk maju bersaing di tingkat global dengan Cina, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain. Apalagi, di tengah MEA persaingan semakin ketat, seluruh masyarakat ASEAN sekarang bisa masuk ke Indonesia untuk bekerja dengan (jajarah dari) berbagai negara di dunia."

Bimo pun memiliki komitmen untuk memotivasi pemerintah dan seluruh stakeholder, agar terus mengirimkan siswa-siswa tamatan SMA kuliah ke negara-negara maju. Di era BJ Habibie dulu dengan uang masih terbatas bahkan pinjaman, masih bisa mengirim siswa pelajar ke berbagai negara. Kalau dia mempunyai visi untuk mengirimkan siswa-siswa tamatan SMA ke luar negeri. Saat ini, Indonesia sudah semakin maju, informasi maupun komunikasi sudah akses, uang ada, dan biaya kuliah juga tidak mahal. Bahkan, ada yang *free* hanya menanggung biaya hidup. Itu bisa kerja *freelance*. Jadi, mengapa tidak kita mengirimkan ribuan orang kuliah belajar di berbagai negara-negara maju?

Ketua Ikatan Alumni Program Habibie (IAAB) yang telah mengambil program doktorat di bidang manajemen Universitas Indonesia ini berkata, "Saya ingin terus berjuang mengirimkan ribuan orang Indonesia untuk kuliah di negara maju melalui Gerakan Indonesia 2030 dengan tema 'Sejuta Siswa Indonesia di Jantung Dunia'. Saya yakin bangsa ini akan maju, karena banyak orang Indonesia yang pingir dan tinggal dibelakang akses saja. Agar ada BJ Habibie belajar bermunculan di Tanah Air."

Visi ini IAAB sendiri adalah memajukan kekuatan bangsa ini dengan 4000 alumni, agar bisa



"PEMERINTAH PERLU MEMBUAT PROGRAM BEASISWA KE LUAR NEGERI YANG DIBAYAI DENGAN SELEKSI KETAT UNTUK PARALULUSAN SMA YANG CERDAS, BERMENTAL BAIK, DAN MEMILIKI NASIONALISME BAIK OLEH PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH, KEMENTERIAN, BUMN, BANK-BANK NASIONAL, MAUPUN PARTAI POLITIK SECARA KONSISTEN."

berkiprah di level internasional. "Kalau, alumni kami banyak yang memiliki keahlian, seperti pencipta musik, kapal selam tanpa awak, jaket kanker, dan lainnya. Mengapa kita tidak berusaha pada beasiswa sama untuk menghasilkan dan menciptakan banyak hal yang berguna dan membahayakan negara? Teruslah mengawigilkan kembali program beasiswa melalui sistem, adopsi kepeda pemerintah untuk bisa tetap dilestarikan," paparnya.

TIDAK PERLU TAKUT

Pero orang tua menurut Bimo tidak perlu merasa takut. Jika anak akan ke luar negeri, seperti mengambil pendidikan S1 di luar negeri, BJ Habibie, Werdiansa, Djogjonegoro, dan takah lainnya tamatan SMA dulu

lanjutkan baray kuliah di berbagai negara di Eropa dan Amerika. "Ketika BJ Habibie menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, dia ingin sekitar 2000 anak SMA terbaik bangsa terkawal ke berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, Jepang, Austria, maupun Kanada. Setelah kembali ke tanah air, saya hampir tidak pernah lihat ada yang berubah baik secara berpikir, mental, atau eksistensinya jadi tidak percaya kepada Tuhan. Kalau memang mungkin ada, saya pikir itu tidak signifikan terjadinya. Jadi, mayoritas berjalan baik, bahkan mereka berubah lebih dewasa, mandiri, dan berminat 'ungkap diri' yang memperoleh Bachelor of Science in Aerospace Engineering (Comlaude) di North Carolina State University, Amerika. Ini saya terkejut."

Banyak mahasiswa Indonesia rata-rata itu hampir 99% pulang kembali ke Tanah Air, tidak seperti India, Cina, atau Timur Tengah, mereka cenderung senang mau tinggal. Terutama perlu ada pembiasaan mental, karakter, budaya, bela negara, maupun peningkatan kepatutan dan sikap orang tua. "Dulu 10 tahun yang lalu sudah ada dan matang untuk mau tinggal di luar negeri. Sekarang tidak di bawah tingkat SMA dan saya tidak sopak kalau pengalaman mahasiswa dibelikan setelah tamat S1 di dalam negeri. Waktu yang tepat adalah tamat SMA, karena sudah masuk ke usia dewasa dan mandiri."

Bahkan, di luar negeri sendiri anak umur tersebut sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya dalam mempelajari berbagai bahasa penerjemahannya akan lebih mudah dan cepat. Belum membah dan tidak ada beban keluarga, serta tenaga untuk beasiswa bisa dengan masyarakat setempat. Mereka tak hanya menyerap ilmu pengetahuan, tapi juga budaya dan cara berpikir. Lalu, pendidikan mereka bisa berlanjut terus, managkat ke jenjang S2 dan S3," sambung Bimo.

EDUKASI TERUS-MENERUS

Berbagai kendala dalam bisnis ini pun diatamnya. Seperti dari sisi internal, bagaimana melayani customer membuat program yang cocok dengan minat, dan program bahasa yang unggul serta efektif dalam waktu yang terbatas. Sementara, kendala eksternal adalah lebih ke arah bagaimana mengubah mindset cara berpikir orang tua dan anak-anak yang masih merasa ketakutan untuk belajar ke luar negeri. Malin membutuhkan proses panjang untuk mengubah dan dukungan dari pemerintah sangat diperlukan.

Bimo menegaskan pemerintah perlu membuat program beasiswa yang ditayangi dengan seleksi ketat. Tamatan SMA yang cerdas, pintar, bermental baik, dan memiliki nasionalisme bisa dikirim sekolah ke luar negeri. "Bak oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti gubernur, walikota, kementerian-kementerian, BUMN, bank-bank nasional, institusi-institusi sosial, maupun partai politik. Dan bisa juga didukung dengan perjanjian timah dari perusahaan. Saya yakin 20 tahun lagi bangsa Indonesia akan maju," ujar pria yang selalu haus untuk belajar terus-menerus ini serius.

Tak hanya belajar ke luar negeri, Euro Management juga menyediakan penguasaan bahasa asing Inggris, Jerman, Prancis dan lainnya harus dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Termasuk itu juga, pelajar SMA, dan mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mereka memang ada yang sudah menguasai bahasa asing, tapi tidak banyak. Padahal kedisiplinan bahasa asing, Inggris, Jerman, Prancis dan lainnya sangat dibutuhkan untuk dikuasai. Euro Management pun peduli akan hal-hal ini dan alih-alihnya lewat program CSR bisa memberikan kursus gratis bahasa asing kepada para wartawan, siswa SMA, maupun mahasiswa perguruan tinggi. ■





Women's Obsession

life • career • style

■ EDISI 009/ TAHUN ke - 2 / 2016



VACA
IN SNOW FALL

ANTI
FRIZZ HAIR

SRIKANDI-SRIKANDI
BUMN

Pilkada serentak merupakan momentum untuk menjangkiti sosok kepala daerah yang mampu mendorong produktivitas di daerahnya. Dibutuhkan kepala daerah yang memahami cara yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus, memiliki gagasan segar maupun inovasi tepat guna yang terkait dengan faktor produktivitas bagi masyarakat.

Tahapan pilkada serentak sebaiknya menjadi pasar gagasan oleh calon kepala daerah. Untuk menunjukkan sejauh mana kapasitas dan kompetensinya demi kemajuan daerah. Rakyat membutuhkan sosok kepala daerah yang bisa mewujudkan faktor tipping point terkait produktivitas.

Pada prinsipnya fenomena tipping point bisa terjadi, jika seseorang memiliki gagasan atau inisiatif hebat yang bisa menyebar seperti virus ganas dan mampu menduplikasi secara deret ukur.

Rakyat membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Yakni, tidak sekadar kepemimpinan politik, tetapi juga cara untuk menggenjot produktivitas maupun daya kreativitas. Kepemimpinan transformatif harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah yang berhasil melakukan leapfrogging atau lompatan katak terkait produktivitas.

Menurut Murphy istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri dengan cara menggenjot produktivitas. Dalam konteks lompatan di atas, sebaiknya sosok calon kepala daerah yang bertangung dalam pilkada, kelak bisa membebaskan kakinya dari beban dan jeratan partai politik. Agar dirinya bisa memperbaki hasil terdahulu dan mampu melakukan lompatan besar untuk kemajuan daerahnya.

KEPALA DAERAH DAN PRODUKTIVITAS



Mestinya calon kepala daerah harus mampu menyusun konsep dan dokumen pembangunan sesuai dengan lapangan katak. Di era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama terhadap pemerintahan. Jika kita cermati ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJMD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Kita lihat hanya belum menekankan secara tegas akan pentingnya faktor kecepatan dan belum tampak milestones pembangunan secara sistematis untuk mendorong produktivitas daerah.

Ada baiknya kita simak kekhawatiran Presiden Joko Widodo terkait angka pengangguran usia muda yang cukup tinggi. Sehingga menyebabkan produktivitas nasional bermasalah. Ironisnya ditinjau dari latar belakang pendidikan, pengangguran terbesar justru adalah lulusan SMK (9,84%). Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA (6,95%), SMP (5,76%) dan SD (3,44%). Dari total 7,56 juta pengangguran terbuka yang mencapai 20,76%.

Strategi untuk meningkatkan produktivitas tidak cukup dengan membangun berbagai macam infrastruktur. Paling mendasar untuk dibenahi adalah produktivitas terkait aspek luas ketenagakerjaan. Hakekat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja dan birokrasi pemerintahan dalam menghasilkan produk maupun jasa.

Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja dan birokrasi di Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia. Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar US\$121,9. Sementara Indonesia hanya sekitar US\$21,9. Posisi Indonesia pada 2015, juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand, bahkan Sri Lanka.

Di Indonesia, produktivitas tertinggi terjadi di sektor pertambangan yakni sekitar Rp137,2 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan

terendah terjadi di sektor pertanian, sekitar Rp8,7 juta. Bila dilihat per daerah, tingkat produktivitas tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp102,2 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar Rp76 juta per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tenaga kerja paling rendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu hanya sebesar Rp7 per tenaga kerja per tahun, diikuti dengan Provinsi Gorontalo sebesar Rp7,9 juta per tenaga kerja per tahun.

Sungguh prihatin melihat fenomena gap produktivitas (productivity gap analysis) antara Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dari produktivitas Indonesia. Produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%) dari produktivitas Indonesia. Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 2,17 kali (217%) dari produktivitas Malaysia.

Ada korelasi antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kemajuan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Angka produktivitas di Korea Selatan dan Malaysia ternyata hasil dari pencetakan SDM unggul secara besar-besaran. Terutama pencetakan SDM dengan cara mengimpor para remajanya untuk belajar ke luar negeri, terutama ke pusat IPTEK dan peradaban unggul dunia. Kemajuan yang diraih Korea Selatan dan Malaysia selama masa pembangunan 1960-2015 mengandalkan pada peningkatan produktivitas dan menggenjot kualitas sumber daya manusia. Bukan mengandalkan pada kepemilikan sumber daya alam (SDA). ■

BIMO SASONGKO, BScE, MScE, MBA

Presiden Direktur Euro Management yang pernah mendapat beasiswa Science and Technology for Industrial Development (STADI) 1 Menitaka BPTI B1 Habitat ini adalah seorang pendiri konsultan pendidikan Euro Management Indonesia dan ketua umum Ikatan Alumni Program Hablitz (SABE). Euro Management memberikan layanan pengajaran dan beasiswa bahasa asing Inggris, Jerman, Prancis dan lainnya kepada para tamatan SMA dan jenjang. Dia berkomitmen men-dive penersehan dan seluruh stakeholder nya lain, untuk terus mengimpor siswa-siswa tamatan SMA ke luar negeri agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang membanggakan.





Bimo Sasongko Persiapkan Sejuta Anak Bangsa Belajar ke Pusat-Pusat Peradaban di Dunia

Bimo Sasongko (kanan) menerima penghargaan TOP Eksekutif Muslim 2017.

Anwar Tandjung

Foto: Denny

Bermula dari keresahan melihat pemerintah bangsa Indonesia yang belum maksimal mengurus pendidikan ke arah yang lebih baik, Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA (sang penerima penghargaan Top Eksekutif Muslim 2017 dari Majalah Ibadah yang bekerjasama dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia-IPEMI), yang waktu itu sedang menyelesaikan program MBA-nya di Pforzheim University of Applied Science Fachhochschule (FH), Pforzheim, Jerman, merasa prihatin dan tertantang untuk ikut serta berkontribusi memajukan Indonesia lewat sebuah pendidikan nonformal. Institusi itu kemudian muncul dengan nama Euro Management Indonesia (EMI).

Institusi yang fokus pada konsultan pendidikan internasional itu, sejak berdirinya pada tahun 2003, hingga kini terus berkembang, baik secara fisik maupun non fisik. Mulai dari pengiriman beberapa siswa ke negara Jerman dan Prancis, kini sudah lebih dari 2000 siswa yang melanjutkan studi ke Inggris, Australia, Amerika Serikat, Belanda,

Spanjol, dan Jepang. Mulai dari beberapa karyawan hingga ratusan karyawan. Dari tempat yang terbatas, sampai beberapa ruang belajar dan kantor yang cukup representatif, yang kini berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Program Beasiswa

Pendidikan adalah suatu yang wajib bagi kemajuan suatu bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan MEA ini. Agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju lain, SDM Indonesia haruslah berkualitas. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas itu, Bimo Sasongko, CEO dan Founder dari EMI yang juga merupakan Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie) memfasilitasi beberapa program bagi anak bangsa, salah satunya adalah program beasiswa belajar lima bahasa asing (Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang).

Terhitung sejak tahun 2016 (Q2, 2017) sudah lebih dari 3000 partisipan yang mengikuti program ini. Mereka terdiri dari siswa SLTA, mahasiswa, jurnalis, PNS, pegawai BUMN, dan Guru yang masing-masing berjumlah 1000-an lebih.

Walaupun pemerintah sejak lama memberikan program beasiswa, tapi

sifatnya sangat terbatas hanya untuk S2 dan S3. Untuk S1 masih sangat minim. Padahal belajar di luar negeri sejak masa muda itu sangat penting. Karena masih bersifat fleksibel, belum memiliki tanggungan, dan tidak memiliki banyak beban. Untuk itu, Bimo Sasongko lewat Euro Management menargetkan (hingga tahun 2030) bisa mengirimkan 1 juta anak bangsa ini menuntut ilmu ke luar negeri. Program beasiswa ini, dulu pernah dilakukan oleh Pak Habibie pada tahun 1980 dan berhenti 1998 karena persoalan politik.

Hal ini sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bukan hanya mengadopsi keilmuannya saja, tetapi juga cara berpikir dan budaya positifnya, agar peradaban bangsa Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Menggalang Umat Islam untuk Maju

Kemajuan suatu bangsa atau ummat, salah satunya ditentukan dengan pendidikan. Kalau pendidikannya lemah, bangsa dan ummat akan menjadi ejekan, injakan, dan jajahan bangsa dan ummat lain yang lebih maju.

Kelemahan umat Islam (dari dulu) adalah yang tak lagi mementingkan pendidikan (formal non-formal, terlebih ilmu pengetahuan alam). Bimo mengajak, ummat Islam haruslah belajar. Harus maju.

Walaupun banyak tantangan, menggerakkan ummat Islam supaya belajar dan maju haruslah berjalan terus. Hanya dengan ilmulah kita bisa maju dan menguasai dunia. Seperti halnya pada peradaban keemasan Islam dahulu. Peradaban Keilmuan Islam yang disegani dan mampu menjadi inspirasi negara-negara Barat untuk mengirimkan para sarjanannya mempelajari budaya dan keilmuan Islam. Karena terlena, hingga saat ini ummat Islam dikuasi. Untuk membangkitkannya lagi, belajar ilmu pengetahuan di dunia Barat disertai dengan keimanan dan nasionalisme yang tinggi, adalah salah satu caranya. Langkah itulah yang ditempuh Bimo Sasongko lewat Euro Management-nya.

Reiner Rahardja Hasilkan Seperempat Triliun di Usia 26 Tahun

Juli 2016 / Tahun 8 / Rp 20.000,-

elshinta

Majalah Peluang, Inovasi UKM dan Industri Kreatif Indonesia

► **Futri Zulya Safitri**
BANGUN
4 BISNIS
UNTUK
BERDAYAKAN
MASYARAKAT
hal. 46

Photomotion,
Mendulang Fulus
dari Foto Mainan
hal. 92

Bukalapak
ACHMAD ZAKY
"Mereka yang
Kreatif
yang akan
Menang!"

Prospek
Mengintip
Peluang Bisnis
Kreatif

Konsep
Amal Resto
Ari Wibowo
hal. 102

BIMO SASONGKO

bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA, terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tentara dan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Namun keinginannya yang kuat untuk bisa sukses membuatnya ulet belajar sejak kecil dan dekat dengan buku. Salah satu mimpinya adalah bisa studi di luar negeri. Masa kecilnya dihabiskan di Tanjung Priok,

Kirim 2000 Mahasiswa ke Jantung Eropa

Masa kecilnya dihabiskan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta dengan kondisi lingkungan yang tak terlalu baik. Demi menjaga dirinya dari pergaulan buruk, lalu orang tuanya mengirimkannya untuk belajar di salah satu SMA di Bandung. Keinginan kuat untuk bisa belajar di luar negeri dibuktikannya, sekitar tahun 1990-an ia diterima untuk belajar di Amerika Serikat. Sepulang dari Amerika dengan menggondol gelar S1 dan S2, lalu ia kembali mengulik ilmu di Jerman. Pulang kembali dan mendirikan Euro Management Indonesia, lembaga konsultasi pendidikan untuk luar negeri yang saat ini telah memberangkatkan 2000 orang ke Eropa.

lokasi yang cukup keras di Jakarta. Karena itulah, selesai bangku SMP, Bimo lalu dikirim ke kota Bandung untuk melanjutkan studi SMA. "Saking saya

inginnya bisa belajar di luar negeri, saya SMA tidak mau di Jakarta. Akhirnya saya pilih untuk sekolah di Bandung, ikut saudara disana. Jadi saya memang sudah bisa mandiri dan jauh dari orang tua sejak SMA," katanya.

Selepas SMA pada 1990, lalu ia masuk ke ITB. Namun baru sebulan kuliah, Bimo pun diterima untuk kuliah program beasiswa Menristek Habibie kala itu, dan ia pun berangkat ke Amerika Serikat di tahun itu. Untuk mendapatkan beasiswa ini bukanlah pekerjaan mudah, ia melakukan serangkaian tes hingga 6 kali sampai akhirnya





dinyatakan lulus dan diberangkatkan ke AS. Di Amerika,

dirinya kuliah dengan mengambil jurusan Teknik Penerbangan di North Carolina University, yang kemudian dilanjutkan dengan menamatkan S-2 di Arizona State University. Pria kelahiran tahun 1972 ini mengakui jika di masa-masa awal kuliah di luar negeri memang cukup berat, terlebih jauh dari keluarga. "Yang paling utama adalah faktor bahasa, meski di Indonesia sudah belajar bahasa, pada praktiknya tetap saja bahasanya berbeda. Budaya juga, saya masih malu kalau bicara. Praktis, selama 2,5 tahun saya hanya bisa dengar dan tak mengerti bahasa mereka. Setelah itu baru saya bisa lancar berbahasa dan sudah seperti hidup di Tanah Air saja. Tak ada kendala lagi," katanya.

Setelah menamatkan jenjang S1 selama 4 tahun, Bimo pun langsung mengambil jenjang S2 dengan tanpa beasiswa. Selama di sana pun, berbagai pekerjaan pernah dicoba olehnya dari mulai kerja di perpustakaan



kampus ataupun di kantor pos universitas. Dari pekerjaan tersebut dirinya dibayar hingga 100 euro per minggu. Tamat S2 pada 1997 lalu Bimo pulang ke Indonesia dan langsung bekerja di BPPT. Selain di BPPT ia juga bekerja di salah satu perusahaan dan membuatnya

bisa mendapatkan banyak uang. Dari pekerjaan tersebut ia sudah bisa membeli rumah dan mobil. Tapi karena keinginannya untuk bisa kembali kuliah belum padam, semua asetnya kemudian dijual. Dengan bekal dana 6000 euro hasil menjual semua asetnya, Bimo pun berangkat ke Jerman. "Saya kemudian ambil lagi S2 untuk mengambil gelar MBA di Fachhochschule (University of Applied Sciences) Pforzheim, Jerman. Saat di Jerman inilah saya sempat membawa serta anak istri saya. Tapi karena biaya hidup yang cukup berat, akhirnya mereka kembali ke Indonesia sebelum saya menamatkan pendidikan. Di Indonesia saya nol kembali,





karena semua asset sudah saya jual," sebut Bimo.

Namun dari Jerman inilah mimpinya untuk membangun sebuah bisnis di bidang pendidikan mulai muncul. Diakuinya, kala itu sebelum pulang ke Indonesia, di Jerman dirinya sudah membuat *business plan*, namun pada kenyataannya sangat sulit untuk direalisasikan. "Saat saya kembali ke Indonesia dua tahun berikutnya, saya malah bingung harus memulai dari mana, karena kantor tidak ada, uang pun tidak ada. Akhirnya

saya kembali melamar pekerjaan, tapi tidak ada perusahaan yang menerima juga. Karena tak ada yang mau menerima, saya pilih kembali ke BPPT. Saat itu saya digaji Rp 1,5 juta sebulan. Saya nikmatin saja lah," akunya.

Tapi karena ide bisnisnya belum hilang, sambil bekerja di BPPT Bimo pun membuat brosur kursus bahasa Inggris yang kemudian ia bagi-bagikan ke sekolah-sekolah SMA. Di tahun 2002, ia mendirikan institusi konsultan pendidikan untuk

membantu calon mahasiswa/i yang ingin melanjutkan kuliah di Eropa, yang diberi nama Euro Management Indonesia. Setelah tiga bulan berjalan, ternyata ada beberapa orang tua yang merespon dan langsung mendaftar. Bimo sendiri awalnya tak percaya, karena banyak para orang tua siswa yang percaya terhadapnya. Singkat cerita di tahun pertama itulah ia berhasil mendapatkan 20 orang yang akan melanjutkan kuliah ke luar negeri dan mengikuti program pembekalan bahasa di lembaganya. "Dari 20 orang itu saya bisa dapatkan dana sekitar Rp 600 juta, saya berkewajiban untuk membimbing mereka selama satu tahun sampai ke proses pemberangkatan, pembelian tiket, dan tempat tinggal di negara tujuan," imbuhnya.

“
Saat saya belajar di Jerman, saya merasakan sekali bahwa kuliah di sana biayanya tidak besar bahkan gratis”

Tahun berikutnya, jumlah pendaftar melonjak menjadi 50 orang, tahun 2005 ada 70 orang dan tahun 2006 berjumlah 90 orang. "Sejujurnya saya tak menduga perkembangan Euro Management bisa seperti ini. Euro Management Indonesia saya dirikan dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon mahasiswa Indonesia





untuk dapat melanjutkan studinya baik program S1, S2

maupun S3 di Eropa. Saat saya belajar di Jerman, saya merasakan sekali bahwa kuliah di sana biayanya tidak besar bahkan gratis, dan saya berangan-angan nanti kalau pulang ke Indonesia akan membuat institusi pendidikan yang tahu persis kondisi Eropa, terutama Jerman & Prancis," ungkapnya lagi.

Ayah dari lima anak dan suami dari Dwiwreka Novitria ini merasakan sendiri nilai plus saat kuliah di Jerman dan Prancis. Biaya pendidikan gratis di Jerman dan Prancis berlaku untuk semua tingkat pendidikan. Sehingga mahasiswa hanya perlu menanggung biaya hidup dan jumlahnya lebih kurang sama dengan di negara-negara lain, termasuk Indonesia, bahkan bisa lebih kecil.

"Biaya hidup selama kuliah di Jerman dan Prancis pun sebenarnya bisa lebih ringan jika mahasiswa mau mencari pekerjaan *part time* yang banyak tersedia. Misalnya kalau bekerja maksimal 20 jam perminggu selama masa kuliah, kita bisa mendapatkan 325 Euro perbulan. Bahkan mahasiswa berhak mendapatkan pekerjaan *full time* selama masa liburan 3 bulan, 40 jam perminggu, dengan rata-rata pendapatan antara 750-1000 Euro per bulan. Selain itu, universitas di Jerman dan Prancis juga mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti magang selama masa program kuliah di berbagai perusahaan Jerman dan Prancis, minimal



dua semester penuh dengan pendapatan antara 300 hingga 1000 Euro perbulan," tuturnya.

Di lembaganya tersebut, para peserta didik Euro Management sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas berupa kursus bahasa Jerman atau Prancis selama 6 bulan dengan pengajar lokal dan native speaker, pengurusan dokumentasi-dokumentasi (passport dan lain-lain) dan cultural workshop. "Memang tidak ada jaminan bahwa setiap peserta didik di Euro Management akan diterima kuliah di Jerman atau Prancis tapi tidak perlu khawatir karena syarat penerimaan mahasiswa

di Jerman dan Prancis itu sangat mudah. Pada prinsipnya di Jerman dan Prancis siapapun boleh mengenyam pendidikan. Yang paling penting hanya lulus dalam bahasa Jerman atau Prancis serta lulus dalam tes matematika dasar," ucapnya. Diakuinya, saat ini dirinya telah memberangkatkan sekitar 2000 mahasiswa ke luar negeri, khususnya ke negara-negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis yang paling banyak diminati. Tak hanya Eropa, dalam jumlah kecil dirinya juga mengurus para mahasiswa yang akan belajar ke Amerika, Jepang, Australia, Inggris, dan Negara lainnya.





Kini Euro Management Indonesia telah berkembang pesat menjadi sebuah konsultan pendidikan internasional terbesar di Indonesia yang secara terpadu dan terintegrasi membantu calon siswa-siswi Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi terbaik dan ternama di negara-



negara Eropa, khususnya di Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Australia dan Jepang. Saat ini dalam setahun dirinya tidak kurang menerima sekitar 150 orang yang mendaftar. Dalam pelayanannya ia baru membuka di Jakarta dengan alasan agar lebih fokus, meski sebelumnya pernah juga membuka di

Bandung dan Yogyakarta tapi karena perkembangan yang tidak maksimal, dua cabang tersebut akhirnya ditutup. Lalu bagaimana dengan omzet yang bisa diraih dari bisnis ini? "Setahun omzetnya bisa sampai Rp 7,5 miliar, dengan laba bersih sekitar 10% dari omzet," pungkas Bimo. **(Doddy Handoko, foto: dok. pri)**

rossmax

GlucodDr

familyDr

Sambut Hari Lebaran

Berikan Hadiah Terindah Keluarga Anda

Alat Tes Kolesterol



Alat Tes Asam Urat



Alat Monitor Lemak Tubuh



Nebuliser



Tensimeter



Alat Tes Gula Darah



Termometer



Tensimeter



PROMO
PAKET
EKONOMIS
3 in 1*

Anda dapat di apotik-apotik terdekat dan toko alat kesehatan seluruh Indonesia



Customer Care
PT. Medisindo Bahana
Telp : (021) 425 0665 | Email : medisindo@medisindo.co.id | www.medisindo.co.id

* tersedia di outlet tertentu

Wednesday, 29 June 2016, 13:48 WIB

Suka Duka Ramadhan Sambil Kuliah di AS dan Eropa

Red: Agung Sasongko



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengalaman berpuasa saat berkuliah di negeri orang telah memberikan kesan berbeda bagi CEO Euro Management, Bimo Sasongko. Pemimpin lembaga pendidikan bahasa dan misi beasiswa ke luar negeri bagi pelajar ini, merupakan salah satu penerima beasiswa Habibie pada 1991.

Sebagai penerima beasiswa Habibie, Bimo mendapatkan kesempatan berkuliah di North Carolina State University, Amerika Serikat pada 1991 sampai 1996. Dan program magister di Jerman pada 2001 hingga 2002. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan di AS dan Jerman. Berbeda dengan di Indonesia, suasana Ramadhan di AS tentu tidak terlalu terasa seperti di tanah air. Hal itu juga ia rasakan ketika di Jerman. Ketika di AS pada era 1990an awal, publikasi media terhadap Islam masih sangat minim sehingga perhatian publik AS terhadap Ramadhan saat itu juga masih minim.

Dari segi waktu, AS dan Jerman tidak berbeda jauh lama waktu berpuasa dengan Indonesia. Namun yang membedakan ketika itu waktu-waktu ia kuliah dan berpuasa masih memasuki musim dingin atau bersuhu dingin.

Namun Bimo merasakan kehangatan bulan Ramadhan, ketika berkumpul berbuka puasa bersama mahasiswa muslim dari seluruh dunia di masjid sekitar kampus North Carolina State University. "Di

kampus saya saat itu sudah ada masjidnya tapi dikelola oleh warga Timur Tengah," ujar Bimo yang juga Sekjen Ikatan Alumni Program Habibie ini.

Sebagai Muslim Asia Tenggara, Muslim Indonesia disambut baik bergabung dalam berbagai kegiatan acara. Bahkan ia pun sempat dipercaya menjadi pengurus di Muslim Association di sana. "Jadi saya sempat ikut gabung untuk acara berbuka, menyiapkan makanan dan acara keislaman lain, diluar kesibukan kuliah," kata dia.

Kesan yang mendalam saat itu, sebagai sesama Muslim berbuka, makan berjejer dengan suhu udara yang masih cukup dingin. Namun berpuasa sambil berkuliah di luar negeri bukan tanpa hambatan. Saat di AS, terkadang Bimo harus melewatkan jam-jam berbuka dan shalat maghrib justru di kelas.

Karena kampus tidak peduli dengan aktivitas keagamaan. Sampai akhirnya ia menyempatkan keluar membatalkan puasa dengan air mineral, dan masuk lagi ke kelas. Sehingga makan dan berbuka puasa dilakukan setelah kelas. Parahnya bila kelas berlanjut, maknanya membawa sedikit snack atau coklat untuk pengganjal setelah waktu berbuka. "Itu bahkan bisa terjadi berkali-kali," ujar dia. Terlebih ketika di North Carolina saat itu, di bulan Ramadhan saat Februari adalah puncak-puncaknya ujian. Karena jelang Mei dan Juni sudah masuk waktu libur jelang musim panas.

Hal itu juga ia rasakan ketika beasiswa program magister di Jerman pada 2001 hingga 2002. Saat itu bulan puasa terjadi di November pas saat musim dingin. Di tengah suasana dingin, kondisi tubuh mudah lapar. Kejadian yang sama sering ia alami, saat Ramadhan itu jam-jamnya aktif kuliah sehingga kadang buka puasa dilakukan di kelas.

"Namun enaknya buka puasa di sana hampir semua gratis," kata dia. Bahkan Bimo sempat tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli takjil berbuka. Sebab buka puasanya di masjid, dan pulang dari masjid mendapatkan bungkusan makanan untuk sahur.

Kalau akhirnya berbuka di luar masjid, jika membeli makanan di toko Islam untuk berbuka, seringkali penjual menggratiskan makanan tersebut. "Seperti kita beli kebab di jam maghrib waktu berbuka, penjual toko yang muslim tahu kita mau berbuka, maka kita mendapat gratis," ujar dia.

Jadi hampir satu bulan mahasiswa Indonesia di sana itu bisa menjaga pengeluaran. Namun bedanya saat saya di Jerman minim kegiatan Islam karena aktivitas full kuliah. Bahkan shalat taraweh pun dijalankan sendiri.

Sesama mahasiswa Indonesia di Jerman, kita bergabung semua pada waktu buka rata-rata. Enaknya itu, waktu berkumpul bersama. Terkadang dalam satu kota cuma ada 50an orang, tapi jarang bertemu. Momentum puasa dan berbuka bersama, justru bisa mempertemukan mahasiswa muslim Indonesia setiap hari. Terkadang ada beberapa kegiatan atas undangan keluarga-keluarga Indonesia yang menetap di sana.

Nah pelajaran selama studi di AS dan Eropa itu juga yang ia ambil ketika memimpin lembaga studi bahasa dan misi beasiswa ke luar negeri, Euro Management saat ini. Bimo berharap generasi muda

muslim Indonesia bisa semakin maju, mampu berbahasa asing hingga mengambil studi ke luar negeri.

Inilah tujuan lembaga Euro Management yang ia pimpin, mencetak satu juta Habibie, dengan mendorong pelajar mendapatkan beasiswa ke luar negeri. "Saat ini sudah hampir 2000 orang siswa yang dikirim Euro Management ke luar negeri. Dan mayoritas mereka adalah muslim," kata dia.

Kenapa, karena sebagai negara muslim terbesar sudah menjadi tanggung jawab meningkatkan harkat martabat generasi muda muslim melalui beasiswa luar negeri. Dan tentu sebelum mereka berangkat, mereka perlu motivasi dan member pesan ke mereka sebagai wakil bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia.

Sehingga dengan kondisi gambaran Islam saat ini, tercermin Islam khususnya di Indonesia yang lebih ramah, santun dan toleran. Ini menjadi beban berat bagi mahasiswa muslim Indonesia sekarang bila dibandingkan pada era 90 dahulu.

Sekarang jatidiri seorang muslim di AS dan Amerika itu benar-benar ditest. Kalau pelajar Indonesia memiliki karakter baik, motivasi tinggi, santun dan toleran, itu menjadi gambaran Indonesia di luar negeri. Karena banyak orang sekarang yang akhirnya malu-malu menunjukkan jatidirinya sebagai muslim di negara barat, lantaran gambaran buruk terhadap Islam selama ini.

Karena itu, ia ingin pelajar-pelajar muslim Indonesia di luar negeri mereka tetap bangga dengan jatidiri keislaman mereka. Sekaligus bangga dengan keindonesiaan yang memiliki karakter lebih toleran dan santun ke semua orang. Sehingga bisa merubah paradigma bahwa Islam itu bukan kekerasan dan kejam seperti gambaran barat selama ini.

ON VIEW



Beasiswa Bahasa Asing untuk Wartawan

Menghadapi ketatnya persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggandeng Yayasan Pendidikan Eropa-Indonesia (YPEI) dan Euro Management Indonesia untuk menyediakan program beasiswa kursus bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Belanda, dan Perancis bagi wartawan selama dua semester.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Marah Sakti Siregar menjelaskan, program ini bertujuan meningkatkan potensi wartawan khususnya dalam menghadapi MEA. "Dengan kemampuan bahasa, wartawan percaya diri dan mampu bersaing dengan wartawan asing," ujar Sakti di kantor Euro Management Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/5).

Senada dengan hal tersebut, CEO dan President Director Euro Management Indonesia Bimo Sasongko mengatakan, wartawan harus mampu menggenggam dunia lewat penguasaan bahasa asing.

"Dengan paham bahasa asing, segala ilmu pengetahuan dan informasi dunia akan mudah dikuasai wartawan," jelas Bimo.

Ia berharap, usai menyelesaikan program beasiswa ini wartawan dapat terpacu semangatnya untuk meneruskan pendidikan tingkat magister hingga doktoral di luar negeri.

"Presiden pertama RI, Soekarno pernah berpidato dan berpesan secara berulang-ulang kepada para wartawan agar mempelajari dan memahami bahasa asing secara serius," ujarnya.

Peserta yang berminat disyaratkan untuk melampirkan persyaratan fotokopi kartu pers dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) via email pwi.pusat@yahoo.com serta memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hingga 20 Mei 2016, tercatat 60 wartawan dari berbagai media yang mendapatkan beasiswa ini diantaranya dari *Koran Jakarta*, *Majalah Pajak*, dan *Suara.com*.

—Aprilia Hariani

Eksekutor Kebiri Disiapkan

Sistem hukum di Indonesia membolehkan penerapan sanksi hukuman kebiri, IDI seharusnya tunduk pada undang-undang.

PUPUT MUTIARA

SIKAP resmi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak dan melarang anggotanya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri secara medis kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak membuat surut sikap pemerintah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No

1/2016 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Dalam merespons sikap IDI tersebut, pemerintah bakal mempersiapkan tenaga khusus sebagai eksekutor hukuman kebiri secara medis itu. Hal itu menyusul pembahasan mengenai penyusunan peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut atas pengesahan Perppu No 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 22/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Yohana S Vembise mengatakan, yang terpenting di dalam PP tersebut nantinya secara jelas mengatur siapa yang menjadi eksekutor serta kapan eksekusi kebiri kimia itu bakal dilaksanakan. "UU memang belum mengamanatkan (eksekutor

kebiri). Tapi, seandainya IDI tetap menolak, pemerintah akan membicarakan kembali apakah akan disiapkan tenaga khusus yang bisa melaksanakan kebiri," ujarnya di sela-sela acara Jelajah Three Ends di Jailolo, Halmahera, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, ungkap Menteri Yohana yang akrab disapa Mama Yo, tenaga khusus yang dimaksud mungkin bisa dari ahli forensik atau siapa saja yang ditunjuk dengan terlebih dahulu akan dididik supaya mampu menjadi eksekutor kebiri kimia.

"Itu kalau kita bicara dalam situasi terburuk ketika IDI tidak mau, sementara UU harus tetap dilaksanakan. Tapi, sampai saat ini belum ada pembicaraan secara khusus," imbuhnya.

Mama Yo menegaskan, dalam waktu dekat, pihaknya

bersama Kementerian/lembaga (k/L) terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan akan duduk bersama membahas PP tersebut. Tidak terkecuali, perwakilan IDI bakal diminta turut hadir guna ikut menyampaikan pandangannya dan memberikan suara.

Sulit dilaksanakan

Sementara itu, psikolog klinis forensik A Kasandra Putranto menilai wacana pemerintah yang ingin mempersiapkan tenaga khusus sebagai eksekutor kebiri justru akan semakin sulit dilaksanakan. Selain belum tentu mumpuni, juga butuh anggaran.

"Jangankan dokter, psikolog saja belum tentu setuju karena persoalannya bukan hanya pelaku, tapi latar belakang pendidikan, ekonomi, kualitas psikologi, dan sebagainya,"

ucapnya. Sehingga, menurut Kasandra, ketimbang anggaran itu difokuskan pada pemberian hukuman bagi pelaku, lebih baik digunakan untuk melakukan pendampingan pemulihan korban. Terhadap pelaksanaannya, bisa dialihkan ke konseling.

Apalagi, jelasnya, tidak melulu faktor yang mendasari seseorang melakukan kejahatan seksual lantaran untuk memenuhi nafsu. Bisa jadi di balik itu ada gangguan pada otak yang seyogyanya bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan.

"Ada kondisi saat otak seseorang bermasalah sehingga mendorong dia melakukan kejahatan seksual, termasuk terhadap anak-anak," pungkasnya. (H-1)

puput.mutiara
@mediaindonesia.com

SEKILAS

Beasiswa S-1 ke Luar Negeri Strategis

IKATAN Alumni Program Habibie (IABIE) mendorong pemerintah terus mengirim pelajar Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri guna menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. "Dulu tujuan Pak Habibie mengirim pelajar ke luar negeri agar mereka jadi tuan rumah di negeri sendiri di bidang sains dan teknologi," kata Ketua Umum IABIE Bimo Sasongko, di Jakarta.

IABIE yang dibentuk pada 2 Agustus 2013 awalnya untuk mengumpulkan dan menjalin koneksi antara para lulusan program beasiswa yang dikirim oleh BJ Habibie. Bimo menyebut WNI lulusan SMA yang dikirim pada 1990-an untuk mengikuti program S-1 sebanyak 1.500 orang.

"Salah satu visi besar kami agar pemerintah kembali mengirimkan lulusan SMA ke luar negeri," kata Ketua IABIE Jarot Suroso. Dia menilai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang mengirimkan WNI untuk kuliah di luar negeri didominasi program S-2 dan S-3. (Anj/H-1)

Keluarga Basis Pendidikan Gender

KESADARAN terhadap pentingnya kesetaraan gender bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Institusi keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak untuk mendapatkan nilai-nilai, aturan-aturan, dan perilaku, termasuk perilaku yang berkaitan dengan gender.

Dalam diskusi yang diselenggarakan HeForShe -gerakan di bawah PBB yang mempromosikan kesetaraan gender-, di Jakarta, Direktur Pusat Informasi PBB Sunaina Lowe mengatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap

Edisi 21-01-2018

Beasiswa untuk Tingkatkan Mutu Sumber Daya Manusia

[Bagikan](#) [Tweet](#)

Pemerintah sangat peduli akan pendidikan anak bangsa, sehingga dengan tangan terbuka pada 30 Januari 2012 merancang lembaga khusus di bawah Kementerian Keuangan, yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Beasiswa LPDP tidak hanya memberikan pem - biayaan untuk kuliah, tetapi juga tunjangan hidup bulanan. Selain itu, akan ada juga tunjangan untuk penelitian yang sejalan dengan studi yang sedang diambil. Para pelajar Indonesia dibiayai 100% selama melanjutkan studi dari awal hingga selesai. "Kami tidak membebankan adanya sebuah ikatan dinas atau kerja setelah studi yang ditempuh selesai seperti di beberapa jenis beasiswa yang lain," ujar Pelaksana Tugas Direktur LPDP Sofwan Effendi.

Dengan demikian, para penerima beasiswa hanya fokus untuk melanjutkan studi sampai selesai, tanpa harus memikirkan di mana tempat mereka mengabdikan setelah lulus. Beasiswa LPDP membebaskan bidang ilmu yang dipilih penerima, juga negara dan universitas yang diinginkan. Persyaratannya tentu sama dengan beasiswa lain, yaitu memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan IELTS dan menulis esai dengan tema "Kontribusi bagi Indonesia". Selain dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris juga peduli akan pendidikan bagi masyarakat global. Sebab, bagi mereka pendidikan mampu memba - ngun sebuah negara.

Mereka pun mengajak masyarakat dunia mewujudkan impian tersebut dengan meng - undang para pelajar untuk melanjutkan pendidikan sekolah di Inggris, termasuk kepada para pelajar Indonesia. Pemerintah Inggris secara rutin membuka beasiswa Chevening yang dananya berasal dari Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran (FCO) Inggris serta ber - bagian mitra lain. Chevening khusus diberikan kepada mahasiswa pascasarjana yang sebelumnya sudah pernah bekerja. Sebab, tujuan utama dari beasiswa ini ialah bagaimana memberikan kesempatan kepada ma - hasiswa tersebut untuk kembali bekerja dan berkon - tribusi untuk negaranya.

Pemerintah Inggris juga menginginkan para profe - sional dan akademisi dari seluruh dunia me - rakan budaya di Inggris serta mem - bangun hubungan baik de - ngan Inggris. "Setiap tahun juga kami memiliki fokus tertentu untuk bidang pekerjaan yang dapat diajukan," ujar Rowena Chief Officer Chevening Scholarship Indonesia. Tiga tahun lalu fokusnya pada bidang jurnalistik sehingga beberapa peraih beasiswa umumnya wa - rta - wan. Para peraih beasiswa Chevening mendapatkan biaya pendidikan tunjangan hidup setiap bulannya.

Tiket pesawat perjalanan pergi dan pulang, serta hibah tambahan untuk beberapa keperluan lain yang penting. Tahapan penyeleksian sama seperti beasiswa lain alias membayar sendiri. Namun, karena untuk tahapan pas - casarjana tentu para calon mahasiswa diminta mem - buat permohonan yang lebih spesifik langsung pada bi - dang yang dituju. "Seperti membuat tesis itu harus sudah menjadi pemikiran dari awal para pelamar beasiswa," papar Rowena. Pelamar yang mampu dengan yakin mempre - sen - tasikan bakal penelitiannya, menjadi nilai lebih. Che - vening mengharapkan lulusannya dapat mengapi - likasikan bidang yang mereka pilih dalam pekerjaan me - reka di pemerintahan ataupun sektor swasta.

Syarat untuk melamar beasiswa Chevening ini ber - beda dari beasiswa lain: calon penerima beasiswa di - pastikan harus memiliki pengalaman kerja minimum se - lama dua tahun sebelum mendaftar, termasuk kerja sukarela dan magang—baik dibayar maupun tidak. Jurusan yang diambil disesuaikan dengan minat pelamar dan biasanya disesuaikan dengan bidang pe - kerjaan yang sedang digeluti atau latar belakang pendidikan. "Dengan bangga pada 2017 lalu kami mem - berangkatkan 66 orang dengan berbagai bidang pekerjaan ada peneliti, PNS, karyawan bank, pengacara, dosen, pegiat organisasi sosial, dan lainnya. Kami senang dapat memberikan pengalaman baru bagi para pe - kerja. Ini berguna untuk pekerjaan yang dilakukan setelah menempuh pendidikan," ujarnya.

Harapannya dapat mengirimkan lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang belajar di Inggris melalui Chevening dan pesertanya tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. "Semoga kemampuan berbahasa Ing - gris lebih merata bagi masyarakat Indonesia agar kesempatan lebih meluas untuk mendapat beasiswa," sambung Rowena. Bagi para pencari beasiswa, siapa sangka ada tempat khusus untuk mempersiapkan mendapatkan bea - siswa. Dari informasi pendidikan internasional, bea - siswa, hingga kursus bahasa Inggris gratis. Euro Management Indonesia memiliki gerakan Indonesia 2020: Indonesia di Jantung Dunia.

"Kami ingin menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk berani belajar ke luar negeri. Kursus gratis ini kami berikan untuk pelajar SMA, mahasiswa, PNS, guru, jurnalis, dan terakhir baru kita luncurkan pekerja sosial," ujar Presdir & CEO Euro Management Indonesia Bimo Sasongko. Gerakan ini agar semakin banyak lagi anak muda Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Bimo menyebut di Jepang jumlah mahasiswa Vietnam 50.000 orang, penduduknya padahal 90 juta jiwa. Sepertiga Indonesia.

Seharusnya kita bisa mengirim 110.000 orang yang belajar di luar negeri, nyatanya mahasiswa Indonesia di Jepang hanya 4.000 orang. Euro Management sudah membantu tidak hanya mengantarkan mahasiswa ke Jerman, namun sudah bertambah ke berbagai negara maju lain seperti Prancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang.

Ananda nararya

Visi Indonesia dan Kualitas SDM

Oleh: Bimo Joga Sasongko

Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar beberapa waktu lalu merekomendasikan agar Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi dengan tajuk Visi Indonesia 2045. Visi tersebut sekaligus menjadi *grand design* pembangunan nasional.

Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebelumnya juga telah mengemukakan pentingnya menghidupkan GBHN dalam tajuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Langkah menghidupkan GBHN memang tidak sekedar menyusun

kebijakan melalui atau dokumen pemerintahan, tetapi juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan pelaksanaan atau pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Itu karena rumusan GBHN yang sebagai apa pun, akan percuma jika sistem kekeluargaan tidak efektif.

Justru faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berdaya saing tinggi adalah merestorasi sumber daya manusia (SDM) bangsa yang unggul. Transformasi menjadi negara maju menuntut berdaya saing tanpa disertai dengan mencetak SDM unggul di segala bidang.

Sejarah menunjukkan bahwa untuk mencetak SDM unggul, maka langkah pengiriman mahasiswa untuk belajar ke luar negeri adalah tepat. Pengiriman ribuan mahasiswa (pemuda) untuk belajar di negara maju adalah penting guna transfer teknologi. Ini dimulai sejak zaman Sorbarto. Pada saat BJ Habibie menjadi Menteri, ia telah mengirim ribuan lulusan SMA ke berbagai negara maju. Langkah ini sebagai persiapan untuk menjalankan strategi transformasi teknologi dan industri yang berbentuk 9 wahana, yaitu strategi seperti industri pesawat terbang (PT Dir), maritim (PT PAL), perikanan (PINDADI), industri baja (PT Krakatau Steel), industri perkotaan nasional (PT INRA), industri nuklir dan PLTN (BATAN) dan sebagainya.



■ Bimo Joga Sasongko

Sayangnya, sejak 1997 berbagai program beasiswa ke luar negeri yang direvisi oleh BJ Habibie diabaikan tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian kesempatan pemuda Indonesia berbakat dari berbagai golongan untuk kuliah di luar negeri menjadi tertutup.

Sistem Lab Based Education

Data statistik menunjukkan, dalam lima tahun terakhir jumlah mahasiswa asing yang belajar di Amerika Serikat terus meningkat. Mahasiswa asal Tiongkok berjumlah sekitar 157.000 orang.

Ada baiknya kita perlu kembali mengangkat sebuah tema besar yakni SDM teknologi yang dahulu dipersiapkan oleh BJ Habibie lewat beasiswa ikatan dinas kuliah di luar negeri. Merekalah yang kita harapkan dapat menangani transformasi industri dan teknologi berbagai bidang di masa depan.

India 100.000, Jepang 21.000 orang, dan Indonesia sekitar 5000 - 6000 orang. Di Jerman, mahasiswa asal Indonesia sekitar 2000 orang, namun mahasiswa Tiongkok di Jerman sampai 25.000 orang. Begitu juga di Australia, mahasiswa Indonesia 11.000 orang, sedangkan asal Vietnam 10.000 orang. Padahal, penduduk Vietnam hanya sekitar 90 juta orang.

Artinya, industri produk Indonesia 250 juta orang atau sekitar tiga kali Vietnam, artinya mahasiswa Indonesia di Australia 30.000 orang. Nyatanya, mahasiswa kita yang belajar di negeri Kanguru itu hanya 11.000 orang. Artinya, Indonesia masih tertinggal dalam mengirimkan mahasiswa Indonesia ke negara-negara maju seperti

Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia dan Jerman.

Selama ini, *sementara* orang Indonesia adalah agen sekolah luar negeri untuk program S2 atau S3. Inilah yang membuat Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain. Rinci pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun berbagai macam infrastruktur fisik dan program relayasa untuk memenuhi swasembada pangan. Maka dibutuhkan SDM yang unggul dan menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini. Untuk itu, kita perlu kembali gencar mengirim para lulusan SMA langsung untuk belajar di perguruan tinggi di negara maju. Hal ini lebih efektif karena para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar di luar negeri. Begitu pun dari segi rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami iptek secara komprehensif.

Kelangkaan untuk mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke luar negeri adalah karena sistem pendidikan di sini yang menekankan sistem *lab based education* (LBE) yang tidak direvisi oleh perguruan tinggi di dalam negeri. Sistem LBE adalah pendidikan yang dilakukan dengan proyek riset atau tugas

Siswa itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman semesta kuliah dan magang kerja di LN sebagai modal penting untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa atau lainnya. Hal itu tidak mengherankan karena sistem pendidikan di negara maju lebih menjadi *problem solving* yang hebat untuk berbagai kehidupan. Karena kurikulum mengutamakan perbaikan yang terus menerus, berkembang setiap detik dan sangat memperhatikan kerja detail.

Perjalanan siswa bangsa sangat membutuhkan solusi multidisiplin dan multipatform namun tetap sesuai dengan konteks permasalahan lokal yang timbul. Di sinilah Gartner mendefinisikan *ceraniti* sebagai sosok yang memiliki pengalaman, kemampuan menjalankan berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin (*versatile*). Hal itu sekaligus untuk menciptakan pengetahuan baru, kompetensi dan keterampilan yang kaya dan penuh guna mendukung perbaikan tatarakula dan nilai bangsa.

Inovasi dan Kreativitas

Sebelum menghidupkan kembali GBHN, ada baiknya kita benar-benar mengevaluasi dan mencari faktor penyebab kegagalan atau kemunduran sistem yang ada selama ini, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sudah tentu hal juga termasuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah Daerah.

Selama ini minat untuk belajar RPJM dan RPJPD terlihat tidak realistis dan ketinggalan jaman. Jika kita cermati kondisi saat ini, ada beberapa kelemahan mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJM yang dibuat oleh bupati atau pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Terlihat dengan jelas jika hanya memang belum menekankan faktor inovasi sebagai bidang, daya kreativitas serta faktor berpacu dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Hal itu disebabkan belum adanya dukungan SDM unggul yang visioner dan bisa menyusun cetak biru yang hebat serta didukung *experient* sebagai alat yang andal untuk menyusun rencana pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Sebagai catatan, *experient* yang banyak dipakai negara-negara maju biasanya dibuat oleh kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi yang sudah diidentifikasi secara valid dan terstandarisasi.

Bimo Joga Sasongko
President Director & CEO Ekso
Management Indonesia; Sekjen
Program Pasat (Batas Alimati
Program Habibie (GABIE))

Meneguhkan Indonesia di Eropa

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Uni Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda memiliki arti penting untuk meneguhkan Persada Indonesia di jantung Eropa. Persada itu meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), produk dan komoditas maupun kebudayaan.



■ Bimo Joga Sasongko

penurunan investasi beberapa tahun terakhir, tahun 2015 terlihat peningkatan penanaman modal Jerman di Indonesia.

Bahkan Duta Besar RI untuk Jerman Fauzi Bowo sangat progresif untuk menggenjot penanaman modal tersebut. Hasilnya pada 2015 ada peningkatan 14% dibandingkan 2014. Dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman diharapkan semakin meningkatkan presentase diatas.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman juga sangat penting untuk dijadikan momentum pembelajaran ketenagakerjaan. Kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman juga diwarnai dengan kerjasama dengan perusahaan terkemuka Jerman, Siemens terkait teknologi pembangkitan energi dan kerjasama terkait teknologi logistik kelautan dari Jerman yang selama ini unggul. Kerja sama seperti di atas tentunya melibatkan pengembangan SDM.

Saatnya Indonesia belajar dari Jerman terkait pendidikan kejuruan dan penyelenggaraan balai latihan kerja untuk menopang sektor industri. Model pendidikan kejuruan di Jerman yakni *duales system* sukses dan menjadi model ideal bagi dunia. Sangat tepat agenda Presiden Jokowi yang meninjau pusat pendidikan ke-trampilan di Siemenstadt, hal itu bisa dijadikan acuan bagi kementerian pen-

didikan dan kementerian tenaga kerja.

Saat ini, negara Uni Eropa memang sedang menerapkan sistem pendidikan kejuruan dengan sistem baru untuk mengatasi pengangguran kaum muda. Jerman tidak didera oleh masalah pengangguran yang hebat karena memiliki sistem pendidikan kejuruan yang dinamakan *duale ausbildung*. Atau di kalangan internasional itu disebut sebagai *duales system*. Berdasarkan prinsip tersebut para siswa langsung belajar praktek di perusahaan.

Pelajaran teori di sekolah dan praktek kerja di perusahaan mendapat bobot yang sama. Contohnya, perusahaan otomotif Volkswagen telah sukses merekrut 17 ribu calon tenaga kerja dari seluruh dunia untuk mengikuti *duales system* pendidikan. Hingga kini Volkswagen giat menerapkan sistem itu pada semua cabangnya di negara lain.

Sejak 2012 Menteri Pendidikan Jerman Annette Shavan menandatangani kerjasama dengan berbagai negara untuk mengadopsi sistem tersebut. Kerjasama itu menjadikan sekitar 30.000 pemuda ikut serta dalam program pertukaran magang. Di negara-negara mitra akan dibangun 30 jaringan pendidikan kejuruan regional. Target kerja sama di atas adalah sampai tahun 2020 diharapkan 80% anak muda di Uni Eropa bisa mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri disana.

Sikap Terbuka Jerman

Mestinya Indonesia juga tidak ketinggalan dengan hal tersebut, perlu kerja sama baik oleh pihak pemerintah maupun oleh konsultan pendidikan internasional yang ada di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, Jerman memiliki tingkat pengangguran pemuda yang rendah dibawah rata-rata negara maju di dunia yang mencapai sekitar 8%. Apalagi kondisi Eropa akhir-akhir ini sangat rentan krisis ekonomi. Hal itu terjadi di Yunani yang mana satu dari tiga orang pemuda di bawah usia 25 adalah pengangguran.

Jerman juga sangat terbuka dalam hal ketenagakerjaan. Ada kebijakan unik untuk mengundang pekerja asing ke Jerman dengan cara pengakuan

ijazah asing di bidang pekerjaan tertentu. Juga dengan adanya undang-undang yang memberikan insentif kepada tenaga kerja asing berkualifikasi dari negara-negara non Uni Eropa.

Sistem pengembangan profesi dan ketenagakerjaan di Jerman sangat tepat bagi Indonesia menghadapi datangnya bonus demografi. Jerman sangat teliti dalam memproyeksikan angkatan kerjanya. Apalagi di sana ada ancaman menurunnya jumlah penduduk sampai tahun 2030 menjadi sekitar 77 juta, dan sampai tahun 2060 menjadi 65 juta, sehingga dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi dan memperumit pembiayaan jaminan sosial di Jerman.

Pertumbuhan home industri di Jerman menyebabkan negeri itu perlu ratusan ribu tenaga kerja berkualifikasi dari luar negeri setiap tahunnya. Kondisi di atas menunjukkan bahwa pengembangan industri kecil di Jerman sangat berhasil sehingga bisa menjadi pilar perekonomian bersama perusahaan besar.

Ada tren peningkatan minat di kalangan pemuda Indonesia untuk belajar di Eropa. Pada akhir 2014, jumlah mahasiswa Indonesia yang berangkat untuk studi ke Eropa mencapai 5.800 mahasiswa. Jumlah ini mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun 2011 atau meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan 2013. Secara keseluruhan, sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia saat ini sedang belajar di Eropa.

Adanya Partnership Cooperation Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa perlu disertai langkah konkret. Salah satu langkah konkret itu sebaiknya terkait skema offset atau imbal balik dari perusahaan besar Eropa yang mendapatkan kontrak dari Indonesia. Mereka memberikan beasiswa bagi pemuda Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi di Eropa atas biaya perusahaan tersebut.

Bimo Joga Sasongko
President Director & CEO Euro
Management Indonesia; seken
Pengurus Pusat Ikatan Alumni
Program Habibie (IABIE)

BERITASATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga

Chief Executive Officer: Irwan Djaja, General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja

Groups Editorial Board: Theo L Sambuaga, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Didik J Rachbini, Senior Advisor: Samuel Tahir

Sistem Kesempatan Kerja dan Bonus Demografi

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang menerapkan aplikasi *online* informasi kesempatan kerja bertajuk "Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja" patut diapresiasi. Melalui sistem tersebut semua pihak terkait bisa terintegrasi secara *self assessment* dan dapat berkontribusi dalam mengelola kesempatan kerja secara sistemik.



■ Bimo Joga Sasongko

Jumlah penduduk Indonesia pada 2035 mendatang mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk pada 2035 menjadikan Indonesia negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Idealnya, era tersebut menjadi momentum kebangkitan nasional kedua. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun).

Pada 2010, proporsi penduduk usia produktif sebesar 66,5 persen. Proporsi ini terus meningkat mencapai 68,1 persen pada 2028-2031. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan menu runnya angka ketergantungan, yaitu jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif dari 50,5 persen pada tahun 2010 menjadi 46,9 persen pada periode 2028 sampai 2031. Namun, angka ketergantungan ini mulai naik kembali menjadi 47,3 persen pada 2035.

Kontribusi penduduk berusia produktif menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan catatan adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan semakin banyaknya SDM yang berkelas dunia. Antisipasi dan proyeksi yang tepat terhadap bonus demografi akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang signifikan. Kondisi demikian terjadi di Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Brasil, Rusia, Thailand dan India. Khusus untuk Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Korea Selatan, bonus demografi di sana berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 10-15 persen.

Penyediaan data penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan sebagai satu program prioritas nasional

yang berkelanjutan sebaiknya juga memperhatikan faktor tenaga kerja asing dan tren bisnis dunia yang mengedepankan sistem *outsourcing*.

Kasus lima pekerja Tiongkok yang ditahan karena melakukan kegiatan ilegal di Lanud Halim Perdana Kusuma merupakan indikasi serbuan tenaga kerja asing. Selama ini banyak penyimpangan kompetensi TKA, sehingga jenis-jenis pekerjaan teknis rendah saja dicaplok oleh para TKA yang berasal dari Tiongkok. Hal itu terlihat pada megaprojek infrastruktur ketenagalistrikan yakni PLTU. Hal serupa juga terjadi di proyek infrastruktur kereta cepat, hubungan, telekomunikasi dan transportasi. Ironisnya, peran tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam berbagai proyek infrastruktur justru hanya sebatas jenis pekerjaan kasar seperti sopir, satpam, *cleaning service* dan tenaga kasar non teknis lainnya.

Publik sangat kecewa dengan pemerintah, khususnya terhadap Kementerian BUMN yang menyebabkan tukang pengebor tanah untuk proyek infrastruktur saja harus didatangkan dari Tiongkok. Padahal banyak teknis dalam negeri yang mampu mengerjakan *soil test* dan sebagainya.

Peningkatan jumlah TKA yang merambah berbagai sektor di negeri ini membuat berbagai pihak menjadi gusar. Namun, kegusaran tersebut hendaknya tidak memicu kekacauan tetapi harus diantisipasi secara *fair* dan langkah yang sistemik untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan TKA ke Indonesia semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama Januari 2016 menyebutkan bahwa dari warga negara asing (WNA) yang melakukan kunjungan khusus sebanyak 37.900 kunjungan, jumlah WNA bekerja paruh waktu mencapai 25.200 kunjungan. Jumlah WNA yang bekerja paruh waktu itu meningkat 69,3% dibandingkan Januari 2015.

Tak bisa dimungkiri bahwa perluasan lapangan kerja yang sering dinyatakan oleh pemerintah merupakan jenis profesi yang rentan dan kurang memiliki prospek dan daya saing global. Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata para kepala daerah kurang mampu merencanakan portofolio profesi yang harus dikembangkan di daerahnya. Dimana ada jenis profesi kerja yang sudah usang dan jenuh terus diperhatikan. Sedangkan jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia pada masa depan belum dipersiapkan secara baik.

Perlu belajar dari India untuk

mencetak angkatan kerja yang berkualitas dunia dan banyak diminati oleh perusahaan multinasional. Hingga kini tenaga kerja dari India paling banyak diminati dan dicari oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Seperti Microsoft yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan yang berasal dari India. Begitu juga Intel Corp yang memiliki 1.200 karyawan berasal dari lulusan perguruan tinggi di India. Tenaga kerja ahli dari India juga banyak mengisi tempat di perusahaan-perusahaan teknologi di Korea Selatan ataupun Taiwan. Sekadar catatan, India merupakan negara yang menghasilkan jumlah insinyur paling banyak di dunia melampaui Tiongkok.

Persoalan kesempatan kerja dan kondisi hubungan industrial yang masih bermasalah dan kemerosotan portofolio kompetensi di kalangan pekerja Indonesia harus segera diatasi. Pemerintahan Jokowi dituntut lebih efektif dan sistemik mengatasinya.

Dibutuhkan segera postur aparatur sipil negara (ASN) sektor ketenagakerjaan yang ahli dan kredibel terkait *outsourcing*. Postur ASN ketenagakerjaan di daerah harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait proses bisnis di dunia sekarang ini yang telah mencapai tingkat efektivitas yang luar biasa. Tingkatan itu bisa diraih salah satunya karena faktor *outsourcing*. Tak pelak lagi *outsourcing* lintas negara pada saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi globalisasi yang sangat besar dan sedang dipersebutkan oleh berbagai negara yang memiliki SDM yang tangguh. Terkait dengan postur ASN, pemerintah daerah sebaiknya mulai mengirim para pemuda lulusan SMA untuk kuliah di negara maju. Para pemuda itu sejak dini diproyeksikan menjadi andalan untuk meraih beragam jenis *outsourcing* global untuk daerahnya.

Namun, dalam mengejar potensi dan berkah globalisasi itu, sebaiknya memiliki sistem dan regulasi yang baik disertai dengan pengembangan SDM sejak dini khususnya sejak di bangku sekolah menengah diperkenalkan dengan bidang-bidang andalan *outsourcing* global. Para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi luar negeri biasanya lebih adaptif dan cukup waktu menguasai potensi berbagai jenis *outsourcing* dari perusahaan multinasional.

Bimo Joga Sasongko,
President Director & CEO Euro
Management Indonesia. Sekjen
Pengurus Pusat IABIE (Ikatan
Alumni Program Habibi)

SDM Pengelola Aset Daerah

Oleh Bimo Joga Sasongko | Jumat, 12 Agustus 2016 | 8:12



Kasus pembelian lahan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta yang terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta sebaiknya dijadikan momentum untuk membenahi total tata kelola aset daerah. Untuk itu, diperlukan SDM dengan keahlian khusus yang memiliki kompetensi registry aset yang dipadukan dengan sistem manajemen pemeliharaan secara online.

Aset tersebut harus terintegrasi dan menggunakan sistem informasi geografis (Geographical Information System/ GIS). Manajemen aset daerah dengan GIS mengkoordinasikan berbagai informasi secara efisien dan efektif.

Indonesia perlu mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset daerah berbasis GIS yang sesuai dengan best practise dunia. Ada baiknya SDM di atas belajar dari kota-kota di Amerika Serikat dalam mengelola aset yang telah menggunakan standar GIS Esri. Platform GIS Esri diintegrasikan dengan keseluruhan manajemen aset yang memengaruhi aset publik lainnya dan aktivitas kerja, serta merupakan sumber penting pendapatan dan berbagai aspek interaksi publik.

Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktik-praktik lain yang diterapkan pada aset fisik dan non fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum.

Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik yang terdiri atas tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan. Pengembangan SDM yang berkompetensi mengelola aset daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara. SDM pengelola aset daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan.

Selain itu, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Hal itu agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal. Masalah krusial terkait lingkup aset pemerintah daerah dimulai dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut terlihat dalam hasil pemeriksaan BPK yang menemukan berbagai macam penyelewengan aset Pemrov DKI Jakarta.

Pada masa mendatang, rakyat DKI Jakarta membutuhkan seorang gubernur yang mampu mewujudkan optimasi aset kota sehingga bisa bernilai tambah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga kota. Keberadaan dan pengelolaan aset Pemrov DKI Jakarta kini dalam kondisi yang memprihatinkan.

Para pejabat Pemprov DKI belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profit. Akibatnya, tidak sedikit aset daerah yang pindah tangan secara tidak wajar atau dikelola oleh pihak lain dengan sewa yang sangat kecil.

Gubernur dan bupati atau walikota yang menjadi penanggung jawab utama aset daerah harus membangun sistem informasi aset yang sesuai dengan UU. Aset kota perlu segera diinventarisasi agar dapat dicegah adanya tindakan penyelewengan. Sudah sering Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak modus sertifikat ganda yang telah menggelapkan aset negara dan menyebabkan ketidakjelasan status tanah yang berpengaruh terhadap proses pembangunan dan investasi.

Jakarta membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian. Hal itu diperlukan untuk merombak manajemen aset kota. Kepala daerah harus menguasai sistem manajemen aset kota.

Sesuai dengan hakikat "Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return". Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengelolaan aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan (minimize cost of ownership), memaksimalkan ketersediaan aset (maximize asset availability) dan memaksimalkan penggunaan aset (maximize asset utilization).

Bentuk-bentuk optimalisasi pemanfaatan aset kota berupa komersialisasi aset, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG). Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemrov DKI Jakarta.

Perlu tindakan tegas oleh otoritas hukum dan KPK terkait dengan optimasi aset Pemprov DKI Jakarta. Saatnya BPK melakukan audit investigasi terhadap pemanfaatan seluruh aset existing use. Tindakan itu supaya modus yang merugikan negara bisa diusut tuntas. Perlu evaluasi total terhadap perbandingan pendapatan dari aset atau Return on Asset (ROA).

Dari hasil evaluasi terhadap penerimaan dari masing-masing aset tersebut dapat diproses secara hukum. Kepala daerah yang menjadi penanggung jawab utama aset sebaiknya mewujudkan manajemen aset yang modern serta membangun sistem informasi aset kota yang cerdas dan sesuai dengan UU.

Untuk itu diperlukan lima langkah kerja yang terintegrasi. Langkah pertama adalah inventarisasi aset daerah. Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi atau labelling, pengelompokan dan pembukuan.

Langkah kedua adalah legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Langkah ketiga adalah penilaian aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Langkah keempat adalah optimalisasi aset. Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan yang terkandung dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemrov DKI Jakarta diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan.

Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

Langkah yang kelima adalah pengembangan sistem informasi manajemen aset daerah sebagai perangkat cerdas untuk pengelolaan dan pengawasan. Melalui perangkat tersebut, transparansi publik terkait pengelolaan aset bisa terwujud. Selain itu, sistem itu memudahkan auditor BPK dan pendidik KPK dalam menjalankan tugasnya.

Bimo Joga Sasongko, President Director & CEO Euro Management Indonesia

Memanggil Ilmuwan Balik Kandang

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Di hadapan teladan nasional yang diundang ke Istana Merdeka dalam rangka Hari Kemerdekaan, Presiden Joko Widodo menyerukan agar para ilmuwan yang kini bekerja di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air membantu pemerintah. Para ilmuwan memiliki peran yang strategis untuk membangkitkan bangsa.

Seruan Presiden di atas sebenarnya adalah lagu lama yang diputar kembali. Sejak pemerintahan Presiden Soeharto sudah diimbau agar para ilmuwan dan ahli teknik terkemuka yang bekerja di luar negeri supaya kembali ke Tanah Air untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Para ilmuwan itu sempat berbondong-bondong pulang. Namun, kondisinya ternyata cukup memprihatinkan, karena lembaga iptek dan industri yang ada belum mampu menyambut kepulangan mereka secara layak. Mereka belum bisa diberi *job* yang sesuai dengan keahliannya. Pemerintah saat itu juga belum bisa memberikan fasilitas kerja dan imbalan gaji yang sesuai dengan permintaan para ilmuwan yang balik kandang itu.

Kondisinya semakin memprihatinkan karena anggaran Ristek masih kecil dan adanya kebijakan moneter yang membatasi kegiatan industri strategis akibat tekanan lembaga internasional. Akibatnya banyak ilmuwan di atas yang eksodus dari lembaga iptek dan industri strategis. Mereka kembali lagi bekerja di luar negeri atau terpaksa bekerja di dalam negeri tetapi tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Pemerintahan Presiden Jokowi hendaknya tidak sekadar memanggil pulang para ilmuwan yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Perlu juga menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta pengakuan dalam proyek yang jelas



■ Bimo Joga Sasongko

dan konsisten.

Selain memanggil ilmuwan untuk balik kandang, ada hal yang sangat esensial yakni perlunya mencetak ilmuwan sejak remaja. Untuk membangkitkan iptek nasional tidak bisa dengan jalan pintas atau diserahkan begitu saja kepada pasar. Kebangkitan iptek harus disertai dengan menguatkan tradisi ilmiah atau keilmuan bagi kaum remaja. Tradisi keilmuan sejak remaja, atau sejak sekolah menengah sangat perlu untuk menemukan siswa-siswa berbakat lalu diberi kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi yang baik, termasuk mengirimkan mereka ke luar negeri untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka dan

negeri. Setiap kabupaten atau kota setidaknya setiap tahun secara rutin bisa mengirimkan minimal sepuluh siswa berbakat.

Pengiriman remaja berbakat untuk kuliah di perguruan tinggi di luar negeri perlu bekerja sama dengan konsultan pendidikan internasional yang bisa membimbing siswa untuk menguasai bahasa asing seperti bahasa Jerman, Perancis, Jepang. Karena pengajaran bahasa tersebut kini tidak ada lagi di SMA. Selain itu, konsultan pendidikan internasional bisa membantu memberikan materi matrikulasi untuk menyesuaikan materi ajar dan memberikan gambaran tentang budaya dan kondisi sosial dari negara yang akan dituju. Selain itu, membantu para siswa untuk mendapatkan akomodasi hingga pendampingan bilamana perlu.

Kebangkitan iptek nasional bisa berkelanjutan jika ditopang dengan tradisi ilmiah yang kokoh dari para remaja yang duduk di sekolah menengah. Oleh sebab itu, kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh kaum remaja adalah investasi yang sangat besar bagi perjalanan bangsa ini. Para ilmuwan remaja yang tergaung dalam wadah kelompok ilmiah remaja (KIR) sekolah menengah adalah calon ilmuwan unggul.

Di antara ribuan remaja anggota KIR itu, dulu banyak yang mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari Menristek BJ.Habibie untuk kuliah di perguruan tinggi terkemuka du-

seorang inovator TIK dan ahli radar. Adi Sudadi Soembagijo ahli robotika, Fahmi Amhar sebagai peneliti utama Bakorsurtanal, Mikael Satya Wirawan sebagai koordinator proyek rancang bangun pesawat jet N-2130 PT Dirgantara Indonesia. Dan, sederet ilmuwan lainnya.

Para pemimpin dunia, baik pemimpin pemerintahan maupun korporasi semakin mengapresiasi dan bersimpati terhadap kegiatan ilmiah remaja. Beberapa waktu yang lalu kasus Ahmed Mohamed, seorang pelajar di Amerika Serikat berusia 14 tahun ditangkap polisi serta diborgol di depan kawan sekolahnya sempat menyentak perhatian dunia. Perbuatan kreatif dan inovatif Ahmed yang membuat jam digital dalam kotak menimbulkan kecurigaan dari gurunya yang serta merta melibatkan polisi untuk menginterogasi remaja polos itu.

Ada pelajaran yang sangat berharga terkait kasus Ahmed di atas. Kasus Ahmed telah mendapat perhatian luas, termasuk dari Presiden Barack Obama, CEO Facebook Mark Zuckerberg, Google hingga Twitter. Hasilnya Ahmed mendapat undangan silih berganti untuk berkunjung ke Gedung Putih dan ke kantor pusat Facebook, Twitter dan Google.

Bahkan, Presiden Obama menyatakan bahwa Ahmed telah menginspirasi para anak untuk menyukai ilmu alam. Pengajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di sekolah merupakan wahana yang strategis untuk menumbuhkan inovasi nilai dan teknologi. Pengajaran IPA secara ideal di sekolah merupakan investasi masa depan yang tiada taranya bagi suatu bangsa. Itulah credo yang mendasari pemerintah Amerika Serikat yang begitu getolnya melibatkan entitas pendidik untuk terlibat aktif dalam berbagai program riset nasional.

Seperti yang terjadi dalam misi pesawat ruang angkasa Endeavour, di mana salah satu astronotnya adalah seorang ibu guru IPA Sekolah Dasar yang bernama Barbara Morgan. Sudah beberapa dekade program tersebut dilakukan. Sesuatu yang sudah biasa, jika lembaga-lembaga ilmiah di Amerika Serikat selalu memberikan kesempatan kepada para guru sekolah dasar dan menengah untuk terlibat. Seperti program NASA dengan misi penerbangan pesawat Vomit Comet hingga penerbangan ruang angkasa pesawat Endeavour. Keseriusan di atas membuahkan spirit nasional bangkitnya inovasi dan teknologi secara berkesinambungan.

Bimo Joga Sasongko

Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie)

Untuk mengakselerasi kebangkitan Iptek Nasional perlu terobosan baru. Terobosan itu antara lain menjaring siswa SMA yang berbakat untuk mendapatkan kredit beasiswa dari lembaga keuangan atau korporasi dan pemerintah daerah guna melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.

memiliki tradisi ilmiah yang unggul.

Saatnya pemerintah memulai kembali inisiatif BJ.Habibie yang telah berhasil mencetak ribuan tenaga ahli kelas dunia lewat skema Bea Siswa Luar Negeri (BSLN). Tentunya pada saat ini kondisinya sangat memungkinkan untuk membuat skema yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat.

Untuk mengakselerasi kebangkitan Iptek Nasional perlu terobosan baru. Terobosan itu antara lain menjaring siswa SMA yang berbakat untuk mendapatkan kredit beasiswa dari lembaga keuangan atau korporasi dan pemerintah daerah guna melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar

nia. Dan di antara mereka kemudian berperan dalam rancang bangun Pesawat N-250 yang menjadi ikon Hakteknas. Juga berperan dalam berbagai proyek infrastruktur dan program iptek nasional.

Sebagian besar aktivitas kegiatan ilmiah remaja telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan menggeluti profesi sebagai peneliti di berbagai lembaga riset pemerintah maupun perusahaan swasta. Di antara mereka adalah penerima beasiswa Menristek BJ.Habibie untuk kuliah di luar negeri dan berhasil meraih gelar master hingga doktor.

Mereka kini menjadi ilmuwan, inovator dan pemikir yang tangguh. Antara lain, Beno Kunto Pradekso,

Meneropong Kapasitas Pembangunan Indonesia

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Memasuki 2017, segenap elemen bangsa Indonesia perlu menggelorakan optimisme. Menerawang Indonesia 2017 merupakan keniscayaan bahwa kapasitas dan potensi nasional yang ada harus bisa didayagunakan secara optimal. Hasil kerja yang dicapai saat ini belum mencerminkan kondisi riil. Negeri ini masih tumbuh di bawah kapasitasnya. Ibarat pabrik raksasa, kapasitas yang *idle* masih besar. Perlu memperbarui konsep Indonesia Incorporated yang sesuai dengan semangat zaman di mana SDM unggul semakin menjadi andalan.



■ Bimo Joga Sasongko

dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, selalu ada faktor *asymmetrical information* dalam mekanisme kerja pasar bebas, yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri.

Ketimpangan pendapatan penduduk saat ini semakin mengkhawatirkan. Kesenjangan yang makin lebar lantaran kualitas pertumbuhan yang menurun. Selain itu, disebabkan berubahnya locus perekonomian dari sektor *tradeable* yang mencakup sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur yang menyerap tenaga kerja ke sektor *non-tradeable*. Contoh sektor *non-tradeable* antara lain hotel, restoran, transportasi, dan komunikasi yang pangsa pasarnya domestik.

Salah satu instrumen untuk mengoptimalkan kapasitas pajak. Program pengampunan pajak atau *tax amnesty* pada 2017 harus bisa menjaring segala macam profesi. Masih banyak jenis profesi yang belum berpartisipasi untuk menyukseskan program *tax amnesty*. Program ini diharapkan dapat menjadi titik awal perbaikan sistem perpajakan atau reformasi pajak di Indonesia.

Tahun 2017 ini harus mampu mewujudkan sistem pajak Indonesia yang sesuai dengan perspektif ekonomi nasional, sesuai dengan perkembangan zaman, lebih efisien, sederhana, mudah dipahami masyarakat, serta berbiaya rendah baik dalam administrasi pemungutan maupun dalam memenuhi kewajibannya.

Perlu penghormatan terhadap hak-hak wajib pajak. Penghormatan ini tidak hanya tercantum dalam terminologi wajib pajak menjadi pembayar pajak saja, namun menjamin adanya hak-hak wajib pajak yang mendasar.

Pembenahan sistem pajak di Indonesia seharusnya disertai dua faktor mendasar yaitu edukasi perpajakan dan aktivitas riset mengenai pajak. Untuk itu, pemerintah perlu membuka kerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk mencetak lebih banyak ahli pajak. Selain itu, perlu juga pengiriman pegawai Ditjen Pajak belajar ke luar negeri untuk mempelajari sistem perpajakan di negara maju.

SDM perpajakan Indonesia yang berkelas dunia dan memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi sangat penting untuk menghadapi persoalan masa depan yang lebih kompleks. Apalagi perubahan arsitektur pajak yang semakin cepat berpotensi meningkatkan jumlah sengketa pajak di kemudian hari. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 12.000 berkas banding dan gugatan baru di pengadilan pajak.

Memasuki 2017, bangsa Indonesia sudah diperingatkan oleh Bank Dunia bahwa ekspor industri manufaktur Indonesia terus merosot sepanjang waktu. Terutama untuk industri berteknologi tinggi. Tentunya ini sangat menyedihkan bagi SDM Iptek nasional karena tidak tercipta wahana berkarya untuk mereka.

Selain masalah teknologi tinggi, juga mencuat paradoks yang melibatkan terkait dengan impor berbagai jenis perkakas, seperti halnya cangkul yang membanjiri negeri ini. Perkakas atau alat untuk kerja pertanian, pertukangan, pengerjaan bangunan dan kelistrikan sangat penting untuk menggenjot produktivitas bangsa.

Domikasi perkakas impor karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri lokal untuk menguasai dan menerapkan teknologi produksi. Pemerintah harus segera merevitalisasi industri perkakas lokal yang jenisnya sangat banyak dan beragam. Mestinya pemerintah segera membantu permodalan dan aspek teknologi pengusaha lokal. Termasuk penyediaan bahan baku supaya harga produk lokal dapat bersaing. Karena hampir 40% biaya produksi tersebut untuk belanja bahan baku.

Kapasitas nasional industri logam dasar dan perkakas kurang ditangani secara serius. Industri manufaktur atau pengolahan di Indonesia selama ini dikelompokkan menjadi sembilan jenis. Dua jenis di antaranya adalah industri yang membuat produk dari logam. Yaitu industri logam dasar dan industri perkakas dan permesinan. Sebagian besar berdaya saing rendah. Selama ini pemerintah belum optimal melakukan pembinaan sehingga efisiensi produksi dan mutu produk industri masih buruk.

Menurut International Standard Industrial Classification (ISIC), industri logam dasar dan permesinan memiliki nilai tambah manufaktur yang tinggi jika diterapkan standarisasi dan peningkatan kapabilitas teknologi.

Mitigasi Bencana

Aspek lain, kondisi geografis Indonesia sangat riskan terjadi bencana alam khususnya gempa bumi. Seperti gempa bumi 6,4 Skala Richter (SR) yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh yang terjadi di penghujung 2016.

Memasuki 2017, perlu menguatkan kapasitas pusat dan daerah terkait sistem mitigasi bencana

dan manajemen tanggap darurat. Indonesia sebagai negeri yang sering terjadi bencana harus memiliki kemampuan yang baik terkait manajemen penanganan bencana, utamanya terkait durasi yang cepat. Perlu disiapkan teknologi dan peralatan untuk antisipasi gempa bumi yang setiap saat akan terjadi. Manajemen penanganan kerusakan bangunan dan upaya evakuasi korban membutuhkan teknologi dan peralatan.

Bencana gempa bumi yang terjadi berulang kali di Tanah air mestinya semakin memperbaiki manajemen penanganan bencana. Perlu mengadopsi manajemen proyek modern sehingga bisa mereduksi durasi penanganan bencana alam. Usaha untuk mempersingkat durasi penanganan bencana sangat tergantung kepada organisasi dan tatakelola lembaga penanganan bencana.

Ketenagakerjaan

Memasuki 2017 juga diikuti dengan sederet masalah ketenagakerjaan yang berat. Selama ini perluasan lapangan kerja, yang sering dinyatakan oleh pemerintah, merupakan jenis profesi yang rentan dan kurang memiliki prospek dan daya saing global. Maka, tahun 2017 harus menjadi momentum untuk mengembangkan jenis profesi yang berdaya saing regional dan global.

Pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengembangkan portofolio profesi. Jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia di masa depan harus segera dipersiapkan secara baik. Sehingga serbuan tenaga kerja asing (TKA) segera bisa diatasi.

Pada tahun 2017 tidak boleh lagi terjadi penyimpangan kompetensi TKA, sehingga jenis-jenis pekerjaan teknis rendah saja dicaplok oleh para TKA. Hal itu terlihat pada megaprojek infrastruktur ketenagalistrikan. Hal serupa juga terjadi di proyek infrastruktur kereta cepat, bendungan, telekomunikasi dan transportasi. Ironisnya, peran tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam berbagai proyek infrastruktur hanya sebatas jenis pekerjaan sopir, satpam, *cleaning service* dan tenaga kasar non teknis lainnya.

Pemerintah perlu menggalakan program vokasional atau kejuruan yang berbasis *apprentice* untuk membangunkan kapasitas nasional dan nilai tambah raksasa yang masih tertidur. Esensi nilai tambah lokal adalah berbagai aspek produksi atau jasa yang berlangsung di Tanah Air di mana proses pengolahannya menggunakan teknologi dan inovasi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi atau berlipat ganda jika dibandingkan dengan harga bahan mentahnya. Lebih dari itu, bisa memperluas lapangan kerja.

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum IABIE, Pendiri
Euro Management Indonesia.

Mencetak SDM Pengelola Industri

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Saatnya Indonesia memacu industrialisasi manufaktur untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Sayangnya negeri ini kekurangan tenaga ahli dan terampil untuk berbagai sektor industri. Ketika industri manufaktur memasuki tahap yang lebih bernilai tambah, SDM yang tersedia tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan industri.

Laporan McKinsey Global Institute tentang Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar pemilik industri mengalami kesulitan mendapatkan SDM ahli untuk mengelola industri.

Kajian McKinsey juga menyatakan bahwa potensi Indonesia agar ekonominya mampu tumbuh 6% per tahun maka harus mencetak SDM yang memiliki kemampuan yang andal dalam mengelola industri yang bernilai tambah tinggi. SDM tersebut untuk berbagai lini, dari level manajemen hingga tenaga kerja di lapangan yang dididik secara spesifik. Pada 2030 diproyeksikan kebutuhan SDM kategori di atas hingga mencapai 113 juta orang.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bank Dunia yang mendapatkan fakta bahwa 84% pemberi kerja di sektor manufaktur kesulitan mendapatkan karyawan untuk posisi manajerial dan 69% pemberi kerja mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil.

Tahun 2017 sektor industri di negeri ini perlu totalitas membenahi industri pengolahan atau *manufacturing industry* dari skala industri besar hingga UMKM. Dalam konteks industri pengolahan, keunggulan itu berupa peningkatan nilai tambah ekonomi lokal secara signifikan dan dirasakan langsung oleh rakyat luas. Masalah ini tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berpikir dan berusaha keras terhadap industri di daerahnya.

Kebijakan pengetatan impor harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai jenis komoditas. Hal itu bertujuan agar produk impor semakin sulit masuk ke Indonesia sehingga mendorong investasi untuk membangun pabrik dan tumbuhnya industri-industri



■ Bimo Joga Sasongko

yang mampu substitusi produk impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor Indonesia pada November 2016 mencapai US\$ 12,66 miliar atau naik 10% dibandingkan bulan sebelumnya, demikian juga jika dibandingkan dengan November 2015 (*year on year/yoy*) naik 9,88%. Dari sisi negara asal barang impor nonmigas pada Januari-November 2016, Tiongkok menduduki posisi teratas dengan nilai US\$ 27,55 miliar dan pangsa pasar 26,04%, Jepang US\$ 11,84 miliar (11,20%), dan Thailand US\$ 7,95 miliar (7,52%). Sedangkan impor nonmigas dari Asean menca-

jumlah yang besar, variasi produk minimal dan meningkat ketika ada peningkatan waktu. Ketiga, *Lean Production*, yakni penerapan prinsip JIT dan mengurangi kegiatan yang sia-sia untuk meminimalkan biaya produksi. Keempat, *Agile Manufacture*, yakni menekankan pada upaya untuk mengurangi waktu yang didukung oleh kemampuan SDM.

Pemerintah menekankan perlunya memperkuat pendidikan vokasional untuk memenuhi kebutuhan industri. Perlu sinergi yang detail antarkementerian dan juga dengan perusahaan yang bisa mewujudkan *link and match*. Untuk mewujudkan itu perlu kerjasama antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha atau industri yang diwakili oleh Kadin serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep *link and match* pernah dirumuskan oleh Wardiman Djionenggoro yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet Pembangunan VI. Pada saat ini konsep tersebut masih relevan.

Perspektif *link* menunjukkan proses. Yang berarti bahwa proses pendidikan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (*match*) dengan kebutuhan tersebut. Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia

untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT PAL, PT Krakatau Steel pernah mencetak ribuan teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. *Apprenticeship* adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Durasi *apprenticeship* biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk *apprenticeship* adalah mekanisme pembelajaran cangkang atas dasar saling percaya dan kerjasama antarpemangku kepentingan.

Pemagangan berbasis *link and match* sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi. Ini bisa sukses dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standarisasi sekolah menengah, terutama SMK. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah.

Perlu dana yang cukup besar untuk menata pendidikan vokasional yang notabene akan memperluas portofolio kompetensi ketenagakerjaan di Tanah Air. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80% di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih.

Sektor industri pengolahan saatnya memiliki kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tercatat bahwa kontribusi sektor pengolahan dalam perekonomian Indonesia mencapai puncak pada 2004 ketika kontribusi sektor tersebut mencapai kisaran 28%. Meskipun begitu, secara komparatif angka itu bisa dikatakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, puncak dari kontribusi sektor pengolahan di Jepang adalah sekitar 36%, di Uni Eropa sekitar 32% dan di negara-negara industri maju sekitar 30%.

Saatnya bagi pemerintah daerah untuk merancang sebaik-baiknya *link and match* antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan itu, pemda bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal.

Program vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem Apprentice untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat.

pai pangsa pasar 21,57%, sementara dari Uni Eropa 9,18%.

Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan industri nasional menyeimbangkan neraca nilai impor-ekspor secara signifikan. Secara makro ketidakseimbangan ini disebabkan oleh masalah efisiensi dan masalah produktivitas. Perlu merumuskan kembali strategi dasar pelaku industri. Seperti strategi biaya produksi rendah (*low cost leadership strategy*), strategi segmentasi pasar (*focus strategy*) dan strategi diferensiasi produk (*differentiated product strategy*).

Pada era sekarang ini faktor kegesitan atau agilitas industri merupakan keniscayaan. Untuk mewujudkan kegesitan industri nasional dibutuhkan SDM yang mampu mengembangkan fleksibilitas dan kapabilitas manufaktur.

Adapergeseran paradigma dalam industri manufaktur yang meliputi beberapa tahap. Pertama, *Craft Production*, yakni penyelesaian kerja secara individual dengan basis *job by job*. Kedua, *Mass Production*, yakni produksi dilaksanakan untuk memproduksi barang dalam

merdeka hingga kini belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.

Revitalisasi dan reorientasi pendidikan vokasional telah menjadi agenda penting. Presiden Joko Widodo menekankan perlu langkah cepat terhadap vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air. Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait sektor industri unggulan.

Langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan produktivitas nasional lewat revitalisasi program pendidikan vokasional sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Utamanya dengan menambah jumlah guru kejuruan dan meningkatkan kompetensinya. Dengan cara mengirimkan guru-guru SMK ke negara maju yang memiliki industri yang kuat dan mendunia.

Program vokasional berbasis *apprentice* adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem *Apprentice*

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum LABIE, Pendiri
Euro Management Indonesia.

Mencetak SDM Keamanan Siber

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Kementerian Kominfo tengah menjaring warga negara yang memiliki talenta keamanan siber atau *cyber security*. Untuk itu diluncurkan program merekrut 10.000 SDM siber atau biasa disebut tentara siber. Merekalah yang nantinya memiliki kemampuan untuk mengamankan domain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai lini.



■ Bimo Joga Sasongko

curkan atau melumpuhkan sistem dan aset informasi.

Selain mengatasi serangan siber, Basinas juga bertugas menghadapi perang siber (*cyber war*) yang dilakukan secara terkoordinasi dengan tujuan mengganggu kedaulatan negara. Salah satu contoh serangan siber adalah *Worm Stuxnet* terhadap sistem komputer fasilitas reaktor nuklir di Iran. Contoh lain adalah di Amerika Serikat yang pernah mengalami serangan siber yang menyebabkan 25.000 data pemerintah dicuri dan Kantor Gedung Putih sempat mengalami kondisi darurat dan nyaris lumpuh beberapa saat.

Basinas sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber nasional membutuhkan SDM yang tangguh terhadap keamanan siber. Oleh karena itu relevan untuk perlu mencetak SDM

Masih banyak infrastruktur nasional yang terbuka dan telanjang sehingga bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Seperti pembangkit tenaga listrik, pengendali lalu lintas udara, pasar keuangan, pengendali lalu lintas jalan raya dan lain-lain. Untuk mengatasi semua itu dibutuhkan SDM siber yang tangguh tersebar di berbagai lembaga dan tim CERT yang ada di Indonesia. Yang meliputi, pertama, pertahanan siber militer yakni Center of Cyber (COC) Kementerian Pertahanan. Kedua, keamanan publik siber pemerintah (KP-CERT). Ketiga, instansi pemerintah dan badan usaha (I/P/BU-CERT). Keempat, komunitas dan akademik (K/A-CERT).

Kementerian Pertahanan membutuhkan SDM yang andal untuk mengkoordinasikan Center of Cyber (CoC) sebagai unit induk terdepan. Keberadaan CoC diikuti dengan pembentukan unit khusus CERT di setiap angkatan, yakni AD-CERT, AL-CERT, AU-CERT. Setiap angkatan membutuhkan unit yang lebih kecil lagi seperti di kesatuan setingkat batalyon.

Semua itu membutuhkan SDM siber yang memiliki spesialisasi tinggi lewat pendidikan atau pelatihan khusus untuk menghadapi serangan atau perang siber. Sehingga di lapangan mampu bertanggung jawab menjaga jaringannya dan senantiasa mengikuti dinamika modus-modus peretasan, perusakan dan perlindungan jaringan.

SDM siber sekaligus juga me-

Dengan e-Defense bisa dilakukan evaluasi secara cepat dan akurat terhadap postur pertahanan nasional, akuisisi persenjataan yang diperlukan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan. Selama ini evaluasi di atas sulit dilakukan karena harus mengombinasikan alokasi sumber daya nasional yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang eksis dan untuk memulai program modernisasi atau *arnis build-up*.

Program modernisasi sangat mendesak dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kapabilitas militer negeri ini dengan negara tetangga. E-Defense sangat menunjang strategi pertahanan yang kini mengarah kepada transformasi sistem persenjataan ke arah konektivitas. Dengan kata lain kekuatan militer sekarang ini banyak terkandung pada TIK atau *networking* yang mampu meningkatkan kewaspadaan di segala medan.

Tak bisa dimungkiri *internet protocol* (IP) memegang peranan penting dalam jaringan sistem informasi karena bisa menghubungkan komunikasi dari darat, laut, udara, bahkan dari luar angkasa. IP juga memiliki kemampuan untuk membuat bermacam-macam sistem komunikasi. Komunikasi antarmatra pertahanan bisa dijumpai. Selain itu, IP juga bisa diintegrasikan dengan sistem GPS untuk memberikan informasi posisi yang akurat dan *realtime* mengenai keadaan di lapangan.

Eksistensi COC Kementerian Pertahanan sangat penting untuk pengembangan e-Defense. Antara lain untuk memonitor aktivitas operasional di markas dan alutsista hingga menyangkut unit personel terkecil yang sedang bertugas di lapangan. Seperti dalam hal penjagaan terhadap garis perbatasan dan pulau-pulau terluar yang membutuhkan personel infanteri yang tangguh dan modern.

Beberapa konsep pasukan infanteri masa depan tidak terlepas dari dunia TIK. Personel pasukan infanteri masa depan harus dilengkapi alat navigasi dan komunikasi digital, perangkat komunikasi taktis untuk suara dan data serta persenjataan baru yang termonitor secara baik. Pasukan infanteri masa depan merupakan *integrated fighting system individual*. Perangkat yang melekat pada personel infanteri di garis depan itu berupa persenjataan, helm, komputer, *digital and voice communications*, sistem penanda posisi dan navigasi, pakaian pelindung serta perlengkapan personel.

Kelengkapan lain berupa GPS dan *pedometer dead recording system* yang dapat mengikuti gerak prajurit di lapangan. Dengan perangkat yang demikian maka wilayah perbatasan dan pulau terluar bisa diamankan dengan baik.

Bimo Joga Sasongko
Lulusan North Carolina
State University, Pendiri Euro
Management Indonesia,
Ketua Umum IABIE

Indonesia harus segera mencetak SDM siber untuk memperkuat matra tempur baru. Dengan demikian dari aspek pertahanan negara, Indonesia kini memiliki empat matra pertahanan, yakni angkatan darat, laut, udara, dan dunia maya (siber).

siber dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan. Para diaspora Indonesia yang selama ini bergerak dalam bidang teknologi informasi dan teknologi di perusahaan terkemuka dunia bisa direkrut untuk memperkuat Basinas.

Indonesia harus segera mencetak SDM siber untuk memperkuat matra tempur baru. Dengan demikian dari aspek pertahanan negara, Indonesia kini memiliki empat matra pertahanan, yakni angkatan darat, laut, udara, dan dunia maya (siber).

Sistem keamanan siber untuk setiap negara diawasi dan dikoordinasikan oleh *Computer Emergency Response Team* (CERT) yang berpusat di Amerika Serikat. Di Indonesia yang selama ini menjadi *country coordinator* untuk CERT adalah ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure). Namun selama ini lembaga ini belum mampu menjangkau keseluruhan pertahanan dan keamanan *cyber space*.

neguhkan sistem e-Defense yang pada saat ini telah menjadi doktrin militer global. Solusi masalah pertahanan harus ditangani dengan optimalisasi teknologi informasi. Solusi tersebut antara lain perlu segera mewujudkan *electronics defense system* atau e-Defense. Pengembangan teknologi e-Defense menuju *integrated digitalized battlefield* bagi ke-4 matra pertahanan negara.

Mencetak jumlah SDM siber juga untuk mengembangkan sistem pertahanan negara yang menekankan faktor geostrategis, baik ke dalam maupun ke luar. Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh didasarkan atas konsep *unified approach* yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan faktor geostrategis ke luar memerlukan kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang tangguh melalui pengembangan TIK dan sistem peringatan dini.

Demi suksesnya program di atas, dilakukan *roadshow* di sepuluh kota besar di Tanah Air. Rekrutmen SDM keamanan siber terutama difokuskan bagi generasi muda. Mereka akan dididik lalu diterjunkan untuk menjaga keamanan informasi di Indonesia.

Dari sepuluh ribu tentara siber akan dipilih seribu orang untuk diberi sertifikat khusus. Dan bagi seratus orang terbaik akan dilatih secara khusus dalam *Digital Camp*, lalu diberikan peran untuk membantu industri strategis dan lembaga pemerintah dalam sebuah program yang bertajuk *Born to Control*.

Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dalam hal penggunaan internet selama ini belum dibarengi dengan pembentukan tentara siber. Akibatnya kondisi dunia maya sangat riskan dan berpotensi terjadinya kejahatan dan serangan yang bisa merugikan bangsa dan kepentingan masyarakat.

Selama ini garda terdepan keamanan siber adalah Subdirektorat Cyber Crime Bareskrim Polri. Namun jumlah personelnnya hingga 2016 sangat terbatas, hanya sekitar 25 orang. Sebagai pembandingan jumlah SDM keamanan siber di Tiongkok mencapai 18.000 orang. Untuk mewujudkan keamanan siber, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membentuk Badan Siber Nasional (Basinas). Badan ini dimaksudkan untuk mengatasi serangan siber (*cyber attack*) dan memberantas berbagai macam kejahatan dunia maya.

Serangan siber terjadi ketika intensitas dan skala ancaman siber meningkat dan berubah dari ancaman yang bersifat potensial menjadi aktual berupa kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk memasuki, menguasai, memodifikasi, mencuri, merusak, menghancu-

Menata Kerja Sama RI-AS

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Hasil kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence di Indonesia janganlah berlalu begitu saja. Pertemuan Wapres Pence dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya diharapkan membuahkan hasil yang konkret dan berkelanjutan.

Perlu menata kembali kerja sama Amerika Serikat (AS) dengan Republik Indonesia (RI), utamanya bentuk kerja sama yang lebih esensial terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kerja sama dan bantuan AS terkait pengembangan SDM di masa lalu sangat berarti bagi negeri ini. Pemberian beasiswa kepada pemuda untuk kuliah di perguruan tinggi AS sangat bermakna dan telah mendorong kemajuan dan mencerahkan iklim demokrasi.

Program beasiswa tersebut juga melahirkan para cendekiawan terkemuka. Seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Ahmad Syaf'i Ma'arif yang terkenal dengan julukan tiga Pendekar Chicago. Mereka itu generasi gelombang pertama yang mendapat beasiswa di Universitas Chicago.

Kunjungan Wapres Pence yang didampingi istrinya, Karen Pence dan dua putrinya ke Masjid Istiqlal, lalu melakukan dialog dengan pemuka lintas agama, mengandung makna yang dalam. Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya melakukan negosiasi secara *government to government* atau *business to business*. Tetapi harus bisa mendayung di antara dua karang untuk menata kembali hubungan kedua negara lewat diplomasi publik.

Diplomasi publik di antara kedua negara perlu diperbanyak. Diplomasi tersebut bisa berupa pemberian beasiswa kepada generasi muda, pertukaran remaja, membina diaspora, hingga memperbanyak kerja sama antar kota dalam skema *sister city*.

Dengan diplomasi publik yang efektif maka hubungan kedua negara menjadi kokoh dan saling pengertian. Sehingga kesalahan pemahaman dan fenomena *outrageous fallacy* terhadap AS atau sebaliknya bisa diatasi. Yakni sebuah fenomena penyetsan pengertian terhadap suatu negara, sehingga menimbulkan ketidakserasian karena kesalahpahaman.

Fenomena tersebut seperti terjadi baru-baru ini terkait dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan daftar negara curang yang manipulasi mata uang demi menggenjot eksportnya ke AS.



■ Bimo Joga Sasongko

Yang mana hingga saat ini Indonesia masih berada dalam deretan daftar negara curang penyebab defisit neraca perdagangan AS. Sementara Tiongkok sudah dicoret dari daftar berkat diplomasi publik yang efektif. Selama ini Indonesia mengandalkan ekspor ke AS, selain komoditas, juga ada pakaian jadi, sepatu, dan produk lainnya. Segala macam barang bermerek Nike diproduksi di Indonesia. Begitu juga dengan produk-produk pakaian jadi yang diproduksi di sini, banyak yang diberi merek Indonesia dan merek AS. Hal ini seharusnya dilihat secara mendalam oleh Pemerintah Presiden Trump.

Kunjungan Wapres AS merupakan momentum menata kerja sama terkait SDM Iptek kedua negara. Kerja sama SDM Iptek perlu diperluas. Banyak ahli dari Indonesia yang berkarya di negara Paman Sam dan mendapat posisi strategis di sana sebagai ilmuwan

task force untuk mengelola sistem *offset* kedua negara. Apalagi produk pesawat Boeing Company banyak digunakan oleh maskapai di Indonesia. Begitu juga dengan pesawat militer buatan Lockheed Martin seperti F-16 telah dipakai oleh TNI.

Tentunya perlu skema *offset* yang lebih baik lagi dengan Boeing yang bermarkas di Chicago, Illinois, dengan fasilitas produksi terbesarnya di Everett, Washington, dekat Seattle, Washington.

Definisi *offset* secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai X dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai Y dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut sebaiknya segera didetalkan.

Skema *offset* mencakup transfer teknologi, *co-production* atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri atas *direct offset* dan *indirect offset*. *Direct offset* merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan *indirect offset* atau biasa disebut *offset* komersial biasanya berbentuk *buyback*, bantuan pemasaran/pembelian alat-alat yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Kerja sama lainnya yang tidak kalah penting bagi kedua negara adalah terkait dengan bidang pertambangan. Perlu solusi yang tepat untuk membantu SDM pertambangan nasional, misalnya pekerja PT Freeport Indonesia yang kini sedang

Freeport pusat dan Mitsubishi dari Jepang. Metode Mitsubishi banyak dipakai oleh usaha smelter karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, perlu mengirimkan pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk mendalami *mining safety and processing technology* di AS maupun Jepang.

Seluruh pemangku kepentingan pertambangan di Indonesia berkewajiban mengembangkan SDM yang berdaya saing global. SDM kelas dunia sangat penting mengingat Indonesia menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan tambang. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), menempatkan Indonesia pada peringkat keenam sebagai negara kaya akan sumber daya tambang. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi teratas untuk proyek-proyek pertambangan baru, diikuti oleh Filipina dan Vietnam.

Nilai industri pertambangan Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$ 200 miliar pada 2019. Dengan potensi sebesar ini, kesiapan SDM dan kematangan rencana pembangunan smelter untuk memajukan sektor pertambangan sangat dibutuhkan.

Bagaimanapun sektor pertambangan tetap akan menjadi sumber utama devisa Indonesia, dengan melihat potensi sumber daya mineral yang masih luas untuk digarap baik oleh perusahaan lokal maupun asing. Selain usaha dari pihak swasta, dukungan dari pemerintah berupa kemudahan dan keringanan bagi para investor smelter akan menjadi faktor pendukung yang signifikan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan smelter nasional.

Indonesia masih membutuhkan ratusan smelter yang kapasitas dan teknologinya seperti yang dimiliki *smelting* di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas smelter atau pengolahan hasil tambang ini memiliki kapasitas satu juta ton konsentrat per tahun.

Pemetaan SDM

Kondisi SDM pertambangan nasional perlu dipetakan lagi. Pemetaan untuk mengetahui spesifikasi keahlian atau keterampilan serta untuk membantu bagi mereka yang tidak terasap lagi. Bagi yang terencana PHK perlu penyaluran ke usaha pertambangan lainnya.

Saatnya bagi Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait lainnya untuk menata lagi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pertambangan. Standar kompetensi ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja Indonesia. Saat ini standar kompetensi bagi para tenaga kerja khususnya yang bekerja di industri pertambangan mineral dan batubara masih terbatas. Akibatnya juga berpengaruh dalam penilaian produktivitas secara global karena masih terbatasnya baku mutu acuan yang digunakan untuk menilai kualitas produk atau proses yang dihasilkan.

Bimo Joga Sasongko
Lulusan North Carolina State University, ketua umum LABIE.

Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya bersinergi dengan para diaspora Indonesia di AS untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Tanah Air. Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada.

berkelas dunia.

Para ilmuwan lulusan AS lainnya siap untuk bersinergi membentuk jejaring *Indonesia integrated* untuk memajukan Iptek. Lewat *Indonesia integrated*, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung atau melalui perusahaan/organisasi tempat mereka bekerja.

Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya bersinergi dengan para diaspora Indonesia di AS untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Tanah Air. Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada. Di lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan *Indonesia integrated*.

Kerja sama SDM Iptek AS-RI sebaiknya diawali dengan pembentukan

bermasalah padahal memiliki kompetensi yang baik.

Seyogianya perlu menyegarkan profesi pertambangan di Tanah Air dengan cara magang di AS atau negara lain yang selama ini menjadi afiliasi tambang. Langkah pertama dengan cara menambah keahlian di bidang bahasa asing terkait bidang pertambangan. Untuk itu, perlu peran lembaga atau konsultan pendidikan internasional untuk menambah keahlian bahasa asing bagi SDM pertambangan.

Kemampuan berbahasa asing sangat menunjang penguasaan teknologi pertambangan. Apalagi sebagian besar investasi proyek smelter atau pengolahan bahan mentah tambang merupakan pihak asing yang membawa teknologi dan proses produksinya yang berbasiskan dari negaranya.

Contohnya fasilitas smelter PT Freeport Indonesia yang ada di Kota Gresik bekerja sama dengan

Diaspora dan Potensi Outsourcing Global

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Tujuan utama kongres adalah untuk menghimpun potensi yang dimiliki para diaspora Indonesia agar bisa memberikan nilai tambah dan pemikiran strategis bagi pembangunan di Tanah Air.



■ Bimo Joga Sasongko

arahkan rezeki globalisasi *outsourcing* ke Tanah Air. Untuk itu pemerintah harus memiliki sistem dan regulasi yang baik disertai dengan pengembangan SDM sejak dini. Khususnya sejak di bangku sekolah menengah diperkenalkan dengan bidang-bidang yang dibutuhkan *outsourcing* global. Biasanya para diaspora lebih adaptif dan menguasai potensi *outsourcing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Apalagi Presiden Jokowi memberi perhatian serius terhadap pengusaha alih daya atau *outsourcing*. Untuk itu disiapkan program untuk mengembangkan lebih luas industri jasa termasuk *outsourcing* sebagai salah satu program unggulan pemerintah.

Hal itu mengingat jumlah angkatan kerja yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2016 mencapai angka 127,8 juta jiwa.

Jumlah pengangguran akan mengalami penurunan yang berarti berkat *outsourcing*. Dengan itu para *fresh graduate* juga mendapatkan pelatihan kerja secara insentif sebelum disalurkan ke perusahaan rekanan.

Pelaku usaha *outsourcing* hendaknya jalankan bisnisnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Saatnya Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) membenahi standar kualifikasi perusahaan. Juga perlu membentuk regulasi persyaratan pengguna perusahaan *outsourcing*, membuat regulasi

standarisasi manajemen *fee*, dan hal teknis lainnya. Hal itu agar sistem *outsourcing* di Indonesia berkeadilan bagi karyawan, maupun perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pemerintah bersama asosiasi dan organisasi buruh perlu program cepat untuk mengembangkan *business process outsourcing* (BPO). Sehingga usaha *outsourcing* tidak kalah dengan negara tetangga seperti Filipina. Negara tetangga ini mampu mendapatkan peluang usaha tersebut hingga mencapai US\$ 25 miliar dalam satu tahun. Bidang *outsourcing* yang berpotensi didapat dari pasar global antara lain sektor grafis, animasi, aplikasi *software*.

Sektor ketenagakerjaan kini ditentukan oleh perkembangan bisnis global yang sangat dinamis. Ditandai dengan migrasi tenaga kerja antarnegara. Daya saing tenaga kerja asing (TKA) yang lebih kompetitif memaksa tenaga kerja lokal harus meningkatkan kompetensi dan kemampuan berbahasa asing.

Tak bisa dimungkiri perluasan lapangan kerja yang sering dinyatakan oleh pemerintah merupakan jenis profesi yang rentan dan kurang memiliki prospek dan daya saing global. Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata para kepala daerah kurang mampu merencanakan portofolio profesi yang harus dikembangkan di daerahnya. Di mana ada jenis profesi kerja yang sudah ketinggalan zaman tetapi luput dari perhatian. Sedangkan jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia di masa depan belum dipersiapkan secara baik.

Pemerintahan dituntut lebih efektif meningkatkan daya saing tenaga kerja. Apalagi pada era 2020 hingga 2030 terjadi fenomena bonus demografi, di mana usia produktif penduduk Indonesia mencapai puncaknya. Bonus demografi harus dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan SDM bangsa terutama bagi kaum buruh.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6% dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk pada 2035 tersebut menjadikan Indone-

sia negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun). Idealnya era tersebut menjadi momentum untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi dan daya saing ketenagakerjaan yang berstandar global.

Tak pelak lagi *outsourcing* lintas negara pada saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi globalisasi yang sangat besar dan sedang dipersebutkan oleh berbagai negara yang memiliki SDM yang tangguh. India adalah contoh negara yang mampu merebut potensi global tersebut. Karena SDM di sana dipersiapkan dengan baik. Utamanya dengan cara spesialisasi ketenagakerjaan dan penguasaan bahasa asing.

Memajukan usaha *outsourcing* harus disertai pembenahan SDM perdesaan. Untuk membenahi SDM perlu terobosan yang luar biasa. Dan berani banting setir dengan program pembangunan yang ada.

Masalah pemerataan pembangunan yang paling krusial terdapat di perdesaan. Kebangkitan nasional yang paling esensial adalah dengan cara membangkitkan SDM di perdesaan. Dan membangkitkan proses nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) yang tersedia di masing-masing daerah.

Saatnya membangkitkan SDM di perdesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Perlu terobosan untuk membangkitkan SDM perdesaan lewat pendidikan. Seperti yang pernah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, agar mengirim para lulusan SMK kejuruan perikanan dari daerah terpencil untuk kuliah di Jepang guna mendalami teknologi budidaya mutiara dan proses nilai tambahnya. Terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diapresiasi dan diperluas.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Ketua Umum Ikatan
Alumni Program Habibie (IABIE)

Format Pendidikan Karakter

Oleh Bimo Joga Sasongko

Presiden Joko Widodo mengatakan pendidikan anak sebaiknya tidak hanya diberikan di ruang kelas. Tapi juga bisa dilakukan di luar sekolah dengan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa kemuliaan. Pernyataan itu disampaikan pada Rakor Pimnas 2017 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sleman, DIY.

Jokowi meminta guru menanamkan pendidikan karakter. Sebab, pendidikan karakter penting untuk pembentukan etos kerja, kejujuran, integritas, unggul dan memiliki semangat pantang menyerah, serta kerja keras. Presiden Joko Widodo juga menekankan soal perubahan kondisi bangsa di masa depan. Menurutnya, generasi Z akan mengubah peta politik dan ekonomi secara nasional dalam waktu 5-10 tahun ke depan.

Sistem pendidikan nasional mesti diarahkan untuk membentuk karakter anak yang unggul dan sesuai dengan tantangan zaman. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.

Karakter unggul berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti punya kepercayaan diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, inovatif, dan mandiri.

Penerapan kurikulum sebaiknya disertai dengan transformasi pendidikan. Transformasi tersebut kini sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan *N-Fluence* atau *Net Fluence* yang sedang melanda generasi muda. Mereka kesehariannya tidak bisa lepas dari internet. Jaringan itu kini merevolusi pembelajaran. Dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif.

Perlu program unggulan pemerin-



■ Bimo Joga Sasongko

tan untuk membangun sistem yang mendukung terwujudnya lingkungan pembelajaran generasi Z alias *next generation learning environment*. Yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, administrasi, serta interaksi dan kolaborasi antara guru, siswa, orangtua, komunitas, dan sekolah yang lebih efektif dan murah.

Perkembangan pembelajaran di negara maju diwarnai dengan penerapan *Multiuser Virtual Environment* (MUVE) yang merupakan berbagai model virtual dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga bermacam perkembangan iptek bisa divirtualisasikan secara menarik. Hal ini sangat menggalakan para siswa untuk menekuni disiplin ilmu dengan cara yang lebih praktis dan menyenangkan. Ibarat melakukan tamasya ilmu pengetahuan, setiap hari sekolah menjadi hal yang sangat mengasyikan siswa.

Pembangunan karakter bangsa perlu format atau metode yang efektif sehingga bisa diserap dengan baik oleh generasi saat ini. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendidikan Pengu-

tan Karakter perlu segera diterbitkan.

Pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter. Betapa penting faktor pendidikan itu karena mentalitas seseorang dapat dibangun dengan baik dan terarah. Pendidikan karakter siswa memerlukan proses kreatif dan daya inovatif sesuai dengan kondisi kekinian.

Pembentukan karakter unggul siswa memerlukan waktu belajar yang lebih panjang. Karena para siswa perlu presentasi diri mengenai gagasan dan ide-idenya di dalam kelas. Presentasi dari masing-masing siswa perlu dilakukan agar percaya diri dan lebih memahami pelajaran serta bisa mendorong kreativitas.

Presentasi siswa tentang ide dan karyanya sejak awal tahun 80-an telah menjadi perhatian para guru besar seperti Profesor Andi Hakim Nasution yang setia menjadi dewan juri Lomba Penelitian Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan LIPI. Bahkan, Menteri Pendidikan seperti Daed Joesoef, Nugroho Notosusanto hingga Fuad Hasan juga berkenan mengikuti presentasi yang dilakukan oleh para siswa sekolah menengah. Presentasi seperti telah membuka jalan lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing secara global.

Di masa depan para guru harus intens membimbing presentasi siswa setelah menyerap pelajaran. Presentasi lebih hebat lagi jika memakai bahasa asing.

Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana para pemuda berkreasi dan berinovasi sesuai dengan tren dunia. Seperti yang tergambar dalam kajian lembaga pendidikan terkemuka di Amerika yakni Harvard Business, yang menekankan pentingnya mendorong daya saing pemuda di bidang sistem inovasi dan produksi.

Perlu totalitas untuk membangun ruang kreativitas sekolah. Negeri ini

membutuhkan sebanyak banyaknya tokoh muda inovator untuk menuju kejayaan bangsa. Inovasi segala macam disiplin ilmu dan keanekaragaman budaya. Baik inovasi tingkat dunia maupun tingkat lokal yang memiliki arti strategis dalam kehidupan berbangsa.

Sekolah adalah sarana yang tepat untuk menumbuhkan budaya inovasi. Oleh sebab itu, perlu strategi kebudayaan bagi sekolah yang fokus terhadap budaya inovasi. Menumbuhkan budaya inovasi di kalangan siswa jangan hanya bersifat seremonial. Kegiatan inovatif sebaiknya dilakukan oleh siswa dalam bentuk yang bervariasi.

Pada prinsipnya sumber inovasi, baik itu produk atau proses, merupakan proses belajar. Agar siswa mampu melakukan kegiatan inovatif maka harus ada upaya meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologinya, yaitu dengan memperkuat kapasitas *learningnya*.

Dalam persaingan global yang sangat ketat diperlukan berbagai *right brain training* untuk menggenjot daya kreativitas siswa. Budaya inovasi dengan titik berat proses kreatif dan inovatif sebaiknya menjadi muatan kurikulum di sekolah.

Saatnya melihat dengan jernih kondisi riil pendidikan di negeri ini. Pemerintah bertekad bahwa hakikat pendidikan untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul. Makna pendidikan bukan hanya untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan bangsa yang sifatnya sangat teknis dan bersifat kekinian semata. Melainkan pendidikan untuk mewujudkan peradaban unggul dalam ekosistem global.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Ketua Umum Ikatan
Alumni Program Habibie (IABIE).

Kemerdekaan dan Industri Pertahanan

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Kedaulatan negara merupakan manifestasi kemerdekaan bangsa yang paling hakiki. Tantangan untuk menjaga kedaulatan wilayah RI semakin kompleks sehingga membutuhkan infrastruktur dan alutsista yang modern. Oleh karena itu, dibutuhkan industri pertahanan dengan kondisi yang agilitas atau tangkas.

Spirit HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72 menjadi momentum untuk meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi perbatasan. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan secara optimal sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.

Industri pertahanan itu meliputi industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan industri bahan baku.

Dalam merealisasikannya tentu perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan visi bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. SDM lokal harus memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks ini, industri pertahanan nasional mensyaratkan pula penyelenggaraan dan pengelolaan secara terpadu. Kasus korupsi yang terkait pembelian helikopter



■ Bimo Joga Sasongko

Agusta Westland (Heli AW 101) yang didatangkan dari pabrik Inggris-Italia merupakan indikasi bahwa pengembangan alutsista selama ini belum searah dengan keberadaan industri pertahanan. Pengadaan heli dinyatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Heli tersebut pintunya bukan *ramp door*, padahal PT DI sebagai salah satu industri pertahanan bisa membuat heli seperti yang ditentukan dalam spesifikasi.

Makna peringatan HUT kemerdekaan sangat relevan dengan kondisi dan tantangan hankam pada saat ini. Seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa lanskap politik global dan ancaman

gantara Indonesia merupakan tantangan besar bagi industri pertahanan. Perlu sinergitas antara industri pertahanan dengan TNI AU terkait dengan rencana strategis pengadaan alutsista.

Rencana strategis itu tidak bisa terlepas dari pengembangan SDM. Pengembangan meliputi personel TNI AU maupun kalangan sipil yang menggeluti teknologi penerbangan dan infrastruktur pendukungnya. Dalam Renstra ditegaskan program untuk peremajaan atau penggantian alutsista antara lain pesawat F-5E/F Tiger II yang diproyeksikan pada dua kandidat utama, yaitu Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Rusia, dan F-16 Viper buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat.

Selain itu, pemutakhiran armada pesawat angkut berat kelas C-130 Hercules, helikopter angkut berat dan pemutakhiran pesawat latih jet jenis T-50i dari Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Alat pertahanan negara perlu pula melengkapi dengan radar dan sistem persenjataan.

Dalam era kompetisi global, tantangan TNI AU makin dinamis. Terutama terkait perkembangan kompetisi kedaulatan wilayah udara. Kompetisi sengit tersebut ditunjukkan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok yang telah mengembangkan pesawat pembom nuklir untuk meraih superioritas udara.

Dalam era kompetisi global, tantangan TNI AU makin dinamis. Terutama terkait perkembangan kompetisi kedaulatan wilayah udara. Kompetisi sengit tersebut ditunjukkan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok yang telah mengembangkan pesawat pembom nuklir untuk meraih superioritas udara.

hankam sudah berubah. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM untuk antisipasi perubahan itu.

Postur SDM bidang hankam ditantang kemampuannya untuk bisa menghasilkan metode pengamanan yang paling tepat untuk Indonesia. Hal itu seperti dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pembekalan kepada perwira remaja TNI/Polri, di Mabes TNI.

Program pengadaan alutsista menurut Presiden Jokowi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal itu, misalnya, pengadaan tank pun harus dievaluasi karena mungkin saja saat ini sudah kurang diperlukan, diganti dengan drone atau pesawat nirawak.

Mewujudkan kedaulatan dir-

santara harus segera diatasi.

Saatnya kita meneguhkan Wawasan Nusantara yang kini sangat tergantung kepada SDM yang menguasai infrastruktur pemantau yang andal dalam menjaga wilayah negara. Sistem pemantau terintegrasi dalam C4ISR (*Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) yang mengedepankan *drone* atau pesawat tanpa awak dan sebaran radar di titik-titik rawan, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi.

Drone yang biasa disebut *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebenarnya bisa segera direalisasikan karena sudah ada rancang bangun yang dilakukan oleh BPPT, PT Dirgantara Indonesia, dan LAPAN. Bahkan, jika satelit rancang bangun LAPAN sudah selesai, hal ini sangat menunjang operasional *drone*.

Pemerintah perlu mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional. Khususnya sinergi dan integrasi radar yang dimiliki oleh pihak militer maupun sipil. Alutsista radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan keamanan, faktor keselamatan penerbangan dan kejahatan ekonomi. Dukungan alutsista radar itu, dalam kondisi mendesak, akan memungkinkan dan memudahkan mendatangkan bantuan armada pesawat tempur atau armada kapal dalam waktu yang cepat dan sasaran yang tepat.

Putra-putri Indonesia sudah menguasai teknologi membangun radar yang canggih. Hal itu ditunjukkan oleh pakar teknologi radar yakni Beno Kunto Pradekso yang kini menjadi CEO PT Dua Empat Tujuh yang selama ini fokus usahanya adalah rancang bangun radar, terutama pengembangan jenis *array* radar.

Pada saat ini dibutuhkan penyempurnaan dan penambahan alutsista radar TNI. Seperti jenis Thomson tipe TRS 2215R yang ditempatkan di sepanjang garis pantai Pulau Sumatera menghadap Selat Malaka, antara lain di Sabang, Lhokseumawe, Sibolga, dan lain-lain. Begitu juga radar yang ditempatkan di Kepulauan Natuna yang berfungsi memonitor wilayah di sekitar Laut Tiongkok Selatan.

Kita perlu berupaya dan bergerak cepat untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja radar nasional. Selama ini usaha optimasi tersebut terkendala masalah klasik. Yakni proporsi keterlibatan industri pertahanan nasional.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri *Euro Management Indonesia*, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Para insinyur teknik penerbangan Tiongkok berhasil membuat sejumlah pesawat tempur canggih seperti jet tempur generasi kelima Chengdu J-20, pesawat pembom nuklir berteknologi stealth Xian H-8, dan pembom strategis jarak jauh Xian H-6, dan masih merancang pesawat pembom strategis berteknologi stealth yang bisa mencapai daratan AS, yakni H-20. Selain itu, pesawat pembom canggih yang bisa membawa nuklir dan memiliki kecepatan hipersonik.

Untuk menjaga wilayah udara diperlukan SDM unggul yang memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan sistem radar nasional. Kurangnya radar untuk memantau cuaca dan mengawasi wilayah Nu-

Guru dan Efektivitas Anggaran Pendidikan

Oleh **Bimo Joga Sasongko**

► Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-72, sekaligus juga sebagai peringatan Hari Guru Nasional (HGN).



■ **Bimo Joga Sasongko**

Pada puncak peringatan bertempat di Lapangan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, dan dihadiri oleh puluhan ribu guru, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya yang tinggi dalam pengembangan profesi guru dan terus memperbaiki kesejahterannya.

Peringatan HGN selalu diwarnai dengan masalah klasik terkait kualitas guru. Jumlah guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mencapai 3 juta orang. Jumlah tersebut sebagian besar sedang menunggu proses sertifikasi. Banyak yang kurang menyadari bahwa kualitas dan standar profesi guru yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dengan cara uji sertifikasi, sejatinya bukanlah tujuan akhir. Melainkan titik awal lintasan profesi guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan progres yang lebih terukur.

Sebagai titik awal, sertifikasi mesti disertai dengan tingkat kesejahteraan dan pengembangan karier guru secara progresif. Indonesia jangan kalah dengan Malaysia yang sangat bersemangat mengembangkan profesi guru dengan cara mengirimnya belajar ke berbagai negara.

Para guru dari daerah yang memiliki prestasi tinggi sebaiknya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru tersebut sebelumnya diberi kesempatan meningkatkan kemampuan berbahasa asing beserta pengetahuan kebudayaan dan karakter bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan.

Insentif untuk guru sebaiknya tidak hanya berupa uang. Tetapi juga berupa kesempatan untuk kuliah lagi atau kursus keahlian tambahan di negara maju dan pusat peradaban dunia. Insentif tersebut bisa mengatasi sikap guru yang selama ini pragmatis dan menganggap sertifikasi semata hanya untuk menggapai tunjangan profesi demi meningkatkan penghasilan.

Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah koordinasi Menteri Keuangan sebaiknya menekankan asas keadilan. Yakni dengan menyelenggarakan program beasiswa bagi guru berprestasi untuk belajar atau magang ke negara maju. Sejak LPDP dibentuk, publik melihat belum banyak menyentuh kepentingan para guru. Masyarakat melihat bahwa program di atas terkesan elitis dan cenderung berpihak kepada yang

kaya dan orang kota besar. Terlebih mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat *Letter of Acceptance* (LoA) atau *conditional letter* dari perguruan tinggi luar negeri.

Sementara itu, para guru dari desa dan pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk mendapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih.

Arah dan sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa mengakomodasi para guru dalam mengembangkan kariernya. Pengelola LPDP harus mampu mengarahkan segenap usahanya guna ikut mencetak guru masa depan.

Program sertifikasi guru perlu pembenahan sesuai dengan perkembangan pendidikan global. Apalagi penelitian Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud) menyatakan bahwa tunjangan profesi guru yang sudah berjalan selama ini kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Bertahun-tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menjadi wadah profesi guru berjuang untuk meletakkan anggaran pendidikan nasional dalam posisi yang tepat. Namun selalu terpental akibat turbulensi politik anggaran yang tiada henti. Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum terkait dengan implementasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20% seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945.

Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi 20% anggaran pendidikan secara tepat. Karena selama ini persentasi anggaran tersebut dalam praktiknya di daerah sering bias sasaran. Bahkan anggaran pendidikan banyak yang dimasukkan dalam pos dana alokasi umum (DAU). Sehingga alokasinya kurang relevan untuk sektor pendidikan.

Karena kurangnya pengarahan dari pemerintah pusat terkait implementasi anggaran pendidikan maka banyak

daerah yang melakukan bias sasaran. Padahal, jika anggaran pendidikan itu dilaksanakan secara konsisten, maka tidak ada lagi gedung sekolah yang bobrok dan semua guru kondisinya melek teknologi karena infrastruktur dan alat peraga pendidikan yang canggih bisa terpenuhi.

Kompetensi guru harus segera dibenahi secara totalitas. Karena banyak guru yang kinerjanya masih rendah. Ketika uji kompetensi dasar (UKG) dijalankan masih banyak yang di bawah standar nasional yang ditentukan. Ironisnya, meskipun UKG rendah, tapi tunjangan profesi guru tetap diterima.

Pada saat ini ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi guru. Yakni sebagai bagian dari pendidikan profesi keguruan, bagi mereka calon pendidik. Dan pelaksanaannya berdiri sendiri bagi mereka yang pada saat diundangkannya UUGD sudah berstatus sebagai pendidik. Sertifikasi guru dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio masih punya kesempatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Tak bisa dimungkiri lagi bahwa banyak guru yang kondisi kesehariannya bertolak belakang dengan pengembangan profesionalitas. Yakni semakin banyak guru yang jauh dari buku-buku aktual, hilangnya kebiasaan diskusi, menulis, apalagi melakukan riset atau penelitian ilmiah. Impitan ekonomi dan kurang kondusifnya budaya kerja membuat para guru hanya bisa menghitung hari.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, ketua umum IABIE.

Mengapresiasi 60 Tahun Hubungan RI-Jepang

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Hubungan antara Indonesia dan Jepang pada 20 Januari 2018 genap berusia 60 tahun. Peringatan hubungan tersebut ditandai dengan logo yang menggambarkan bendera kedua negara yang dipadu serasi dengan gambar tokoh perwayangan Arjuna dan rangkaian Bunga Sakura. Keduanya merupakan ikon kebudayaan kedua negara.

Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Jepang-RI menentang tagline "Kerjasama, Maju bersama" dalam rangka Japan-Indonesia Strategic Partnership.

Kontribusi Jepang terhadap pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang sangat berarti. Kondisi globalisasi dan persaingan bangsa-bangsa mengharuskan bangsa Indonesia mengoptimalkan dan memperbarui hubungan internasional, khususnya dengan Jepang.

Kerjasama kedua negara di bidang perdagangan, investasi, kebudayaan, pariwisata, ristik, hingga ketenagakerjaan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman.

Penyesuaian tersebut tentunya sangat tergantung kepada kesiapan SDM yang berkompeten dan mampu menghadapi disrupsi yang tengah melanda dunia. Untuk itu, pemerintah Jepang perlu ikut serta memperkuat SDM Indonesia demi kebutuhan pembangunan.

Pada saat ini Dubes Jepang untuk Indonesia Ishii Masafumi tengah berusaha keras menjamin keamanan dan kelancaran usaha bagi sekitar 19 ribu warga Jepang yang menetap di seluruh Indonesia. Juga memperlancar aktivitas 1.800 perusahaan Jepang yang eksis di



■ Bimo Joga Sasongko

Indonesia.

Perusahaan Jepang di Indonesia memiliki kontribusi besar di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan tersebut perlu didorong agar menambah investasinya. Bagi perusahaan Jepang yang terkendala dengan masalah teknis dan ketenagakerjaan perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat. Sehingga perusahaan tersebut tidak hengkang ke negara lain atau merelokasi pabriknya.

Kondisi globalisasi mulai ditandai dengan gelombang disrupsi teknologi yang mengganggu sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu antisipasi dini terjadinya trans-

gai aspek lainnya yang selama ini sudah dilakukan.

Penguatan kerja sama Indonesia-Jepang dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan SDM pembangunan infrastruktur begitu urgen. Meskipun jumlah mahasiswa/pelajar Indonesia ke Jepang dari 2012 hingga 2016 meningkat, namun jumlahnya kurang signifikan. Hingga 2016 jumlah pemuda Indonesia yang belajar di Jepang hanya 4.630 orang, atau sekitar 1,9% dari jumlah total mahasiswa asing yang belajar di sana.

Kita menjadi iri melihat kenyataan jumlah mahasiswa warga negara Tiongkok di Jepang mencapai 98.483 orang (41,1%), dan Vietnam mencapai 53.807 orang (22,4%). Menimbang faktor luas wilayah Indonesia, jumlah penduduk dan skala pembangunan infrastruktur dan aktivitas sosial, pariwisata dan budaya, mestinya jumlah orang Indonesia yang belajar ke Jepang paling tidak bisa mencapai 50 ribu orang.

Dibutuhkan dorongan dan kemudahan (*affirmative action*) untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang dengan cara yang *extraordinary*. Perlu mencari terobosan skema pembiayaan mahasiswa. Seperti misalnya dengan cara skema *offset* (imbal beli) yang pernah dijalankan oleh Presiden RI ketiga BJ Habibie. Di mana skema *offset* mencakup

dan proyek lainnya.

Habibie Way menekankan *transfer of technology* (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Dengan demikian perusahaan dan industri Jepang yang ada di Indonesia bisa lebih cepat berkembang karena tersedia SDM yang berkompeten dalam jumlah yang cukup. Apalagi selama 10 tahun terakhir perusahaan asing di sini selalu kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Merupakan misi penting Dubes Ishii untuk mewujudkan *strengthen education partnership* Jepang-RI. Terutama di bidang pengembangan SDM di garis depan pembangunan infrastruktur, usaha mitigasi bencana, intelijen investasi serta antisipasi era industri 4.0. Yang mana negara Jepang tentunya sudah sangat siap dan menjadi *leader* dalam menyongsong era tersebut.

Apalagi pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat meluncurkan kebijakan pengembangan vokasi untuk memenuhi kompetensi SDM atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kalangan industri.

Pemerintah Jepang perlu mengulurkan bantuan terhadap guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program vokasi bagi dunia industri. Pemberian beasiswa terhadap guru ke luar negeri sangat berguna untuk *benchmarking* dengan pendidikan yang ada di negara maju.

Terkait dengan sumber daya alam (SDA), perlu transfer teknologi SDM pertambangan dari Jepang. Terutama untuk investasi proyek smelter atau pengolahan bahan mentah tambang. Seperti contohnya fasilitas smelter PTFI yang ada di Kota Gresik Jatim yang bekerja sama dengan Mitsubishi dari Jepang. Metode Mitsubishi banyak dipakai oleh usaha smelter karena lebih efisien dan ramah lingkungan.

Bangsa Jepang dan Indonesia memiliki nasib yang sama terkait dengan potensi bencana alam. Untuk itu kerjasama di bidang mitigasi bencana merupakan keniscayaan. Apalagi Dubes Ishii memiliki pengalaman dan kompetensi yang banyak terkait program penanganan bencana alam. Diharapkan Jepang terus membantu usaha bangsa Indonesia untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Sebaiknya pemerintahan kedua negara memakai kembali Habibie Way terkait perdagangan maupun perjanjian kontrak pembangunan infrastruktur dan proyek lainnya. Habibie Way menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.

formasi ketenagakerjaan dari tenaga manusia kepada mesin/robotika yang didukung oleh teknologi *Artificial Intelligence*. Dampak transformasi tersebut akan segera dirasakan pada sektor transportasi, logistik, layanan pelanggan, dan layanan konsumen.

Usia 60 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia perlu menitikberatkan *strengthen education partnership*. Di samping *strengthen economic partnership* dalam berba-

transfer teknologi, *co-production* atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Saatnya penguatan kerja sama Jepang-RI dengan menambah secara signifikan mahasiswa Indonesia yang belajar ke Jepang. Sebaiknya pemerintahan kedua negara memakai kembali *Habibie Way* terkait perdagangan maupun perjanjian kontrak pembangunan infrastruktur

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management Indonesia. Ketua Umum IABIE.

Tahun Rekonsiliasi SDM Transportasi

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Memasuki tahun 2018 diharapkan terwujud rekonsiliasi bagi sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi. Hal itu seperti yang telah diharapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang tengah berusaha sekuat tenaga melakukan rekonsiliasi antara angkutan konvensional dan angkutan daring. Konflik antar-SDM transportasi di negeri ini yang selama ini terjadi sangat tajam dan meluas di berbagai kota, pada 2018 diharapkan bisa terjadi



■ Bimo Joga Sasongko

kondisi *zero sum game*. Konflik tersebut membuat keduanya rugi, begitu juga dengan masyarakat. Angkutan daring masih banyak kekurangannya dalam hal aksesibilitas aplikasi. Aplikasi masih mudah dimanipulasi dan cenderung menghindari pajak. Seperti halnya kegiatan ekonomi bawah tanah.

Kiranya perlu audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap aplikasi angkutan daring. Hal itu agar tata kelola usaha dan perlindungan konsumen terjaga dengan baik. Apalagi pembuat dan pemilik aplikasi adalah pihak asing yang berpotensi menyedot dana masyarakat secara mudah. Dalam waktu singkat investor asing mendapat keuntungan besar jika usahanya tidak mengalami konflik berkepanjangan dengan pengusaha angkot konvensional.

Pemerintah daerah perlu menggalakan difusi inovasi layanan daring atau aplikasi terhadap perusahaan angkutan umum konvensional. Keniscayaan, aksesibilitas pada angkutan daring menimbulkan perluasan dan diversifikasi yang besar pada usaha logistik lokal hingga nasional. Sistem logistik dan jasa kurir segera menyatu dalam platform bersama. Jasa pengiriman paket, produk hingga bahan baku industri telah menjadi kegiatan *insourcing* yang volumenya semakin membesar dari waktu ke waktu.

Aksesibilitas sangat tergantung pada daya inovasi suatu bangsa. Pemerintah perlu mendorong terwujudnya platform otentik yang khas

Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai macam aplikasi untuk bermacam usaha dan konten lokal.

Saatnya seluruh elemen bangsa menyambut bangkitnya era platform dengan kondisi faktual di dalam negeri. Mengingat platform merupakan ekosistem yang sangat berharga dan berpengaruh yang dapat dengan cepat dan mudah mengukur, mengubah dan menggabungkan *planck* atau fitur-fitur baru, pengguna, konsumen, vendor dan rekanan.

Semakin menjamurnya perusahaan rintisan atau *start-up* yang membangun platform dan *planck* yang lebih kolaboratif akan mampu merangkul konsumen secara efektif. Kapasitas inovasi nasional maupun inovasi daerah perlu diarahkan untuk menciptakan platform yang searah dengan perkembangan ekonomi digital. Para inovator negeri ini perlu mengatasi fenomena *application is eating the world*.

Kapasitas inovasi juga perlu mengkaji lebih dalam fenomena *long tail economic*, yang merupakan pergeseran ekonomi, dalam hal ini produk utama dan pemimpin pasar yang jumlahnya hanya beberapa menuju *niche-niche* kecil yang jumlahnya banyak. Pergeseran seperti itu diprediksi akan meningkat berbanding lurus dengan waktu. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya biaya produksi dan distribusi khususnya dalam bisnis *online*.

Layanan transportasi berbasis aplikasi memang kurang sinkron dengan UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perlu mencari solusi terkait irisan krusial antara aspek inovasi teknologi dengan aspek hukum dan regulasi. Solusi tersebut hendaknya bisa atasi rintangan pengembangan SDM transportasi terkait inovasi teknologi dan ekonomi digital.

Perlu antisipasi sebaik mungkin terkait sistem *online* dan berbagai macam aplikasi yang menyuburkan bermacam modus ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah cenderung menghindari pajak dan kewajiban tertentu. Ekonomi bawah tanah adalah aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar dalam lembaga resmi. Modus di atas ini sudah memakai sistem *online*. Ekonomi bawah tanah menyebabkan sulitnya pemerintah membuat ukuran

yang pasti mengenai transaksi dan nilai tambah yang harus dikenai pajak. Karena nilai transaksi dan aktivitas tersebut tidak tercatat.

Inovasi tentang aplikasi layanan jasa akan terus berkembang dan membutuhkan kreativitas terus menerus. Bisa jadi inovasi angkutan daring akan tumbang dengan kreativitas model bisnis yang baru.

Ada model bisnis yang menarik terkait dengan asumsi di atas. Hal itu bisa kita lihat di kota Paris, di sana ada model bisnis yang menyewakan sepeda secara gratis.

Model bisnis yang dikenal dengan istilah *Velib*, kependekan dari *velo libre* atau sepeda gratis. Usaha itu telah beroperasi pada 1.451 stasiun dengan jumlah sepeda yang dioperasikan mencapai ratusan ribu. Model gratis di atas sangat menguntungkan masyarakat dan para wisatawan dalam aktivitas transportasinya.

Sementara operator sepeda gratis di atas juga memperoleh keuntungan dari sisi yang lain, seperti kerja sama mutual dengan pusat perbelanjaan atau restoran di sekitar pangkalan sepeda gratis. Karena data menunjukkan bahwa pemakai sepeda gratis tersebut cenderung membelanjakan uangnya di dekat pangkalan sepeda tersebut.

Sistem usaha transportasi dan logistik ke depan pada prinsipnya merupakan jaringan fasilitas dan sistem informasi logistik dan angkutan yang menghubungkan hulu sampai dengan hilir. Arah tersebut kini juga diwarnai dengan adanya aktivitas *insourcing*. Beberapa perusahaan multinasional kini tidak sekadar mengirim paket, melainkan juga menangani berbagai aspek logistik secara modern dan terpadu hingga ke unit-unit kecil.

Transformasi bisnis dan pengembangan SDM transportasi perlu *training* yang efektif. Transformasi bisnis dan SDM transportasi harus terpadu dengan infrastruktur transportasi seperti terminal, depo bahan bakar dan depo pemeliharaan. Juga infrastruktur logistik seperti pergudangan, fasilitas kontrol mutu dan infrastruktur penunjang lainnya.

Bimo Joga Sasongko

Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE

Arti Penting Asia Selatan bagi Indonesia

Oleh Bimo Joga Sasongko

Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja ke negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dalam kunjungan itu Presiden mengetahui bahwa pasar ekspor di Asia Selatan masih belum digarap dengan baik.

Setelah kunjungan kerja ke Asia Selatan, Presiden menyampaikan kekecewaannya terkait dengan kinerja ekspor yang menjadi tugas dan lingkup tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Presiden kecewa lantaran nilai ekspor RI ketinggalan jauh dari negara tetangga yang tergabung dalam Asean.

Kinerja ekspor Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Padahal kapasitas nasional dan aset sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar. Data menunjukkan Thailand mampu menghasilkan US\$ 231 miliar dari hasil ekspor. Angka itu tertinggi di Asia Tenggara. Nilai ekspor Malaysia mencapai US\$ 184 miliar, dan Vietnam sebesar US\$ 160 miliar. Sementara itu, Indonesia sebagai negara besar hanya mendapat US\$ 145 miliar dari ekspor. Pendapatan ekspor Indonesia tersebut jelas merupakan paradoks yang menyedihkan.

Selama ini Indonesia mengabaikan pangsa pasar non-tradisional. Padahal pasar ekspor tradisional sudah stagnan, mestinya kita segera memperluas sayap untuk menciptakan pasar baru. Antara lain ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan benua Afrika.

Kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah negara di Asia Selatan melahirkan arti perlunya menggarap potensi yang selama ini terabaikan. Meskipun negara di Asia Selatan adalah negara berkembang yang didera masalah kependudukan yang rumit, tetapi memiliki hubungan yang istimewa sejak Indonesia merdeka dan potensi perdagangan yang luar biasa.

Ada delapan negara yang terletak di Asia bagian selatan yaitu India, Pa-



■ Bimo Joga Sasongko

kistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Maladewa, Nepal, dan Sri Lanka. India adalah negara terbesar di kawasan ini dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak.

Kemitraan Indonesia dengan negara Asia Selatan seperti India cukup signifikan. Indonesia perlu saling mempelajari terkait pembangunan manusia, terutama pengembangan SDM di India. Serta cara India membangun intelektual bangsanya dan menyiapkan angkatan kerja berdaya saing global dan para diasporanya mampu menarik investasi yang berbentuk proyek *outsourcing* global. Begitu juga sistem pendidikan India yang sangat adaptif dengan tuntutan zaman.

Indonesia layak belajar dari diaspora India. Banyak di antaranya yang berhasil menjadi pemimpin korporasi dan organisasi global di luar negeri. Diaspora India berkontribusi bagi negaranya sekitar US\$ 180 miliar per tahun. Sementara itu, diaspora Indonesia baru bisa mendatangkan devisa sekitar US\$ 9 miliar.

Saat ini tren dunia menunjukkan bahwa pengelolaan SDM bangsa telah bertransformasi dari *human resources* menjadi *human capital*. Di mana manusia tidak lagi menjadi pekerja pasif, tetapi secara aktif mengembangkan diri mencari sesuatu, berkreasi dan berinovasi

untuk terus bersaing.

India berhasil membangun modal intelektual bangsanya. Salah satunya terlihat dari strategi yang agresif dalam industri penerbitan. Betapa seriusnya pemerintah India mengembangkan industri penerbitan.

Terlihat dengan usaha pengembangan National Book Trust (NBT). Lembaga semacam BUMN yang dibentuk pada 1957 oleh Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru. Buah dari keseriusan pemerintah India adalah tingginya minat baca masyarakat di sana. National Book Trust of India sukses dalam mempromosikan buku dan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat India.

Kesuksesan di atas diikuti dengan berkembangnya industri perbukuan India yang omzetnya lebih dari 30 miliar rupee India (setara dengan US\$ 685 juta) yang didukung oleh sekitar 15.000 penerbit. Dengan jumlah penerbit sebesar itu, India dapat memproduksi sekitar 70.000 judul buku per tahun dan 40% di antaranya adalah buku-buku berbahasa Inggris.

Saatnya belajar dari India untuk mencetak angkatan kerja yang berkualitas dunia dan banyak diminati oleh perusahaan multinasional. Hingga kini tenaga kerja dari India paling banyak diminati dan dicari oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Microsoft, misalnya, memiliki lebih dari 2.000 karyawan yang berasal dari India. Begitu juga Intel Corp yang memiliki 1.200 karyawan berasal dari lulusan perguruan tinggi di India. Tenaga kerja ahli dari India juga banyak mengisi tempat di perusahaan-perusahaan teknologi di Korea Selatan ataupun Taiwan. Sekadar catatan, India merupakan negara yang menghasilkan jumlah insinyur paling banyak di dunia, melampaui Tiongkok.

Sebagai catatan penting, negara-negara di dunia telah menyusun agenda perdagangan dan investasi lebih agresif. Selain itu, mereka didukung oleh SDM investasi dan

perdagangan yang memiliki pengalaman dan keahlian global.

Selama ini SDM India sangat gesit dan unggul dalam persaingan merebut potensi *outsourcing* global. Dengan demikian, arah ketenagakerjaan di Indonesia harus terkait proses bisnis di dunia sekarang ini yang telah mencapai tingkat efektivitas yang luar biasa. Tingkatan itu bisa diraih salah satunya karena faktor *outsourcing*. Tak pelak lagi *outsourcing* lintas negara pada saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi globalisasi yang sangat besar dan sedang diperebutkan oleh berbagai negara yang memiliki SDM yang tangguh.

India adalah contoh negara yang mampu merebut potensi global tersebut. Sebab, SDM di sana dipersiapkan dengan baik. Utamanya dengan cara spesialisasi ketenagakerjaan dan penguasaan bahasa asing.

Untuk mengejar potensi globalisasi itu Indonesia sebaiknya memiliki sistem dan regulasi yang baik disertai dengan pengembangan SDM sejak dini. Khususnya sejak di bangku sekolah menengah diperkenalkan dengan bidang-bidang andalan *outsourcing* global. Para mahasiswa di perguruan tinggi juga harus dipersiapkan agar lebih adaptif dan menguasai potensi *outsourcing* yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional.

Presiden Jokowi telah memberi perhatian serius terhadap pengusaha alih daya atau *outsourcing*. Program untuk mengembangkan lebih luas industri jasa termasuk *outsourcing* sebagai salah satu program unggulan pemerintah.

Saatnya membenahi standar kualifikasi perusahaan dan regulasi persyaratan pengguna perusahaan *outsourcing*. Tujuannya adalah agar sistem *outsourcing* di Indonesia berkeadilan bagi karyawan dan perusahaan. demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Ketua Umum IABIE.

Mendongkrak Indeks Pendidikan

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 menjadi momentum mencari solusi untuk mendongkrak indeks pendidikan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah "Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan".

Esensi menguatkan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari isu strategis pendidikan dan kebudayaan, yakni ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru. Selain itu, pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah; kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional; membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; serta penguatan pendidikan karakter dan sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.

Peringatan Hardiknas kali ini diwarnai dengan permohonan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dianggap terlalu sulit oleh para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemerintah memang menaikkan tingkat kesulitan soal UNBK tahun ini dan menerapkan *High Order Thinking Skills* (HOTS). Penerapan HOTS untuk mendorong siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Hingga kini kita sangat prihatin melihat Indeks Pendidikan Indonesia yang masih rendah. Kualitas SDM Indonesia masih kalah dengan negara anggota Asean yang lain. Hal itu bisa dilihat dari hasil tes di lapangan. Dibanding Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam, dalam hal tiga jenis tes untuk kategori membaca, matematika, sains, alhasil Indonesia ada di bawah. Bahkan kalau diuji seluruhnya, kita jauh tertinggal dibanding dengan Vietnam.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan peneli-



■ Bimo Joga Sasongko

tian *Right to Education Index* (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara. Hasil penelitian menyatakan indeks kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Filipina.

Bangsa ini tidak boleh mengingkari kenyataan berada di peringkat bawah dalam hal pendidikan. Justru kondisi riil itu harus menjadi cambuk untuk mengejar ketertinggalan hingga peringkat naik signifikan. Mestinya tidak boleh cengeng dengan penerapan HOTS dalam UN.

Kondisi yang memprihatinkan juga ditunjukkan dari hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang menunjukkan posisi Indonesia di urutan 64 dari 72 negara yang disurvei. Penilaian dilakukan terhadap performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, ilmu pengetahuan dan membaca. Tujuannya

untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak demi peningkatan metode pendidikan dan hasilnya di setiap negara.

Melihat hasil survei di atas kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan *leapfrogging* dalam mengembangkan SDM nasional. Dibutuhkan program nasional yang *massive action* di bidang pendidikan yang bisa mencetak atau membentuk secara massal SDM kelas dunia.

Salah satu cara untuk mengatasi terpuruknya indeks pendidikan adalah menerapkan sistem pembelajaran kontekstual. Di negara maju *Contextual Teaching And Learning* (CTL) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya.

Sistem CTL membantu guru mengaitkan antara materi ajar dan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Ciri pembelajaran kontekstual adalah siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai sosok yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau kelompok dan orang yang dapat belajar sambil berbuat (*learning by doing*).

Sistem CTL menggunakan metode penilaian yang autentik (*using authentic assessment*). Penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama proses belajar mengajar. Adapun bentuk-bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah portofolio. Portofolio merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan siswa dalam konteks belajar di kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan untuk mengerjakan tugas tersebut supaya lebih kreatif.

Mereka memperoleh kebebasan dalam belajar. Selain itu, portofolio juga memberikan kesempatan lebih luas untuk berkembang serta memotivasi siswa. Penilaian ini tidak perlu mendapatkan penilaian angka, melainkan melihat pada proses siswa sebagai pembelajar aktif.

Penguatan pendidikan sangat tergantung proses sertifikasi guru. Jumlah guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mencapai 3 juta orang. Jumlah tersebut sebagian besar sedang menunggu proses sertifikasi. Banyak yang kurang menyadari bahwa standar profesi guru yang digariskan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UGD) dengan cara uji sertifikasi sejatinya bukanlah tujuan akhir. Melainkan titik awal lintasan profesi guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan progres yang lebih terukur.

Sebagai titik awal, sertifikasi mesti disertai dengan tingkat kesejahteraan dan pengembangan karier guru secara progresif. Indonesia jangan kalah dengan Malaysia yang sangat bersemangat mengembangkan profesi guru dengan cara mengirim ke berbagai negara. Para guru dari daerah yang memiliki prestasi tinggi sebaiknya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru tersebut sebelumnya diberi kesempatan meningkatkan kemampuan berbahasa asing beserta pengetahuan kebudayaan dan karakter bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan.

Insentif untuk guru sebaiknya tidak hanya berupa uang. Tetapi juga berupa kesempatan untuk kuliah lagi atau kursus keahlian tambahan di negara maju dan pusat peradaban dunia. Insentif tersebut bisa mengatasi sikap guru yang selama ini pragmatis dan mengangap sertifikasi semata hanya untuk menggapai tunjangan profesi demi meningkatkan penghasilan.

Bimo Joga Sasongko
Lulusan North Carolina State University, pendiri Euro Management Indonesia, dan ketua umum IABIE

Pilkada Serentak dan Visi Indonesia 2030

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Pemungutan suara Pilkada serentak 2018 di 171 daerah yakni kabupaten, kota dan provinsi dilaksanakan pada 27 Juni. Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara tersebut sebagai hari libur nasional.



■ Bimo Joga Sasongko

Pilkada jangan sekadar mekanisme untuk rebutan kekuasaan di daerah. Tetapi harus menjadi spirit dan pendorong untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah. Bagi generasi muda mempunyai semangat zaman dan calon pemimpin masa depan hendaknya memetik spirit Pilkada dan jangan golput. Generasi muda sebaiknya memilih pemimpin daerah yang memiliki mentalitas disiplin yang tinggi, ulet dan memiliki agilitas atau kegesitan meskipun menghadapi bermacam rintangan dan hambatan.

Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dalam kondisi suka cita. Bukan kondisi yang penuh ketegangan dan saling curiga. Kemenangan dalam Pilkada seyogianya menjadi kolektivitas kebangsaan yang mampu meraih kemenangan bangsa dalam bentuk konkret menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030.

Para cendekiawan dan beberapa lembaga dunia yakin dengan skenario Indonesia 2030 yang berhasil menjadi negara maju dengan pendapatan perkapita mencapai US\$ 15 ribu. Skenario itu berhasil jika segenap bangsa Indonesia mampu mewujudkan disiplin yang tinggi, pikiran yang cemerlang dan etos kerja yang hebat.

Pelaksanaan Pilkada harusnya disertai dengan makna silaturahmi

untuk merawat jiwa besar Persatuan Indonesia yang telah digariskan para pendiri bangsa. Dengan silaturahmi, tercipta hubungan personal maupun sosial yang lebih baik.

Dibutuhkan semangat dan nilai baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kemajuan bangsa bisa terwujud dengan mentalitas kerja keras dan terus menerus berpikir cerdas. Semua itu demi berhasilnya skenario Indonesia 2030. Kita perlu berpikir keras, dan terus berinovasi sembari terus melakukan tinjauan perekonomian Indonesia hingga 2030. Untuk mewujudkan skenario di atas memang sangat sulit dan berat.

Betapa beratnya mewujudkan tatanan kemajuan Indonesia 2030. Kita bisa mengkaji data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan tahun 2016 Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun. Sementara pendapatan per kapita baru mencapai Rp 47,96 juta atau US\$ 3.605. Kemudian dalam rilis BPS berikutnya, perekonomian Indonesia 2017 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 51,89 juta atau US\$ 3.876.

Menurut kaedah yang dianut internasional, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2030 jika memiliki klasifikasi sebagai negara berpendapatan tinggi (*High Income Country/HIC*)

dengan pendapatan perkapita US\$ 15 ribu. Untuk itu dibutuhkan SDM bangsa yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi dengan sumber pertumbuhan yaitu sektor manufaktur yang tangguh dan bernilai tambah tinggi.

Ada sementara pihak yang kurang yakin dengan skenario Indonesia 2030 bisa terwujud karena melihat data yang mustahil bisa dicapai. Mengingat butuh keajaiban untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 13% guna mencapai pendapatan perkapita US\$ 15 ribu dengan pertimbangan depresiasi rupiah 0,8% dan pertumbuhan penduduk 1,1%.

Kalangan yang pesimis menyatakan bahwa angka-angka di atas mustahil atau sulit diwujudkan. Namun sebagai bangsa pejuang yang dilandasi dengan keimanan yang tinggi kita harus yakin terhadap skenario kemajuan Indonesia 2030.

Untuk itu segenap bangsa harus bekerja keras dan memeras pikiran agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap/MIT*) yang menyebabkan tidak bisa masuk sebagai negara industri maju berpendapatan tinggi. Karena kehilangan sumber dan *power* yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari laju inflasinya.

Untuk lepas dan terbebas dari jebakan MIT tidak ada jalan selain menyiapkan SDM bangsa yang inovatif dan berdaya saing Iptek. SDM bangsa tersebut harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersumber pada industri manufaktur dengan mesin penggerak produktivitas yang tinggi. Platform nilai tambah produksi yang tinggi dan terwujudnya UMKM berorientasi ekspor, itu merupakan keniscayaan untuk mewujudkan skenario Indonesia 2030.

Spirit Pilkada menjadi pembaruan tata kelola diri, organisasi dan pemerintahan ke depan untuk lebih maju dari sebelumnya. Spirit Pilkada juga menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas kecendekiawanan, baik kecendekiawanan birokrasi, keluarga, hingga para pelajar dan mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin masing-masing di bidangnya.

Makna Pilkada juga sangat penting untuk memperbarui program reformasi pendidikan di daerah. Meskipun anggaran pendidikan nasional sudah mencapai 20% dari APBN, tetapi belum menghasilkan postur ideal SDM nasional yang berdaya saing global. Karena kemampuan pejabat dan SDM daerah masih belum sesuai dengan standar tata kelola pendidikan.

Reformasi pendidikan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa. Kebangkitan nasional bisa diwujudkan, seperti prediksi lembaga internasional PricewaterhouseCoopers (PwC) yang merupakan konsultan dan jasa profesional terbesar di dunia saat ini.

PwC pada tahun 2017 mengeluarkan hasil kajian dan prediksi bahwa Indonesia berdasarkan *Market Exchange Rate* (MER) diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi peringkat ke-9 PDB terbesar di dunia atau menjadi peringkat ke-8 berdasarkan *Purchase Power Parity* (PPP).

Prediksi PwC tersebut bisa menjadi kenyataan dengan syarat jika bangsa Indonesia memiliki strategi pembangunan yang tepat yang didukung oleh tersedianya jumlah SDM terbarukan berdaya saing Iptek.

SDM tersebut tidak hanya berprofesi sebagai birokrat, tetapi yang lebih penting SDM unggul tersebut juga mau terjun secara total sebagai pengusaha atau wiraswasta berbasis lokal.

Sesuai dengan teori pakar ekonomi David Mike Dallen yang menyatakan bahwa suatu negara akan bangkit dan terwujud kemakmuran bila jumlah pengusaha cukup tinggi. Pada saat ini jumlah pengusaha Indonesia baru 3,10% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 225 juta. Sebagai pembandingan, jumlah pengusaha di Singapura telah mencapai 7,2%, Malaysia 5%, dan Thailand 4,5%. Dengan demikian untuk mencapai kebangkitan dan kemakmuran di Indonesia perlu meningkatkan sepuluh kali lipat atau mencetak lagi sekitar 8 juta *start-up* atau perusahaan rintisan selama tiga tahun ke depan.

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro Management Indonesia.

Urgensi Calon Legislatif Kader Pembangunan

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019 pada 17 Juli lalu. Pengumuman daftar calon tetap dari 16 peserta pemilu dijadwalkan pada 21-23 September 2018. Akankah Republik ini akan memiliki lembaga legislatif yang berintegritas dan bobot profesionalitas yang baik?

Berdasarkan tahapannya, KPU membuka pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019 sejak 4 Juli lalu dan berakhir 17 Juli. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), partai politik (parpol) menyerahkan daftar bakal calegnya ke KPU di masing-masing tingkatan. Dari daftar bakal caleg ini diwajibkan terdapat 30% perwakilan perempuan.

Bakal caleg harus memasukkan data lewat Sistem Informasi Calon (Silon) agar masyarakat bisa menilai dan memberi masukan. Tujuan lainnya, untuk mencegah tidak ada lagi bakal caleg ganda baik di parpol, daerah pilihan maupun pada tingkatan dewan perwakilan.

Setelah proses pendaftaran, KPU akan melakukan tahapan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon dan menyampaikan hasilnya kepada partai politik peserta pemilu. Parpol diberi kesempatan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengejutan bakal calon pengganti pada 22-31 Juli 2018. Pengumuman daftar calon tetap akan dilakukan pada 21-23 September 2018. Sedangkan pemilihan legislatif (pileg) akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019 di seluruh Indonesia.

Pada 2019 adalah pertama kalinya pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan dalam waktu berbarengan. Maka, selain menyiapkan caleg, parpol juga diwajibkan dengan agenda pengajuan calon presiden dan wakil presiden, 4-10 Agustus 2018. Kesiapan parpol akan diuji di hari pengumuman suara pada 17 April 2019.

Rakyat saat ini pantas prihatin karena hingga kini negeri ini belum memiliki lembaga legislatif yang memiliki integritas dan bobot profesionalitas yang baik.

Oleh karena itu, partai politik perlu mempertimbangkan pemilihan caleg yang tidak hanya sebagai calon atau petinggi partai serta berlatar selebritas, tetapi perlu memprioritaskan caleg kader pembangunan. Siapakah kader



■ Bimo Joga Sasongko

pembangunan itu?

Biasanya kader pembangunan itu bukan aktivis ataupun pengurus parpol, karena waktunya banyak tercurah untuk mengembangkan profesi dan karyanya. Mereka itu adalah sosok-sosok profesional nonpartai, tetapi memiliki kompetensi dan karya inovatif yang sangat berguna bagi pembangunan.

Keniscayaan bagi parpol untuk memberikan porsi pencalonan kepada kader pembangunan. Pengurus parpol perlu melakukan koordinasi dan sinergi kader pembangunan agar mereka mau duduk di lembaga legislatif.

Selama ini kader pembangunan yang mampu menyelesaikan masalah bangsa hanya menjadi

teknologi seperti halnya Silicon Valley di Amerika Serikat. Sukses tim di atas telah mengangkat Ridwan Kamil memenangkan Pilgub Jabar 2018 yang baru lalu.

Contoh di Bandung tersebut merupakan bukti perlunya kader pembangunan menjadi anggota legislatif yang memiliki kemampuan teknis dan pemikiran inovatif untuk mengatasi tantangan zaman.

Keniscayaan, anggota legislatif mesti memiliki visi "glokalitas" dalam merancang peraturan dan rencana pembangunan. Yakni visi yang menekankan aspek globalisasi dan potensi lokalitas. Masa depan dunia akan diwarnai dengan fenomena partisipasi publik yang memberi ide, gagasan dan inisiatif luar biasa yang disebut Ideagora. Anggota legislatif mesti menekankan pentingnya wahana Ideagora. Yang merupakan wahana untuk mengembangkan gagasan dan ide kreatif rakyat luas terkait dengan inovasi segala bidang. Berupa karya unik yang bermutu yang berpotensi menjadi sesuatu unggulan di tingkat regional hingga mendunia.

Anggota legislatif mendatang harus mampu bersinergi dengan eksekutif untuk mendorong produktivitas daerah. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi daerah adalah produktivitas. Dibutuhkan tim super daerah yang memahami cara yang tepat untuk meningkatkan produktivitas.

Keniscayaan, anggota legislatif mesti memiliki visi "glokalitas" dalam merancang peraturan dan rencana pembangunan. Yakni visi yang menekankan aspek globalisasi dan potensi lokalitas. Masa depan dunia akan diwarnai dengan fenomena partisipasi publik yang memberi ide, gagasan dan inisiatif luar biasa yang disebut Ideagora. Anggota legislatif mesti menekankan pentingnya wahana Ideagora.

penonton dalam proses demokrasi yang sangat penting untuk memastikan masa depan bangsa.

Kader pembangunan sangat tepat bila menjadi anggota legislatif, baik di tingkat DPRD maupun di DPR RI. Selama ini banyak kader pembangunan yang berlatih belah ketukang teknolog dan inovator telah membantu memecahkan masalah pembangunan yang berlatar daerah. Sebagai contohnya adalah kader pembangunan yang membantu mewujudkan Bandung Smart City (BSC). Kader pembangunan di atas terdiri atas inovator, pelaku bisnis, hingga diaspora Indonesia yang tersebar di luar negeri. Dalam konteks di atas ditunjuk sebagai ketua BSC adalah Ilham Akbar Habibie yang merupakan putera sulung Presiden RI ketiga BJ Habibie.

Tim BCS telah berhasil merumuskan cetak biru dan konsep kota berbasis teknologi yang diintegrasikan pada pelayanan publik untuk mencerdaskan warga dan kotanya. Konsep pengembangan berbasis

Juga memiliki gagasan segar dan inovasi tepat guna yang terkait dengan faktor produktivitas bagi masyarakat.

Rakyat membutuhkan wakil yang bisa mewujudkan faktor *tipping point* terkait produktivitas. Saatnya legislatif mampu menyusun konsep dan dokumen pembangunan yang sesuai dengan semangat zaman. Pada era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama. Jika kita cermati masih ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah Daerah. Kita lihat isinya belum tampak *milestones* perubahan yang hebat.

Eksistensi UU Nomor 25 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam Perda RPJPD harus tertuang rumusan visi untuk merancang masa depan pembangunan daerah. Namun, rumusan RPJPD kebanyakan hanya berisi kompilasi data-data yang tidak aspiratif dan ketinggalan zaman. Padahal, RPJPD merupakan

dokumen perencanaan yang mengandung unsur kebijakan publik.

Mestinya harus ada indikator dan korelasi positif terhadap sasaran lima tahunan. Kekuatan RPJPD sebagai satu dokumen perencanaan pembangunan akan terwujud jika ada kejelasan mengenai faktor-faktor yang akan dikembangkan sebagai pendukung pencapaian visi dalam kurun 20 tahun ke depan yang terdistribusi bebannya secara baik dalam lima tahunan.

Di negara maju seperti Amerika Serikat sudah ada standardisasi profesi pekerja politik dan aliran kinerja bagi anggota legislatif. Juga ada lembaga yang melakukan penilaian, seperti The National Standards for Civic and Government yang membuat kategori mengenai kecakapan dan kinerja anggota legislatif.

Kader pembangunan yang duduk di legislatif biasanya lebih profesional dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan membuat deskripsi, menganalisis, serta kemampuan mempertahankan pendapat tentang isu-isu publik. Mereka juga memiliki kecakapan intelektual yang menyangkut manajemen aspirasi yang terkelola secara manual maupun secara digital.

Dari aspek profesionalitas ada beberapa parameter kerja anggota legislatif yang harus dibenahi. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, pengalaman, dan keahlian anggota legislatif bila diukur dengan kompleksitas persoalan aktual pada saat ini yang masih timpang. Banyak anggota legislatif yang tidak mampu mendisiplinkan persoalan rakyat secara tertulis dengan waktu yang singkat.

Selain itu, aspek *problem solving* anggota DPRD yang rendah, utamanya yang menyangkut *thinking challenge* , yakni tingkat pemikiran kreatif, inovatif atau orisinal yang diperlukan untuk mencari berbagai pemecahan masalah.

Anggota legislatif mendatang harus memahami dan mengonasi strategi diferensiasi terhadap produk inovasi karya anak bangsa yang harus terus dikembangkan. Untuk membuat faktor diferensiasi yang paling penting dan mendasar adalah aktivitas pelatihan masyarakat untuk membuat produk inovatif.

Diferensiasi inovasi akan terwujud dengan baik jika ada landasan yang kokoh terhadap stimulus gagasan disain dari masyarakat. Jika stimulus itu bisa dijalankan secara baik maka sederet gagasan disain masyarakat akan berubah menjadi produk yang lebih konkret. Oleh karena itu, sangatlah penting masukan dari pakar disain produk. Agar gagasan disain masyarakat itu layak untuk dikembangkan.

Agenda penting legislatif ke depan adalah bagaimana cara meningkatkan kapasitas inovasi daerah yang pernah dilakukan oleh kota di negara-negara maju. Yakni, dengan cara mengembangkan Advanced Research Park yang menghasilkan berbagai produk unggulan dunia.

Bimo Joga Sasongko
Sekjen Ikatan Alumni
Jerman (IAJ) dan pendiri Euro
Management Indonesia

Satu Tarikan Napas Memajukan Indonesia

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Pemerintah

memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 10 Agustus 2018 yang dipusatkan di Kota Pekanbaru, Riau. Hakteknas merupakan salah satu hari bersejarah nasional, tonggak sejarah kebangkitan teknologi Indonesia, yang ditandai dengan penerbangan perdana pesawat rancang bangun anak bangsa yakni N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 di Bandung.

Spirit Hakteknas adalah satu tarikan napas untuk memajukan Indonesia. Latar belakang lahirnya Hakteknas menunjukkan gotong royong dan kerja keras oleh anak-anak intelektual BJ Habibie dalam mewujudkan transformasi teknologi dan industri untuk bangsanya. Presiden RI ketiga BJ Habibie yang kini berusia 82 tahun menyebut bahwa anak-anak intelektualnya hingga kini masih konsisten menggeluti pengembangan Iptek dan menumbuhkan kapasitas inovasi.

Beberapa di antaranya juga berperan mendorong kebangkitan *start up nation* dan ikut memperbaiki proses bisnis berbagai korporasi. Semua itu sesuai dengan skenario besar yang pernah dirancang oleh BJ Habibie pada awal tahun 80-an.

Ada satu tarikan napas yang sama bagi anak intelektual Habibie menyikapi kondisi Indonesia saat ini. Mereka sepakat bahwa negeri yang sangat dicintai masih tumbuh di bawah kapasitasnya. Ibarat pabrik raksasa, kapasitas yang *idle* masih besar. Perlu memperbarui konsep kemajuan yang berkeadilan sesuai dengan semangat zaman. Di mana SDM terbarukan semakin menjadi andalan. Yakni SDM yang mumpuni dalam bidang Iptek dan proses inovasi.

SDM terbarukan, menurut Pres-



■ Bimo Joga Sasongko

iden RI ketiga, memiliki daya kreatif dan inovasi yang lebih unggul dari generasi sebelumnya. Keniscayaan pertumbuhan ekonomi dunia dan masalah krusial kemasyarakatan membutuhkan bermacam inovasi sebagai solusinya.

Saatnya bergotong royong dan curah pikir membenahi nilai tambah produksi di segala lini. Sektor manufaktur perlu menerapkan standarisasi dan peningkatan kapabilitas teknologinya. Khususnya memajukan teknologi sederhana atau tepat guna yang dibutuhkan oleh usaha rakyat.

Kini hampir semua negara sedang dilanda euforia menyongsong era

sebelumnya. Penerapan Industri 4.0 dipelopori oleh negara Jerman yang sejak 2015 telah merampungkan kerangka kerja yang akan diterapkan pemerintah mulai 2020.

Merujuk World Economic Forum dalam laporannya yang berjudul: *The Next Economic Growth Engine Scaling Fourth Industrial Revolution Technologies in Production*, kita bisa memprediksi bahwa industri manufaktur global akan totalitas mewujudkan era Industri 4.0 pada 2025.

Prediksi Mc-Kinsey Global Institute (MGI) menyatakan bahwa Indonesia bisa masuk peringkat 7 ekonomi dunia pada tahun 2030 jika per tahun mampu mencetak sekitar 10 juta tenaga kerja *qualified* yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kini inovasi menjadi faktor yang penting untuk mendorong kinerja ekspor dan investasi. Sebagian besar anak intelektual Habibie bersentuhan langsung dengan proses inovasi. Mereka adalah inovator berbagai bidang yang sedang bergotong royong mendorong indeks inovasi nasional.

Anak intelektual Habibie menekankan pentingnya Undang-undang Inovasi. Faktor inovasi adalah jawaban atas paradoks: mengapa kapasitas dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar, namun kinerja ekspor dan nilai investasi masih kalah dengan negara tetangga.

Sekadar catatan, Thailand mampu

disebabkan faktor inovasi. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) di daerah kurang optimal karena belum menekankan aspek inovasi.

Pembentukan UU Inovasi bisa memberi arah yang jelas terhadap eksistensi *Science Technology Park* (STP) atau Taman Ilmu dan Teknologi yang kini ada di setiap kota. Menurut International Association of Science Parks (IASP), eksistensi STP harus mampu menjadi inkubator dan mendorong pembentukan perusahaan yang berbasis Iptek yang mengedepankan inovasi.

Di dalam UU Inovasi idealnya terdapat kelembagaan yakni Otoritas Inovasi Nasional (OIN). Otoritas ini bertugas mengelola dan mengembangkan secara progresif kapasitas inovasi nasional dan daerah. Otoritas juga bertanggung jawab terhadap percepatan difusi inovasi segala lini serta melakukan literasi dan edukasi. Kelembagaan OIN sebaiknya langsung di bawah Presiden.

Adanya UU Inovasi diharapkan bisa mendorong indeks inovasi. Peringkat Indeks Inovasi Global Indonesia kini makin tertinggal. Peringkat inovasi Indonesia, berdasarkan *Global Innovation Index 2017*, berada di posisi 87 dari total 127 negara. Posisi ini hanya naik satu peringkat dibandingkan dengan raihannya pada 2016. Dibandingkan dengan negara di Asean, peringkat *Global Innovation Index* Indonesia juga tertinggal. Misalnya, Malaysia berada di posisi 37, sedangkan Vietnam berada di posisi 47.

Eksistensi OIN akan mampu menyinergikan tiga unsur utama dalam sistem inovasi. Yakni, pertama, unsur kelembagaan (litbang, pendidikan, industri, intermediasi, keuangan atau perbankan). Unsur kedua adalah jejaring kelembagaan sistem inovasi. Dan unsur yang ketiga adalah instrumen kebijakan berupa perangkat hukum dan peraturan yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pembiayaan inovasi (seperti misalnya modal ventura), pengelolaan risiko teknologi, standarisasi dan sertifikasi.

Pembiayaan inovasi nasional pusat dan daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu dibentuk *innovation fund* semacam dana abadi. Dana itu diharapkan berasal dari APBN/APBD, CSR perusahaan, dan sumbangan dari pihak ketiga dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut sebaiknya dikelola oleh badan otonom.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Sekjen Ikatan
Alumni Jerman (IAJ).

Kini inovasi menjadi faktor yang penting untuk mendorong kinerja ekspor dan investasi. Sebagian besar anak intelektual Habibie bersentuhan langsung dengan proses inovasi. Mereka adalah inovator berbagai bidang yang sedang bergotong royong mendorong indeks inovasi nasional. Anak intelektual Habibie menekankan pentingnya Undang-undang Inovasi.

Industri 4.0 dan menjadikan era tersebut sebagai referensi untuk menjalankan strategi pembangunan. Presiden Jokowi juga telah meluncurkan *Making Indonesia 4.0* sebagai peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era manufaktur digital. Yang pasti, untuk mewujudkan *Indonesia 4.0* tidak mudah dan butuh berbagai persyaratan yang kini masih jauh dimiliki bangsa ini.

Anak intelektual Habibie sebagian besar telah bersentuhan sejak dini dengan pranata Industri 4.0 dan era

meraup US\$ 231 miliar dari ekspor. Jumlah itu tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan nilai ekspor Malaysia sebesar US\$ 184 miliar, dan Vietnam mencapai US\$ 160 miliar. Sementara itu, Indonesia hanya sebesar US\$ 145 miliar. Volume ekspor Indonesia sebagian besar dari sektor industri pengolahan yang bernilai tambah kecil karena kurang inovatif. Celakanya, industri pengolahan banyak memakai bahan baku impor.

Masalah kinerja sektor investasi di daerah yang belum optimal juga

Platform Gotong Royong Intelektual Bangsa

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Usia Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) telah menginjak 73 tahun. Kini postur intelektual bangsa semakin banyak jumlahnya. Mereka adalah kelas menengah yang memiliki tugas sejarah untuk bergotong royong lewat pikiran dan tenaga demi mewujudkan Indonesia yang unggul dan berkelas dunia.



■ Bimo Joga Sasongko

bersama secara murah meriah dan guyup. Oleh karenanya, perlu dirumuskan arah dan platform gotong royong sebagai energi kolektif kebangsaan untuk menghadapi persaingan global yang makin sengit.

Menurut Bung Karno, gotong royong merupakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, dan perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Dalam konteks zaman sekarang, gotong royong memiliki arti yang luar biasa bagi kemajuan bangsa jika kaum intelektual mampu bersinergi dan

nisasi negara masih sangat sedikit. Namun begitu, dalam hitungan bulan setelah hari merdeka, para pemuda yang notabene SDM bangsa mampu mengambil alih lembaga penting dari tangan penjajah. Lalu mereka dengan penuh tekad bergotong royong berusaha menjalankan aktivitas berbagai lembaga dan badan usaha yang dibutuhkan oleh negara.

Sebulan setelah hari kemerdekaan, angkatan muda kereta api mengambil alih sektor perkeretaapian. Kemudian disusul oleh sektor pos dan telekomunikasi, perminyakan, dan sektor lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan untuk SDM pertahanan untuk bela negara.

Setelah perang kemerdekaan para petinggi TNI banyak merekomendasikan pengiriman anggota TRIP untuk kuliah di luar negeri. Setelah berhasil kuliah mereka kembali ke Tanah Air dan berperan penting untuk membenahi pemerintahan tinggi di dalam negeri yang sebelumnya dikelola oleh ilmuwan Belanda. Seperti contohnya Profesor Suwondo B Sutedjo Dipl Ing, yang sebelumnya adalah anggota TRIP Divisi Ronggolawe, yang berhasil menyelesaikan studinya pada Technische Hochschule di Hanover Jerman. Sekembali ke Indonesia, Suwondo membenahi

GTCI 2018, di mana Indonesia berada di urutan ke-77 dari total 119 negara di dunia dalam peringkat Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2018.

Bangsa Indonesia menduduki peringkat ke-77, masih kalah dengan negara tetangga. Sebagai perbandingan, Malaysia di peringkat 27, Filipina di posisi 54, dan Thailand di peringkat 70.

GTCI merupakan laporan komprehensif tahunan yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur bagaimana suatu negara menyediakan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing mereka.

Dalam mengukur indeks GTCI, lima pilar yang digunakan antara lain *enable* atau keberagaman dalam pengetahuan, pengalaman, dan cara menyelesaikan masalah. Pilar kedua dan ketiga adalah *attract* atau kemampuan menarik sumber daya asing, dan *grow* atau kemampuan untuk meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara dua pilar lainnya yang digunakan sebagai penilaian adalah pendidikan vokasional dan teknikal, serta pengetahuan global.

Para intelektual bangsa mesti memiliki modal alamiah berupa portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi. Modal itu untuk mewujudkan kepemimpinan unggul, khususnya kepemimpinan dalam domain iptek dan dunia usaha.

Platform gotong royong intelektual bangsa perlu *massive action* berupa program mentorship di seluruh pelosok Tanah Air.

Menurut Lowenstein & Bradshaw, mentorship adalah suatu bentuk sosialisasi untuk peran profesional yang mendorong pencapaian program nasional. Perjalanan bangsa saat ini diwarnai bermacam disrupti teknologi dan datangnya era Industri 4.0. Generasi saat ini perlu navigasi dan pembekalan agar termotivasi dan mampu bersaing secara global.

Cita-cita bangsa sering terhambat oleh perdebatan para intelektual bangsa yang tidak berkesudahan karena belum adanya *grand design* pembangunan yang strategis dan visioner. Akibat, pembangunan nasional setelah era Orde Baru masih berjalan tanpa panduan yang jelas sehingga menjadi tindakan tambal sulam tanpa konsep serta cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Menurut Bung Karno, gotong royong merupakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, dan perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Dalam konteks zaman sekarang, gotong royong memiliki arti yang luar biasa bagi kemajuan bangsa jika kaum intelektual mampu bersinergi dan menghilangkan eksklusivisme.

menghilangkan eksklusivisme.

Gotong royong bukanlah sesuatu yang sudah jadi atau *given*. Gotong royong memerlukan rekayasa dan pembangunan manusia untuk mencetak SDM terbarukan yang sesuai dengan kemajuan zaman. SDM terbarukan memiliki daya kreatif dan inovasi yang lebih unggul dari generasi sebelumnya.

Di situ lah urgensi perlunya kembali merumuskan platform gotong royong para intelektual bangsa yang sesuai dengan tantangan zaman. Pada saat Kemerdekaan RI dikumandangkan, SDM bangsa yang mampu memutar roda orga-

dan mengajar di Institute Teknologi Bandung (ITB).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad mulai tahun 2019 pembangunan bangsa menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan tahun berikutnya difokuskan untuk membenahi SDM bangsa lewat penguatan keahlian dan produktivitas.

Platform gotong royong intelektual bangsa diharapkan bisa menjadi ujung tombak untuk mendorong indeks daya saing SDM bangsa. Masyarakat prihatin melihat indeks

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Ketua Umum IABIE

Rekomendasi Habibie tentang Nilai Tambah

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Bangsa Indonesia harus berpikir keras untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan usaha *repositioning* produk nasional di tengah terjadinya perang dagang dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah.



■ Bimo Joga Sasongko

signifikan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat.

Semua negara sedang berlomba-lomba memanfaatkan teknologi terkini, antara lain dengan tawakul Industri 4.0 demi untuk mendapatkan nilai tambah sebesar-besarnya dan seefisien mungkin terhadap produk industrinya. Pada hakikatnya *factory 4.0* atau pabrik cerdas yang saat ini sedang menjadi perhatian besar dunia adalah untuk mendapatkan nilai tambah yang paling ideal.

BJ Habibie telah merumuskan konsep nilai tambah industri untuk negara berkembang sejak awal dekade 80-an. Menurut pakar ekonomi dunia Haller dan Stolowy (1995), *value added* (VA) atau nilai tambah adalah pengukuran *performance* entitas ekonomi. Arti nilai tambah adalah perbedaan antara nilai dari output suatu perusahaan atau suatu industri, yaitu total pendapatan yang diterima dari penjualan output tersebut, dan biaya masukan dari bahan-bahan mentah, komponen-komponen atau jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi komponen tersebut.

Nilai tambah diketahui dengan melihat selisih antara nilai output dengan nilai input suatu industri. *Value added* (VA) merupakan konsep utama pengukuran *income* suatu negara. Konsep ini secara tradisional berakar pada ilmu ekonomi makro, terutama yang berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional yang diukur dengan *performance* produktif dari ekonomi nasional yang biasanya dinamakan produk domestik.

Pemerintah perlu mengonsolidasikan industri nasional, baik BUMN maupun swasta untuk mendongkrak nilai tambah produknya. SDM teknologi nasional sudah cukup jumlahnya untuk bergotong royong dan memeras pikiran guna merumuskan proses nilai tambah produk nasional. Sehingga tidak ada lagi bahan baku dan setengah jadi yang dijual begitu saja ke luar negeri dengan nilai tambah yang kecil. Kondisi itu tentunya tidak bisa menyerap tenaga kerja secara optimal dan belum mampu mendongkrak ekonomi lokal secara kuat.

Kondisi perekonomian dunia yang semakin dinamis bahkan sewaktu-waktu bisa fluktuatif perlu kebijakan yang masih terkait *positioning* produk nasional. *Positioning* produk diwarnai bermacam teknologi dan datangnya era Industri 4.0. *Positioning* produk nasional perlu mencermati perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Implikasi perang dagang bisa menyebabkan banjir produk ke Indonesia.

Perang dagang menyulitkan usaha pemerintah yang berusaha keras meningkatkan kinerja ekspor. Presiden Joko Widodo belum puas dengan kinerja ekspor nasional. Kekecewaan Presiden tersebut ditunjukkan dengan membandingkan nilai ekspor RI yang ketinggalan dari negara tetangga.

Presiden menyatakan bahwa sebagai bangsa besar seharusnya kinerja ekspor tidak kalah dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Apalagi kapasitas dan sumber daya alam serta jumlah SDM yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar. Sebagai catatan, Thailand mampu menghasilkan US\$ 231 miliar dari ekspor tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan Malaysia US\$ 184 miliar, dan Vietnam mencapai US\$ 160 miliar. Sementara Indonesia, hanya US\$ 145 miliar.

Untuk menggenjot ekspor produk nasional tidak cukup lewat pameran perdagangan dengan skala lokal hingga global. Tapi perlu mencari terobosan yang bisa menggenjot perdagangan sekaligus menjadi sistem bagi pengusaha untuk bertukar informasi tentang produk unggulan.

Terkait dengan masalah *positioning* produk nasional ada baiknya kita mengkaji peta yang menggambarkan aliran produk yang terjadi. Seperti dalam elaborasi oleh Peter Dickens dalam

bukunya *Global Shift: Mapping The Changing Contours of the World Economy*.

Buku itu merekomendasikan kepada bangsa-bangsa pentingnya merancang ulang mata rantai jaringan produksi global. Dan selalu fokus pada pasar dan kematangan produk. Hal itu sangat relevan, di tengah banyaknya perusahaan di Tanah Air yang kini menghadapi ketidakseimbangan biaya bahan baku yang diimpor dengan hasil penjualan produk yang diekspor atau diserap dalam pasar domestik.

Usaha memacu perdagangan produk nasional sangat tergantung kepada sistem logistik. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.

Saatnya mengintegrasikan simpul-simpul infrastruktur logistik, baik simpul logistik (*logistics node*) maupun keterkaitan antarsimpul logistik (*logistics link*) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik meliputi pelaku logistik dan konsumen; sedangkan keterkaitan antarsimpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat perdesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antarpulau maupun lintas negara.

Volume perdagangan nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja logistik. Oleh karena kapasitas SDM di bidang logistik masih memprihatinkan maka perlu ditingkatkan. Kebutuhan tenaga-tenaga yang kompeten di sektor logistik tidak hanya diperlukan untuk pengembangan sistem logistik nasional, tetapi juga dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja.

Dibutuhkan strategi yang mampu mengembangkan SDM dengan kompetensi dan profesi logistik berstandar internasional. SDM logistik yang terpercaya baik pada tingkat operasional, manajerial dan strategis, dan mencukupi kebutuhan nasional untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional.

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro
Management Indonesia.

TNI dan Tantangan Revolusi Industri 4.0

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-73 dilaksanakan secara sederhana tetapi sarat makna. Peringatan kali ini juga difokuskan untuk mengatasi situasi bangsa yang diliputi duka akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengerahkan secara optimal personel dan alutsista yang dimiliki ketiga angkatan untuk menangani korban gempa Sulteng serta mengatasi isolasi daerah akibat rusaknya berbagai infrastruktur.



■ Bimo Joga Sasongko

gan teknologi telah mengubah seluruh tatanan strategi militer. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh personel TNI maupun para Taruna-Taruni Akademi Militer.

Menurut konsultan dunia terkemuka Deloitte, bahwa Industri 4.0 mampu meningkatkan tingkat kesiapan operasional militer. Kemajuan dalam teknologi Industri 4.0 sangat membantu organisasi pertahanan negara meningkatkan kesiapan dan keefektifan mereka. Berbagai alutsista dan infrastruktur militer penunjang kini telah menerapkan dan didukung dengan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan teknologi

pendidikan umum, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan yang dikelola oleh keluarga besar TNI. Seperti SMA Taruna Nusantara, SMA Taruna Nala, dan SMA Pradhita Dirgantara. Semuanya memiliki misi besar untuk mencetak SDM unggul khususnya bidang hankam yang mampu mewujudkan metode pengamanan yang paling tepat untuk Indonesia. Hal itu sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang dikemukakan saat memberikan pembekalan kepada perwira remaja TNI/Polri, di Mabes TNI.

Tak hentinya-hentinya Panglima TNI menyatakan bahwa Indonesia kini termasuk dalam wilayah Indo Pasifik yang sangat dinamis, sehingga memiliki peluang dan tantangan untuk menghadapi perubahan geopolitik yang terjadi tiba-tiba. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara maju untuk menjawab tantangan revolusi Industri 4.0 beserta dampak sosialnya.

Panglima TNI menyatakan alutsista Indonesia harus segera mengikuti perkembangan pesat teknologi digital. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI harus segera dikembangkan menjadi berbasis teknologi digital. Keniscayaan pembaruan alutsista itu perlu dilakukan mengingat jenis teknologi yang menjadi pilar Industri 4.0 semakin bergerak cepat dan sulit dikuasai.

Visi kemaritiman Presiden Joko Widodo bisa terwujud jika didukung dengan kekuatan laut yang tangguh. Perlu mewujudkan postur armada Nusantara bisa masuk lima besar dunia. Untuk itu dibutuhkan kekuatan Armada Nusantara yang terintegrasi antara kapal perang, pesawat udara maritim, dan ketangguhan pangkalan.

Big Data. Teknologi pilar Industri 4.0 itu sangat membantu perencanaan tugas militer, operasi militer maupun untuk efektivitas anggaran militer suatu negara. Dalam laporan terbaru, Deloitte menyatakan bahwa pasukan pertahanan AS mampu meningkatkan kesiapan mereka berkat teknologi Industri 4.0.

Upaya keras pimpinan TNI untuk membangun dan mendirikan lembaga pendidikan berkelas dunia harus didukung penuh. Baik pendidikan dan latihan terkait bidang kemiliteran, maupun untuk

Selain Perang (OMSP); pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan *Minimal Essential Force* (MEF); serta pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana satuan alutsista TNI dan satuan baru; peningkatan sarana dan prasarana perbatasan; serta penguatan industri pertahanan.

Sasaran yang akan dicapai melalui alokasi anggaran fungsi pertahanan tahun 2019 di antaranya ialah pengadaan 125 paket kendaraan taktis, suku cadang, kendaraan tempur, dan suku cadang kendaraan taktis; pengadaan/penggantian 3 unit kendaraan tempur; pengadaan/penggantian 688 pucuk senjata dan amunisi; pembangunan 18 unit KRI, KAL, dan Alpung; serta modernisasi 1 paket Command Center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Menurut kajian Global Power, Indonesia menempati peringkat ke-19 dari 55 negara yang disurvei dalam urutan kekuatan pertahanan negara. Terkait dengan unsur kekuatan pertahanan kapal perang, Indonesia menduduki peringkat 39 dunia.

Kondisi tersebut tentunya belum menggembirakan karena Indonesia adalah negara maritim. Jumlah kapal perang milik TNI AL masih kurang memadai untuk mendukung operasi ketiga armada wilayah.

Visi kemaritiman Presiden Joko Widodo bisa terwujud jika didukung dengan kekuatan laut yang tangguh. Perlu mewujudkan postur armada Nusantara bisa masuk lima besar dunia. Untuk itu dibutuhkan kekuatan Armada Nusantara yang terintegrasi antara kapal perang, pesawat udara maritim, dan ketangguhan pangkalan.

Panglima TNI sangat memperhatikan faktor kapabilitas pertahanan negara yang mesti dikembangkan untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kapabilitas itu dibuat berdasarkan strategi pertahanan negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan dan sumber daya nasional.

Dalam rangka melaksanakan strategi pertahanan negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap warga bangsa.

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum IABIE, Pendiri
Euro Management Indonesia

HSP dan Urgensi Pendidikan Kelas Dunia

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-90 tahun 2018 menengahkan tema "Bangun Pemuda Satukan Bangsa". Untuk membangun pemuda dalam aspek mentalitas dan keahlian dibutuhkan pendidikan berkelas dunia. Masalahnya, kondisi sebagian besar lembaga pendidikan saat ini kebanyakan masih jauh dari standar dunia.

Adalah suatu keniscayaan membangun pendidikan berkelas dunia untuk menggenggam para pemuda Indonesia agar mampu bersaing. Mendirikan pendidikan berkelas dunia jangan dipandang sebagai program eksklusivisme. Kemampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun lembaga pendidikan berkelas dunia masih banyak kendala. Sehingga instansi lain sangat diharapkan bisa mengambil peran tersebut. Termasuk kalangan swasta.

Betapa pentingnya membangun pendidikan berkelas dunia di Tanah Air, sampai-sampai TNI ikut berusaha secara total. Peringatan HSP ke-90 diwarnai dengan fenomena kepemimpinan dunia yang kini semakin diisi oleh sosok belia. Baik kepemimpinan politik maupun korporasi. Patut angkat topi menyaksikan kepemimpinan dunia yang kini semakin diisi oleh sosok belia.

Data demografi menunjukkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang ten-



■ Bimo Joga Sasongko

tang Kepemudaan dengan rentang usia 16-30 tahun, berjumlah 24,5% dari total penduduk Indonesia. Kondisi demografi pemuda di atas harus dikelola secara tepat.

Bangsa Indonesia sedang menanti bangkitnya kaum muda yang berani mengarungi kompetensi dunia untuk kendalikan semangat zaman. Perlu membangun optimisme kebangsaan bahwa tidak lama lagi pemuda mampu mewujudkan mimpi bangsa Indonesia, dan menjadi sangat terhormat di antara bangsa lain. Bahkan lebih dari itu, bangsa ini perlu bermimpi untuk suatu saat memimpin dunia. Memimpin dalam aspek politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proyeksi dan prediksi tentang Indonesia yang akan menjadi bangsa besar dan maju pada tahun 2030 telah dibuat McKinsey Global Institute. Berbagai indikator telah dikemukakan oleh McKinsey Global Institute. Seperti potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang amat hebat jika SDM muda dikelola dan diarahkan dengan benar.

Faktor di atas menjadi pendorong pimpinan TNI untuk membangun dan mendirikan lembaga pendidikan berkelas dunia untuk pendidikan umum, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengambil langkah cepat dan sesuai dengan tantangan zaman. Yakni bersiap menghadapi perkembangan tatanan dunia baru yang diwarnai dengan era revolusi industri

4.0. TNI telah membangun beberapa lembaga pendidikan untuk jenjang SMA berkelas dunia. Antara lain SMA Taruna Nala di Malang, Jawa Timur yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Lalu mendirikan SMA unggulan berkelas dunia lainnya yang bernama Pradhita Dirgantara yang berlokasi di Lanud Adisoemarmo, Solo.

Pembangunan SMA berkelas dunia tersebut diharapkan mampu mencetak SDM bangsa yang unggul dan berdaya saing global. Lulusan SMA itu juga diproyeksikan mampu menembus perguruan tinggi terkemuka baik di dalam maupun luar negeri.

Saatnya Indonesia totalitas mengembangkan SMA unggulan sesuai dengan persaingan global demi mencetak generasi emas. Perlu terobosan seperti yang telah diterapkan SMA Taruna Nala yang telah mengombinasikan antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum internasional dari Cambridge University (IGCSE). Juga menekankan Program Leadership Academy sehingga lulusannya bisa menjadi calon pemimpin masa depan yang berwawasan internasional dan siap hadapi tantangan globalisasi.

Peringatan HSP 2018 diwarnai dengan spirit kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan pesta olahraga se Asia, Asian Games XVIII di Jakarta-Palembang. Hal ini menjadi momentum lahirnya pahlawan masa kini dalam sosok pemuda.

Sukses Asian Games menjadi kesempatan emas untuk mengembangkan SDM olahraga berkelas dunia. Selain itu menjadi alasan kuat pentingnya mengirim para atlet dan pelatih untuk belajar di luar negeri yang memiliki teknologi tinggi dan sistem kompetisi yang lebih baik. Pengiriman atlet muda ke luar negeri merupakan keniscayaan. Untuk memperlancar program tersebut para atlet mesti diberikan pelatihan bahasa asing beserta kebudayaan negara tersebut.

Dalam dunia olahraga faktor ketidakpastian sangat besar sehingga perlu melibatkan iptek untuk memperkecil ketidakpastian itu dengan usaha yang terukur. Serta mengetahui strategi para pesaing Indonesia dengan sistem kepelatihan modern serta ilmu keolahragaan (*sport science*).

Kini olahraga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia. Selain untuk membangun karakter dan kualitas SDM bangsa, olahraga sudah menjadi entitas ekonomi dan industri dengan nilai tambah yang signifikan. Pemerintahan Jokowi telah melakukan langkah debirokratisasi olahraga agar tidak mengalami kelangkaan prestasi terus menerus. Debirokratisasi pada prinsipnya membebaskan atlet cabang olahraga dari belitan birokrasi dan politisasi. Dan selanjutnya mengembangkan profesionalitas atlet dan pengurus cabang olahraga sesuai dengan perkembangan global.

Tantangan pengembangan olahraga di masa depan diwarnai dengan kemampuan suatu bangsa melakukan riset di bidang olahraga. Riset tersebut juga akan menumbuhkan industri olahraga serta melakukan banyak kegiatan eksperimental yang melibatkan ahli teknik dan laboratorium.

Riset dan industri peralatan olahraga dunia telah mengalami lompatan yang luar biasa berkat pesenyawaan dengan kemajuan teknologi virtual dan simulasi dengan taju teknologi olahraga 4.0. Hal itu terlihat dengan desain peralatan olahraga melalui riset yang melibatkan teknologi canggih. Seperti penggunaan perangkat desain dari perusahaan Prancis terkemuka Dassault Systemes yang terdiri atas aplikasi, layanan, dan metodologi yang membahas kebutuhan unik pelanggan di industri peralatan olahraga.

Perangkat Dassault Systemes didedikasikan untuk mendukung inovasi yang luas dalam hal peralatan olahraga, infrastruktur gedung atau stadion, dan simulasi olahraga. Selain itu, teknologi virtual di atas dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja peralatan atletik mulai dari sepatu lari hingga pakaian atlet.

SDM Indonesia perlu magang dan transfer teknologi pada perusahaan multinasional seperti Dassault Systemes. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja atlet nasional saja, tetapi juga bisa membantu meningkatkan tingkat kepuasan penonton di dalam stadion.

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum LABIE, pendiri
Euro Management Indonesia

4 OPINION

INVESTOR DAILY

Pahlawan Kemajuan Bangsa

Oleh Bimo Joga Sasongko

Peringatan Hari Pahlawan 2018 bertema Semangat Pahlawan di Dadaku. Tema tersebut menjadi momentum untuk mempersiapkan generasi muda yang berpotensi menjadi sosok pahlawan masa kini. Yakni pahlawan kemajuan bangsa di tengah sengitnya persaingan global.

Dalam kaitan ini, kita perlu merumuskan figur pahlawan masa kini. Definisi pahlawan masa kini pada hakikatnya adalah sumber daya manusia (SDM) bangsa yang telah memperlihatkan karya unggul, kepeloporan, serta kerelaan berkorban demi kemajuan bangsa serta memperjuangkan kepentingan rakyat luas. Untuk menuju kemajuan dibutuhkan gagasan hebat dan karya-karya yang inovatif yang bisa menerobos pasar global.

Spirit bagi Pemuda

Pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 antara rakyat Indonesia dan pasukan sekutu Britania Raya dijadikan sebagai tonggak Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya sangat dahsyat sepanjang sejarah dunia, menyebabkan sekitar 16 ribu pejuang gugur di medan perang sebagai kusuma bangsa. Perang yang dahsyat itu berlangsung selama 20 hari.

Sebagian besar yang gugur adalah para pemuda dan pelajar. Semangat juang yang oleh Bung Tomo digambarkan bagaikan "banteng-banteng ketaton" dalam medan laga yang tidak takut mati karena disemangati oleh pekik takbir dan seruan merdeka.

Kehebatan Revolusi Surabaya 1945 yang digerakkan oleh pemuda dan pelajar diabadikan di Imperial War Museum di London, Inggris. Ada sebuah foto yang menarik, seorang anak muda sekitar 12 tahun digiring oleh serdadu Gurkha dengan bayonet terhunus. Penjelasan foto itu adalah: "Anak ini tertangkap setelah terkena tembakan pada kakinya dan pincang. Sebelumnya anak ini menembaki



■ Bimo Joga Sasongko

pasukan Sekutu dan melemparkan granat". Inilah bukti sejarah betapa hebatnya daya juang, militansi dan semangat totalitas yang dipersembahkan untuk bangsanya.

Pertempuran Surabaya benar-benar melibatkan arek-arek yang tiada lain adalah pemuda dan pelajar. Para pejuang itu sangat belia, usianya antara 12 hingga 25 tahun. Mereka ini masih pelajar SMP hingga SMA. Yang sebagian bergabung dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Di antaranya ada yang sudah kuliah di perguruan tinggi, serta ada pula yang sudah dilatih sebagai tentara Heiho dan Peta.

Hari Pahlawan menjadi spirit bagi pemuda pelajar zaman sekarang untuk terus berjuang untuk kejayaan bangsanya. Bentuk pertempuran pemuda pelajar zaman sekarang tersebar di berbagai bidang dan medan di seluruh dunia.

Pemuda zaman sekarang berpotensi menjadi pahlawan masa kini yang warisi semangat Hari Pahlawan. Hal ini sebagai keberlanjutan daya juang dan menyambung cita-cita para pahlawan muda yang gugur dalam pertempuran Surabaya yang tergabung dalam TRIP.

Hal di atas dari masa ke masa telah berlangsung. Setelah revolusi kemerdekaan para pejuang muda yang masih berstatus pelajar sekolah menengahi itu beberapa di antaranya melanjutkan kuliah di dalam dan luar negeri.

Beberapa anggota TRIP telah dikirim ke Eropa untuk melakukan "pertempuran" yang lain di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Jerman, Perancis, Swedia, Rusia, dan lain-lain. Mereka semua menyiapkan dirinya untuk melakukan revolusi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah perang kemerdekaan para petinggi TNI banyak merekomendasikan pengiriman anggota TRIP untuk kuliah di luar negeri. Setelah berhasil kuliah mereka kembali ke Tanah Air dan berperan penting untuk membenahi perguruan tinggi di dalam negeri yang sebelumnya dikelola oleh ilmuwan Belanda. Seperti contohnya Profesor Suwondo B. Sutedjo, Dipl Ing, yang sebelumnya adalah anggota TRIP Divisi Ronggolawe. Ia berhasil menyelesaikan studinya pada Technische Hochschule di Hanover, Jerman. Sekembali ke Indonesia, Suwondo membenahi dan mengajar di Institute Teknologi Bandung (ITB).

Kini Indonesia butuh pahlawan masa kini, apalagi planet Bumi kondisinya semakin *crowded* sehingga perlu inisiatif yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan karya teknologi. Melihat kondisi global seperti itu, Indonesia ini membutuhkan pahlawan masa kini, yakni tokoh-tokoh *zeitgeist*. Yakni tokoh yang benar-benar mampu mengendalikan semangat zaman dengan inisiatif besar lewat berbagai inovasi untuk menuju cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sejarah menunjukkan bahwa kaum belia lebih tangguh mengendalikan semangat zaman dan berani membuat revolusi alias perubahan mendasar. Pada era globalisasi predikat pahlawan layak diberikan kepada sosok yang memberi dampak positif pada

masyarakat luas. Seperti para pelaku ekonomi, pengembang SDM kelas dunia, atau pahlawan lingkungan alam.

Saatnya mengajak seluruh elemen bangsa untuk mencermati hasil kajian yang dilakukan oleh Bill George, seorang profesor di Harvard University, yang menyatakan bahwa kepemimpinan otentik diakselerasi dan berkembang oleh dialektika dan perjuangan atau kepahlawanan yang berbasis lokalitas.

Pada saat ini bangsa Indonesia sangat membutuhkan pahlawan yang mampu membuat terobosan untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan rakyat luas. Negeri ini membutuhkan sebanyak banyaknya pahlawan inovasi untuk menuju kejayaan bangsa. Inovasi segala macam disiplin ilmu, pelestari lingkungan dan keanekaragaman budaya. Baik inovasi tingkat dunia maupun tingkat lokal yang memiliki arti strategis dalam kehidupan berbangsa.

Kita perlu mencetak pahlawan masa kini yang bisa menggenjot nilai tambah bangsa dan memperluas lapangan kerja. Pahlawan yang mampu mengoptimalkan sumber daya kreatif yang berbasis lokalitas. Sehingga di negeri ini terwujud "Locality is the King".

Lokalitas yang dimaksud sesuai dengan teori Thomas L. Friedman yang bertajuk globalisasi lokal atau glocalitas. Fenomena glocalitas akan mempromosikan produk, konten dan budaya lokal bisa lebih bernilai tambah.

Masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya. Indonesia membutuhkan pahlawan yang mampu menjadikan produk atau konten lokal bisa *go international*. Semangat Hari Pahlawan harus bisa menjadikan negeri ini gudangnya para kreator dan inovator di segala bidang kehidupan bangsa.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Ketua Umum IABIE

Peraturan PPPK dan Daya Saing Global

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan untuk berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status PPPK.

Setelah peraturan ini berlaku, Presiden Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Fokus pemerintah mulai 2019 menekankan pembangunan SDM yang berdaya saing global. Termasuk membentuk sosok tenaga pendidik yang mampu menyiapkan generasi milenial yang unggul pada eranya dan berkepribadian Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa persoalan guru sangat pelik pada saat ini. Menteri Muhadjir Effendy menyatakan jika masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% masalah pendidikan di Indonesia telah teratasi. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan terus tergerak.

Masalah guru honorer yang tidak kunjung selesai selama ini telah menguras energi bangsa dan menimbulkan isu strategis yang lain. Seperti program untuk membentuk guru berkualitas global yang mampu membangkitkan kreativitas berbasis sumber daya lokal. Kreativitas merupakan kunci daya saing bangsa menghadapi era Industri 4.0 dan kondisi dunia yang semakin dilanda oleh disrupsi di



■ Bimo Joga Sasongko

segala bidang kehidupan.

Menyelesaikan masalah guru honorer dengan skema PPPK dan program mencetak guru berkualitas tidak bisa lepas dari masalah anggaran. Untuk ke depan pemerintah harus bisa merestrukturisasi anggaran pendidikan yang telah mencapai 20%. Dengan jumlah anggaran pendidikan sebesar itu mestinya masalah laten guru honorer bisa terurai di daerah. Sehingga masalahnya tidak mengalir seperti air bah ke pemerintah pusat.

Melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 terlihat bahwa tang-

ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Saat ini Kemendikbud sedang meningkatkan metode pembelajaran pengelolaan manajemen sekolah baik negeri maupun swasta; pengembangan keterampilan pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dan peningkatan kemampuan siswa Indonesia dalam *high order thinking skills* (HOTS). Keberhasilan program di atas sangat tergantung kepada faktor guru.

Profesi guru memiliki peran strategis untuk menyadari bahwa Indonesia adalah negara besar dengan potensi luar biasa, namun belum didayagunakan seoptimal mungkin. Para guru mampu berperan mewujudkan gerakan Indonesia kreatif dan inovatif yang berbasis ruang kelas. Saatnya menjadikan kelas di sekolah sebagai lumbung kreativitas.

Guru mampu mendorong kegiatan kreatif apapun bentuknya di dalam kelas hingga menjadi entitas ekonomi yang tangguh di suatu daerah. Kegiatan itu mendasarkan diri pada filosofi alamiah tentang kemampuan merakit pada embrio makhluk hidup setelah mengalami fertilisasi.

Gen yang mengatur dan meng-

bermacam proses kreatif ana bangsa bisa membelah diri sesuai dengan karakter dan relevansinya masing-masing. Sehingga mampu memfasilitasi potensi lokal untuk bersaing secara global.

Guru harus memiliki tekad kuat yang bisa membuat bangsanya melakukan lompatan kemajuan yang tidak kalah dengan bangsa lain. Sayangnya, kini masih banyak guru yang kondisi kesehariannya bertolak belakang dengan pengembangan profesionalitas. Yakni masih banyak guru yang jauh dari buku-buku aktual yang bermutu, hilangnya kebiasaan diskusi, menulis, apalagi melakukan riset atau penelitian ilmiah. Impita ekonomi dan kurang kondusifnya budaya kerja menyebabkan para guru hanya bisa menghitung hari.

Selama ini terdapat dua jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi dua yakni DAK fisik dan DAK nonfisik. Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya mampu membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah yang rusak. Sedangkan DAK nonfisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Para guru dari daerah yang memiliki prestasi tinggi sebaiknya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru tersebut sebelumnya diberi kesempatan meningkatkan kemampuan berbahasa asing beserta pengetahuan kebudayaan dan karakter bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan.

Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah koordinasi Menteri Keuangan sebaiknya menekankan aspek keadilan. Yakni dengan menyelenggarakan program beasiswa bagi guru berprestasi untuk belajar atau magang ke negara maju. Sejak LPDP diberlakukan, publik melihat belum banyak menyentuh kepentingan para guru.

Oleh karena itu, arah dan sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa mengakomodasi para guru dalam mengembangkan kariernya. Pengelola LPDP harus mampu mengarahkan segenap usahanya guna ikut mencetak guru masa depan.

Guru harus memiliki tekad kuat yang bisa membuat bangsanya melakukan lompatan kemajuan yang tidak kalah dengan bangsa lain. Sayangnya, kini masih banyak guru yang kondisi kesehariannya bertolak belakang dengan pengembangan profesionalitas. Yakni masih banyak guru yang jauh dari buku-buku aktual yang bermutu, hilangnya kebiasaan diskusi, menulis, apalagi melakukan riset atau penelitian ilmiah.

gung jawab dan distribusi anggaran pendidikan telah dilimpahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Sayangnya pelimpahan tersebut belum disertai dengan kesiapan daerah dalam mengelola anggaran sehingga bisa tepat sasaran dan bisa mereduksi persoalan guru.

APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun. Sebanyak 20% dari anggaran tersebut atau sebesar Rp 492,5 triliun diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62% ditransfer-

kan proses dan kemampuan merakit diri sejak sel telur hingga terus membelah diri menjadi bentuk dan performansi yang paripurna disebut sebagai gen-gen homeotik atau *homeotic genes*. Pada diri anak manusia, gen tersebut terletak di bagian tengah kromosom 12, yang bisa dianalogikan sebagai proses kreativitas alamiah yang sangat menakutkan dan merupakan gambaran akan kebesaran Tuhan.

Filosofi Homeotik sebaiknya dijadikan landasan para guru untuk mengembangkan daya kreativitas bagi anak didiknya. Sehingga

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia. Ketua Umum IABI

Mengatasi Defisit Guru Vokasional

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Mewujudkan profesionalitas guru vokasional atau kejuruan merupakan keniscayaan bangsa yang tengah memasuki era industri 4.0. Kebutuhan terhadap guru produktif untuk meneguhkan industrialisasi nasional perlu terobosan. Guru produktif tidak mesti dilahirkan dari bangku universitas kependidikan. Mereka bisa saja berlatar belakang ahli teknik, inovator, bahkan juga para *start-up* atau pengusaha rintisan.

Mayoritas sekolah kejuruan di Tanah Air, postur tenaga pengajarnya masih didominasi oleh kategori guru nomatif-adaptif atau guru umum yang mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan kategori guru produktif yang mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih persentasenya masih kecil, di bawah 30%.

Untuk mencetak guru produktif yang sesuai dengan perkembangan zaman tidak mudah. Perlu terobosan dan program yang masif di seluruh daerah. Desentralisasi pendidikan dan pengajaran sebagian besar anggaran pendidikan nasional ke daerah menuntut kepala daerah untuk mencetak guru produktif dalam jumlah yang cukup untuk menggerakkan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah jangan kepalang tanggung dalam mencetak guru produktif.

Terobosan mesti segera dilaku-



■ Bimo Joga Sasongko

kan. Antara lain dengan memberikan bea siswa kepada masyarakat yang berprestasi untuk belajar ke luar negeri sesuai dengan kategori dan bidang guru produktif yang diperlukan. Apalagi berbagai bidang teknologi dan produksi belum bisa diajarkan di perguruan tinggi dalam negeri. Atau masih terbatas sekali kapasitasnya, di lain pihak kebutuhan industri yang sangat besar sudah di depan mata.

Saatnya bagi pemerintah daerah bersinergi dengan para guru produktif untuk merancang sebaik-baiknya link and match antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan langkah itu daerah bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal.

Keniscayaan, pemda perlu membuat skema beasiswa ikatan dinas belajar di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan guru produktif setiap tahunnya. Universitas di negara maju telah melengkapi program studi hingga mencakup bidang yang sesuai dengan perkembangan industri kreatif dan proses produksi yang sesuai dengan revolusi Industri 4.0. Sementara kondisi universitas di Tanah Air prodinya masih stagnan. Itulah mengapa Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke beberapa perguruan tinggi selalu meminta dibuka prodi baru yang lebih relevan dengan semangat zaman.

Pemerintah daerah yang telah diguyur anggaran pendidikan nasional dalam jumlah yang besar mestinya bisa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi defisit guru produktif. Jika kondisi defisit tersebut terlambat diatasi maka Indonesia kehilangan momentum untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni penggerak industrialisasi.

Mencetak guru produktif sekaligus bisa membangkitkan SDM di perdesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Perlu terobosan untuk membangkitkan SDM perdesaan lewat pendidikan. Seperti yang pernah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, agar mengirim guru SMK kejuruan perikanan dari daerah terpencil untuk kuliah di Jepang guna mendalami teknologi budidaya dan proses nilai tambahnya. Terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diapresiasi dan diperluas.

Mencermati struktur APBN tahun 2019 terlihat bahwa tanggung jawab dan distribusi anggaran

lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Kemendikbud terus menambah skema sertifikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang SMK. Tahun ini, Kemendikbud menetapkan sebanyak 81 kompetensi keahlian bagi guru produktif.

Skema sertifikasi mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Payung hukum ini mencantumkan sertifikasi profesi terdiri atas sertifikat satu hingga sembilan pada jenis profesi. Skema ini berlaku secara nasional dan direncanakan berlaku secara baku bagi lingkup internasional.

Revitalisasi dan reorientasi vokasional kini menjadi agenda penting pendidikan nasional. Apalagi Presiden Joko Widodo menekankan perlu langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan atau program vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air. Kepada menteri terkait Presiden memerintahkan dengan segera revitalisasi vokasional. Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.

Persaingan global dan regional semakin mempertegas tak ada kata atau kalimat lain yang lebih penting, selain memperbaiki secara totalitas produktivitas dan nilai tambah lokal. Sektor pertama yang mesti dibenahi adalah sektor industri pengolahan agar bisa memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Saatnya sektor industri pengolahan berkontribusi untuk mendorong perekonomian dan menyediakan sumber pekerjaan yang berkualitas bagi angkatan kerja.

Saatnya bagi pemerintah daerah bersinergi dengan para guru produktif untuk merancang sebaik-baiknya *link and match* antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan langkah itu daerah bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal.

Bimo Joga Sasongko
Lulusan FH Pforzheim Jerman.
Pendiri Euro Management
Indonesia.

Menata Sistem Imbal Beli

Oleh Bimo Joga Sasongko

► Pemerintahan mendatang perlu mewujudkan efektivitas belanja negara. Salah satu yang krusial adalah belanja barang ke luar negeri. Sebagai contoh adalah belanja alutsista TNI dan infrastruktur. Masalah belanja barang ke luar negeri perlu segera diatasi dengan menata ulang sistem pengelolaan imbal beli atau *offset*. Sehingga bisa lebih bernilai tambah dan menguntungkan banyak entitas di dalam negeri.

Pola imbal beli yang diterapkan oleh pemerintah mendatang perlu ditata lebih rinci dengan mewajibkan eksportir negara mitra dagang untuk membeli produk atau jasa dalam negeri. Apalagi pada saat ini ada perlambatan ekspor nasional, sehingga skema imbal beli ini bisa dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk penetrasi produk ekspor. Selain itu, hal ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor.

Penataan sistem imbal beli yang cukup terinci terlihat pada imbal beli pengadaan 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai US\$ 1,14 miliar dengan barter berbagai komoditas dari Indonesia yang akan diekspor ke Rusia. Kedua negara menunjuk Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana teknis imbal beli antara pesawat Sukhoi dan berbagai komoditas dari Indonesia, seperti olahan karet, furnitur dan minyak kelapa sawit serta turunannya tersebut. Komoditas dan produk yang diekspor mesti punya nilai tambah yang tinggi.



■ Bimo Joga Sasongko

saatnya merombak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor karena sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional.

Skema imbal beli merupakan suatu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan atau memasarkan barang tertentu dari

yang besar, seperti pembelian pesawat terbang untuk penerbangan sipil maupun keperluan militer.

Definisi *offset* secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai "X" dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai "Y" dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut didefinisikan oleh lembaga pengelola *offset* di negeri ini. Bisa saja jenis *offset* berupa alih teknologi lewat pengiriman sumber daya manusia (SDM) untuk belajar keluar negeri maupun produksi bersama terkait barang yang dibeli.

Lembaga *offset* sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional, serta ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga *offset* harus mengerti betul tujuan ekonomis dari *offset* yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa ke luar negeri. Selanjutnya, lembaga *offset* juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan.

Idealnya lembaga *offset* dibentuk

yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima *offset*. Kemudian melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap pelaksanaan *offset* serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Penerapan sistem imbal beli menentukan ekonomi pertahanan suatu bangsa. Masalah yang menghambat penguatan pertahanan negara seperti pengadaan alutsista TNI pada prinsipnya disebabkan adanya distorsi ekonomi pertahanan. Hambatan tersebut perlu segera diatasi dengan memperbaiki cetak biru ekonomi pertahanan, mengingat geopolitik global terus berubah.

Menurut Britannica Encyclopedia, ekonomi pertahanan adalah manajemen ekonomi nasional yang terkait dengan dampak ekonomi dari belanja militer. Implikasi yang terkait dengan ekonomi pertahanan antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pengaruh belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, serta efek stabilitas nasional dan global.

Adanya cetak biru ekonomi pertahanan yang sesuai dengan kondisi terkini sangat membantu industrialisasi bangsa.

Menghadapi persaingan global yang makin sengit serta ancaman perang terbuka yang berlatar perebutan sumber daya alam (SDA) perlu konsep ekonomi pertahanan yang berbasis industri alutsista dalam negeri. Industri alutsista ini tidak sekadar merakit bersama dengan negara lain yang lebih maju. Harus ada nilai tambah yang riil, disertai dengan penguasaan teknologi dan proses industri oleh SDM lokal.

Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Mereka mesti memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan perkembangan zaman.

Bimo Joga Sasongko
Pendiri Euro Management
Indonesia, Alumni FH Pforzheim
Jerman.

Menghadapi persaingan global yang makin sengit serta ancaman perang terbuka yang berlatar perebutan sumber daya alam (SDA) perlu konsep ekonomi pertahanan yang berbasis industri alutsista dalam negeri. Industri alutsista ini tidak sekadar merakit bersama dengan negara lain yang lebih maju. Harus ada nilai tambah yang riil, disertai dengan penguasaan teknologi dan proses industri oleh SDM lokal.

Indonesia sebagai pembayaran atas seluruh atau nilai sebagian barang dari pemasok luar negeri.

Selain imbal beli, skema lain yang bisa dipergunakan oleh pemerintah antara lain *offset* atau pembelian barang di mana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi kerja sama produksi dan alih teknologi.

Pemerintahan mendatang perlu membentuk lembaga lintas kementerian untuk mengelola sistem imbal beli utamanya *offset* terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan infrastruktur. Terutama bagi

oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain ke luar negeri dengan jumlah nominal tertentu, misalnya senilai di atas Rp 300 miliar, harus ditempuh dengan mekanisme *offset* yang sebaik-baiknya. Begitu juga ada ketentuan *offset* tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan *offset* yang ideal.

Lembaga *offset* harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait *offset*.

Karakter Bangsa dan Rudy Habibie

● BIMO JOGA SASONGKO

President Director & CEO Euro Management Indonesia, Alumni Aerospace Engineering North Carolina State University Raleigh USA

Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Sepotong bait lagu kebangsaan "Indonesia Raya" ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa maka yang pertama dibangun adalah jiwanya, baru kemudian badannya.

Pembangunan jiwa bisa diartikan sebagai pembangunan karakter bangsa atau dalam istilah Bung Karno disebut sebagai *national character building*. Setelah pembangunan karakter ditentukan, baru kemudian pembangunan fisik dilakukan secara semesta dengan wahana yang tepat serta didukung segenap SDM unggul berdaya saing global.

Pembangunan karakter merupakan megaprojek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apa pun dan berapa pun harganya akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karakter bangsa.

Salah satu bangsa yang getol membangun karakter bangsanya adalah Singapura. Pembangunan karakternya menekankan pada rekayasa mentalitas dan etos kerja di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Rekayasa ini dilandasi ajaran Konfusianisme yang diaktualisasikan dengan kemajuan zaman.

Megaprojek pembangunan karakter bangsa Singapura dimulai sejak 1970-an. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan beberapa pakar dari seluruh dunia untuk mengimplementasikan ajaran Konfusius kepada para siswa sekolah dan mahasiswa.

Salah satu pakar Konfusius yang direkrut Lee adalah Profesor Tu Weiming, guru besar yang mengajar sejarah dan filsafat Cina di Harvard University. Profesor Tu ditugasi untuk mengajarkan etika Konfusius bagi siswa sekolah dan mahasiswa. Etika tersebut merupakan mata pelajaran wajib sebagai pendidikan karakter dan pemompa etos kerja.

Sistem pendidikan nasional di Indonesia hingga kini belum mampu membentuk karakter manusia Indonesia yang sesuai tantangan zaman. Bung Karno pernah menyatakan, sesuai perjuangan fisik menumbangkan kolonialisme dan imperialisme, bangsa

Indonesia memasuki tahap perjuangan baru, yakni menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, harus dibangun karakter bangsa dan mendirikan sekolah-sekolah teknik di seluruh Indonesia.

Ribuan putra-putri Indonesia lulusan SMA dikirim belajar di luar negeri, terutama ke Eropa Timur dan Uni Soviet. Mereka disebut Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas). Dalam pidato pelepasan Mahid, Bung Karno berpesan agar belajar sebaik-baiknya dan kembali ke Tanah Air membangun negeri.

Pembangunan karakter bangsa perlu metode efektif, sehingga bisa diserap dengan baik oleh generasi saat ini. Film *Rudy Habibie*—sekuel dari *Habibie & Ainun*—merupakan salah satu metode pembangunan karakter bangsa. Film ini mengandung banyak pesan kebangsaan dan nilai perjuangan anak bangsa menggapai cita diri dan bangsanya.

Konten film ini merupakan dialektika dan perjuangan presiden ketiga RI BJ Habibie saat kuliah di RWTH Aachen, Jerman. Saat itu, kehidupan Habibie muda yang biasa dipanggil Rudy dalam kondisi penuh keprihatinan. Di sana, dia tak hanya belajar teknologi penerbangan, tetapi juga mendalami arti cinta, persahabatan, dan mengkaji persoalan bangsanya bersama para mahasiswa Indonesia lain yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Eropa.

Sejak PPI Jerman didirikan pada 1956, sebagai pengurus Rudy memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail. Menurutnya, PPI sebaiknya jangan terlalu berpolitik praktis, tetapi harus mulai menyiapkan wahana bangsa di berbagai bidang, seperti kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Film *Rudy Habibie* terkandung nilai perjuangan anak bangsa yang selalu berusaha menggemang semangat zaman. Rudy memulai perjuangannya dari Kota Bandung sejak 1950 ketika masih duduk di bangku SMA.

Rudy meninggalkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung lalu berjuang keras menjadi mahasiswa RWTH Aachen (Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen), perguruan tinggi tertua di Jerman yang didirikan untuk menunjang tahapan revolusi industri di negeri tersebut.

Film *Rudy Habibie* selain memiliki kisah nan unik juga bisa menjadi motivasi kebangsaan bagaimana membentuk karakter dan menyiapkan wahana bangsa untuk tinggal landas menuju kemajuan dan kemakmuran.

Kini, Rudy oleh sang waktu telah dinobatkan menjadi eyang bagi generasi bangsanya. Sepanjang kariernya, Eyang Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat iptek serta mencetak ribuan SDM unggul untuk menjalankan berbagai bidang pembangunan.

Jika bangsa Indonesia konsisten menjalankan pengembangan iptek dan industrialisasi sesuai yang digariskan Eyang Habibie dalam strategi dan transformasi, tentu negeri ini kondisinya setara Korea Selatan dan Cina.

Pada dekade 1970-an sebenarnya Korea Selatan memulai strategi industrialisasi yang mirip Indonesia. Saat itu, kedua negara sedang mencetak SDM teknologi sebanyak-banyaknya untuk menjalankan strategi transformasi teknologi dan industri.

Waktu itu, Indonesia juga memiliki strategi transformasi teknologi dan industri yang dipimpin Menristek BJ Habibie dengan membentuk sembilan wahana industrialisasi nasional serta Pusat Pengembangan Iptek (Puspiptek) di Serpong. Begitu juga program pengiriman ribuan lulusan terbaik SMA melalui beasiswa ikatan dinas untuk kuliah di perguruan tinggi di negara maju.

Dalam perjalanannya, strategi transformasi di Indonesia menjadi tertinggal dan teralienasi akibat kondisi politik tak menentu. Fenomena ini, antara lain, terlihat dari kondisi industri elektronika dan telekomunikasi.

Pada era 1970-an sebenarnya Eyang Habibie telah menyiapkan wahana untuk pengembangan jenis industri di atas, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti), Lembaga Elektronika Nasional (LEN), dan berbagai macam laboratorium serta didukung SDM teknologi lulusan luar negeri yang termasuk ikatan dinas.

Ternyata, kondisi industri nasional kini tertinggal oleh Samsung, kebanggaan bangsa Korsel dan Huawei kebanggaan Cina. Kondisi PT Inti dan LEN yang dulu direncanakan sebagai salah satu wahana tangguh industrialisasi belum bisa tumbuh semestinya. Akibatnya, pasar industri elektronika dan telekomunikasi di negeri ini didominasi Cina dan Korsel. ■

'Wujudkan Ide Besar Habibie'

● AMRI AMRULLAH

JAKARTA — Putra sulung mantan presiden ketiga BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie berharap alumni beasiswa pendidikan di luar negeri mampu mewujudkan gagasan besar ayahnya. Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Umum Anggota Ikatan Alumni Program Beasiswa Habibie (IABIE) di Jakarta, Sabtu (30/7).

Ia mengungkapkan cita-cita tulus Habibie dengan program beasiswa yang ia cita-citakan dulu adalah manusia Indonesia yang mampu menciptakan nilai tambah sangat besar, sekaligus menyejahterakan rakyat banyak. Karena itu, tenaga teknis dan profesional di bidang industri besar dan strategis diutamakan.

"Pak Habibie adalah motornya ketika beasiswa ini diluncurkan sejak 1982 hingga 1996. Sebagai motor penggerak, ide ini harus segera diinstitusionalisasi. Karena saat ini masih banyak ide tersebut yang belum terwujud," kata dia.

Ilham mengatakan, alumni program beasiswa Habibie saat ini sebagian besar sudah di bagian manajemen. Mereka berprofesi di bidang masing-masing sehingga bisa berkontribusi lebih besar mewujudkan cita-cita Habibie. "Dan IABIE bisa menjadi salah satu wadah pentingnya," ujarnya.

Karena itu, ia berharap IABIE mampu menjadi bagian dari institusionalisasi ide-ide Habibie. Walaupun kini beasiswa Habibie sudah tidak ada lagi.

Bagian dari *masterplan*

Ilham juga mengungkap, salah satu yang menjadi impian besar Pak Habibie adalah bangsa Indonesia ini maju di bidang industri strategis. Hadirnya industri strategis saat itu memang tidak lepas dari program beasiswa Habibie saat itu, yang dimulai pada 1982 hingga 1992.

Walaupun saat ini ada program beasiswa pendidikan dari pemerintah, seperti LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dari Kementerian Keuangan, menurut dia, pola beasiswa berbeda dengan beasiswa Habibie dulu.

"Beasiswa LPDP saat ini tidak ada keterikatan, orang yang dapat beasiswa dia bisa *ngapain aja* setelah itu. Itu ada bagusnyanya, juga ada tidak bagusnyanya. Bagusnyanya setelah penerima beasiswa LPDP bisa fleksibel," kata Ilham.

Para penerima beasiswa Habibie dulu, menurut dia, pulang ke Indonesia sudah menjadi bagian dari *masterplan* pembangunan Indonesia. Mereka sudah tahu mau ditaruh di mana. "Sebagian besar penerima beasiswa Habibie saat itu difokuskan pada tenaga-tenaga teknis di industri strategis," ujarnya.

Dengan begitu, hasilnya bisa dirasakan dengan hadirnya berbagai industri besar dan strategis kini. Walaupun saat ini berbagai industri strategis masih tetap ada, kondisinya masih belum berkembang seperti harapan besar Habibie.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mewujudkan kembali cita-cita besar Habibie melalui program beasiswa bagi pengembangan industri strategis. Karena ia meyakini bagaimanapun industri strategislah yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan berkualitas, memberi nilai tambah jauh lebih tinggi dari hanya sekadar industri jasa dan komoditas.

■ ed: nina chairani

Makna Haktekknas

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia.
Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni
Program Habibie)

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Haktekknas) yang diperingati setiap 10 Agustus kali ini bertema Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa. Peringatan Haktekknas ke-21 dipusatkan di Kota Solo dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Penyelenggaraan Haktekknas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995. Tujuan peringatan untuk menghargai seluruh komponen bangsa dalam memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta memberi dorongan untuk terus-menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban unggul bangsa Indonesia.

Latar belakang penentuan tanggal Haktekknas adalah peristiwa terbang perdana pesawat N-250 buatan PT Dirgantara Indonesia pada 1995. Pesawat hasil rancang bangun putra-putri bangsa Indonesia itu telah menjadi ikon kebangkitan teknologi nasional.

Setelah 21 tahun berlalu, kita patut merasa diri apakah makna hakiki kebangkitan teknologi masih relevan. Kebangkitan Iptek merupakan kunci kebangkitan bangsa. Kebangkitan nasional menjadi visi para Presiden RI dari waktu ke waktu. Setiap presiden memiliki kiat dan mazhab tersendiri untuk mewujudkan kondisi kebangkitan nasional. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memiliki kiat tersendiri untuk menuju kebangkitan nasional. Karena latar belakang kedua tokoh bangsa ini adalah saudagar atau pedagang, tentunya visi kebangkitan nasional tersebut diwarnai strategi ala saudagar.

Peringatan Haktekknas ke-21 tahun 2016 hendaknya bisa menyadarkan seluruh elemen bangsa tentang makna kebangkitan nasional yang esensial. Dibutuhkan strategi pemerintahan yang mampu menggerakkan segenap potensi bangsa untuk bangkit dan tinggal landas dalam berbagai sektor kehidupan.

Visi kebangkitan nasional ala saudagar tersirat dalam langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi yang tertuang dalam 12 paket kebijakan ekonomi. Setumpuk paket itu esensinya adalah memperlancar kegiatan para pengusaha yang notabene adalah sau-

dagar berbagai kelas. Sederet paket tersebut juga diharapkan bisa membangkitkan saudagar lokal berlabel UMKM dan mencetak saudagar muda intelektual yang berjiwa kreatif dan inovatif.

Visi kebangkitan nasional ala saudagar sesuai dengan teori pakar ekonomi David Mike Dallen yang menyatakan bahwa suatu negara akan bangkit dan terwujud kemakmuran bila jumlah pengusaha sedikitnya dua persen dari jumlah penduduknya.

Visi kebangkitan nasional ala saudagar juga terartikulasi dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang penting bagi kegiatan ekonomi. Sayangnya, pembangunan infrastruktur tersebut kurang terkonsep dengan baik dan terlihat tergesa-gesa tanpa disertai strategi transformasi teknologi dan persiapan SDM berkompeten yang matang.

Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur yang dibangun kurang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi industri lokal dan perluasan kesempatan kerja. Bahkan, pembiayaan infrastruktur yang bertumpu kepada utang itu terlihat tidak disertai dengan aspek pengawasan kualitas bangunan dan kinerja struktur yang baik. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur kurang melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal serta menekan sedikit mungkin tenaga kerja asing (TKA).

Esensi kebangkitan nasional membutuhkan *milestones* bangsa dan strategi transformasi. Ada baiknya membandingkan visi kebangkitan nasional ala saudagar dengan visi ala teknolog. Visi kebangkitan nasional ala teknolog terwakili dalam strategi transformasi BJ Habibie yang terartikulasikan ke dalam tajuk tinggal landas dan alih teknologi. Yakni, lewat pembangunan industri maju dan pencetakan SDM teknologi yang sangat progresif. Dengan jalan pengiriman lulusan SMA terbaik dari seluruh pelosok negeri untuk kuliah di pusat peradaban dunia dan pusat iptek di negara maju.

Ada benang merah visi kebangkitan nasional antara Bung Karno, BJ Habibie, dan Jokowi. Visi ketiganya bertema dalam karakter *ascensionisme* bangsa, yakni sifat dan kecenderungan akan hal-hal yang besar, unggul, dan megah. Visi Bung Karno ditangkap dan disesuaikan dengan kemajuan zaman oleh BJ Habibie.

Salah satu contoh visi dan konsep Bung Karno yang fenomenal dan berjiwa *ascensionisme* terlihat dalam pembangunan Ibu Kota negara dengan berbagai monumen, Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno (GBK), dan lainnya. Hal itu merupakan usaha megaestetik

Bung Karno dalam memberikan baju budaya untuk membangun *national character building*.

Pada sisi BJ Habibie, kecenderungan *ascensionisme* ini terartikulasikan dalam sebuah visi penguasaan *hi-tech* atau teknologi tinggi. Langkahnya untuk mendirikan wahana industrialisasi berbasis *hi-tech* dan pusat iptek dengan strategi yang sangat progresif, yakni berawal dari akhir dalam alih teknologi searah dengan visi Bung Karno. Puncak dari artikulasi visi Presiden RI ketiga dimanifestasikan ke dalam Haktekknas sebagai tonggak kebangkitan nasional.

Kini, makna kebangkitan teknologi nasional perlu dikonkretkan. Peran teknolog dalam pembangunan infrastruktur yang masih minim sebaiknya ditingkatkan secara signifikan karena kurang sinkronnya sumber daya teknologi nasional dengan berbagai proyek infrastruktur.

Ada baiknya menyimak premis Paul Krugman, pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi, yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur hendaknya dibarengi dengan *job creation* atau perluasan lapangan kerja untuk berbagai tingkatan, baik tingkat pekerja dengan kualifikasi insinyur maupun teknisi. Mestinya, pemerintah jangan tunduk begitu saja dengan kemauan pihak pemberi utang yang seandainya sendiri menentukan spesifikasi teknologi dan teknolog yang terlibat dalam proyek infrastruktur. Pengadaan infrastruktur dengan skema pembiayaan apa pun harus mengedepankan komponen lokal dan melibatkan seluas mungkin tenaga kerja lokal.

Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia mengembangkan industri pesawat terbang, khususnya keberhasilan PT DI dalam merancang bangun pesawat N-250, adalah fenomena jika ditinjau dari konteks transformasi teknologi. Oleh sebab itu, peringatan Haktekknas yang ke-21 tahun ini sebaiknya juga dijadikan momentum untuk merevitalisasi kembali kapabilitas dan infrastruktur yang telah dimiliki oleh PT DI.

Hingga saat ini, tingkat utilisasi PT DI masih belum dioptimalkan. Saatnya pemerintah mengembangkan portofolio usaha PT DI yang terdiri atas beberapa unit bisnis dalam kelompok Aircraft (Airplane & Helicopter), Aircraft Services (Maintenance, Overhaul, Repair and Alteration), Aerostructure (Parts & Components, Sub Assemblies, Assemblies Tools & Equipment), Engineering Services (Communication Technology, Simulator Technology, Information Technology Solution, Design Center). Kapasitas fabrikasi PT DI harus segera didayagunakan sebelum dimakan usia. ■

Kamis, 11 Agustus 2016, 08:26 WIB

Membumikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

Red: M Akbar



REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Bimo Joga Sasongko (Ketua Ikatan Alumni Program Habisie/IABIE)

Tantangan kebangkitan teknologi di negeri ini masih diadung oleh persoalan klasik yakni belum membina sistem inovasi. Untuk memperkuat sistem inovasi nasional maupun daerah dibutuhkan regulasi yang ketat tentang teknologi impor, baik yang masuk secara komersial, kerjasama investasi, maupun hibah.

Langkah tersebut sesuai dengan UU Nomor 18/2002 ayat c yakni penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan dengan penguatan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri.

Untuk lebih membumikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-21, pada 10 Agustus 2016, IABIE merekomendasikan pentingnya reinventing teknologi tepat guna. Definisi tepat guna yang selama ini telah dibiarkan dan terdegradasi perlu dirumuskan kembali sesuai dengan semangat zaman. Teknologi tepat guna tidak harus berkonotasi kuno dan sepele. Bisa saja tepat guna mengandung tingkat teknologi yang canggih.

Dalam tataran sosio-engineering, tepat guna lebih menekankan solusi jitu terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini. Teknologi tepat guna harus cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada rentang waktu tertentu sesuai dengan kondisi budaya dan ekonomi serta penggunaannya harus ramah lingkungan.

Sejarah membuktikan bahwa konsistensi terhadap pengembangan teknologi tepat guna yang diikuti jiwa atau semangat berdaya telah mengantarkan sebuah bangsa mengalami kebangkitan teknologi yang luar biasa.

Untuk membumikan Hakteknas perlu mengedepankan kreativitas masyarakat. Kreativitas pada prinsipnya melekat pada individu warga bangsa, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Benih-benih kreativitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai dengan penguatan sistem inovasi. Sayangnya sistem inovasi di negeri ini masih belum progresif dan masih terjebak birokrasi sehingga sulit terserap oleh masyarakat luas.

Padahele, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kecanggihan laju open innovation atau inovasi terbuka. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah. Apalagi akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat produk baru memiliki daur hidup yang semakin singkat.

Di sisi lain, jika ingin survive maka perusahaan harus terus mengeluarkan produk baru. Implikasi varian dari biaya riset yang semakin besar dan periode waktu yang lebih singkat untuk meraih keuntungan. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak mampu mengembangkan produk-produk inovatif.

Hakteknas dan Konten Lokal

Peringatan Hakteknas hendaknya bisa mencerahkan rakyat tentang milestones menuju bangsa yang maju. Juga diharapkan bisa membuka cakrawala baru terkait dengan pengembangan konten lokal pada era konseptual yang diakselerasi oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Perlu menggelorakan rasa optimis warga bangsa untuk bisa menguasi iptek. Saat ini dunia tengah memasuki era konseptual atau *conceptual age*. Era ini dipicu oleh pesatnya perkembangan konvergensi TIK yang sangat menunjang pertumbuhan industri kreatif. Era konseptual ditandai dengan sengitnya kompetisi global untuk menciptakan konten yang menarik dan bernilai tambah tinggi.

Dalam era konseptual, konten merupakan raja dari segala bentuk industri kreatif. Sayangnya, negeri ini belum memiliki sistem nasional yang baik untuk mengelola dan mengembangkan konten. Akibatnya, negeri ini dibanjiri oleh konten asing yang sedemikian rakusnya menyedot devisa negara.

Untuk menggenjot nilai tambah bangsa dan memperluas lapangan kerja, perlu mengoptimalkan sumber daya kreatif yang berbasis lokalitas. Isu strategis terkait dengan konvergensi TIK di negeri ini adalah pentingnya regulasi yang komprehensif disertai insentif untuk pengembangan konten multimedia. Dengan demikian, ketika mega proyek infrastruktur seperti Palapa Ring telah terbangun, jangan sampai jalan tol informasi itu justru leang konten lokal.

Lokalitas yang dimaksud diatas sesuai dengan premis Thomas L. Friedman yang menyatakan fenomena globalisasi lokal atau glocalitas. Fenomena glocalitas akan mempromosikan budaya lokal lebih bernilai tambah.

Pengertian budaya merujuk maestro kebudayaan Koentjaraningrat adalah sebuah hasil cipta, karya, dan rasa manusia. Dari pengertian diatas bisa ditarik pengetian bahwa budaya lokal merupakan hasil cipta, karya dan rasa yang khas serta tumbuh dan berkembang didalam suku bangsa yang ada disuatu daerah.

Saatnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan regulasi industri konten menuju kepada kondisi dimana tercipta perkembangan industri konten yang berbasis lokalitas. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya. Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangugan hidup bangsa.

Pengembang konten multimedia diharapkan bisa mendorong inovasi bangsa yang kini sedang tumbuh. Karena data menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan anggota G-20, ternyata dalam hal paten berada dinomor sepuluh alias ranking terakhir.

Untuk kedepan bangsa ini membutuhkan konten lokal yang mampu go internasional. Sehingga bangsa ini menjadi gudangnya para kreator dan inovator disegala bidang kehidupan. Benih-benih kreatifitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai dengan penguatan sistem inovasi.

Sayangnya, sistem inovasi di negeri ini masih sepi insentif. Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandi dengan kecanggihan laju open innovation. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah karena adanya bermacam insentif.

Urgensi Indonesian Science Fund

IABIE mendukung gagasan dan langkah Presiden RI ketiga BJ Habibie yang juga pendiri Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (API) yang tengah menghimpun senbua ilmuwan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan bangsa.

Segegap elemen bangsa perlu mendukung dan menyokong API terkait penghimpunan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau dana abadi. Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (Indonesian Science Fund/ISF) tersebut diharapkan berasal dari APBN, CSR perusahaan dan sumbangan dari pihak ketiga dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut akan dikelola oleh badan otonom di bawah API.

Pemerintah sebaiknya segera mendukung secara konkrit sistem dan kelembagaan ISF. Apalagi pada saat ini betapa rendahnya investasi nasional dalam penelitian dan pengembangan yang kurang dari 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Hal ini tentunya menghambat kapasitas Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju.

Serta untuk memberi dorongan agar ada usaha terus menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban Indonesia.

Kebijakan nasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), khususnya kegiatan inovasi sebaiknya mencermati fenomena global. Ada dua strategi global yang bisa dijadikan masukan berharga. Strategi pertama adalah pendirian taman-taman bisnis yang diperuntukkan bagi sektor industri spesifik.

Contoh negara yang sangat progresif dalam mendirikan aneka taman bisnis adalah Dubai. Dibawah kepemimpinan Sheikh Mohammed, negara itu telah membangun secara spektakuler Dubai Internet City (DIC) yang dirancang dengan bantuan Arthur Andersen dan McKinsey & Company. Selain itu juga didirikan Dubai Healthcare City, Dubai Biotechnology and Research Park, Dubai Industrial Park, Dubai Studio Park, dan Dubai Media Park.

Dengan terbangunnya taman-taman bisnis tersebut Dubai menjadi basis yang ideal bagi perusahaan multinasional apapun. Dalam waktu singkat perusahaan top dunia hadir dan membuat kontrak jangka panjang dengan nilai investasi yang besar. Diantaranya adalah Microsoft, Oracle, HP, Compaq, Siemens, Sony Ericsson. Begitu juga perusahaan raksasa media massa dan penyiaran memiliki cabang utama di Dubai Media Park. Seperti Reuters, CNN, CNBC, BBC, Arabian Radio Network.

Strategi global yang kedua ditunjukkan oleh Israel yang sukses membentuk perusahaan-perusahaan inovatif yang sukses menarik ventura global serta mampu menciptakan ekosistem teknologi yang terus menerus mencari produk dan pasar baru.

Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini infrastruktur fisik di Israel masih kalah dibanding Dubai. Namun hukum alam telah menunjukkan bahwa aspek budaya dan ideologi ternyata merupakan tanah yang lebih subur untuk menumbuhkan pranata inovasi.

Strategi Israel untuk menumbuhkan perusahaan inovatif bermula dari program pemerintah yang bernama Yoza, yang dalam bahasa Ibrani berarti insentif. Program Yoza diluncurkan dengan penyetoran dana pemerintah sebesar 100 juta dollar AS kepada perusahaan yang melakukan proses inovasi sebagai stimulus untuk mendatangkan modal ventura.

Pada saat ini ada sekitar 300 modal ventura raksasa yang beroperasi di Israel baik dari perusahaan asing maupun domestik yang menginvestasikan sejumlah besar danang dalam rintisan dan proses inovasi.

Persoalan daya inovasi bangsa terkait dengan persoalan mendasar yang menyangkut budaya, geo-politik dan kesiapan SDM. Eksistensi Indonesian Science Fund hendaknya jangan layu sebelum berkembang. Meskipun saat ini terjadi pemangkasan belanja negara, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengalokasikan dana sebagai katalis dana abadi pengembangan iptek dan prakarsa modal ventura untuk kegiatan inovasi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar secepatnya mencari solusi terhadap kondisi masih ada sebagian ilmuwan dan teknolog dari instansi pemerintah dan BUMN yang kapasitasnya masih idle. Untuk itu perlu insentif dan program terobosan agar kapasitas mereka bisa digunakan secara optimal.

Salah satu yang perlu insentif dan terobosan adalah Puspiptek (Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Serpong yang berupa infrastruktur iptek yang sangat luas dan beragam. Berbagai laboratorium teknik, fasilitas pengujian, fasilitas kalibrasi, hingga reaktor nuklir perlu dioptimalkan.

Saatnya pemerintah membenahi wahana riset dan teknologi seperti halnya kawasan Puspiptek agar komponen laboratorium tidak menjadi besi tua. Perlu peta jalan baru terkait kebijakan riset dan teknologi yang bertumpu kepada inovasi produk. Untuk itu pemerintah harus segera mencinerigkan lembaga-lembaga riset dan pengkajian seperti halnya BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN dengan perusahaan atau komunitas inovatif yang ada di negeri ini.

Home > News > Nasional

Senin, 20 Juni 2016, 13:05 WIB

Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Esthi Maharani



Demografi Penduduk (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia memprediksi Indonesia bakal menjadi negara terbesar ketujuh di dunia pada 2030. Hal ini karena pada 2030 Indonesia akan memiliki bonus demografi yang 70 persen penduduknya berada di usia produktif. Terlebih, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Namun, prediksi positif tersebut justru membuat Presiden Direktur Euro Management Indonesia Bimo Sasongko khawatir. Dia mengatakan, prediksi yang dibuat 'bangsa Barat' tentang Indonesia biasanya benar. Namun, jika itu terbukti, alih-alih menjadi negara makmur, Indonesia justru bisa menjadi negara terbelakang jika mayoritas sumber daya manusianya berpendidikan rendah dan tak memiliki keahlian.

"Jangan sampai kita punya bonus demografi tapi SDM-nya tidak berkualitas," kata Bimo ketika berbincang dengan Republika, Ahad (19/6).

Dia berpendapat, pemerintah harusnya mulai fokus menyiapkan generasi muda agar dapat menguasai ilmu pengetahuan yang akan dibutuhkan bangsa ini ke depan. Bimo mencontohkan, saat ini pemerintah tengah membangun sejumlah infrastruktur seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Namun, ketika proyek-proyek hasil kerjasama dengan asing itu selesai dibangun, Bimo khawatir belum ada SDM Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah ke depan tak hanya getol menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi juga sambil menyiapkan SDM-nya.

Menurut Bimo, cara paling tepat untuk menyiapkan SDM yaitu dengan mengirimkan sebanyak-banyaknya mahasiswa Indonesia untuk belajar di pusat teknologi dan peradaban dunia saat ini, yakni Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.

Dari pengamatannya pada data statistik yang ada, Bimo menyebut jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain.

Misalnya saja Korea Selatan saat ini memiliki 130 ribu mahasiswa yang menuntut ilmu di luar negeri. Sementara jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri hanya 60 ribu. Padahal, jumlah penduduk Indonesia hampir sembilan kali lipat banyaknya dari negeri ginseng tersebut.

Menurut Bimo, negara-negara lain seperti Cina, India dan Malaysia sudah sadar betul pentingnya menyiapkan SDM yang berkualitas. Karenanya, pemerintah mereka pun getol memfasilitasi generasi muda agar bisa 'mencuri' ilmu dari negara-negara maju.

"Coba perhatikan siapa yang paling banyak menikmati pendidikan gratis di Jerman? Itu Cina. Ada satu juta mahasiswa Cina di luar negeri," ujar dia.

Bimo mengaku tak setuju dengan pendapat yang menyatakan belajar di Indonesia dan luar negeri sama saja. Memang, kata dia, pelajaran yang diajarkan di universitas tak berbeda. Namun, dengan belajar di negeri maju, mahasiswa sekaligus dapat berinteraksi dengan para ilmuwan ternama, mempelajari etos kerja, budaya belajar dan cara berpikir kreatif mereka yang tak akan ditemui jika hanya berkulat di dalam negeri.

Sekolah Penuh Wisata

■ BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sedang fokus

membangun karakter siswa dan mencegah agar siswa tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja. Tantangan berat membangun karakter siswa karena masih banyak lingkungan sekolah dengan kondisi bangunan yang tidak nyaman dan halaman yang sempit sehingga siswa merasa seperti di penjara saat menerima pelajaran.

Untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan semangat zaman, tidak harus melalui metode yang sarat doktrin dan cara-cara seperti penataran P-4 pada masa rezim Orde Baru. Untuk membentuk karakter dan sikap positif para siswa perlu mengubah metode pengajaran sehingga siswa merasa riang gembira dan terbuka imajinasinya dalam menerima pelajaran. Jangan ada lagi siswa merasa tertekan saat menerima mata pelajaran apa pun. Mata pelajaran yang dianggap momok, seperti matematika, IPA, dan bahasa asing tidak lagi takut dan menjemukan.

Perlu membenahi karakter siswa sesuai dengan semangat zaman, yakni pentingnya daya inovasi. Seperti yang pernah dirumuskan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di mana siswa harus terus-menerus menghasilkan inovasi dengan cara 3N (nitenti, neroke, nambahi).

Metode 3N yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan untuk membentuk karakter siswa terkait dengan kemajuan zaman yang sangat ditentukan oleh kapasitas inovasi. Metode 3N yang memakai istilah bahasa Jawa tersebut sangat relevan bagi pelajar hingga dunia usaha.

Para siswa diharapkan selalu memperhatikan unsur N yang pertama, yakni "nitenti" atau mengamati kemajuan teknologi atau perkembangan produk. N yang kedua adalah "neroke" atau menirukan kemajuan teknologi atau perkembangan produk.

Lalu unsur N yang ketiga adalah "nambahi" atau menambahkan (modifikasi). Metode 3N ini sebaiknya ditanamkan kepada siswa sekolah dengan cara-cara yang meng-

asyikkan dan penuh ceria seolah mereka sedang berwisata.

Kondisi lingkungan sekolah yang ada sekarang ini kebanyakan kurang ramah lingkungan dan kurang nyaman untuk mengembangkan daya imajinasi anak. Bahkan, tidak sedikit bangunan fisik sekolah yang mirip penjara yang gaduh, bising, dan dikepung aneka polusi udara.

Semestinya pendidikan dasar dan menengah memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan ramah lingkungan. Saatnya menghilangkan penyeragaman atau conformity pendidikan dasar dan menengah lalu memberikan nuansa yang lebih bersahabat dengan alam, mengedepankan aspek kebudayaan lokal, serta bersendikan daya imajinasi.

Dalam mengembangkan kecerdasan, karakter unggul, dan budi pekerti siswa, perlu bangunan sekolah yang lebih ergonomik. Bangunan sekolah rindang karena dikelilingi pohon besar, lapangan olahraga yang memadai, dan dilengkapi dengan danau buatan beserta instrumen biotanya.

Ruang kelasnya dirancang lebih natural dan membuat siswa bisa relaksasi karena tidak terkungkung oleh tembok. Kelas dengan dinding semiterbuka yang bercorak arsitektur tradisional. Sarana belajar seperti meja, kursi, papan tulis, alat penengaran, dan lain-lain dibuat dengan prinsip ergonomik sehingga tubuh siswa tidak merasa terpeku atau terikat selama menerima pelajaran. Dengan suasana dan infrastruktur seperti itu, serapan mata pelajaran dan daya tahan tubuh siswa dalam proses belajar bisa lebih optimal. Siswa tidak lagi sering mengantuk dan merasa lelah dan stres di sekolah.

Untuk menumbuhkan karakter unggul siswa sesuai kemajuan zaman yang mengedepankan daya imajinasi dan kapasitas inovasi, sekolah mesti membuat setiap mata pelajaran menjadi menyenangkan dan bisa dihayati lebih mendalam. Perlu menerapkan prinsip di mana sekolah sebagai tempat wisata ilmu pengetahuan dan budaya sepanjang hari.

Prinsip ini bisa diimplementasikan dengan menggalakkan metode eksperimental yang menarik dengan cara membuat proyek-proyek ilmiah sederhana yang relevan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Para guru diarahkan untuk merangsang siswa dengan cara membuat proyek ilmiah sederhana setelah pelajaran teori. Metode eksperimental menuntut para guru dan pengelola sekolah untuk lebih kreatif dan inovatif guna memperoleh modul-modul proyek ilmiah sederhana beserta informasi pendukungnya.

Pengajaran IPA selama ini belum mampu memberikan motivasi berwisata ilmu,

proses nilai tambah, dan solusi praktis problema kemasyarakatan. Hal ini karena pengajaran IPA masih sebatas hafalan rumus-rumus yang kurang mengasyikkan siswa. Perlu mencari model pengajaran IPA yang mampu menumbuhkan inovasi dan sikap positif terhadap kemajuan teknologi, proses nilai tambah, dan mampu menjaga lingkungan.

Idealnya, pengajaran IPA di sekolah dasar dan menengah harus mampu menumbuhkan sikap ilmiah (scientific attitude). Sikap ilmiah tersebut mengemuka dalam diri siswa dalam bentuk sikap ingin tahu (curiosity), kebiasaan mencari bukti sebelum menerima pernyataan (respect for evidence), sikap luwes dan terbuka dengan gagasan ilmiah (flexibility), kebiasaan bertanya secara kritis (critical reflection), serta sikap peka terhadap lingkungan sekitar (sensitivity to living things and environment).

Sikap ilmiah ini dapat mudah dicapai jika proses belajar mengajar IPA banyak melibatkan metode eksperimental dalam suasana wisata ilmu. Jadi, bukan sekadar interaksi satu arah dan menekankan hafalan (rote learning), melainkan belajar yang sesungguhnya (meaningful learning). Itulah yang menjadi titik berat kebijakan pengajaran IPA di Amerika Serikat. Bahkan, pemerintah sering melibatkan para guru dalam program riset nasional.

Salah satu contoh pelibatan guru dalam riset nasional adalah misi pesawat ruang angkasa Endeavour dari NASA yang salah satu astronotnya adalah seorang ibu guru IPA sekolah dasar yang bernama Barbara Morgan. Sudah beberapa dekade program tersebut rutin dilakukan. Lembaga riset, BUMN, hingga korporasi besar di Amerika Serikat selalu memberikan kesempatan kepada guru sekolah dasar dan menengah untuk terlibat.

Tidak menariknya metode pengajaran di sekolah disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, pertama, selama ini proses belajar mengajar, terutama untuk mata pelajaran IPA terlalu menekankan aspek kognitif. Artinya, konsep yang diajarkan hanya sekadar pengetahuan, kurang direalisasikan sebagai sikap dan perilaku yang aktual.

Kondisinya semakin memprihatinkan karena sistem ujian hanya mengukur aspek kognitif. Evaluasi terhadap sikap yang terintegrasi dengan kognitif (pengetahuan) belum dilakukan dalam proses belajar mengajar.

Kedua, seringkali guru menyepelekan materi yang menyangkut pengetahuan praktis dan problema lingkungan hidup dengan alasan bahwa materi tersebut tidak memerlukan hitungan matematik dan kurangnya bahan referensi. ■

Superioritas OTT dan Dilema Pajak

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia,
Ketua Umum Ikatan Alumni Program
Habibie (IABIE)

Pemerintah tengah menghadapi dilema besar, terkait masalah perpajakan bagi perusahaan internet dan jasa digital yang beroperasi secara global. Tidak bisa dimungkiri bahwa eksistensi Over The Top (OTT), seperti Google, Facebook, Twitter, Word Press, Microsoft, Apple, Yahoo, Research In Motion, sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Eksistensi OTT juga telah membawa kemajuan bangsa dan berhasil melancarkan konektivitas segenap penjuru Tanah Air. Aplikasi OTT telah mengubah model bisnis sehingga mampu bersaing secara global. OTT juga telah membantu proses kreatif warga serta mendorong produktivitas nasional. Kini OTT telah memasuki segenap kehidupan bangsa dan telah menjadi gaya hidup.

Di lain pihak, pemerintah sedang kekurangan pendapatan sehingga harus memperluas objek perpajakan hingga menasar OTT. Ironisnya, OTT seperti yang ditunjukkan oleh Google menolak pengenaan pajak. Namun begitu, penolakan Google Asia Pacific Pte Ltd untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atas kewajibannya, sebaiknya disikapi secara hati-hati.

Perlu *win-win solution* sehingga kepentingan rakyat luas yang telah menggantungkan diri terhadap OTT, untuk berbagai aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Google selama ini menghindari pajak melalui cara legal, yakni lewat celah yang disebut *tax treaty*. Yakni, perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisasi pemajakan berganda ataupun berbagai usaha penghindaran pajak.

Google telah menolak pendirian Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menjadi persyaratan bagi badan usaha asing untuk dapat dikenai pajak di Indonesia. Penolakan itu menimbulkan masalah terkait dengan *fairness*

(keadilan) bagi perusahaan digital lokal, seperti Tokopedia, Traveloka, Kaskus, dan lainnya yang telah membayar pajak.

Superioritas Google di seluruh dunia berawal dari layanan gratis lalu berkembang menjadi *platform*, yang merevolusi model bisnis dan membentuk kolaborasi yang hebat. Kini Google telah menjadi peramban utama sekitar 90 juta pengguna internet di Indonesia, untuk mencari informasi dan berbagai proses bisnis, edukasi, kreativitas, navigasi, konektivitas, serta promosi kebudayaan dan produk lokal. Superioritas Google tidak sekadar mesin pencari atau *googling*, tapi telah beranjak menjadi superioritas *platform* kehidupan. Tak bisa dimungkiri, berkat Google para pelaku usaha *e-Commerce* (perdagangan berbasis elektronik) sangat terbantu dan mendapatkan manfaat yang berlimpah.

Perlu langkah yang persuasif supaya Google mau membayar pajak di Indonesia. Langkah persuasif tersebut sebaiknya melibatkan pengguna Google, yang tentu suaranya sangat didengar oleh kantor pusat Google. Para pengguna Google di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat melebihi pengaruh pemerintah. Pemerintah belum perlu bertindak represif untuk menagih pajak Google.

Perkara pajak Google untuk Indonesia yang masih tersendat, jangan sampai merusak kerja sama antara pengembang Indonesia dan OTT. Kunjungan Pemerintahan Jokowi ke Silicon Valley beberapa waktu lalu, yang merupakan markas OTT membuahkan kerja sama strategis. Hal itu jangan terganggu oleh isu perpajakan. Kerja sama tersebut untuk mengembangkan SDM terkait dengan inovasi dan ekonomi kreatif, yang sangat menunjang pengembangan konten keindonesian. Konten lokal itu bisa berupa produk budaya, seni, dan industri. Selain itu, bisa juga menjadi promosi yang hebat bagi destinasi wisata.

Tekad Presiden Joko Widodo untuk membentuk poros teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan Silicon Valley, merupakan langkah strategis dalam mengembangkan konten keindonesian untuk mengimbangi superioritas OTT, yang kini sudah masuk hingga segmen

masyarakat perdesaan Indonesia.

Pembentukan poros teknologi bisa efektif jika ada pembenahan ekosistem di dalam negeri bagi warga negara, yang selama ini menggeluti inovasi. Poros teknologi memiliki arti yang signifikan bagi kemajuan Indonesia jika mengedepankan *start-up nation*, yang berupa usaha-usaha rintisan inovasi di segala lini. Indonesia memerlukan banyak karya inovasi produk dan inovasi proses bisnis.

Pemerintah memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan total valuasi 130 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.756 triliun. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan 1.000 teknopreneur pada 2020, dengan total valuasi 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 138 triliun.

Saatnya pemerintah membangun infrastruktur *e-Marketplace* bagi produk industri kreatif. Tentunya, infrastruktur tersebut terkait dengan dengan OTT global. Pemerintah sebaiknya merombak model bisnis dan *marketing* untuk industri kreatif dan destinasi wisata, yang sesuai dengan ekspansi usaha OTT. *Marketing* produk kreatif rakyat Indonesia mendayagunakan sebaik mungkin keberadaan OTT. Apalagi, model bisnis OTT tidak mengenal batas wilayah.

Internet telah mencerahkan jagat kreativitas, sekaligus melancarkan pengembangan model bisnis baru bagi industri kreatif. Peradaban gelombang keempat akan menempatkan produk industri kreatif, yang merupakan jenis pekerjaan masa depan (*the future of works and employment*) dan sangat menjanjikan. Hal itu disertai dengan tuntutan untuk terus-menerus berinovasi.

Di era ekonomi kreatif, infrastruktur *e-Commerce* dan segenap aktivitas ekonomi dengan sendirinya harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi kreatif, yaitu adanya basis pengetahuan yang menunjang inovasi. Sehingga kinerja ekonomi kreatif di negeri ini bisa terwujud dengan baik. Selain itu, eksistensi *e-Marketplace* produk industri kreatif juga sangat ditentukan oleh program lembaga inovasi daerah. Program lembaga inovasi daerah hendaknya terfokus pada produk dan inovasi lokal. ■

Membenahi SDM Intelijen

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia,
Ketua Umum Ikatan Alumni Program
Habibie (Ialbie)

Persaingan dan ancaman global perlu dihadapi dengan mencetak sumber daya manusia (SDM) intelijen yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk mencetak SDM ini, perlu melibatkan lintas disiplin ilmu sehingga mampu melihat ancaman global terkait perang asimetris, seperti perang digital, perang produk, hingga faktor pemicu yang menyebabkan gejolak sosial.

Kini pembenahan SDM intelijen menjadi agenda penting dunia. Seperti yang dilakukan oleh MI6, badan intelijen Inggris yang telah menambah 1.000 anggota dinas rahasianya atau 40 persen dari jumlah total personel. Penambahan ini merupakan program pengembangan terbesar sejak Perang Dingin sebagai bagian dari upaya MI6 untuk menghadapi persaingan ekonomi, perang asimetris, dan memanfaatkan teknologi baru.

MI6 telah menjadi legenda dinas rahasia dan digambarkan sebagai induk mata-mata dalam karya fiksi yang sangat populer, mulai dari karakter George Smiley buatan John le Carré hingga James Bond karya Ian Fleming. MI6 beroperasi di luar negeri dan bertugas mengamankan Inggris beserta kepentingan ekonominya.

Indonesia kini mestinya juga berkepentingan membenahi SDM intelijen. Terbentuknya SDM intelijen yang berkualitas sangat membantu negara dalam memenangkan persaingan global. Badan intelijen juga harus memberi perhatian serius terkait dengan kondisi Indonesia yang telah menjadi ajang perang digital oleh pihak asing.

Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) raksasa dunia dalam bidang perangkat keras, aplikasi, ataupun yang biasa disebut sebagai OTT (*over the top*) telah menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat gemuk dan sekaligus sebagai ajang perang asimetris yang menempatkan kepentingan bangsa ini, seperti pelanduk yang terjepit di antara peperangan raksasa.

Budi Gunawan sebagai kepala Badan In-

telijen Negara (BIN) diharapkan bisa menyinergikan beberapa lembaga intelijen di negeri ini. Budi Gunawan memiliki PR besar terkait kompetensi dan jumlah SDM intelijen, yang kondisinya belum optimal untuk mengatasi potensi gangguan dan ancaman terhadap negara. Gangguan dan ancaman tersebut sudah berubah bentuk dan skalanya.

Tantangan terkini bagi Kepala BIN adalah mewujudkan teknologi intelijen untuk meneguhkan intelijen dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam yang saat ini banyak digelapkan berbagai pihak. Di antaranya, kontraktor usaha pertambangan dan sumber daya kelautan.

BIN juga harus mampu menanggulangi modus penyadapan yang dilakukan asing terhadap aktivitas pemerintahan RI. Operasi penyadapan oleh pihak asing terhadap alat komunikasi Presiden RI dan beberapa pejabat pemerintah lainnya tidak boleh terjadi lagi.

Kekompakan dan sinergi dari berbagai lembaga intelijen di negeri ini, yakni intelijen TNI, kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu dijaga. Kini, Kepala BIN diadang tantangan berat terkait postur dan kompetensi SDM intelijen yang mesti ditingkatkan dalam waktu singkat. Karena, tugas intelijen semakin berat dan membutuhkan kompetensi spesifik dan sesuai kemajuan teknologi, terutama TIK.

Langsung atau tidak langsung, Indonesia terdampak perang digital oleh pihak asing yang semakin sengit. Kondisi ini mesti bisa diatasi oleh SDM intelijen nasional. Perang digital seperti terlihat dalam kasus produk Samsung Galaxy Note 7 dan iPhone 7 yang merupakan bentuk perang dagang terkini yang melibatkan aksi intelijen.

Perang di atas menyebabkan ditariknya produk ponsel Samsung Galaxy Note 7 yang sudah telanjur beredar akibat beberapa insiden terbakarnya baterai ponsel saat diisi kembali pemilikannya. Berkecamuknya perang dagang antara iPhone selaku perusahaan Amerika Serikat dan Samsung sebagai perusahaan Korea Selatan harus menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Dengan terjadinya *recall* 2,5 juta unit Galaxy Note 7 yang sudah beredar di 10 negara, termasuk di AS dan Korea Selatan sendiri, diperkirakan Samsung bakal menderita

kerugian Rp 23,8 triliun dan kehilangan pendapatan Rp 65 triliun untuk tahun ini saja.

Peningkatan kompetensi SDM intelijen sebaiknya menjadi kata kunci bagi Kepala BIN untuk membenahi organisasi. Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM intelijen perlu dibenahi karena tantangan dan bentuk kontra intelijen semakin canggih sehingga memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu.

Agenda pertama Kepala BIN untuk membenahi personel atau SDM intelijen sebaiknya menerapkan *merit system*. Selama ini, BIN belum sepenuhnya menerapkan *merit system* dalam pengembangan karier dan kompetensi.

Hingga kini, masih berlaku sistem konvensional untuk mengembangkan SDM intelijen. *Merit system* memacu anggota intelijen untuk selalu meningkatkan kompetensinya, lebih berinovasi dan kreatif.

Merit system seharusnya segera diterapkan secara sistemis di seluruh intelijen daerah, yakni Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) sehingga mendorong terciptanya personel yang memiliki kinerja baik. Proses wanjak di Bakorinda harus didasarkan pada pertimbangan matang sehingga setiap penempatan personel akan terwujud *"the right man in the right job in the right time"*. Untuk menempatkan personel pada jabatan tertentu.

BIN kini juga membutuhkan kerja sama dan pendidikan global bagi para anggota. Jika hanya mengandalkan pendidikan dan kursus di dalam negeri, tentunya tak memadai. Saat ini, postur SDM intelijen terkendala komposisi struktur yang sebagian besar terdiri atas kepangkatan bintang ke bawah yang memiliki kapasitas dan keterampilan intelijen yang minim.

Sedangkan, perwira intelijen yang persentasenya lebih kecil juga belum memiliki pola pengembangan profesi yang sesuai dengan tantangan zaman. Untuk mengatasi disparitas karier dan kompetensi itu, perlu sistem pengembangan SDM intelijen pada level perwira dengan berbagai program pendidikan di luar negeri.

Untuk itu, perlu penguasaan bahasa asing dan memilih lembaga atau perguruan tinggi di luar negeri yang tepat untuk pendidikan para perwira intelijen. ■

Momentum Hari Guru Nasional

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia,
Ketua Umum Ikatan Alumni Program
Habibie (IABIE)

Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November sebaiknya dijadikan momentum untuk mengembangkan profesi guru sesuai tantangan zaman. Peringatan HGN juga merupakan kesempatan untuk merancang postur guru nasional yang ideal untuk menggenjot daya saing bangsa.

Postur guru nasional kini tecermin dari guru yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Postur itu berjumlah sekitar 3.015.315 guru. NUPTK diberikan kepada guru yang statusnya PNS ataupun non-PNS sebagai nomor identitas resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan, yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Tema peringatan Hari Guru Nasional 2016 adalah "Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya". Kalimat mulia karena karya menekankan penghargaan untuk profesi guru dan tenaga kependidikan.

Penghargaan di atas diharapkan nyata dan bukan utopia. Puncak peringatan HGN 2016 dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

HGN 2016 diwarnai isu strategis terkait aspek profesionalitas guru. Antara lain, penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan, optimalisasi pendidikan inklusi, revitalisasi SMK menghadapi daya saing ketenagakerjaan, hingga penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.

Awal mula peringatan HGN dicetuskan oleh Wardiman Djojonegoro, yang saat itu menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan. HGN ditetapkan berdasarkan Keppres No 78 Tahun 1994. Penentuan HGN memiliki latar belakang terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945.

Pembentukan PGRI diawali dengan adanya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sejak 1912. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri atas para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah.

Guru inspiratif

HGN merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan guru ideal yang menjadi sosok inspiratif bagi siswa. Hingga saat ini, sosok guru yang inspiratif dan adaptif dengan kemajuan dunia jumlahnya belum mengembirakan. Sehingga lembaga pendidikan di

negeri ini masih dibelit oleh rutinitas dan belum menjadi lumbung kreativitas dan inovasi. Padahal, era globalisasi sekarang ini memungkinkan sekolah menjadi pendorong yang hebat bagi daya kreativitas masyarakat.

Untuk membentuk guru yang inspiratif, dibutuhkan wahana dan kesempatan bagi guru untuk mengikuti perkembangan global. Wahana tersebut untuk menunjang proses pengajaran serta meningkatkan profesionalitas guru.

Sedangkan, kesempatan yang harus diberikan untuk guru adalah mengikuti pendidikan lanjutan ke luar negeri atau mengikuti bermacam event tentang perkembangan metode pendidikan global dan iptek yang relevan.

Kita masih prihatin karena hingga kini, postur guru di negeri ini masih banyak yang gagap teknologi. Khususnya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, perkembangan TIK dan kemampuan mesin pencari lewat internet telah merevolusi tata kelola dan kebudayaan dunia. Serta mentransformasikan proses pendidikan begitu cepatnya. Mesin pencari juga sangat pemurah karena menyediakan sumber informasi yang tak terbatas sebagai bahan baku untuk berkreasi.

Eksistensi guru bagi suatu bangsa adalah kunci kemajuan. Bagi negara maju, guru adalah segalanya. Seperti dalam sikap pemimpin bangsa Jepang Kaisar Hirohito saat menghadapi kalah perang dan kehancuran bangsanya hingga di titik nadir. Untuk membangkitkan kembali bangsanya, Hirohito terlebih dahulu menata dan menghimpun para guru.

Begitu juga, dengan langkah bangsa Amerika Serikat dalam dasawarsa terakhir sangat progresif untuk membenahi postur guru. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Amerika yang mulai terkejar oleh Cina dan India. Pembenahan postur guru dipimpin oleh sosok reformis pendidikan Amerika Serikat, yakni Arne Duncan sebagai menteri Pendidikan AS.

Gerakan Duncan itu dipicu oleh laporan The President's Commission on Excellence in Education yang berjudul *A Nation At Risk: The Imperative for Education Reform*. Laporan itu menyebabkan gelombang reformasi pendidikan di Amerika Serikat, yang menekankan totalitas pengembangan kompetensi guru dan merancang ulang sistem sekolah serta mempersiapkan para siswa supaya unggul dalam kompetisi pada masa depan.

Gerakan Duncan diakselerasi dengan membentuk The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession. Tim tersebut bertugas mengembangkan standarisasi dan sertifikasi profesi guru serta dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS).

Misi NBPTS mengembangkan standarisasi kompetensi guru serta mengadvokasi reformasi pendidikan. Mereka yang duduk dalam lembaga ini adalah para guru kelas. Sejak NBPTS didirikan, pengembangan profesi guru di Amerika Serikat hasilnya sangat pesat.

Pemanfaatan teknologi

Berbagai terobosan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah cara tercepat untuk mencetak generasi emas Indonesia. Postur guru yang inspiratif bisa mewujudkan lingkungan pembelajaran generasi baru, yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi TIK terkini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, administrasi, serta interaksi dan kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, komunitas, dan sekolah yang lebih efektif dan murah.

Kini semua guru dari tingkat SD hingga SMA/SMK mestinya memiliki laptop, yang terkoneksi dengan sistem layanan informasi pendidikan lewat internet untuk menunjang proses pengajaran, mengembangkan profesionalitas, dan menggenjot daya kreativitas.

Dengan sistem ini, para guru bisa lebih efektif dalam bekerja sehingga bermacam penyakit rutinitas yang menimpa guru bisa teratasi. Selama ini penyakit rutinitas dan *tetek bengek* birokrasi telah membelenggu para guru sehingga dari tahun ke tahun, mereka terpaksa berkubang dengan masalah yang itu-itu saja. Akibatnya, tidak mampu meningkatkan kualitas dirinya sesuai dengan semangat zaman.

Kondisi ini sangat relevan dengan premis Root Bernstein penulis buku *Sparks of Genius*. Yang menyatakan siapa pun perlu keluar dari cara kerja rutin dan konformitas birokrasi supaya bisa melihat masalah dan tantangan pekerjaan dengan cara yang baru.

Dengan adanya sistem layanan elektronik kependidikan yang baik, para guru bisa mempersiapkan materi ajar lebih baik dan variatif serta bisa berkolaborasi dengan forum guru mata pelajaran. Kolaborasi para guru itu pada gilirannya, akan menyuburkan budaya mengunggah dan mengunduh konten pendidikan ataupun ilmu pengetahuan umum.

Program layanan elektronik kependidikan searah dengan program global World Wide Innovative Teacher Forum. Secara rutin, Indonesia mengirimkan wakilnya yang dihasilkan melalui seleksi lewat forum guru mata pelajaran.

Salah satu agenda menarik yang berbasis daya kreativitas adalah acara Innovative Teacher Competition. Dunia sekarang ini terfokus kepada usaha untuk meningkatkan lembaga pendidikan, yang mampu menggenjot daya kreativitas warga negaranya.

Cara lain untuk meningkatkan daya kreativitas utamanya bagi lembaga pendidikan adalah dengan merombak budaya belajar dan ruangan sekolah. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa pengaruh tata ruang, khususnya ruang kelas terhadap daya kreativitas cukup besar.

Ruangan kelas yang dilengkapi dengan perangkat TIK untuk proses belajar, sang guru dengan perangkatnya yang mampu mengakses materi ajar yang bermutu, serta infrastruktur kelas yang dirancang secara ergonomik dan nyaman secara lingkungan bisa memperbaiki proses kreatif siswa secara signifikan. ■

Debat Pilkada dan Kapasitas Kepemimpinan

● BIMO JOGA SASONGKO

Wakil Sekjen ICMI, Pendiri Euro Management Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelenggarakan debat antarpasangan calon (paslon) yang mengikuti pilkada. Debat bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang visi dan misi masing-masing kandidat.

Ada manfaat lain, yakni bisa melihat kapasitas berpikir dan karakter kepemimpinan para kandidat, yang akan mengendalikan roda pemerintah daerah. Kini masyarakat mengharapkan kepala daerah bertipe *civil servant* yang cerdas dan pandai berempati.

Debat pilkada juga bisa mencerahkan rasionalitas publik. Dalam acara debat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, masih tampak suasana tegang yang ditunjukkan seluruh paslon. Meski semangat berdebat, semua paslon mengalami defisit *sense of humour*.

Begitu juga, dengan sang moderator debat, masih belum mampu mencairkan suasana sehingga terjadi relaksasi. Faktor humor dalam debat politik sangat penting. Menstimulasi tawa tulus ternyata semakin penting bagi sektor korporasi, birokrasi, dan kegiatan politik.

Menurut penelitian konsultan SDM internasional Hay Group, tipe kepemimpinan atau manajemen paling efektif pada era sekarang ini adalah yang bisa menimbulkan rasa humor. Eksploitasi humor telah menjadi tren global, terutama di perusahaan multinasional.

Dunia butuh transformasi budaya kerja dari yang serbakaku dan terburu waktu, menjadi situasi kerja yang mampu berbagi emosi dan empati dibumbui dengan humor segar.

Menikmati suguhan humor dari politisi yang sedang berkampanye dapat meningkatkan kadar *endorphin* dan mengirimkan *dopamine* ke otak, yang bisa memberikan rasa senang dan penghargaan.

Humor telah terbukti secara empiris melalui berbagai penelitian dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan kualitas interaksi antara politisi dan publik. Penggunaan humor dalam memperbaiki kualitas

interaksi dan komunikasi juga didukung teori yang memadai.

Acara debat pilkada juga diharapkan membangkitkan sikap kritis masyarakat yang bisa mewujudkan transformasi demokratis di negeri ini dalam berbagai tingkatan dan profesi. Transformasi ini juga akan teratukulasikan dalam gerakan membongkar budaya politik afirmatif.

Budaya afirmatif menyebabkan gaya kepemimpinan nasional dan daerah yang terkesan kering dan hanya pamer keberhasilan pembangunan fisik yang semu.

Maraknya kasus kekerasan di tengah warga kota dan tindak kejahatan hingga meningkatnya kasus narkoba dan masalah kejiwaan merupakan tantangan berat bagi paslon Pilkada DKI Jakarta. Masalah itu terjadi karena beberapa faktor yang saling memengaruhi.

Antara lain faktor kemiskinan struktural, lonjakan pengangguran usia muda akibat sempitnya lapangan kerja, ketimpangan pendidikan, meningkatnya pengidap gangguan kejiwaan usia muda, dan semakin jauhnya rasa keadilan sosial.

Melalui debat pilkada, masyarakat bisa menakar dan mengidentifikasi gagasan, inisiatif, dan solusi paslon terkait pengembangan potensi warga. Kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dalam pilkada untuk merebut hati pemilih dan memenangkan pertarungan politik.

Masa depan dunia akan diwarnai fenomena luar biasa yang disebut *Ideagora*. Paslon hendaknya menekankan pentingnya pasar *Ideagora*. Hal itu terlihat dari animo masyarakat yang menganggap paslon bukan sekadar penyuluh aspirasi politik belaka.

Melainkan juga sebagai pasar bagi gagasan, inovasi, dan karya unik yang bermutu bagi kepentingan publik. *Ideagora* yang berasal dari kata *agora* dalam bahasa Yunani kuno, adalah arena yang menjadi pusat aktivitas politik dan perdagangan bagi warga Athena waktu itu.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini membuat *Ideagora* menjadi fungsi yang sangat strategis dan spesifik karena menjadikan pasar gagasan, inovasi, dan inisiatif yang cemerlang dapat diakses dan dikembangkan lebih lanjut oleh siapa pun.

Dalam konteks di atas, organisasi atau perseorangan dapat memanfaatkan kekuatan konvergensi TIK untuk membangun produk dan jasa yang baru dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya. Mekanisme di atas disebut pasar *Ideagora*.

Tak bisa dimungkiri kondisi DKI Jakarta masih terpuruk dalam berbagai bidang. Seperti infrastruktur transportasi, keadilan sosial yang timpang, kekerasan dan konflik sosial yang sering terjadi, serta sempitnya lapangan kerja.

Hal itu membuat rakyat Ibu Kota menunggu pemimpin baru yang mampu mengabdikan kepada rakyat, bukan seorang penguasa yang sangat represif. Seorang pemimpin yang mampu dalam percaturan budaya kosmopolitan.

Juga seorang pemimpin yang memiliki segudang gagasan, kreativitas, dan daya inovasi untuk mengangkat harkat sehingga bisa bersaing pada era globalisasi. DKI Jakarta dan daerah lain membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi bom waktu masalah sosial-ekonomi.

Dalam konteks DKI, bom waktu itu, antara lain, jumlah pengangguran yang cukup tinggi serta menyempitnya lapangan kerja yang layak dan berprospek baik. Tulang punggung utama bagi warga DKI adalah sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif.

Ironisnya, tulang punggung tersebut semakin rapuh dan kurang kompetitif. Indikator lain yang sangat mengkhawatirkan adalah semakin tidak jelasnya kontribusi sektor KUKM terhadap PDRB. Padahal, KUKM ikon ekonomi dalam memperluas lapangan kerja.

Paslon kepala daerah pada saat ini harus memiliki cara efektif untuk mencetak wirausaha muda. Saatnya pemuda didorong menjadi pelaku UMKM yang kreatif dan ulet. Sebab, peran UMKM terhadap ekonomi bangsa-bangsa di dunia sangat luar biasa.

Hal itu ditunjukkan Profesor Herman Simon, ilmuwan Jerman dengan mengambil kajian ekonomi di beberapa negara. Ternyata UMKM merupakan jagoan tersembunyi yang menjadi penyelamat ekonomi nasional.

Tak pelak lagi, para pemilih pilkada serentak yang diselenggarakan pada Februari 2017 nanti, cenderung menjatuhkan pilihannya kepada paslon yang memiliki gagasan hebat untuk mengembangkan SDM pelaku UMKM yang berdaya saing. ■

Pengembangan SDM Jurnalistik

● BIMO JOGA SASONGKO

Wakil Sekjen ICMI, Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE.

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) merupakan momentum untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) bangsa di bidang jurnalistik. Kompetensi wartawan harus selalu ditingkatkan karena tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Pengembangan SDM jurnalistik sangat penting, mengingat persaingan global semakin sengit. Kemampuan wartawan untuk berbahasa asing juga harus ditingkatkan melalui pendidikan atau kursus bahasa asing yang berkualitas. Kursus itu juga mengenai seluk beluk kebudayaan dan cara hidup suatu bangsa yang telah meraih kemajuan.

Pengembangan SDM jurnalistik juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini sempat kecewa dengan kinerja komunikasi publik oleh para pembantunya. Sehingga menyebabkan berita hasil pembangunan dan kebijakan pemerintah belum optimal bahkan sering tenggelam oleh berita *hoax*. Presiden berharap agar para menteri dan pejabat lainnya meningkatkan kemampuan komunikasi publiknya dengan cara bersinergi lebih baik lagi dengan para jurnalis.

Para Presiden RI memiliki cara dan gaya tersendiri untuk membantu meningkatkan kompetensi para wartawan. Seperti halnya kiat presiden ketiga RI BJ Habibie yang sering mengajak langsung rombongan wartawan untuk mengunjungi pusat peradaban unggul dunia dan industri canggih di negara maju. Agar mereka mengetahui dan bisa menulis secara detail tentang transformasi teknologi dan industri. Banyak wartawan yang diberi kesempatan magang di negara maju oleh Presiden BJ Habibie.

Peringatan HPN secara rutin diwarnai dengan penyerahan anugerah jurnalistik dan pers, bakti sosial, dan hiburan rakyat. Rangkaian peringatan kali ini sebaiknya juga merumuskan perlindungan bagi wartawan. Perlindungan profesi selain meningkatkan kompetensi hadapi persaingan global juga menyangkut aspek keselamatan kerja dan bentuk asuransi saat bertugas di lapangan, terutama saat menghadapi situasi genting. Berbagai kejadian di dunia mengakibatkan terluka atau tewasnya sejumlah wartawan yang melakukan tugas jurnalistik.

Masih hangat dalam ingatan kita tentang tewasnya beberapa wartawan media massa cetak dan elektronik dalam mengikuti *joy*

flight pesawat terbang jenis SSJ-2011 yang menabrak gunung di daerah Bogor beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan tragedi tugas profesi yang perlu dipikirkan lebih lanjut.

Acap kali keteguhan wartawan dalam meliput melampaui kewajiban profesinya. Karena media massa cetak maupun elektronik tergolong entitas industri maka kematian di atas merupakan kecelakaan kerja. Selama ini para jurnalis dihindangi dilema, yakni antara kewajiban profesi dengan faktor keselamatan kerja. Padahal, faktor keselamatan kerja merupakan keharusan manusiawi sekaligus aturan yang tidak boleh diabaikan oleh segenap jurnalis media masa.

Berbagai peristiwa yang terjadi, seperti bencana alam, kerusuhan massa, musibah kecelakaan transportasi dan peristiwa di daerah konflik bersenjata membuat naluri jurnalistik sulit dikendalikan. Lalu, menerjang mara bahaya yang jelas terlihat maupun yang sedang mengintip. Dengan peralatan jurnalistik, mereka berburu berita, video, dan gambar eksklusif.

Apa yang telah dilakukan para jurnalis tersebut memiliki dua sisi nilai sekaligus, yaitu herois dan tragis. Dikatakan tragis karena kurang menyadari dan mudah mengabaikan aspek keselamatan kerja. Padahal, masalah keselamatan kerja jurnalis sudah diatur sedemikian rupa. Untuk itu, para wartawan harus mendapatkan pelatihan dan perlindungan keselamatan yang baku.

Dalam konteks peliputan bencana alam, peperangan, kecelakaan, kerusuhan sosial dan politik, naluri jurnalistik tidak bisa dicegah oleh siapa pun. Kondisi tersebut dalam domain etika dan profesi lazim disebut dengan istilah *conundrum*, yaitu suatu kondisi yang sedemikian kompleks sehingga sangat sulit untuk dicarikan solusinya.

Dalam diskursus etika dan profesi yang berkaitan dengan profesi jurnalistik, terdapat dua pendirian untuk menjelaskan situasi dilematis yang dihadapi SDM jurnalistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John C Merrill dalam bukunya yang berjudul *Contraversies in Media Ethics*.

Dua hal tersebut adalah, pertama, apa yang dinamakan sebagai pendirian profesional. Pendirian ini menyatakan bahwa jurnalis harus mengutamakan kewajiban profesinya serta mengalihkan pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap menghambat dan menggugurkan profesionalitasnya, termasuk di dalamnya adalah pertimbangan yang bersifat manusiawi. Ini dengan alasan bahwa profesi merupakan pilihan tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh alasan apa pun.

Kedua, adalah apa yang disebut sebagai pendirian kemanusiaan. Pendirian ini mengemukakan bahwa jurnalis sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang muncul saat mencari berita maupun dampak pemberitaannya. Sepenting apa pun kewajiban profesional itu dapat digugurkan dengan alasan kemanusiaan. Antara pendirian profesional yang bersifat absolut serta pendirian humanistik yang bercorak relativistik, tampaknya, sangatlah bertentangan.

Aspek profesionalisme seakan-akan mendorong sekaligus memerintahkan jurnalis untuk mengeliminasi aspek humanisme. Sebaliknya, aspek humanisme dengan sendirinya memberikan peluang bagi jurnalis untuk bersikap permisif dan selalu minta untuk dimaafkan apabila telah dianggap menyalahi norma dan aturan.

Problem keselamatan kerja bagi jurnalis sebenarnya sudah banyak dibahas dan dicarikan solusi konkretnya. Bahkan, risiko tinggi seperti liputan di daerah konflik bersenjata sudah ada solusi konkretnya yang berupa *engineering directive* maupun berbagai pemahaman lainnya. Misalnya, jurnalis yang bertugas ke wilayah konflik bersenjata harus membekali diri dengan pengetahuan pendukung seperti teknik *survival*, kemampuan berbahasa dan budaya, sosiologi, psikologi, hukum, forensik, dan bahkan balistik.

Tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah membawa peralatan dan keperluan lain seperti makanan dan obat-obatan selama melakukan liputan. Namun, banyak pengusaha industri media massa, baik cetak maupun elektronik, yang belum memperhatikan secara baik aspek keselamatan kerja bagi SDM-nya. Pada prinsipnya, jurnalis juga merupakan pekerja industri. Implikasinya sama dengan para pekerja industri di Indonesia lainnya yang mana sekarang ini juga masih dibelit oleh berbagai persoalan keselamatan kerja.

Laporan organisasi buruh sedunia (ILO) sering menyatakan bahwa standar keselamatan kerja di Indonesia masih masuk dalam peringkat buruk jika dibandingkan dengan negara lain di Asia. Ini termasuk standar keselamatan kerja bagi SDM jurnalistik di negeri ini. Perlu dibentuk Komisi Nasional Keselamatan Kerja yang kredibel. Komisi di atas diharapkan independen, cerdas, dan berwibawa, seperti eksistensi OSHA di Amerika Serikat. Lembaga itu telah memiliki reputasi tinggi serta telah sampai kepada hal-hal detail dan spesifik yang sangat berguna untuk mengembangkan standarisasi keselamatan kerja di muka bumi ini. ■

Raja Salman dan Investasi

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum IABIE, Alumnus North Carolina State University

Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi membuka lebar pintu investasi. Butuh kejelian dan strategi investasi agar bisa menangkap peluang tersebut. Kunjungan Raja Salman berlangsung pada 1-9 Maret 2017. Raja akan menetap di Jakarta selama tiga hari kemudian mengunjungi Pulau Bali. Presiden Joko Widodo juga akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman.

Perlu intelijen investasi agar proposal yang disodorkan cocok dengan arah baru pembangunan yang tertuang dalam Visi 2030 Arab Saudi.

Peran intelijen investasi sesuai dengan tekad Presiden Jokowi, agar BUMN dan swasta bisa menerobos pasar nontradisional atau pasar yang baru di berbagai belahan dunia. Termasuk peluang yang telah disodorkan oleh rombongan Raja Salman.

Tidak mudah merebut peluang, apalagi investor Saudi selama ini kebanyakan bukan investor agresif. Indonesia perlu memperbanyak SDM intelijen investasi.

Tindakan investasi pada prinsipnya membutuhkan analisis menyeluruh untuk menjamin keamanan dana pokok dan mampu memberikan keuntungan memadai. Tindakan yang tidak memenuhi persyaratan di atas berarti tindakan spekulasi.

SDM intelijen investasi haruslah sosok mumpuni dan mengerti secara detail peluang investasi di suatu negara. Biasanya yang cocok dengan spesifikasi di atas adalah para diaspora Indonesia, yang menjadi pelaku investasi atau telah bekerja pada perusahaan internasional.

Mereka juga bisa dari kalangan teknolog, peneliti, atau kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Kini Arab Saudi tidak lagi mengedepankan sektor minyak dan gas semata, tetapi menekankan pentingnya diversifikasi perekonomian.

Arab Saudi ingin menjadi hub logistik tiga benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk itu, Saudi sedang gencar membangun infrastruktur pelabuhan laut dan udara yang paling maju di kawasan.

Salah satu diversifikasi ekonomi yang dilakukan Saudi adalah pengembangan sektor pariwisata. Pada April 2016 lalu, Pangeran Sultan bin Salman, ketua Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional (SCTH) Arab Saudi, telah meluncurkan Program Pascaumrah.

Sebuah inisiatif yang memungkinkan jamaah umrah mengonversi visa mereka ke visa turis. Sektor pariwisata sangat cocok menjadi kerja sama investasi unggulan antara Indonesia dan Arab Saudi.

Apalagi dalam lawatan kali ini, Raja Salman melakukan liburan wisata yang cukup lama di Pulau Bali dan destinasi wisata di sekitarnya. Saatnya proposal investasi yang diajukan Indonesia *incorporated* tidak didominasi sektor migas saja.

Sebenarnya, Presiden Joko Widodo telah membentuk menteri penghubung untuk meluncurkan kerja sama dan investasi dari luar negeri. Sepuluh orang menteri Kabinet Kerja dan dua kepala badan (BKPM dan Bekraf) diberi tugas mengatasi hambatan investasi.

Namun, langkah tersebut belum efektif karena kurangnya SDM intelijen investasi. Ada gagasan agar pegawai Kementerian Luar Negeri ditransformasikan menjadi intelijen investasi, tetapi belum memenuhi spesifikasi yang diharapkan.

Idealnya, intelijen investasi masing-masing bertanggung jawab terhadap kawasan tertentu. Pembagian kawasan yang sangat beragam itu tentunya membutuhkan banyak tim intelijen investasi yang setiap saat bekerja secara detail.

Peran menteri penghubung investasi kurang optimal dan sulit bertindak detail tanpa didukung tim ahli tangguh dan kredibel. Untuk menarik investor luar negeri tidak cukup dengan mengatasi hambatan birokrasi dan perizinan.

Perlu pendekatan nilai dan laporan hasil riset yang ditujukan kepada investor potensial. Untuk merebut peluang investasi, ditentukan kemampuan tim untuk memahami konsep *value investment* di berbagai negara.

Pakar investasi global, Benjamin Graham yang juga dijuluki bapak *value investing* menyatakan, investasi membutuhkan analisis komprehensif terkait rasio investasi, metodologi valuasi, serta mencari nilai untuk menjustifikasi spekulasi.

SDM intelijen investasi harus mampu mengeksplorasi beragam jenis metode valuasi investasi, untuk menangkap peluang bisnis dan investasi. Mereka harus mema-

hami dan akrab dengan para *fund manager* top dunia.

William Browne salah satu super investor global dari Tweedy Browne Company menyatakan, investasi itu ilmu sosial untuk menemukan bisnis yang memiliki probabilitas tinggi agar bertahan di pasar.

Untuk itu, Browne menyatakan dibutuhkan banyak intelijen investasi sebagai analisis yang bertugas mencari ide-ide investasi. Setiap anggota memiliki dimensi dan latar belakang berbeda serta fokus kajian pada negara yang berbeda.

Apalagi, perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya perdagangan frekuensi tinggi dan ETF (*exchange traded funds*), yang menyebabkan lebih banyak likuiditas ke pasar dan meningkatkan *spread* saham. Tentunya hal ini harus dikuasai.

SDM intelijen investasi sebaiknya juga direkrut dari warga negara yang memiliki kompetensi *hi-tech* dan karya inovasi yang bisa dijadikan *start-up nations*. Selain itu, mereka secara periode waktu sepadan terangnya sudah mengalami fase maturitas.

Mereka itu, antara lain, para penerima beasiswa Menristek BJ Habibie yang pada era 80-an dikirim negara untuk berkuliah di luar negeri. Selain itu, juga ada sejumlah teknolog dan mantan pengelola BUMN industri strategis sarat *hi-tech* yang kini banyak bekerja di luar negeri.

Ada baiknya SDM intelijen investasi mencontoh kehebatan SPARX Group, perusahaan *holding* manajemen aset di Jepang. SPARX adalah singkatan dari Strategic Portfolio Analysis Research eXperts (Ahli Riset Analisis Portofolio Strategis) yang dipimpin Shuhei Abe.

Perusahaan ini memiliki metode sangat bagus untuk melahirkan ide-ide investasi spektakuler dan menguntungkan. SPARX menghasilkan banyak riset investasi yang sangat kredibel dan berpengaruh dalam tataran global.

Salah satu laporan risetnya yang terkenal berjudul "Takeover Opportunities in Japan". Laporan riset ini berhasil menggaet banyak investor ke Jepang.

Selama ini Shuhei Abe berhasil mengembangkan investasi luar biasa di sektor logistik, perkeretaapian, dan properti di Jepang. Kunci sukses SPARX adalah mengirimkan banyak laporan riset hasil kerja intelijen investasi.

Laporan tersebut memancarkan ide-ide investasi hebat pada waktu yang tepat. ■

Kerja Sama Iptek Prancis-RI

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro Management Indonesia

Kunjungan bersejarah Presiden Prancis Francois Hollande ke Tanah Air merupakan momen menata kerja sama terkait SDM iptek kedua negara. Presiden Hollande membawa 40 pengusaha yang melakukan kerja sama investasi senilai 2,6 miliar dolar AS.

Selain agenda utama tentang kerja sama di sektor maritim dan ekonomi kreatif, sebaiknya perlu menjabarkan secara detail kerja sama SDM iptek yang selama ini telah terjalin, tapi belum optimal. Perlu kejelasan untuk mengambil manfaat kerja sama.

Sehingga tidak lagi terjadi defisit transaksi perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar 315 hingga 490 juta dolar AS selama ini. Defisit tersebut disebabkan Indonesia mengimpor berbagai jenis pesawat terbang dan infrastruktur pendukungnya dari Prancis.

Beberapa waktu yang lalu, publik sempat tercengang oleh pengumuman Airbus, yang mendapat pesanan dari salah satu maskapai Indonesia sebanyak 234 unit pesawat terbang. Kontrak yang ditandatangani di Istana Elysee merupakan pemecah rekor.

Nilai kontrak yang mencapai 18,4 miliar euro atau sekitar Rp 230 triliun tersebut merupakan order terbanyak yang pernah diterima sepanjang sejarah Airbus.

Kontrak di atas menjadi *leverage* bagi Airbus juga Prancis untuk mengatasi kelesuan ekonomi di kawasan Eropa. Mengingat pentingnya kontrak tersebut, sampai-sampai dihadiri langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande.

Dengan nilai kontrak yang fantastis itu, mestinya Presiden Prancis juga turut mendorong adanya *offset* SDM penerbangan untuk ratusan bahkan ribuan pemuda Indonesia, untuk belajar perguruan tinggi dan pusat riset penerbangan di Prancis.

Saatnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan BPPT merumuskan sistem *offset* dan ToT terkait dengan pembelian pesawat oleh pihak swasta dan BUMN.

Perlu meneliti seluruh dokumen pengadaan pesawat yang menyangkut dokumen teknis, sertifikasi, potensi *offset*, dan transfer of technology (ToT) ataupun skema pembiayaan.

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan ToT dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Apalagi, kondisi SDM penerbangan di Tanah Air kini masih kurang. Perlu program pengiriman lulusan SMA untuk kuliah ke Prancis.

Apalagi, strategi pembangunan Presiden Jokowi mengedepankan kemandirian bangsa dan penguasaan teknologi oleh putra-putri bangsa sendiri. Untuk itu, perlu memasukkan faktor pengembangan SDM teknologi dalam setiap perjanjian pembangunan infrastruktur dan pembelian teknologi canggih dari luar negeri.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem *offset*. Apalagi, produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi mumpuni.

Belanja BUMN, misalnya, PT Garuda Indonesia (Persero) yang setiap tahun menyiapkan belanja modal atau Capex (Capital Expenditure) sekitar 500 juta dolar AS setara Rp 6,8 triliun, untuk ekspansi bisnis perseroan dan anak usaha juga harus memakai skema *offset*.

Belanja Garuda tersebut, antara lain, pembelian pesawat untuk Garuda dan Citilink dari Prancis, yakni Airbus A330. Misalnya pembelian oleh Garuda harus disertai *offset*. Itu bisa saja dengan menggandeng industri dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia.

Dengan demikian, langkah Garuda yang terus bertransformasi sejalan pertumbuhan positif industri penerbangan dan rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur transportasi udara, dengan membuka bandara-bandara baru yang bisa berfungsi ganda.

Perlu transparansi pengadaan pesawat terbang. Transparansi itu menyangkut masalah teknis pesawat, skema pembiayaan, pengembangan SDM, hingga jadwal penyerahan pesawat untuk dioperasikan.

Kerja sama SDM iptek antara Indonesia-Prancis perlu diperluas. Banyak ahli dari Indonesia yang berkarya di Prancis dan mendapat posisi strategis di sana sebagai ilmuwan berkelas dunia. Beberapa di antaranya menjadi profesor tamu dan peneliti di ENSICA Toulouse.

Ilmuwan dari Indonesia lulusan Prancis juga banyak yang menjadi ahli pembuatan berbagai jenis turbin. Hal ini tentunya bisa menjadi solusi pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air, yang selama ini ber-

gantung kepada ahli dari Cina.

Para ahli Indonesia sebenarnya sudah mampu merancang bangun turbin dengan sertifikasi global. Para ilmuwan lulusan Prancis dan Eropa lainnya, siap bersinergi membentuk jejaring Indonesia Integrated untuk memajukan iptek.

Lewat Indonesia Integrated, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung atau melalui perusahaan/organisasi tempat mereka bekerja.

Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan, sebaiknya bersinergi dengan para diaspora di luar negeri, untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada di Indonesia. Di lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan Indonesia Integrated.

Kerja sama SDM iptek Indonesia-Prancis sebaiknya diawali dengan *task force* untuk mengelola sistem *offset*. Definisi *Offset* secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik.

Kalau kita membeli pesawat terbang senilai X dari negara lain, kita meminta timbal balik senilai Y dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis, dan nilai Y tersebut sebaiknya segera didetailkan.

Task force harus mampu menjalankan fungsi strategisnya, yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait *offset*. Kemudian, menyusun *data base* yang akurat, terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima *offset*.

Lalu, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *offset* serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema *offset* mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang terdiri atas *direct offset* dan *indirect offset*.

Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian.

Sedangkan *indirect offset* atau biasa disebut *offset* komersial biasanya berbentuk *buyback*, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. ■

Hardiknas dan Visi Kebangsaan

● BIMO JOGA SASONGKO

Lulusan North Carolina State University,
Ketua Umum IABIE, Wakil Sekjen ICM

E sensi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei terkait erat dengan visi kebangsaan menjadi negara maju. Peringatan Hardiknas 2017 bertema "Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas". Tema tersebut menyiratkan upaya besar agar SDM bangsa ini memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi untuk mendukung suksesnya Visi Indonesia 2045.

Cita-cita pendiri bangsa dan konstitusi negara menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, tentunya melalui sistem dan infrastruktur pendidikan yang terbaik.

Visi kebangsaan 2045 terwujudnya Indonesia sebagai negara maju sangat bergantung pada hasil pendidikan nasional. Visi kebangsaan tersebut sebenarnya memiliki alasan yang objektif. Ini tergambar oleh lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute. Mereka memproyeksikan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil serta rasio usia produktif yang dikelola dengan sistem pendidikan yang paripurna dalam rentang bonus demografi (tahun 2020-2035), Indonesia bisa mewujudkan diri sebagai negara maju dan unggul pada 2045.

Prasyarat utama terwujudnya visi adalah menyempurnakan sistem pendidikan nasional serta membangun infrastruktur pendidikan secara besar-besaran, sesuai dengan tantangan era gelombang keempat atau era konseptual. Orientasi konten atau kurikulum pendidikan harus mengedepankan daya kreatif dan inovatif untuk memacu kekuatan ekonomi bangsa.

Kini perkembangan sistem pendidikan dunia mengarah kepada pendekatan kontekstual atau *contextual teaching and learning* (CTL). CTL merupakan konsep belajar yang menuntut para guru dan dosen mampu mengaitkan antara materi yang diajarkannya dan situasi aktual. Konsep di atas juga mengharuskan guru dan dosen lebih banyak berperan sebagai pendorong daya inovasi dan kreativitas para siswa. CTL akan membuat sektor pendidikan klop dengan sektor industri.

Meneropong visi kebangsaan itu ada kendala besar terkait postur SDM yang eksis

pada saat ini. Postur itu tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebesar 47,37 persen masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 persen, dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 persen. Sedangkan lulusan diploma ke atas (DI, DII, DIII, dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 persen. Komposisi jumlah angkatan kerja di atas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Dengan kondisi postur SDM di atas, perlu totalitas program unggulan nasional terkait pendidikan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama, adalah program penjarangan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu, agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan, untuk prodi tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat.

Dengan kondisi tersebut, perlu ada terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri (LN). Ini agar mereka mampu menembus perguruan tinggi ternama di LN. Mereka diarahkan hingga diberi insentif lewat beasiswa atau kredit mahasiswa. Perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar sewaktu belajar di LN.

Sebaiknya, setiap pemerintah daerah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuat program pengiriman kaum belia lulusan SMA terbaik di daerahnya, untuk diberi beasiswa kuliah di LN. Apalagi, studi di negara maju, seperti di Jerman dan Prancis, biaya kuliahnya gratis. Perguruan tinggi di sana tergolong universitas terbaik di dunia.

Kedua, adalah kategori program vokasional berbasis *link and match* yang harus digenot secara totalitas. Penekanan program adalah mengembangkan sistem *apprenticeship* (magang) seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi, para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya *apprenticeship* yang

bermutu, dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK.

Ketiga, adalah kategori program pendidikan informal untuk segmen masyarakat berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial, khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang ada. Baik di tingkat desa maupun kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan di tingkat kabupaten/kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarannya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Jika ketiga kategori program unggulan nasional di atas berhasil dilaksanakan, pada saat bonus demografi bangsa berlangsung, SDM bangsa bisa dikelola dengan baik. Sekadar catatan, rasio sederhana bonus demografi dapat digambarkan bahwa di setiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 64 orang yang berusia produktif, sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Rasio usia produktif di atas 64 persen sudah cukup bagi Indonesia untuk bergerak menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang berlangsung dari 2020 dan akan berakhir pada 2035. Suksesnya program unggulan terkait pendidikan akan mengamini prediksi McKinsey Global Institute, yang menyatakan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi tujuh besar dunia pada 2030.

Peringatan Hardiknas 2017 merupakan momentum untuk meneguhkan *milestone* pengembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global. Dalam lintasan abad, kita bisa menyimak sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia. Perjalanan dari negara kurang maju sampai menjadi maju terlihat siklusnya semakin pendek. Pada era peradaban Mesir kuno perlu beberapa ribu tahun, peradaban Romawi dan Yunani kurang dari seribu tahun, era Renaissance dan peradaban Islam sepanjang 700-an tahun, Eropa kurang dari 400 tahun, Amerika Serikat perlu sekitar 200-an tahun, Jepang kurang dari 100 tahun, dan kemajuan naga Asia, seperti Korea Selatan dan Tiongkok adalah fenomena yang menarik karena butuh waktu efektif kurang dari 50 tahun untuk mewujudkan kemajuan. Indonesia berpeluang untuk mencapai kemajuan itu dalam waktu dekat. ■

Optimasi Peran Diaspora

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IASIE). Pendiri Euro Management Indonesia

Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan hadir untuk membuka Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta. Tujuan utama kongres untuk menghimpun potensi yang dimiliki diaspora Indonesia agar bisa memberikan nilai tambah dan pemikiran bagi pembangunan di Tanah Air.

Dialektika kehidupan dan gaya kepemimpinan Obama sangat menginspirasi masyarakat dan diaspora Indonesia. Konektivitas dunia yang berkembang pesat menjadikan negara seolah tanpa batas. Warga dunia semakin mudah menjalin kerja sama dan bekerja di negara lain.

Kondisi demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan segera memasuki era bonus demografi mestinya menjadikan bangsa ini memiliki jumlah diaspora nomor tiga dunia setelah Tiongkok dan India.

Diaspora adalah penghasil devisa yang sangat signifikan. Peran diaspora Indonesia juga penting dalam proses *global brain circulation* yang sangat menentukan bagi pengembangan iptek dan pendidikan. Begitu pun promosi industri budaya dan produk nasional bisa tersebar ke seantero dunia lewat diaspora.

Untuk mewujudkan hal di atas perlu mengoptimalkan langkah Indonesian Diaspora Network Global (IDNG). Saatnya para diaspora bersinergi bangun negeri dengan kiprahnya masing-masing di luar negeri.

Kongres Diaspora Indonesia adalah perhelatan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh IDNG. Jaringan ini dibentuk saat kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Los Angeles pada 2012. Kongres ke-4 kali ini untuk membahas berbagai isu ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia di tanah air maupun di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri RI perlu membuat sistem informasi dan menerbitkan kartu Diaspora Indonesia untuk memetakan secara detail kiprah dan potensi, terutama spesialisasi profesi dan domisili diaspora. Sistem informasi dan pembuatan kartu untuk memberikan dukungan kepada para diaspora terkait aktivitasnya di luar negeri, seperti misalnya dukungan fasilitas yang diberikan mereka dalam bentuk insentif dalam bisnis maupun investasi.

Sistem informasi dan kartu diaspora harus diikuti dengan kebijakan yang konkret untuk membantu para diaspora yang kini menjadi pekerja migran. Eksistensi IDNG harusnya bisa membantu pekerja migran yang kini butuh sistem kontrak mandiri. Kontrak mandiri merupakan proses penempatan tanpa memakai jasa komersial yakni PJTKI/PPTKIS di dalam negeri atau pihak agensi di negara penempatan.

Kontrak mandiri sangat dibutuhkan pekerja migran agar mereka tidak lagi terkena *overcharging* sebagai imbas langsung penempatan oleh PJTKI dan agensi. Hal itu juga bisa menghemat biaya penempatan buruh migran. Kontrak mandiri juga bisa membuat pekerja migran menjadi lebih tangguh dan lincah karena tertantang untuk terus mengembangkan diri. Mestinya Pemerintah Indonesia jangan kalah dengan Filipina yang telah memberi kebebasan bagi warganya yang menjadi diaspora dalam hal kontrak mandiri jika bekerja di luar negeri.

Pemerintah bersama IDNG harus segera merumuskan peta jalan untuk mengoptimalkan peran diaspora dan memperbanyak jumlahnya hingga menjadi tiga besar dunia. Hal itu tentunya membutuhkan strategi dan skema pembiayaan yang konsisten. Perlu program untuk mentransformasikan Diaspora Indonesia yang kini berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) berubah menjadi TKI formal dengan kompetensi serta lebih bermartabat dan bernilai tambah.

Para diaspora juga sangat penting untuk membantu merumuskan jenis profesi di luar negeri yang bisa diambil oleh WNI berpen-

didikan yang kini banyak menganggur. Seperti misalnya SDM kesehatan khususnya perawat yang terpaksa menganggur atau kerja tak menentu sebagai pegawai honorer. Sebaiknya mereka diarahkan menjadi pekerja migran. Hal ini tentunya perlu pemberian fasilitas pembiayaan. Sudah waktunya perbankan nasional menyiapkan plafon kredit.

Kini diaspora Indonesia banyak yang berperan penting dalam berbagai profesi dan bidang keilmuan. Seperti diaspora di Malaysia yang tergabung dalam Indonesia Brain Gain (IBG) Association Chapter Kuala Lumpur yang telah menerbitkan buku yang bertajuk *Indonesia Brain Gain*. Buku ini membahas tentang industri energi, penerbangan, inovasi teknologi, kewirausahaan, produk halal, dan tren global.

Tak pelak lagi, diaspora saat ini makin mendapatkan perhatian serius oleh semua negara. Posisi penyumbang diaspora terbesar dunia kini ditempati Tiongkok dan posisi kedua ditempati India. Kedua posisi ini seiring dengan total populasi kedua negara tersebut. Diaspora Indonesia layak belajar dari diaspora Tiongkok maupun India. Banyak di antaranya yang berhasil menjadi pemimpin korporasi dan organisasi global di luar negeri.

Semangat voluntarisme dari para diaspora harus terus difasilitasi agar mereka tetap memiliki kecintaan pada Tanah Air dan berbakti nyata demi pembangunan Indonesia.

Saatnya peningkatan *human capital investment* dengan mencetak sebanyak mungkin diaspora Indonesia yang unggul dan berkompeten. Karena permasalahan terkait dengan pekerja migran menyangkut tingkat pendidikan dan kompetensi yang memadai. Indonesia harus malu karena standar kompetensi pekerja migran asal Filipina rata-rata lebih tinggi. Karena sistem sertifikasi dan standar kompetensi di sana lebih kredibel, cepat berkembang, dan tertata dengan baik.

Tren global menunjukkan bahwa jumlah wirausaha dari kalangan pekerja migran saat ini berkembang pesat. Para diaspora sedang bertransformasi menjadi pengusaha atau wirausaha. ■

Leapfrogging untuk SDM

● **BIMO JOGA SASONGKO**
Ketua Umum IABIE,
Pendiri Euro Management Indonesia

Memasuki 2018 perlu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) bukan dengan cara atau langkah yang biasa-biasa saja. Melainkan perlu *leapfrogging* atau lompatan besar dalam membentuk SDM yang unggul dan berkelas dunia.

Menginjak 2018 kita sangat prihatin melihat Indeks Pendidikan Indonesia.

Tak kurang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ekonomi Indonesia tumbuh di level lima persen, itu menjadikan Indonesia masuk tiga besar negara G20 dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, setelah Cina dan India.

Namun, kualitas SDM Indonesia masih kalah dari negara ASEAN yang lain. Kualitas manusianya masih tertinggal dari negara tetangga. Menurut Menkeu, hal itu bisa dilihat dari hasil tes di lapangan.

Dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam dalam hal tiga jenis tes untuk kategori membaca, matematika, sains, al-hasil Indonesia ada di bawah. Bahkan, kalau diuji seluruhnya, kita jauh tertinggal dibandingkan Vietnam.

Bangsa ini tidak boleh mengingkari kenyataan berada di peringkat bawah dalam hal pendidikan. Justru kondisi riil itu pada 2018 harus menjadi cambuk untuk mengejar ketertinggalan hingga peringkat naik signifikan.

Kondisi memilukan di atas juga ditunjukkan dari hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), yang menunjukkan posisi Indonesia di urutan 64 dari 72 negara yang disurvei.

Penilaian dilakukan terhadap performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan membaca. Tujuannya, menguji dan membandingkan prestasi anak-anak demi peningkatan metode pendidikan dan hasilnya di setiap negara.

Melihat hasil survei di atas, tak pelak lagi kita harus berusaha sekuat tenaga melakukan

leapfrogging dalam mengembangkan SDM nasional.

Dibutuhkan program nasional unggulan di bidang pendidikan, yang bisa mencetak atau membentuk secara massal SDM kelas dunia.

Perlu restrukturisasi program penjarangan SDM kelas dunia yang sudah ada, tapi hasilnya belum optimal. Istilah *leapfrogging*, secara harfiah berarti lompatan katak, yang merupakan lompatan hebat pembangunan bangsa, khususnya dalam bidang pengembangan SDM.

Istilah *leapfrogging* pada mulanya digunakan untuk menyebut strategi pembangunan yang progresif dan transformatif, dengan merujuk dua negara, yakni Jerman dan Jepang yang memiliki lompatan hebat setelah kalah perang dan alami kehancuran total.

Menyongsong 2018, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa.

Hal itu terlihat dari perintah Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor kepada semua pihak yang terlibat pengelolaan dana abadi pendidikan agar mereka lebih produktif, programnya terukur dan tepat sasaran. Presiden ingin terjadi lompatan besar terkait SDM untuk pembangunan.

Salah satu program strategis nasional untuk pembentukan SDM kelas dunia lewat dana pendidikan Indonesia.

Selama ini dana pendidikan Indonesia dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang penerimaannya berasal dari investasi dana abadi.

Kini dana tersebut telah terakumulasi sekitar Rp 31 triliun. Masyarakat berharap, program LPDP yang merupakan investasi pemerintah di bidang SDM segera direstrukturisasi, baik secara organisasi, operasional, maupun metode seleksi.

Sejalan dengan yang ditekankan Presiden, kesempatan untuk meraih beasiswa dan pendanaan program LPDP seyogianya tidak salah sasaran.

Program itu jangan justru banyak direbut oleh orang kaya yang notabene sudah memiliki dana dan fasilitas.

Tahun ini LPDP menyiapkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk memberikan beasiswa kepada 12 ribu orang. Restrukturisasi LPDP harus menyentuh aspek pengelolaan dan metode seleksi hingga mencakup banyak negara yang dituju oleh penerima beasiswa.

Karena, selama ini pengiriman mengelompok ke negara tertentu. Padahal, pusat inovasi

teknologi dan kemajuan peradaban kini semakin menyebar di muka bumi.

Restrukturisasi program LPDP juga harus mengatur lebih baik lagi terkait penyerapan alumni dengan ikatan dinas yang sesuai kondisi zaman. Konsep ikatan dinas secara garis besar menyatakan, pihak pertama harus memberikan kontribusi terhadap pihak kedua ataupun sebaliknya dan bersifat mengikat dalam periode tertentu.

Ikatan dinas perlu disepakati sebelum para *awardee* berangkat ke luar negeri. Substansi surat ikatan dinas harus sangat jelas, termasuk penempatan dan kewajiban setelah lulus pada lembaga pemerintah ataupun BUMN.

Semua sudah diarahkan sangat detail dan sistemis sesuai kebutuhan pembangunan bangsa. Langkah restrukturisasi LPDP juga mencakup efektivitas durasi beasiswa. Perlu durasi belajar para mahasiswa yang diimbangi dengan pengalaman bekerja di luar negeri.

Dengan memberikan kesempatan bekerja di luar negeri, para penerima beasiswa ini dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari secara langsung, di perusahaan ataupun organisasi internasional, dan mendapatkan pengalaman serta jaringan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Arah dan sasaran LPDP perlu segera dirombak agar bisa ikut serta menggalakan program vokasional atau kejuruan yang berbasis *apprentice*, untuk membangunkan nilai tambah lokal yang diibaratkan raksasa yang masih tertidur.

Esensi nilai tambah lokal adalah berbagai usaha produksi atau jasa yang berlangsung di Tanah Air. Di mana proses pengolahannya menggunakan teknologi dan inovasi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi atau berlipat ganda jika dibandingkan harga bahan mentahnya.

Dengan prinsip nilai tambah yang *genuine*, bangsa Indonesia tidak sudi lagi mengimpor bahan mentah tanpa diolah secara signifikan terlebih dahulu. Program vokasional berbasis *apprentice* adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan.

Apprenticeship adalah bentuk pendidikan kerja yang mengombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus. ■

Polemik Perguruan Tinggi Asing

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia,
Lulusan North Carolina State University,
North Carolina, USA.

Pemerintah membuka pintu lebar masuknya perguruan tinggi asing (PTA). Langkah pemerintah itu menimbulkan polemik hebat. Pro dan kontra mencuat tanpa ruang lingkup yang jelas. Itu terjadi karena tujuan pemerintah membuka cabang PTA belum terdefinisi detail. Pemerintah baru sebatas menyatakan, PTA hanya akan membuka program studi yang terkait *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM). Itu pun belum disertai karakteristik STEM seperti apa yang dibutuhkan.

Juga belum jelas seperti apa keterkaitan prodi PTA dengan kebutuhan pembangunan nasional saat ini dan mendatang. Mestinya, prodi STEM yang akan menjadi fokus PTA terkait dengan penguasaan iptek dalam dimensi *systems, process, dan product*.

Dengan demikian, prodi yang dijalankan tidak hanya mencetak SDM yang hanya menguasai kulitnya teknologi saat ini, tetapi bisa menguasai kuning telurnya teknologi terkini. Jadi, prodi tersebut bisa langsung kompatibel dengan peningkatan kapasitas inovasi nasional yang pada saat ini telah tertinggal.

Penguasaan teknologi perlu ruang imajinasi yang ditunjang laboratorium yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seharusnya, misi prodi STEM mampu meningkatkan daya kreatif bangsa untuk menciptakan bermacam inovasi. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang unggul, menurut Steve Jobs, harus *"be hungry and foolish in mastering technology"*. Menurut BJ Habibie, penguasaan STEM bisa melalui beberapa jalur. Jalur pertama adalah akuisisi teknologi melalui proyek transformasi berupa program bertahap di lapangan kerja. Jalur ini akan melahirkan insinyur profesional yang lahir sebagai produk pembudayaan dalam lapangan kerja. Ujiannya bukan berupa tes tulisan, melainkan desain dan produk nyata.

Jalur kedua adalah lewat pendidikan, untuk kemudian menguasai teknologi melalui sekolah menengah kejuruan (SMK), uni-

versitas, S-1, S-2, dan S-3 yang didukung dengan laboratorium dan bengkel inovasi. Dua jalur tersebut, menurut BJ Habibie, memiliki peran strategis untuk membangun SDM terbarukan, manusia bersumber daya iptek secara berkesinambungan. Sesuai dengan filosofi sekumpulan Burung Bangau yang terbang bersama menembus rintangan alam.

Mereka harus terbang maju bersama dalam kondisi alam seperti apa pun. Filosofi itu analog dengan akuisisi untuk menguasai teknologi mesti secara berjenjang dan maju bersama berkesinambungan. Filosofi di atas harus menjadi pedoman jika ingin mencetak SDM bidang STEM lewat perguruan tinggi. Sebetulnya, ada alternatif atau pilihan yang lain yang lebih praktis dan efektif, yakni pengiriman besar-besaran pemuda Indonesia langsung kuliah di luar negeri (LN) pada perguruan tinggi terkemuka yang diawali dengan program supermatrifikasi dan pelatihan bahasa asing.

Kemudian, dilakukan tes masuk perguruan tinggi LN bertempat di Jakarta. Alternatif di atas membutuhkan metode khusus yang dirumuskan oleh mereka yang pernah sukses belajar di LN. Mereka juga perlu memahami bahwa tradisi ilmiah dan keunggulan ristik di universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun, tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia. Karena, hal itu sudah berakar kuat dengan budaya bangsanya. Juga, sudah bersejawa dengan karakter dan etos kerja bangsa maju itu.

Pemerintah perlu mengkaji secara teliti terkait pilihan warga negara apakah mereka sebaiknya kuliah langsung di LN atau cukup masuk PTA yang beroperasi di Indonesia.

Saatnya pemerintah membantu masyarakat membuat perbandingan yang akurat tentang prospek dan biaya untuk dua pilihan di atas. Bisa jadi biaya kuliah PTA justru lebih mahal ketimbang kuliah langsung ke LN.

Apalagi, beberapa PT terkemuka di Eropa hingga kini telah membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya. Mereka hanya mengeluarkan biaya hidup selama belajar. Pemerintah menyatakan tidak akan mengontrol atau membatasi besaran atau tarif biaya kuliah yang dipasang PTA, berbeda dengan besaran uang kuliah di PTN, yang tetap ada

jatah insentif 20 persen untuk mahasiswa yang kurang mampu.

Dengan demikian, besaran uang kuliah PTA nuansanya sangat liberal dan tentunya sangat mahal. Polemik beroperasinya PTA di Indonesia sebaiknya disertai dengan solusi alternatif yang bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan terbaik. Perlu pengkajian yang mendalam antara memasukkan pemuda ke PTA dengan biaya yang lebih mahal dari PTS yang sudah eksis ataukah lebih baik mendorong pemuda Indonesia langsung kuliah di LN dengan biaya yang relatif sama dengan kalau mereka masuk PTA di dalam negeri.

Jika mereka langsung belajar di LN, lebih banyak nilai tambah dan lebih adaptif dengan kemajuan zaman. Karena, para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar ke luar negeri. Begitu pun dari segi rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami iptek secara komprehensif. Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirimkan ke LN karena sistem pendidikan di sana yang menekankan sistem *lab based education* (LBE).

Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih. LBE tidak mungkin bisa dicabut atau dipindahkan secara instan oleh PTA yang beroperasi di Indonesia. Karena, sistem LBE ini juga terkait akar budaya ilmiah dan mentalitas atau karakter yang melekat pada sebuah bangsa maju. Pengiriman mahasiswa ke luar negeri lebih menjangkau tantangan masa depan. Hal ini searah dengan paradigma *global brain circulation*, seperti yang dikemukakan oleh Paul Krugman, penerima hadiah Nobel bidang ekonomi.

Mereka yang belajar di luar negeri sejak lulus SMA lebih mudah menjadi sosok versatilis. Sosok itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman sewaktu kuliah dan magang kerja di LN sebagai modal penting untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Mereka juga mampu menyerap nilai dan karakter unggul sebuah bangsa maju serta memahami transformasi sosial dan adanya disrupsi teknologi yang tentunya hadir lebih dulu di negara maju ketimbang di Tanah Air. ■

Pembentukan UU Inovasi

● **KOMANG WIRAWAN**
Lulusan RWTH Aachen University

● **BIMO JOGA SASONGKO**
Lulusan FH Pforzheim Jerman

Masih rendahnya kinerja ekspor dan investasi bukan semata akibat hambatan regulasi, birokrasi, dan infrastruktur. Setelah hambatan dihilangkan dan infrastruktur dibangun, tetapi tetap saja kinerja ekspor dan investasi belum menggembirakan.

Kini inovasi menjadi faktor yang penting untuk mendongkrak kinerja ekspor dan investasi. Untuk itu Indonesia memerlukan Undang-undang Inovasi. Faktor inovasi adalah jawaban atas paradoks, mengapa kapasitas dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar. Namun, kinerja ekspor dan nilai investasi masih kalah dengan negara tetangga. Hal tersebut pernah dikecewakan oleh Presiden Joko Widodo.

Sekadar catatan, Thailand mampu meraup 231 miliar dolar AS dari ekspor. Jumlah itu tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia 184 miliar dolar AS dan Vietnam mencapai 160 miliar dolar AS. Sementara Indonesia hanya 145 miliar dolar AS.

Volume ekspor Indonesia sebagian besar dari sektor industri pengolahan yang bernilai tambah kecil karena kurang inovatif. Celakanya, industri pengolahan banyak memakai bahan baku impor. Contohnya, garam impor hingga plastik impor.

Masalah kinerja sektor investasi di daerah yang belum optimal juga disebabkan faktor inovasi. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah kurang optimal karena belum menekankan aspek inovasi.

Meskipun implementasi UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah ditunjang oleh perda untuk membangun Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hal itu masih belum efektif karena infrastruktur tersebut belum disertai dengan proses inovasi yang memadai.

Pembentukan UU Inovasi bisa memberi

arah yang jelas terhadap eksistensi Science Technology Park (STP) atau Taman Ilmu dan Teknologi yang kini ada di setiap kota. Menurut International Association of Science Parks (IASP), eksistensi STP harus mampu menjadi inkubator dan mendorong pembentukan perusahaan yang berbasis iptek yang mengedepankan inovasi.

Di dalam UU Inovasi, idealnya terdapat kelembagaan, yakni Otoritas Inovasi Nasional (OIN). Bertugas mengelola dan mengembangkan secara progresif kapasitas inovasi nasional dan daerah. Otoritas juga bertanggung jawab terhadap percepatan difusi inovasi segala lini serta melakukan literasi dan edukasi. Kelembagaan OIN sebaiknya langsung di bawah Presiden.

Adanya UU Inovasi diharapkan bisa mendongkrak indeks inovasi. Peringkat Indeks Inovasi Global Indonesia kini makin tertinggal. Berdasarkan Global Innovation Index 2017, Indonesia berada di posisi 87 dari total 127 negara. Posisi ini hanya naik satu peringkat dibandingkan posisi pada 2016. Dibandingkan negara di ASEAN, peringkat Global Innovation Index Indonesia juga tertinggal. Misalnya, Malaysia berada di posisi 37, sedangkan Vietnam berada di posisi 47.

Realitas rendahnya indeks inovasi tidak cukup hanya dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sistas P3 Iptek).

Karena belum ada lembaga tersendiri yang mengelola dan mengembangkan inovasi, sistem inovasi di negeri ini pun masih belum efektif dan kurang berdaya. Sistem inovasi sebenarnya mencakup basis iptek (termasuk aktivitas pendidikan, aktivitas litbang, dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan nonbisnis serta masyarakat umum), dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang.

Eksistensi OIN mampu menyinergikan tiga unsur utama dalam sistem inovasi, yakni pertama unsur kelembagaan (litbang, pendidikan, industri, intermediasi, keuangan, atau perbankan). Unsur kedua adalah jejaring kelembagaan sistem inovasi. Dan unsur yang ketiga adalah instrumen kebijakan berupa

perangkat hukum dan peraturan yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pembiayaan inovasi (misalnya, modal ventura), pengelolaan risiko teknologi, standarisasi, dan sertifikasi.

Pembiayaan inovasi nasional pusat dan daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Perlu dibentuk *innovation fund* semacam dana abadi. Dana itu diharapkan berasal dari APBN/APBD, CSR perusahaan dan sumbangan dari pihak ketiga dari dalam ataupun luar negeri. Dana tersebut sebaiknya dikelola oleh badan otonom.

Betapa rendahnya investasi nasional dalam penelitian dan pengembangan yang kini kurang dari 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini tentunya menghambat kapasitas Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju.

Solusi persoalan daerah tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur. Yang lebih penting adalah melahirkan berbagai macam inovasi dari dan untuk masyarakat. Pembentukan Citizen Innovation Laboratory atau laboratorium inovasi warga seperti yang ada di DKI Jakarta perlu ditiru daerah lainnya. Laboratorium itu bisa melahirkan ribuan penggerak inovasi warga.

Presiden Joko Widodo meminta agar inovasi layanan publik harus mendapat perhatian lebih. Keberadaan OIN mampu membenahi manajemen inovasi nasional dan daerah agar lebih efektif dan bisa diakses seluas-luasnya oleh publik.

Manajemen inovasi merupakan disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan inovasi dalam proses produk dan pelayanan, organisasi, hingga pelanggan dan pasar. Target dan tujuan manajemen inovasi adalah memungkinkan organisasi untuk merespons berbagai peluang dan menggunakan upaya kreatif untuk memperkenalkan ide-ide, proses, atau produk serta layanan baru. Dengan adanya manajemen inovasi yang baik, bisa memicu dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dari segenap bangsa.

Hasil inovasi teknologi tepat guna tingkat kabupaten/kota sebaiknya segera ditransformasikan menjadi wahana difusi inovasi. Dalam domain sosial, difusi inovasi bagian penting proses pembangunan manusia. Kini inovasi merupakan bagian kuning telurnya pembangunan SDM suatu negara maju. ■

Making Indonesia 4.0

• BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia,
Ketua Umum IABIE

Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center (JCC). Acara bertema "Implementasi Industri 4.0 dalam rangka Transformasi Lanskap Industri Nasional Menuju Top 10 Ekonomi Dunia 2030". Bersamaan dengan itu, Presiden Jokowi juga meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era *digital manufacturing*.

Penerapan Industri 4.0 dipelopori oleh negara Jerman yang sejak 2015 telah merampungkan kerangka kerja yang akan diterapkan pemerintah mulai 2020. Ratusan perusahaan di Jerman telah terlibat dalam program nasional itu dengan total investasi mencapai 140 miliar euro. Jenis industri yang sudah siap menerapkan Industri 4.0 ini adalah industri manufaktur, otomotif, serta industri teknologi informasi dan komunikasi.

Ekosistem Industri 4.0 ditandai dengan terwujudnya pabrik cerdas. Ada beberapa persyaratan untuk mewujudkan skenario Industri 4.0. Antara lain, kemampuan dalam hal interoperabilitas atau kesesuaian. Yakni, Kemampuan mesin, perangkat sensor, dan tenaga kerja untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain lewat *Internet of Thing* (IoT).

Kemudian juga kemampuan untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model *manufacturing digital* dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan dan pengolahan data dari sejumlah sensor untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan.

Merujuk World Economic Forum dalam laporannya yang berjudul *The Next Economic Growth Engine Scaling Fourth Industrial Revolution Technologies in Production*, kita bisa memprediksi bahwa industri manufaktur global akan totalitas mewujudkan era Industri 4.0 pada 2025.

Making Indonesia 4.0 pada saat ini masih terkendala oleh indeks konektivitas yang masih rendah. Kondisi *digital divide* atau ketimpangan digital di Indonesia timur dan barat menyebabkan peringkat Indonesia tergolong rendah, yakni indeks konektivitas

hanya 4,34. Hal ini berada di urutan 111 dari 176 negara yang disurvei oleh International Telecommunication Union (ITU).

Indeks pembangunan TIK Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura yang memiliki nilai indeks 8,05, Malaysia 6,38, Brunei Darussalam 6,75, Filipina 4,67, dan Vietnam 4,43. Dengan kondisi indeks konektivitas seperti di atas, sulit bagi Indonesia untuk menyongsong era Industri 4.0.

Indonesia harus mempersiapkan SDM beriptek dan pekerja sektor industri untuk menghadapi era Industri 4.0 dalam jumlah yang memadai. SDM tersebut untuk menguasai teknologi pendukung, yakni bidang teknologi *Internet of Things* (IoT), *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Additive Manufacturing*, *Augmented Reality*, *Big Data*, *Autonomous Robots*, *Simulation*, dan *platform integration*.

Bagi kaum pekerja era Industri 4.0 bisa berdampak negatif. Karena mereduksi beberapa bidang profesi yang pada akhirnya memangkas jumlah tenaga kerja. Namun begitu, kehadiran era itu tidak sepenuhnya berdampak negatif karena akan melahirkan jenis profesi yang baru.

Dalam era tersebut, akan terjadi perang untuk memperebutkan SDM berbakat dan berkompentensi yang tinggi. Perebutan itu dari tingkat lokal hingga global. Dalam era ini, sebagian besar tenaga kerja akan menjadi pekerja kontrak atau alih daya. Pola ketenagakerjaan seperti ini tidak bisa lagi diatur dengan undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang ada sekarang ini. Masalah jam kerja, bobot kerja, dan hal-hal normatif pekerja sudah tidak relevan lagi dengan peraturan yang berlaku selama ini.

Dampak ketenagakerjaan pada era Industri 4.0 mulai dirasakan oleh para pekerja di Jerman. Seperti dirasakan oleh pekerja industri manufaktur logam, mesin, dan elektronik di Jerman yang menyatakan bahwa Industri 4.0 telah menjadikan proses produksi menuntut adanya *smart factory* dan *smart products*.

Hal tersebut menimbulkan masalah baru, yakni tuntutan keterampilan yang lebih tinggi serta soal jaminan sosial dan kecocokan model kerja dengan hukum yang berlaku. Hampir semua organisasi pekerja di Eropa menyatakan bahwa datangnya era di atas menimbulkan lebih banyak hubungan kerja yang bersifat *freelance* dan alih daya.

Menyongsong era Industri 4.0 perlu mentransformasikan keterampilan tenaga kerja yang terkait jenis teknologi yang menjadi pilar utama. Hal itu juga sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah angkatan kerja Indonesia pada 2017 sebanyak 131,55 juta.

Sebagian besar atau sekitar 80 persen di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih. Penataan kompetensi ketenagakerjaan sebaiknya memproyeksikan periode bonus demografi hingga 2030. Bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 70 persen terhadap total angkatan kerja. Jangan sampai bonus demografi justru menjelma menjadi bencana karena negara gagal mencetak angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Diperkirakan mulai 2020, akan terjadi gelombang pasang hingga tsunami yang mengganggu lapangan pekerjaan warga dunia. Jika nanti robot dan *artificial intelligence* sudah masuk ke dalam industri secara masal, perlu dipersiapkan sematang mungkin tenaga kerja.

Prediksi Mc-Kinsey Global Institute (MGI) menyatakan bahwa Indonesia bisa masuk peringkat ke-7 ekonomi dunia pada tahun 2030 jika mampu mencetak jutaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Struktur ketenagakerjaan di Tanah Air hingga saat ini masih didominasi oleh pekerja dengan latar belakang lulusan SD dan SMP.

Untuk menjadi 10 besar ekonomi dunia, Indonesia harus bisa mencetak sekitar 113 juta tenaga kerja terampil dan ahli supaya bisa menghadapi era Industri 4.0 dengan baik. Seperti skenario yang dibuat oleh MGI. Para pekerja itu harus mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan di industri manufaktur yang berbasis Industri 4.0. Jika pemerintah gagal mencetak ratusan juta *tenaga kerja di atas*, mimpi menjadi tujuh besar ekonomi dunia bisa bubar.

Skenario Making Indonesia 4.0 dengan melihat kondisi terkini memang sangat sulit terwujud. Apalagi, kekuatan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh faktor konsumsi masyarakat, bukan sektor manufaktur yang tangguh. Modal Indonesia saat ini untuk memasuki era itu hanyalah faktor bertumbuhnya konsumen domestik yang jumlahnya sekitar 90 juta orang hingga tahun 2030. ■

Revitalisasi Pelayaran Rakyat

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro Management Indonesia.

Musibah tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba menimbulkan duka seluruh bangsa. Ada hikmah yang besar dari musibah tersebut, yakni perlu segera revitalisasi pelayaran rakyat (Pelra).

Kondisi Pelra kini didera berbagai persoalan krusial. Perlu program revitalisasi yang tidak hanya membutuhkan dana besar, tetapi juga persiapan SDM kompeten terhadap pengadaan dan peremajaan kapal rakyat.

Sebenarnya sudah banyak SDM ahli perkapalan yang dimiliki bangsa Indonesia. Mereka lulusan dalam dan luar negeri yang mampu mendesain berbagai jenis kapal yang cocok untuk Pelra.

Kesulitan aspek desain, produksi, dan bahan baku yang selama ini menjadi kendala sebenarnya sudah ada solusinya. Bahan baku konstruksi kapal rakyat dari kayu pilihan selama ini merupakan kendala terbesar.

Namun, kini sudah ada solusinya dengan material baru yang lebih *feasible* dan mudah diproduksi. Selain masalah desain dan produksi, pelayaran rakyat juga diadang masalah kompetensi para pelaut.

Perlu program aksi masif untuk memberikan pendidikan bagi SDM pelayaran yang selama ini beroperasi tanpa pengetahuan pelayaran memadai. Saatnya memberikan pelatihan gratis bagi puluhan ribu pelaut.

Ini untuk meningkatkan kompetensi pelaut di Pelra agar mereka bisa berlayar lebih aman dan paham ilmu pelayaran.

Pembenahan Pelra yang pernah dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini masih tersendat. Perlu akselerasi karena kondisi Pelra semakin rawan kecelakaan fatal.

Revitalisasi juga bisa meningkatkan konektivitas laut di Tanah Air menjadi lebih efisien dan efektif. Operasional dan layanan Pelra selama ini tidak terjadwal dengan baik. Pelayaran masih berdasarkan pesanan.

Implikasi negatifnya banyak, antara lain tidak adanya manifes penumpang dan barang. Kalau terjadi kecelakaan seperti kasus KM Sinar Bangun, sulit ditangani dengan cepat. Dalam operasionalnya, Pelra mengalami dilema okupansi dan pemborosan bahan bakar.

Masalah ini sama dengan yang dialami

perusahaan kapal niaga nasional dan BUMN, yakni kapal dalam perjalanan kembali dalam kondisi kosong setelah mengantar penumpang dan barang.

Untuk itu, pemerintah juga harus memberikan insentif atau subsidi beban operasional karena kapal pulang kosong tanpa muatan. Perlu cetak biru bagi pelayaran rakyat sesuai karakter daerah. Selama ini, cetak biru Pelra belum jelas bentuk ataupun gambar desainnya.

Implikasinya, kalau gambar desainnya tidak ada, tidak ada perusahaan asuransi yang mau menjamin jika terjadi kecelakaan atau tenggelam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran Pasal 15 ayat 1 dan 2, perusahaan Pelra pada umumnya identik dengan konstruksi kapal kayu yang dioperasikan pelaut tradisional atau bakat alami dengan model manajemen yang sangat sederhana.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93/2013 tentang penyelenggaraan angkutan laut, Pelra adalah kegiatan angkutan laut yang menggunakan kapal layar tradisional yang sepenuhnya digerakkan tenaga angin, kapal layar motor berukuran sampai 500 GT (*gross tonnage*) yang digerakkan tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu, serta kapal motor dengan ukuran antara 7 GT sampai 35 GT.

Menurut pengurus organisasi pelayaran rakyat, eksistensi kapal Pelra kian tersingkir dan dieliminasi dari aktivitas logistik. Akibatnya, jumlah kapal kian menyusut. Dalam tiga tahun terakhir, menyusut hingga 50 persen karena krisis permodalan dan dipinggirkan sebagai moda angkutan dan usaha logistik.

Langkah pertama program revitalisasi Pelra adalah menetapkan standar nasional kapal pelayaran rakyat dengan bobot yang sesuai kondisi alam, jalur pelayaran, serta operasional mereka sebagai *feeder* kapal niaga nasional khususnya untuk angkutan perbatasan, daerah perairan pedalaman, dan program rintisan.

Adapun bobot kapal yang perlu standarisasi dan penataan ulang supaya tidak timbul konflik kepentingan dengan kapal niaga nasional adalah maksimal 174 GT untuk angkutan antarpulau (di bawah bobot kapal niaga nasional) atau maksimal 35 GT untuk angkutan perairan pedalaman atau sesuai level air.

Perlu peningkatan jumlah serta kualitas

SDM sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi. Proyeksi kebutuhan SDM pelayaran hingga 2019 mencapai 1,3 juta orang.

Tingginya kebutuhan SDM pelayaran, baik untuk memenuhi kebutuhan perhubungan laut nasional maupun asing memerlukan dukungan peningkatan kualitas serta kapasitas Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran, dan lainnya.

Perlu *link and match* antara lembaga pendidikan dan riset dengan industri transportasi, serta regulator untuk mendukung terwujudnya sistem pelayaran nasional berkelas dunia. Perlu *SDM shipping and ship building* dan perombakan diklat pelaut.

Sebagai negara maritim, Indonesia perlu mengembangkan SDM bidang kemaritiman ahli. BPPT sebaiknya konsolidasi kompetensi dan merangkul kembali SDM ahli yang pernah disekolahkan oleh negara di luar negeri.

Banyak ahli kemaritiman dan teknik perkapalan yang pernah diberikan beasiswa ke luar negeri oleh Menristek BJ Habibie pada era 80-an. Tentunya, mereka pada saat ini kompetensinya sudah sangat mumpuni.

Dengan demikian, mereka sangat tepat membantu revitalisasi Pelra dan program nasional kemaritiman yang lain. Dibutuhkan pula, penyediaan infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik yang ahli dalam bidang maritim.

Selain itu, wahana pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Kelautan. Ada beberapa faktor yang masih menjadi masalah pelik dalam pengembangan pendidikan kemaritiman.

Masalah yang krusial adalah pemenuhan guru produktif serta perbaikan infrastruktur pendidikan maritim.

Saat ini, banyak guru di SMK kemaritiman yang sejatinya bukan guru produktif, melainkan dikaryakan menjadi guru produktif.

Selain itu, SMK kemaritiman di Indonesia juga masih kekurangan laboratorium dan peralatan praktik. Ini tentu memengaruhi kompetensi lulusan SMK di bidang kemaritiman di dunia kerja.

Peralatan seperti simulator kapal untuk praktik siswa bisa diadakan melalui kerja sama dengan BPPT dan industri strategis, seperti PT LEN, PT DI, dan PT PAL.

Simulator yang digunakan dalam pembelajaran di SMK bidang kemaritiman sesuai standar kinerja yang sudah disusun BPSDM Kemenhub dalam hal penggunaan simulator dalam pembelajaran. ■

Industrialisasi Indonesia-Korsel

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia,
Ketua Umum IABIE

Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan (Korsel) belum lama ini, sangat relevan untuk mempelajari secara komprehensif bagaimana kebangkitan industri Korsel bisa terwujud dalam waktu yang relatif singkat.

Korsel merupakan mitra strategis Indonesia dan investor kelima terbesar Indonesia. Indonesia perlu belajar dan mencontoh kebangkitan nasional Korsel yang ditandai dengan suksesnya program industrialisasi serta monetisasi industri budayanya yang tumbuh luar biasa dan mampu mendunia.

Jika kita menengok sejarah, pada dekade 70-an sebenarnya Korsel dan Cina yang menyandang sebutan Macan Asia itu, memulai strategi industrialisasi yang mirip dengan Indonesia.

Ketiga negara tersebut sama-sama sedang mencetak sumber daya manusia (SDM) teknologi sebanyak-banyaknya untuk menjalankan strategi transformasi teknologi dan industri.

Waktu itu, Indonesia juga memiliki strategi transformasi teknologi dan industri yang dipimpin Menristek BJ Habibie dengan membentuk sembilan wahana industrialisasi nasional serta pusat pengembangan iptek (Puspiptek) di Serpong.

Begitu juga, ada program pengiriman ribuan lulusan terbaik SMA dari seluruh Tanah Air. Dengan cara pemberian beasiswa ikatan dinas kepada mereka untuk berkuliah di perguruan tinggi terkemuka di negara maju.

Semua langkah Indonesia saat itu, boleh dibilang kongruen atau sebangun dengan langkah Korsel dan Cina. Namun dalam perjalanannya, strategi transformasi di Indonesia terkendala oleh kondisi politik sehingga stagnan dan teralienasi.

Dan akhirnya, Indonesia tertinggal oleh Cina dan Korsel. Fenomena ketertinggalan itu antara lain terlihat dari kondisi industri elektronik dan telekomunikasi, yang pada era 70-an sebenarnya BJ Habibie telah menyiapkan wahana pengembangan jenis industri di atas.

Yakni, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Lembaga Elektronika Nasional (LEN), dan berbagai macam laboratorium serta didukung SDM teknologi lulusan luar negeri yang termasuk ikatan dinas.

Ternyata kondisi industri nasional kini tertinggal jauh oleh Samsung kebanggaan Korsel dan Huawei kebanggaan Cina. Kondisi PT INTI dan LEN yang dulu direncanakan sebagai salah satu wahana tangguh industrialisasi ternyata tidak tumbuh semestinya bahkan sering terpuruk dan kalah bersaing.

Kini pasar industri elektronik dan telekomunikasi telah didominasi Cina dan Korsel yang juga telah menguasai Jepang. Dominasi perusahaan Jepang di bisnis elektronik di Indonesia, semakin tergusur produk elektronik Korea Selatan dan Cina.

Ironisnya, produsen elektronik Jepang Toshiba menjual pabrik televisi dan mesin cucinya di Indonesia ke perusahaan Cina, Skyworth. Aksi pencaplokan perusahaan Jepang oleh investor Cina bukan kali pertama.

Sebelumnya, Haier Group dari Cina mengakuisisi perusahaan elektronik Jepang, Sanyo Electric. Padahal, seperti Toshiba, Sanyo juga memiliki akar bisnis cukup kuat di Indonesia. Kita sangat prihatin melihat industri elektronik nasional yang hanya menjadi penonton.

Padahal, pasar elektronik dan telekomunikasi di Indonesia sangat gemuk. Kondisi di atas menjadikan kunjungan Presiden Jokowi memiliki makna sangat signifikan untuk belajar bagaimana cara membangkitkan industri nasional.

Misalnya, membangkitkan PT INTI dan LEN sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan pemain kecil-kecilan dalam hal pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pasar elektronik di Indonesia.

Presiden Jokowi juga perlu konsisten dengan kebijakan lokalisasi komponen oleh perusahaan multinasional yang memenangkan proyek infrastruktur sehingga persentase TKDN komponen terus meningkat dan diproduksi oleh industri elektronik nasional.

Selain bidang industrialisasi dan pengembangan industri kreatif, Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Korsel dalam menata birokrasi pemerintahan dan bagaimana cara bangsa Korsel mencetak jutaan SDM unggul yang disebar di seluruh dunia.

Hal itu terlihat dari para peneliti muda Samsung yang ditugaskan ke luar negeri, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Belum lagi perusahaan lainnya yang juga melakukan program pengembangan SDM yang serupa.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Korsel, sebaiknya juga mempelajari cara Samsung mengelola dan mengembangkan SDM. Sebaiknya Presiden meminta Samsung untuk memberikan beasiswa kepada para lulusan SMA terbaik.

Tujuannya agar mereka bisa belajar di Korsel dan berkesempatan kerja magang di pusat pengembangan teknologi Samsung. Selama lima tahun terakhir, Samsung menekankan pentingnya program spesialis regional, unsur pokok dalam upaya globalisasi Samsung.

Program tersebut meliputi pelatihan SDM dengan wawasan internasional agar memahami situasi di pasar-pasar luar negeri. Pelatihan tersebut dengan cara menugaskan karyawan ke berbagai negara untuk belajar dan memahami budaya dan potensinya.

Samsung Electronics memiliki 21 ribu peneliti luar negeri yang tersebar di 29 lembaga penelitian di 16 negara yang mengkaji bidang-bidang strategis, yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, Jepang, India, Israel, dan Polandia.

Dalam konteks inovasi terbuka, Samsung bekerja sama dengan universitas ternama dunia, seperti MIT, Universitas of California-Berkeley melalui program-program *industrial affiliate* dan *visiting researcher*.

Presiden Jokowi yang bertekad membentuk postur aparatur sipil negara (ASN) yang bersih dari korupsi, cerdas, cekatan, dan memiliki daya inovasi perlu mengacu kepada Korsel yang telah berhasil melakukan reformasi birokrasinya.

Program di atas dipelopori presiden kelima Korsel Chun Doo Wan yang menetapkan sejumlah prinsip utama reformasi administrasi dan birokrasi melalui *Civil Servants Ethics Act*, *Civil Servant Consciousness Reform Movement*, *Retired Civil Servant Employment Control*, *Civil Servant Property Registration*, dan *Civil Servant Gifts Control*.

Program revolusi mental bagi ASN di Indonesia oleh pemerintahan Jokowi, mestinya dilakukan dengan mengambil referensi Korsel di atas. ■

Demokratisasi Teknologi

● BIMO JOGA SASONGKO

Pendiri Euro Management Indonesia.
Ketua Umum IABIE

Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-90 Tahun 2018 mengusung tema Bangun Pemuda Satukan Bangsa. Diperlukan demokratisasi teknologi untuk membangun pemuda dari aspek pembangunan mental ataupun intelektualnya.

Kini pemuda Indonesia menghadapi era disrupsi dan menyongsong revolusi industri 4.0. Ironisnya, pemuda Indonesia sebagian besar hanya menjadi objek produk teknologi dari luar negeri.

Pemuda Indonesia semakin kecanduan konsumerisme produk teknologi tanpa berdaya menumbuhkan nilai tambahnya. Kebutuhan ruang kreativitas bagi para pemuda belum dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sehingga proses demokratisasi teknologi untuk pemuda sulit terwujud. Padahal, tren menunjukkan korporasi dunia sedang menekankan inisiatif dan program demokratisasi teknologi. Salah satu korporasi yang tengah getol menerapkannya adalah Microsoft.

Perusahaan yang kini dibawah kepemimpinan Satya Nadella, CEO ketiga, setelah Bill Gates dan Steve Ballmer. Wujud demokratisasi teknologi ala CEO Microsoft tersebut terlihat saat peluncuran Windows 10.

Dalam peluncuran itu, Microsoft tidak lagi menggelar pesta penjualan super mewah seperti yang lalu. Satya lebih memilih meluncurkan produknya di kawasan miskin Kenya. Satya ingin mendemonstrasikan budaya korporasi baru. Dia ingin memahami keadaan setiap konsumen seperti menyediakan internet murah bagi masyarakat, terutama para pemuda di desa-desa terpencil Afrika.

Sebagai pakar komputer, Satya merumuskan filosofi kepercayaan sebagai $E+SV+SR = T/t$ (*Empathy+Shared Values+ Safety and Reliability= Trust over time*). Kepercayaan dibentuk dari adanya rasa empati, konsistensi, adil, dan keberagaman.

Ini upaya membuat korporasi menjadi yang lebih humanis dan berkontribusi bagi banyak manusia secara luas. Kini, korporasi global tengah menumbuhkan jiwanya sebagai perusahaan kuat yang bisa mendemokratisasi

teknologi untuk warga dunia.

Sementara itu, korporasi besar dan perusahaan *start up* di Indonesia yang kebanyakan dimiliki modal asing, masih enggan melakukan demokratisasi teknologi kepada masyarakat, khususnya para pemuda.

Jumlah pemuda sesuai dengan undang-undang tentang kepemudaan dengan rentang usia antara 16-30 tahun, menurut data BPS berjumlah 61,8 juta orang. Jumlah tersebut 24,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Potensi demografi pemuda di atas harus dikelola secara totalitas dengan berbasis kemajuan teknologi. Agar nantinya, mereka tidak menjadi beban negara hingga berubah menjadi bencana sosial.

Ada tiga karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi generasi muda untuk memenangkan pertarungan masa depan sekaligus mewujudkan mimpi Indonesia.

Pertama, diperlukan generasi muda yang memiliki kualitas integritas tinggi, kedua, kapasitas keahlian dan intelektual yang cukup mumpuni, dan ketiga, karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional di bidangnya.

Kapitalisasi di atas, membutuhkan wahana pengembangan teknologi serta memberi kesempatan bagi pemuda agar bisa menjadi unggul di kelas dunia. Para pemuda yang disebut generasi milenial kini terjerat masalah konektivitas.

Untuk itu, pemerintah perlu fokus kepada program teknologi informasi komunikasi (TIK) kerakyatan yang bertujuan menjadikan TIK untuk kemashlahatan rakyat seluas-luasnya dengan harga yang semurah-murahnya.

Hal ini sebagai salah satu bentuk demokratisasi teknologi yang tepat sasaran. Perlu terobosan teknologi dan inovasi tepat guna yang mengedepankan *open sources* dan membongkar regulasi yang selama ini cenderung berpihak kepada vendor asing.

Pemerintah diharapkan bisa mewujudkan e-Readiness Indonesia untuk memenuhi kebutuhan generasi milenial dalam konektivitas. Perlu kesiapan infrastruktur TIK kerakyatan, sistem inovasi, insentif pengembang TIK, dan faktor sosio teknologi untuk memacu daya saing generasi milenial. Hadlirnya teknologi digital harusnya menjadikan bangsa Indonesia semakin kreatif dan produktif.

Namun, nyatanya belum demikian. Teknologi baru digunakan untuk mengonsumsi sedangkan untuk produktivitas masih langka. Belum ada kesadaran, teknologi informasi dan media baru mesti dikapitalisasi atau diproduktivitaskan.

Sejarah menunjukkan, kaum muda lebih tangguh mengendalikan semangat zaman.

Saatnya pemuda menggelorakan kemajuan Indonesia secara konkret dengan membangkitkan sel-sel kreatif terkecil hingga desa.

Usaha membangkitkannya perlu mencapai tingkat *high concept* dan *high touch*.

High concept adalah kemampuan menciptakan keindahan artistik dan emosional, mengenali pola-pola dan peluang, menciptakan narasi yang indah dan menghasilkan temuan atau inovasi teknologi yang belum disadari orang lain.

High touch merupakan kemampuan berempati, memahami esensi interaksi manusia, dan menemukan makna. Dalam konteks di atas, diperlukan inovasi teknologi yang merupakan aspek *high-tech* yang pada gilirannya akan mendorong aspek *high concept* dan *high touch* bagi kluster ekonomi kreatif yang digeluti kaum muda.

Besarnya jumlah pemuda selain merupakan potensi juga mengandung risiko. Mulai 2020 sampai 2035, Indonesia menikmati era langka yang disebut bonus demografi, ketika usia produktif diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini.

Jumlahnya mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi seperti pisau bermata dua. Di satu sisi merupakan peluang strategis bagi sebuah negara melakukan percepatan pembangunan ekonomi.

Sebab, negara tersebut memiliki keterseediaan SDM usia produktif dalam signifikan. Namun, jika salah kelola, bukan bonus yang didapat, tetapi bencana sosial. Untuk mencegah bencana sosial, diperlukan mitigasi sosial jelang era bonus demografi.

Mitigasi tersebut untuk mengatasi pemuda yang teralienasi dengan tantangan zaman akibat kurangnya fasilitas untuk berkarya nyata. Bentuk mitigasi ideal, antara lain, berupa kursus-kursus vokasional dan *workshop* gratis bagi pemuda.

Daya saing suatu bangsa ditentukan sejauh mana para pemudanya berkreasi dan berinovasi sesuai tren dunia, seperti yang tergambar dalam kajian lembaga pendidikan terkemuka di Amerika Serikat, yakni Harvard Business.

Mereka menekankan pentingnya mendorong daya saing pemuda di bidang sistem inovasi dan teknologi produksi. Pada prinsipnya, sistem inovasi, baik itu produk maupun proses merupakan proses belajar.

Agar pemuda mampu melakukan kegiatan inovatif, maka harus ada upaya meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologinya, yaitu memperkuat kapasitas pembelajaran. ■

Nusantara dan Pengawasan Wilayah

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro Management Indonesia

Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember menekankan arti penting Deklarasi Juanda 1957 sebagai konsepsi kewilayahan untuk mewujudkan Wawasan Nusantara.

Peringatan Hari Nusantara mengingatkan segenap bangsa agar jangan lengah dan lemah dalam mewujudkan kedaulatan wilayah secara utuh. Patut diperhatikan, kini ada masalah yang masih mengganjal kedaulatan bangsa dan melukai perasaan rakyat. Yakni, adanya kontrol sebagian ruang udara Indonesia yang masih dikendalikan oleh negara tetangga.

Negara tetangga yang wilayahnya sebesar kota itu hingga kini masih menguasai *Flight Information Regional* (FIR), terkait pengaturan lalu lintas udara bagian barat Indonesia, yakni ruang udara di Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna, dan perairannya.

Masalah tersebut hingga kini masih berlarut-larut dan belum berhasil diambil alih oleh otoritas terkait di Indonesia. Pemerintahan sudah silih berganti, tetapi masalah tersebut terus mengganjal. Inilah batu ujian pemerintah dan Panglima TNI yang baru untuk segera menuntaskan kewibawaan Wawasan Nusantara.

Masalah FIR mestinya bisa dituntaskan paling lambat 2018, karena semua infrastruktur dan SDM berkompeten sebenarnya sudah disiapkan, yaitu dengan adanya Jakarta Automated Air Traffic Service (JAATS) yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan lalu lintas udara di wilayah Indonesia Barat secara utuh dan penuh wibawa.

Hari Nusantara menjadi peringatan keras bagi setiap generasi bangsa agar mampu melakukan pengawasan wilayah NKRI secara efektif yang menggunakan teknologi terkini.

Sesuai dengan era Industri 4.0.

Memasuki tahun 2019, segenap bangsa jangan terlena dengan urusan pesta demokrasi. Justru memasuki 2019, ada masalah tersembunyi sehingga perlu menyempurnakan agenda bela negara yang paling esensial.

Hal itu adalah kemampuan menjaga ke-

daulatan wilayah negara dengan sistem terkini. Untuk itu, perlu meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi pertahanan. Perlu perencanaan strategis pengelolaan SDM bangsa sebagai sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Target agenda bela negara tahun 2019 adalah meneguhkan sistem pengawasan daratan, laut, udara, serta garis perbatasan negara. Wawasan Nusantara kini harus difokuskan pada doktrin yang tidak lengah sedikit pun dalam menjaga kedaulatan bangsa karena ditunjang SDM ahli dan infrastruktur canggih.

Indonesia yang juga memiliki banyak pulau kecil strategis secara posisi ataupun potensi ekonomi harus selalu dijaga. Sayangnya, sifat strategis tersebut belum didayagunakan secara optimal. Pembangunan dan pengusahaan masih sulit dilakukan.

Pendekatan geospasial, yaitu dengan data dan informasi yang bereferensi bumi merupakan langkah yang efektif dalam pengelolaan.

Agenda bela negara juga harus klop dengan kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang tengah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap SDM untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan.

Wawasan Nusantara kini sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan membutuhkan infrastruktur serta SDM pemantau yang andal dalam menjaga wilayah darat, laut, dan udara.

Sistem pemantau lazimnya terintegrasi dalam C4ISR (*Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*), yang mengedepankan pesawat tanpa awak dan sebaran radar di titik-titik rawan.

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang biasa disebut pesawat tanpa awak bisa segera diterapkan secara massal, karena sudah ada riset dan rancang bangun yang dilakukan BPPT, PT Dirgantara Indonesia, dan LAPAN.

Bahkan, satelit buatan LAPAN yang bisa menunjang operasional pesawat tanpa awak juga sudah rampung.

Satelit Lapan A2 dan A3 mampu menjalankan berbagai misi strategis, seperti pemantauan daratan dan seisinya, muatan

Automatic Identification System (AIS) untuk pemantau berbagai aspek kemaritiman, muatan sains untuk pengukuran medan magnet bumi, serta muatan komponen satelit itu sendiri untuk menguji bermacam sensor.

Hari Nusantara mesti bisa menyadarkan segenap warga bangsa terkait potensi luar biasa di bumi Pertiwi yang harus dijaga dengan metode yang paripurna. Perlu mencari solusi jitu untuk atasi berbagai rintangan yang mengadang dalam mendayagunakan potensi besar tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Keniscayaan, makna peringatan Hari Nusantara menjadi momentum meneguhkan sistem pengawasan daratan, laut, udara, serta garis perbatasan negara.

Wawasan Nusantara kini harus difokuskan pada doktrin yang tidak lengah sedikit pun dalam menjaga kedaulatan bangsa karena ditunjang dengan SDM ahli dan infrastruktur yang canggih.

Hingga kini, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di negeri ini masih jauh dari harapan. Lingkup pengelolaan di atas menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antarpemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perlu juga mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional. Khususnya, sinergi dan integrasi radar yang dimiliki TNI ataupun instansi sipil. Alutsista radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan di wilayah udara dan laut.

Berbagai zona yang selama ini sangat rawan dan menjadi ancaman kedaulatan bangsa perlu dibangun infrastruktur radar. Dibutuhkan pula SDM yang ahli dalam hal desain dan optimasi radar yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis radar, baik milik militer maupun instansi sipil.

Integrasi itu mampu mengatasi masalah kompatibilitas data, pengolahan, dan pendistribusiannya secara cepat. Sebuah keniscayaan, mengintegrasikan radar nasional yang mampu menampilkan sistem dengan satu layar besar untuk seluruh radar militer dan sipil di Tanah Air. ■

Ketajaman Debat Capres

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habiebie (IABIE), Alumnus FH Pforzheim Jerman.

Seluruh rakyat sedang menantikan acara debat capres dan cawapres yang akan berlaga dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sebuah ke-niscayaan, publik menginginkan faktor ketajaman dalam debat pilpres. Tajamnya debat capres, bisa menyemangati bangsa Indonesia yang sedang membutuhkan pemimpin tangguh yang visioner. Pemimpin yang memiliki mimpi besar, penggagas yang hebat, dan pelaksana pembangunan yang gigih.

Kepemimpinan nasional ke depan harus mampu melingkupi lintas bidang keilmuan yang memiliki stamina tubuh dan kesehatan prima. Keringatnya sering bercucuran karena sibuk menyelesaikan masalah aktual di lapangan. Dalam prodi kebudayaan, tipologi sosok pemimpin di atas disebut poliglotisme. Dia tidak hanya mahir berwacana dalam bahasa ibu, tetapi juga piawai dalam pergaulan global untuk mengenalkan visinya kepada warga dunia.

KPU menyelenggarakan lima putaran debat antarpasangan calon (paslon) yang mengikuti Pilpres 2019. Debat bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang visi dan misi masing-masing kandidat.

Ada manfaat lain, yakni rakyat bisa melihat kapasitas berpikir dan gaya kepemimpinan kandidat yang mengendalikan pemerintahan lima tahun ke depan. Kini, rakyat mengharuskan pejabat pemerintahan bertipe *civil servant* yang cerdas dan berempati. Debat capres bisa mencerahkan rasionalitas publik. Visi capres-cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2019 harus bersumber dari Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus visi esensial bangsa yang eksistensinya telah mendunia.

Dalam implikasi pembangunan bangsa, visi dan misi para capres otomatis menjadi haluan pembangunan bangsa. Karena, pada saat ini tidak ada lagi Garis Besar Haluan

Negara (GBHN) yang disusun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena tidak ada GBHN, visi-misi dan konten debat capres menjadi rancangan besar pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pentingnya visi dan misi capres yang sesuai dengan semangat zaman.

Visi dan misi tidak sekadar menyusun dokumen pembangunan, tetapi juga termasuk menyusun metode mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan efektif dan berdaya saing. Rumusan visi dan misi sebagus apa pun, percuma jika sistem kekuasaan tidak efektif.

Faktor penting mewujudkan pemerintahan efektif dan berdaya saing tinggi adalah SDM bangsa yang unggul. Perlu memperhatikan dua hal mendasar, yakni estafet kepemimpinan dalam berbagai lini serta penyiapan SDM unggul yang akan menjalankan transformasi bangsa.

Transformasi menjadi negara maju mustahil tanpa SDM unggul. Namun, belum ada SDM unggul visioner dan bisa menyusun cetak biru hebat didukung *expert system* untuk rencana pembangunan, pembuatan keputusan, dan pengendalian pembangunan. Sebagai catatan, *expert systems* yang banyak dipakai negara maju biasanya dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi yang sudah dianalisis secara valid dan terstandarisasi.

Menjelang acara debat capres putaran pertama masih tampak suasana kaku seluruh timses paslon. Meskipun semua paslon tampak semangat dalam persiapan berdebat, semua paslon hendaknya jangan mengalami defisit *sense of humor*. Sebab, faktor humor dalam debat politik sangat penting. Menurut penelitian konsultan SDM internasional Hay Group, tipe kepemimpinan atau manajemen paling efektif pada era sekarang adalah yang bisa menimbulkan rasa humor.

Eksplorasi humor telah menjadi tren global, terutama di korporasi global. Warga dunia butuh transformasi budaya kerja dari yang serbakaku dan terburu waktu menjadi ruang atau situasi kerja nyaman dan mampu berbagi emosi serta empati dari para pemimpin yang diwarnai dengan humor segar. Menikmati suguhan humor dari politisi yang sedang berkampanye bisa memberikan rasa senang dan penghargaan.

Humor telah terbukti secara empiris dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan kualitas interaksi antara politisi

dan publik.

Penggunaan humor dalam memperbaiki kualitas interaksi dan komunikasi mesti didukung oleh teori dan logika yang memadai. Acara debat capres diharapkan bisa membangkitkan sikap kritis masyarakat yang pada gilirannya bisa mewujudkan transformasi demokratik di negeri ini dalam berbagai tingkatan dan bidang profesi.

Transformasi demokratik juga akan terartikulasikan ke dalam gerakan mem-bongkar feodalisme dalam domain partai politik. Melalui debat, masyarakat bisa menakar gagasan, inisiatif, dan solusi paslon terkait pengembangan potensi warga negara. Faktor kreativitas dan inovasi menjadi penting dalam kampanye pilpres untuk merebut hati pemilih dan memenangkan pertarungan politik. Masa depan dunia akan diwarnai fenomena luar biasa yang disebut ideagora.

Paslon dalam Pilpres 2019 hendaknya menekankan hakikat pasar ideagora. Hal itu terlihat dari gereget masyarakat yang menganggap paslon tidak sekadar penyalur aspirasi politik, tetapi juga pasar bagi gagasan, inovasi, dan pemikiran bagi kepentingan publik. Istilah ideagora berasal dari kata agora dalam bahasa Yunani kuno, yakni arena yang menjadi pusat aktivitas politik dan perdagangan bagi warga Athena waktu itu.

Pesatnya perkembangan teknologi digital membuat ideagora menjadi fungsi yang sangat strategis dan spesifik karena menjadikan pasar gagasan, inovasi, dan inisiatif yang cemerlang dapat diakses dan dikembangkan lebih lanjut oleh siapa pun.

Dalam konteks di atas, organisasi atau perseorangan dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk membangun produk dan jasa yang baru lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya. Mekanisme di atas disebut pasar ideagora.

Mekanisme itu terlihat pada *pitching* dalam domain bisnis *startup*. *Pitching* merupakan kesempatan menyampaikan ide bisnis model di hadapan *venture capital* agar dipilih dan mendapatkan modal sosial serta pendanaan yang cukup.

Tak bisa dimungkiri, era revolusi industri 4.0 saat ini harus bisa dimanfaatkan para pemimpin bangsa untuk mengembangkan model bisnis dan mencetak *startup* atau usaha rintisan sebanyak-banyaknya. Peradaban era 4.0 akan menempatkan usaha rintisan sebagai jenis pekerjaan masa depan warga bangsa yang sangat strategis. ■

Buku dan Kepemimpinan

● BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum IABIE, Penulis Buku Anak Intelektual Habibie

Makna peringatan Hari Buku Sedunia 23 April lalu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan buku menjadi tolok ukur kadar kepemimpinan bangsa.

Prakarsa Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) tentang hari buku bertujuan memajukan peradaban.

Di Indonesia, peringatan hari buku kali ini sangat relevan saat bangsa ini tengah melakukan seleksi kepemimpinan eksekutif ataupun legislatif. Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat bergantung pada sejauh mana animo rakyat dalam membaca buku serta volume penerbitan buku bermutu.

Melihat peradaban bangsa yang paling afdal adalah lewat buku yang autentik karya anak bangsa. Karena itu, peringatan hari buku kali ini mesti disambung lewat kancah pameran buku internasional.

Kehadiran Indonesia di event buku dunia, antara lain, di Frankfurt Book Fair dan London Book Fair merupakan eksistensi diri untuk mengejar tertinggalnya negeri ini dibandingkan negara lain yang jauh lebih agresif dan produktif dalam hal perbukuan.

Buku dan kepemimpinan bangsa bagaikan dua pasang kaki kuda yang saling memacu kemajuan menuju negeri harapan. Kita bisa melihat betapa hebatnya kadar kepemimpinan para perintis dan pendiri bangsa.

Mereka memiliki konsepsi dan pemikiran yang brilian, runtun, dan kontennya melesat ke depan. Begitu pula, opini publik pada waktu itu mengalir jernih. Itu pertanda, pada zaman itu indeks literasi elite bangsa amat menggembirakan.

Para elite politik saat ini perlu menengok jendela sejarah kelahiran bangsa. Di situ akan terlihat, semangat kebangsaan hanya dapat dikendalikan dengan baik oleh kepemimpinan yang lengket dengan buku.

Layar sejarah telah menyajikan kisah, betapa hebatnya gaya kepemimpinan para perintis dan pendiri Indonesia yang telah mencapai tingkat kematangan.

Indikator kematangan itu terlihat jelas ketika kita membaca gagasan dan pemikiran dalam karya tulisnya yang sangat intelektualistik. Mereka adalah figur-figur politisi-cendekia yang sangat visioner.

Melalui buku karyanya, rakyat tergerak dan memahami dialektika kebangsaan yang mengalir jernih. Dalam usia yang sangat belia Bung Karno menulis buku *Indonesia Menggugat* yang pernah mendapat perhatian dunia.

Mohammad Natsir sangat produktif menulis artikel ideologis yang dibukukan dengan judul *Capita Selecta*, buku yang mencerahkan kehidupan demokrasi. Bung Hatta menulis buku *Indonesia Merdeka* dan sederet buku lainnya.

Sementara itu, Bung Sjahrir menulis *Renungan dalam Tahanan*. Dan demikianlah para pejuang lainnya. Mereka semua sangat piawai di dalam memimpin wacana karena giat menulis sekaligus merupakan kutu buku.

Menyelami buku karya perintis dan pendiri bangsa yang ditulis saat usia belia seperti menikmati orkestra simfoni. Karya tulis itu juga digali dari tesis dan sintesis pemikiran tokoh-tokoh besar dunia, lalu dikawinkan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia.

Buah pemikiran para elite politik yang tertuang dalam buku pada era perjuangan kemerdekaan bangsa yang mengalir jernih menyebabkan rakyat mudah menangkap secara baik, jalan pikiran dan gagasan para pemimpinnya.

Setiap saat rakyat selalu menunggu dan menunggu kehadiran konsepsi, gagasan, dan pemikiran para pemimpinnya.

Kini kehidupan bangsa dilanda keprihatinan terkait dengan terpuruknya minat baca dan menulis para elite politik dan masyarakat. Kondisinya bertambah memprihatinkan karena usaha penerbitan buku masih sepi.

Untuk menggalakkan usaha penerbitan buku, Indonesia mesti sering membuat event perbukuan serta mengikuti secara penuh pameran buku dunia. Misalnya, Frankfurt International Book Fair, London Book Fair, dan sebagainya.

Event seperti itu akan membawa semangat dan harapan baru bagi perbukuan nasional. Tahun ini, ada 450 judul buku yang mewakili Indonesia dalam London Book Fair

(LBF) pada Maret 2019. Pada masa mendatang, jumlahnya mesti ditingkatkan.

Tenutama untuk buku-buku yang autentik keindonesiaan sehingga Indonesia terus mendapat sorotan utama dan menjadi *market focus* bursa buku internasional. Langkah Komite Buku Nasional (KBN) yang mendorong partisipasi kaum milenial dalam *digital publisher* patut diapresiasi.

Saatnya penulis milenial melakukan diversifikasi karya dan produknya menjadi elektronik (*e-book*). Hal ini sekaligus merupakan sumber pendapatan tambahan baginya.

Indeks literasi bangsa perlu segera ditingkatkan agar tidak semakin jauh tertinggal oleh bangsa lain. Salah satu upaya perbaikan kualitas literasi bangsa lewat *platform storytelling* Wattpad. Kini di negeri ini semakin banyak yang berminat membaca karya fiksi.

Mungkin ada pengaruh dari medium seperti itu (Wattpad) dan banyak karya tulisan yang diterbitkan. Saatnya pemerintah mawas diri dan berusaha bangkit terkait dengan masih terpuruknya usaha perbukuan dan rendahnya minat baca masyarakat.

Perhatian dan pengembangan terhadap buku searah dengan program utama UNESCO. Sering kali lembaga dunia ini menyerukan pengembangan buku dan literasi bagi suatu bangsa.

Apalagi sejak 1995, UNESCO memutuskan Hari Buku Sedunia yang salah satu maknanya untuk menghormati sastrawan dan pengarang besar, seperti Shakespeare, Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega dan Josep Pla, Maurice Druon, Vladimir Nabokov, Manuel Mejia Vallejo, dan Halldor Laxness.

Badan PBB itu juga menekankan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan, yakni pengarang, penerbit, distributor, perpustakaan, organisasi perbukuan, serta berbagai komunitas yang semuanya bekerja sama mempromosikan buku dan literasi sebagai aktivitas untuk menguatkan nilai-nilai sosial, mencerahkan kebudayaan, dan meneguhkan kemanusiaan.

Perlu pembenahan usaha percetakan dan penerbitan buku di Indonesia yang bersifat mendasar serta sesuai dengan perkembangan zaman. Usaha itu memerlukan transformasi proses bisnis agar bisa bersaing menghadapi era ekonomi digital. ■

Investasi SDM Daerah

OLEH BIMO JOGA SASONGKO



Presiden Joko Widodo kecewa terhadap kepala daerah karena rendah dalam menyerap anggaran. Banyak daerah belum membelanjakan anggaran. Hingga akhir 2015 masih banyak anggaran provinsi, kabupaten dan kota mengendap di bank-bank yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai 90 triliun rupiah. Pada akhir April 2016, jumlahnya meningkat menjadi 220 triliun. Dana tersebut sangat besar karena sepanjang tiga bulan pertama tahun ini penyerapan anggaran secara nasional baru 280 triliun.

Serapan anggaran daerah yang buruk mengindikasikan, ada masalah birokrasi atau aparatur sipil negara (ASN) daerah. Mereka tidak siap dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Inovasi daerah masih rendah. Padahal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani. Selama ini birokrasi terkukung rutinitas sehingga kurang memiliki daya inovatif. Perlu menata etos kerja ASN daerah agar mampu mendayagunakan infrastruktur *e-Government* seefektif mungkin sesuai dengan tatakelola dan standar global.

Untuk ini diperlukan terobosan untuk mencetak birokrat unggul sejak dini. Pemerintah daerah perlu investasi sumber daya manusia (SDM) dengan mengirim lulusan sekolah menengah untuk belajar ke luar negeri dengan beasiswa. Selama ini pemerintah daerah sudah mengirimkan SDM ke perguruan tinggi dalam negeri seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lainnya dengan status ikatan dinas. Karena konvergensi teknologi dan pesatnya kemajuan tata kelola korporasi global, maka perlu juga terobosan dengan mengirimkan putra-putri daerah ke luar negeri.

Para lulusan sekolah menengah terbaik di daerah diberi kesempatan kuliah dan magang di negara maju agar mempelajari tatakelola korporasi serta berbagai inovasi seperti bidang teknologi *e-Sourcing*. Ini sekarang diintegrasikan dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-Procurement*. Teknologi *e-Sourcing* bukan hanya katalog elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa. Ini diperlukan inovasi agar bisa menjadi aplikasi atau alat bantu analisis dan rujukan standar teknis daerah.

Negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja telah lama memperhatikan pentingnya inovasi birokrasi daerah. Sejak 1992 AS menerapkan National

Performance Review yang fokus menilai dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, utamanya manajemen sumber daya.

Mencetak ASN daerah berkelas dunia searah dengan inisiatif dan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa. Perbaikan tata kelola pemerintahan telah menjadi penekanan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia 2016. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend membantu hibah setengah miliar euro untuk pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

strategis. Sejarah kebangkitan nasional bangsa-bangsa dunia juga diwarnai dengan langkah mengirimkan para pemuda ke luar negeri. Biaya pemerintah daerah untuk beasiswa pemuda ke luar negeri harus dipandang sebagai investasi produktif, tidak semata-mata konsumtif tanpa manfaat balikan atau *rate of return*. Investasi modal manusia selalu berjangka panjang.

Sejak awal dekade ini, para pembuat kebijakan negara maju, terutama Eropa telah meningkatkan perhatian terhadap mahasiswa internasional. Banyak nega-

lain itu, juga dibuat skema pencarian kerja pascastudi agar mahasiswa internasional mudah mengakses dunia kerja. Kesempatan ini harusnya ditangkap pemerintah daerah.

Untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan dibutuhkan profil ASN kreatif dan inovatif. Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kependudukan hanya bisa diatasi dengan kebijakan yang inovatif. Pada saat ini birokrat harus mampu meningkatkan kapasitas inovatif di lingkungannya. Juga pentingnya penguatan sistem inovasi dalam berbagai eselon birokrasi.

Birokrasi harus memiliki akal panjang untuk menerobos berbagai persoalan pelik dengan kondisi dana yang sangat terbatas. Perlu memetik pengalaman dari negara maju. ASN hendaknya piawai mengambil contoh sukses tentang peningkatan kapasitas inovasi daerah yang pernah dilakukan di negara maju. Misalnya di daerah Austin dan Cleveland di Amerika Serikat. Disana program penguatan kapasitas inovasi daerah berhasil menjadikan daerah itu menjadi rumah dari puluhan konsorsium industri semikonduktor. Dengan cara mengembangkan *Advanced Research Park* yang menghasilkan berbagai produk unggulan dunia. Masih banyak contoh lainnya yang berkembang di Amerika Serikat dengan program serupa, yakni Silicon Valley, Arizona, Florida, Wichita, dan lain-lain.

Perkembangan teknologi dan tren dunia telah menyajikan berbagai inisiatif menuju *smart work*. Mestinya ASN mampu mendayagunakan infrastruktur *e-Government* seefektif mungkin sesuai dengan tatakelola dan standar global. Pengadaan infrastruktur layanan elektronik oleh ASN sudah merata hingga kedaerah. Namun, manfaat layanan elektronik masih belum optimal karena lemahnya kapasitas inovasi. Layanan elektronik merupakan keniscayaan untuk mencapai efektivitas pemerintahan.

Buruknya penyerapan anggaran juga disertai dengan *overhead cost* yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama ini *resources* daerah sebagian besar tersedot untuk biaya rutin eksekutif dan legislatif daerah. Apalagi manajemen *resources* Pemda berupa penggunaan input dan pengelolaannya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* masih belum mengedepankan inovasi dan kreativitas. Untuk itu diperlukan transformasi menuju pemerintahan daerah yang efektif dengan mencetak SDM berdaya saing global lewat pengiriman mahasiswa ke luar negeri. ■

Penulis Alumnus Arizona State University dan North Carolina State University, Amerika Serikat.



« Pengiriman mahasiswa ke luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi SDM yang sangat strategis. Sejarah kebangkitan nasional bangsa-bangsa dunia juga diwarnai dengan langkah mengirimkan para pemuda ke luar negeri. »

Negara-negara Uni Eropa memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Eropa pantas menjadi tujuan pengiriman mahasiswa.

Strategis

Pengiriman mahasiswa ke luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi SDM yang sangat

strategis. Sejarah kebangkitan nasional bangsa-bangsa dunia juga diwarnai dengan langkah mengirimkan para pemuda ke luar negeri. Biaya pemerintah daerah untuk beasiswa pemuda ke luar negeri harus dipandang sebagai investasi produktif, tidak semata-mata konsumtif tanpa manfaat balikan atau *rate of return*. Investasi modal manusia selalu berjangka panjang.

Mereka juga memberi kesempatan luas untuk mengakses lapangan kerja baik selama maupun setelah lulus. Se-

Mengembangkan SDM Kelas Dunia

OLEH BIMO JOGA SASONGKO,
BSAE, MSEIE, MBA



Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda 18-22 April. Indonesia merupakan negara pertama Asia Tenggara yang memiliki Comprehensive Partnership Agreement (CPA) dengan Uni Eropa. Keberadaan CPA perlu segera disertai langkah konkret dan strategis.

Salah satunya mencetak sumber daya manusia (SDM) berkelas dunia untuk membangun, khususnya mengisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik sebagai insinyur maupun manajemen. Indonesia perlu mempersiapkan SDM sejak awal, dengan merekrut lulusan SMA terbaik untuk diberi beasiswa ikatan dinas belajar di perguruan tinggi (PT) terkemuka Eropa.

Saatnya pemerintah membuat program nasional "Sejuta Indonesia di jantung iptek dan inovasi dunia" bekerja

Eropa gratis bagi mahasiswa dari luar negeri. Sayang, peluang tersebut banyak diambil kaum muda Tiongkok dan Korea Selatan. Indonesia kurang progresif mengambil peluang tersebut. Maka, perlu ada *task force* yang mampu mewujudkan harapan tadi.

Presiden Jokowi memberi peran besar BUMN untuk terlibat langsung dalam berbagai pembangunan infrastruktur dan disuntik dana besar melalui penyertaan modal negara (PMN). Sayangnya, kualitas BUMN belum bagus. Sudah waktunya, pemerintah mencetak SDM berkelas dunia. Direksi BUMN sebaiknya direkrut dari sumber-sumber andal.

Peningkatan mutu SDM BUMN merupakan solusi untuk menggenjot daya saing. Rendahnya daya saing BUMN tergambar dalam hasil audit BPK 2014. Nilai jual 121 BUMN 'hanya' 1.997 triliun rupiah dan hampir 90% dihasilkan 25 BUMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan total aset BUMN pada 2014 yang men-

sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal sama, juga pada BUMN yang sudah tercatat di pasar modal daripada BUMN Malaysia Khazanah Nasional yang membawahi 24 perusahaan.

Menghadapi tantangan globalisasi dan pasar ASEAN seharusnya BUMN menyiapkan strategi guna mengatasi berbagai kendala. Misalnya, BUMN besar, tapi harus gesit. Portofolio beragam, tetapi harus terspesialisasi. Diperlukan The BUMN Way yang mengawinkan gaya berbagai manajemen sehingga tatakelola dan budaya kerjanya lebih berdaya saing.

Untuk mewujudkan BUMN yang besar tetapi gesit perlu belajar dari Samsung yang memiliki 75 perusahaan afiliasi dari beragam industri. Total karyawan 500 ribu. Samsung juga memiliki 600 basis di luar negeri di 63 negara. Korporasi besar ini gesit karena usahanya terdiversifikasi. Dia memiliki struktur pembuatan dan pelaksanaan keputusan secara cepat. Kecepatan menjadi strategi dan identitas diri.

Kecepatan distribusi dan aliran bahan mentah serta informasi ditingkatkan melalui inovasi dalam proses IT. Contoh pembuatan manajemen rantai suplai global, sistem perencanaan sumber daya perusahaan kelas dunia.

BUMN sebaiknya meniru Samsung dalam mengelola dan mengembangkan SDM.

Namun kemampuan dalam menciptakan laba relatif rendah, 'hanya' 219 triliun. Data ini menunjukkan kemampuan BUMN mengelola aset dan menciptakan laba masih rendah.

Dari hasil *benchmarking* yang dilakukan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FEUI) terhadap BUMN di ASEAN, daya saing Indonesia kalah jauh. Super holding company (SHC) Temasek yang membawahi 15 perusahaan investasi masih lebih unggul dibanding 20 BUMN yang

Selama lima tahun terakhir dia menekankan pentingnya program spesialis regional yang merupakan unsur pokok dalam upaya globalisasi. Program meliputi pelatihan SDM dengan wawasan internasional agar memahami pasar-pasar luar negeri. Caranya menugaskan karyawan untuk belajar ke berbagai negara dan memahami budaya kerjanya.

Hingga 2014, perusahaan Korea itu memiliki 21.000 peneliti luar negeri di 16 negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, Jepang, India, Israel dan Polandia. Dalam konteks inovasi terbuka, dia bekerja sama dengan universitas ternama dunia seperti MIT, Universitas of California-Berkeley me-

lalui program-program industrial affiliate dan visiting researcher.

Benahi

Kementerian BUMN perlu membenahi postur BUMN dengan memasukkan para ahli yang kompeten dan berpengalaman internasional. Saat ini banyak yang bekerja di pusat riset dan industri terkemuka dunia. Contoh di bidang industri penerbangan banyak WNI bekerja di Boeing atau Airbus.

Saatnya Presiden Joko Widodo memilih pucuk pimpinan perusahaan yang berkeahlian global serta bervisi

« Menghadapi tantangan globalisasi dan pasar ASEAN seharusnya BUMN menyiapkan strategi guna mengatasi berbagai kendala. Misalnya, BUMN besar, tapi harus gesit. Portofolio beragam, tetapi harus terspesialisasi. Diperlukan The BUMN Way yang mengawinkan gaya berbagai manajemen sehingga tatakelola dan budaya kerjanya lebih berdaya saing. »

pengembangan perusahaan sesuai tren dunia. Untuk itu, perlu seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan secara transparan dan profesional. Hasilnya diumumkan secara luas agar putra-putri terbaik bangsa bisa ikut serta.

Panitia seleksi (pansel) uji kelayakan pucuk perusahaan bisa bekerja sama konsultan pendidikan internasional. Peserta harus memenuhi kriteria profesionalitas kelas dunia, memahami manajemen dan usaha perusahaan bersangkutan. Mereka tidak boleh ada benturan kepentingan serta berdedikasi tinggi.

Saatnya memperbarui isi kontrak manajemen berisi komitmen pimpinan terpilih untuk memenuhi segala target yang ditetapkan pemegang saham. Selama ini banyak direksi tidak menguasai proses bisnis global yang mengedepankan solusi teknologi, e-Sourcing. Solusi tersebut dikembangkan dengan prinsip *supply chain management*. Selain itu, hanya sedikit direksi yang mampu membuat laporan keuangan berlevel International Financial Reporting Standards. ■

Penulis Sekjen Ikatan Alumni Program Habibie



Potensi Demografi Kaum Muda

OLEH
BIMO JOGA SASONGKO



Indonesia sebaiknya menata postur sumber daya manusia (SDM) nasional untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit dengan fokus kaum muda. Data demografi menunjukkan jumlah pemuda sesuai dengan batasan UU berusia 16-30 tahun berjumlah 61,8 juta. Ini 24,5 persen total penduduk nasional 252 juta (BPS, 2014).

Demografi pemuda ini harus dikelola secara totalitas agar potensinya tidak menjadi beban sejarah dan berubah menjadi bencana sosial. Lihat saja kemiskinan, kejahatan dan kekerasan oleh pemuda atau terlibat narkoba. Penyebabnya antara lain faktor kemiskinan struktural, lonjakan pengangguran usia muda, dan putus sekolah.

Ada karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi setiap generasi muda untuk memenangkan pertarungan masa depan dalam mewujudkan mimpi Indonesia sejahtera. Diperlukan generasi muda yang memiliki kualitas integritas tinggi. Kapasitas keahlian dan intelektual yang mumpuni. Kepemimpinan yang peduli dan profesional.

Tak pelak lagi, bangsa saat ini menanti kebangkitan kaum muda untuk mewujudkan negeri harapan. Kapitalisasi tersebut membutuhkan wahana dan kesempatan bagi pemuda agar bisa menjadi unggulan.

Perlu membangun optimisme kebangsaan, tidak lama lagi pemuda mampu mewujudkan mimpi bangsa. Prediksi tentang Indonesia yang akan menjadi bangsa maju pada tahun 2030 telah dibuat McKinsey Global Institute. Berbagai indikator telah dikemukakan lembaga itu seperti pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mulai tersebar di luar Jawa. Prediksi ini bisa terwujud jika postur SDM bangsa, utamanya para pemuda, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar se-

jak dini di pusat-pusat keunggulan iptek dan inovasi dunia.

Sejarah menunjukkan, kaum belia lebih tangguh mengendalikannya semangat zaman.

Mereka berani membuat terobosan dan inovatif. Orang tua sering menyatakan, anak muda seperti peribahasa "kaduk uani kurang deduga" yang berarti kelewatan tapi kadang-kadang kurang perhitungan. Itulah kekuatan, kelemahan dan sekaligus keajaiban kaum muda.

Indonesia membutuhkan terobosan atau langkah yang tidak biasa. Peran penerobos sangat tepat dilakukan kaum muda. Perlu memperbaiki konsep Indonesia Incorporated yang bernuansa muda, yang sesuai dengan semangat zaman di mana tulang punggung ekonomi masa depan, ekonomi kreatif. Saatnya pemuda menggelorakan optimisme Indonesia secara konkret dengan membangkitkan sel-sel kreatif hingga desa.

Pakar proses kreativitas Daniel L. Pink menyatakan bila ingin maju harus melengkapi kemampuan teknologi (*high-tech*) dengan hasrat mencapai tingkat "high concept" dan "high touch." *High concept* adalah kemampuan menciptakan keindahan artistik dan emosional, mengenali pola-pola dan peluang, menciptakan narasi yang indah dan menghasilkan temuan-temuan.

High touch kemampuan berempati, memahami esensi interaksi manusia, dan menemukan makna. Dalam konteks ini, diperlukan inovasi teknologi sebagai aspek *high-tech* guna mendorong *high concept* dan *high touch* bagi *cluster* ekonomi kreatif kaum muda.

Besarnya jumlah pemuda merupakan potensi dan risiko berat. Mulai tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati era langka bonus demografi (BD). Jumlah usia produktif diproyeksikan men-

capai 64 persen total jumlah sebesar 297 juta.

BD analog pisau bermata dua. Di satu sisi merupakan potensi atau peluang sangat strategis sebuah negara untuk percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan SDM usia produktif melimpah. Namun jika salah kelola, bukan bonus, te-

usia produktif terbaik dari 2020 sampai 2035.

Proyeksi

Data demografi klop dengan proyeksi lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute yang memperkirakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling stabil dunia, Indonesia akan menjadi ne-

« Indonesia membutuhkan terobosan atau langkah yang tidak biasa. Peran penerobos sangat tepat dilakukan kaum muda. »



tapi bisa menimbulkan malapetaka sosial.

Rasio sederhana BD dapat digambarkan, setiap 100 penduduk terdapat 64 orang berusia produktif. Sisanya 46 orang anak-anak dan lansia. Rasio usia produktif di atas 64 persen sudah cukup untuk bergerak menjadi negara maju. Itu rasio

gara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh pada tahun 2030.

Segep bangsa berkeadilan mencetak pemuda santun, cerdas, inspiratif dan berprestasi. Perlu menekankan arti penting kemandirian dan kreativitas pemuda. Peringatan Sumpah Pemuda ke-

marin masih diwarnai dengan maraknya penyakit sosial yang melibatkan pemuda.

Tak bisa dimungkiri, semakin banyak pemuda teralienasi dengan tantangan zaman karena pemerintah kurang serius memberi fasilitas untuk berkarya nyata. Akibatnya, banyak pemuda yang hari-harinya terasa menjemukan dan sumpek karena minimnya prasarana atau ruang kreativitas. Padahal dalam era sekarang ekonomi kreatif bisa tumbuh subur jika distimulasi adanya ruang kreativitas dan kursus-kursus atau *workshop* gratis bagi pemuda.

Daya saing suatu bangsa ditentukan kemampuan berkreasi dan berinovasi sesuai dengan tren dunia. Seperti tergambar dalam kajian lembaga pendidikan terkemuka Amerika, Harvard Business. Dia menekankan pentingnya mendorong daya saing pemuda di bidang sistem inovasi dan produksi. Tak pelak lagi, situasi dunia semakin membutuhkan SDM muda yang inovatif dan ulet berbisnis untuk menghalau krisis.

Perlu membangun ruang kreatif bagi pemuda. Negeri ini membutuhkan sebanyak-banyaknya tokoh muda inovator baik tingkat dunia maupun lokal. Pada prinsipnya sumber inovasi baik produk ataupun proses merupakan area belajar (*learning*). Tujuannya agar pemuda mampu berinovasi. Di sini diperlukan upaya meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologinya dengan memperkuat kapasitas *learning*.

Kapasitas inovasi akan membaik jika daya kreativitas pemuda ditumbuhkan dengan membangun berbagai infrastruktur. Dalam persaingan global yang sangat ketat perlu *right brain training* untuk menumbuhkan daya kreativitas pemuda.

Modus kreativitas bisa lahir dari berbagai disiplin ilmu lalu bersenyawa menjadi produk hebat. ■

Penulis lulusan
North Carolina State
University, Amerika

Batu Loncatan SDM 2017

OLEH
BIMO JOGA SASONGKO

Memasuki 2017 perlu menegaskan milestone pengembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global. Milestone merupakan langkah besar dan strategis sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa.

Postur Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebesar 47,37 % masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 % dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 %. Sedangkan lulusan diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 %. Komposisi jumlah angkatan kerja diatas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Dengan kondisi postur SDM diatas perlu menekankan program nasional yang dikelompokkan menjadi tiga segmen. Pertama, adalah program penjarangan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan untuk prodi tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat.

Dengan kondisi tersebut perlu terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di luar negeri. Mereka perlu diarahkan hingga diberi insentif lewat bea siswa atau kredit mahasiswa. Mereka perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi

proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar memulai studinya di luar negeri.

Kedua, adalah program vokasional berbasis link and match. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya *apprenticeship* yang bermutu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK.



Ketiga, adalah program pendidikan informal untuk segmen masyarakat berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang ada. Baik di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Menjaring Siswa Berbakat

Kini pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun berbagai macam infrastruktur fisik dan proyek rekayasa untuk memenuhi swasembada pangan. Maka

dibutuhkan SDM yang unggul dan menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini. Untuk itu perlu mengirim sebanyak-banyaknya lulusan SMA berbakat untuk belajar di perguruan tinggi di negara maju. Hal ini lebih efektif karena para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar di luar negeri. Begitupun dari segi rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami iptek secara komprehensif.

Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirim ke luar negeri adalah sistem pendidikan di sana yang menekankan sistem Lab Based Education (LBE)

yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di dalam negeri. Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih.

Ada baiknya napak tilas pencetakan SDM yang dahulu dilakukan oleh BJ Habibie lewat beasiswa ikatan dinas kuliah di luar negeri untuk menangani transformasi industri dan teknologi berbagai bidang. Pada saat ini ribuan anak intelektual BJ Habibie itu tetap eksis berkarya dan telah menemukan jalan masing-masing untuk mengabdikan kompetensinya untuk bangsa.

Penerima beasiswa ikatan dinas ke luar negeri searah dengan paradigma global brain circulation seperti yang ditemukan oleh Paul Krugman penerima hadiah Nobel bidang Ekonomi. Para penerima bea-

siswa LN yang dikirim sejak mereka lulus SMA lebih mudah menjadi sosok versatile. Sosok itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman sewaktu kuliah dan magang kerja di LN sebagai modal penting untuk memecahkan

suai dengan kebutuhan.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. *Apprenticeship* adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja de-

« Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirim ke luar negeri adalah sistem pendidikan di sana yang menekankan sistem Lab Based Education (LBE) yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di dalam negeri. »

berbagai persoalan bangsa. Hal itu tidak mengherankan karena sistem pendidikan di negara maju bisa menjadi

ngan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Durasi *apprenticeship* biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk *apprenticeship* adalah mekanisme pembelajaran cangkih atas dasar saling percaya dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Pemagangan berbasis *link and match* sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi. Ini bisa sukses dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standarisasi sekolah menengah, terutama SMK. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah.

problem solving yang hebat untuk berbagai kehidupan.

Prinsip Desentralisasi

Memasuki 2017 perlu totalitas menggalakkan program vokasional atau kejuruan yang berbasis *apprentice* untuk membangun nilai tambah lokal. Program vokasional berbasis *apprentice* adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem *Apprentice* untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti industri pesawat terbang PT DI pernah mencetak puluhan ribu teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan se-

Untuk mewujudkan *link and match* perlu sinergi antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha/industri yang diwakili oleh KADIN serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep *link and match* yang dirumuskan oleh Wardiman Djodjonegoro yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet Pembangunan VI, pada saat ini konsep tersebut masih relevan. ■

Penulis, Alumni North Carolina State University, Amerika Serikat, Ketua Umum IABIE.

Makna Kunjungan Raja Salman

OLEH BIMO JOGA
SASONGKO

Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi membuka pintu kerja sama berbagai sektor, tidak hanya investasi sektor migas, misalnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Apalagi Visi 2030 Arab Saudi juga mendukung transformasi SDM nasional yang mengurangi ketergantungan sektor migas.

Wakil Putra Mahkota, Muhammad bin Salman, yang juga sebagai Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan telah mengumumkan Visi Saudi 2030 yang menetapkan goal 15 tahun ke depan beserta agenda kebijakan Rencana Transformasi Nasional. Utamanya terkait diversifikasi pendapatan negara dan transformasi postur SDM nasional agar berdaya saing global.

Sekadar catatan, Arab memiliki 7,2 juta pekerja asing yang berbagi tempat dengan warga Arab sekitar 27 juta jiwa. Kerajaan melihat perlu reformasi postur SDM nasional dan komposisi ideal antara pekerja asing dan lokal. Kerajaan menyadari selama ini boleh dibalang mentalitas warganya tak mau bersusah payah serta berpikir keras untuk bangsanya.

Segala sesuatunya diserahkan kepada tenaga kerja asing dengan imbalan gaji besar. Bahkan, fasilitas vital dan persenjataan canggih yang dibeli dari luar negeri untuk masalah operasional dan perawatannya juga bergantung pada tenaga asing.

Pemerintah Indonesia perlu mengemukakan kembali bantuan dana sektor pendidikan yang selama ini dikucurkan Arab kepada lembaga pendidikan Tanah Air, terutama pondok pesantren.

Apresiasi dan penghargaan Arab terhadap Polri dalam mengatasi ancaman terorisme sebaiknya juga diwujudkan dalam bentuk bantuan pendidikan bagi personel kepolisian untuk



belajar lagi di luar negeri. Perlu menyipkan SDM Polri yang memiliki kompetensi tinggi bidang Threat Identification and Risk Assessment (TIRA) dalam menghadapi aksi teroris yang semakin ganas.

Mereka kelak bisa mengidentifikasi ancaman dan menyusun perencanaan sistem keamanan infrastruktur dengan baik. Tak pelak, semakin dibutuhkan SDM Polri yang mumpuni di bidang engineering security beserta peralatan seperti pendeteksi bahan peledak atau senjata. Juga semakin penting teknologi surveillance dengan CCTV menggunakan computer based yang mampu mengolah gambar dan video.

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu segera dirombak karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih. Ini memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Apalagi perwira Polri yang persentasenya sekitar 10 persen, juga belum memiliki pola pengembangan profesi sesuai dengan tantangan zaman.

Untuk mengatasi disparitas karier dan kompetensi perlu sistem pengembangan SDM Polri pada level perwira. Untuk itu, perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi LN untuk pendidikan para perwira Polri.

Para ulama yang mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Salman, se-

baiknya mengajukan program untuk meningkatkan kompetensi santri yang berpotensi memajukan bangsa.

Perlu cara yang efektif untuk mencetak santri wirausaha menjadi pelaku UMKM yang kreatif dan ulet. Produktivitas sangat relevan untuk dijalankan. Kini, Arab menjadi kekuatan baru dunia yang diperhitungkan. Dia memainkan peran sentral di kawasan Timur Tengah dan forum G-20. Dunia melihat keperkasaan Arab saat melancarkan

melawan terorisme.

Kerja Sama

Arab belanja militer sekitar 10,4 persen dari PDB, sedangkan per kapitanya sekitar 17 ribu dollar AS. Belanja tersebut termasuk peringkat atas dunia. Sekadar perbandingan belanja negara lain dihadapkan PDB-nya, AS 4,8 persen, Russia 4,3

Elang buatan Amerika Serikat.

Besarnya belanja militer Arab dan jumlah alutsista tentu membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikan dan merawat berkala. Teknisi Indonesia yang selama ini berkecimpung dalam industri pertahanan, seperti PTDI, PAL, Pindad bisa mengisi kebutuhan SDM di Arab.

SDM Iptek Indonesia bisa

« Dia memainkan peran sentral di kawasan Timur Tengah dan forum G-20. Dunia melihat keperkasaan Arab saat melancarkan Operasi Decisive Strom ke Yaman dan membentuk Koalisi Militer Islam untuk melawan terorisme. »



persen, Korea Selatan 2,9 persen, Malaysia 2 persen, dan Indonesia 0,89 persen.

Operasi Decisive Strom ke Yaman dan membentuk Koalisi Militer Islam untuk

Senjata terbaru Arab yang dipamerkan antara lain pesawat tempur generasi terbaru F-15SA

dikirim ke Arab untuk menambah kompetensi dan pengalaman. Apalagi Arab dan Indonesia telah resmi meneken perjanjian kerja sama di bidang pertahanan. Memorandum kerja sama resmi ditandatangani pada 2014 di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Arab dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Ini merupakan pertama kalinya ada kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Arab sejak hubungan diplomatik dibuka pada 1950-an. Kesepakatan dua lembaga itu, meliputi kerja sama penelitian dan transfer teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pelatihan pasukan khusus terkait penanganan teroris, dan kerja sama dalam penanganan bencana.

Arab, yang memiliki teknologi dan senjata canggih, mengajak Indonesia dalam penelitian dan pengembangan alutsista. Kerajaan juga telah menyempatkan diri melihat sejumlah alutsista TNI yang diproduksi atau dirakit di Indonesia, seperti panser Anoa buatan Pindad di Markas Kopassus. Selain itu juga, pesawat jenis CN-295 rakitan PT DI kerja sama Airbus Military. ■

Penulis Luhutan North
Carolina State University

Pengembangan SDM Polri

OLEH BIMBO JOGA SASONGKO



Peringatan Hari Bhayangkara ke-71 pada 1 Juli diwarnai dengan tantangan yang makin kompleks. Kini seluruh jajaran Polri dituntut lebih profesional. Sesuai dengan makna lambang kepolisian yang bernama Rastra Sewakotama. Yang berarti Polri adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Sebutan itu adalah brata pertama dari Tri Brata yang dilkrarkan sebagai pedoman hidup segenap Polri.

Sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat harus menghindari sikap sebagai penguasa. Ini sejalan dengan prinsip dasar kepolisian di semua negara yang disebut *new modern police philosophy*.

Penugasan penting Presiden kepada Kapolri Tito Karnavian menekankan pengembangan karir dan SDM Polri secara progresif. Sehingga kompetensi personel diseluruh lini bisa berkembang dengan baik.

Presiden Jokowi meminta agar Kapolri melakukan reformasi total demi kesempurnaan organisasi. Kompetensi sebaiknya menjadi kata kunci bagi Kapolri dalam menyempurnakan organisasi.

Istilah kompetensi dalam kamus bahasa Inggris Webster mendefinisikan "Competence" sebagai kondisi yang cocok, cukup dan tepat (*suitable, sufficient and fit*). Istilah tersebut menggambarkan tugas-tugas yang menjadi elemen dari sebuah pekerjaan. Istilah ini berasal dari *Management Charter Initiative*, Inggris pada 1988 yang menyatakan bahwa kompetensi didefinisikan secara resmi sebagai: "kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam konteks tertentu. Dan kemampuan untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan ke konteks yang baru dan atau berbeda.

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu dibe-
nahi karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih dan

memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Prestasi dan kompetensi yang tinggi pada diri Kapolri saat ini merupakan hasil dari sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri yang pernah dia tem-
puh. Antara lain pendidikan di University of Exeter di Inggris yang meraih gelar MA dalam bidang Police Studies. Dan meraih PhD di Nanyang Techno-
logical University, Singapura. Hampir seluruh pendidikan dan kursus kepolisian yang terbaik di dunia pernah diikutinya. Sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri itu sangat membantu tugas dan menunjang prestasi.

Sistem perekrutan di Polri mesti dibe-
nahi secara mendasar. Sistem perekrutan pada berbagai jenjang sebaiknya dilakukan secara transparan. Tidak boleh lagi terjadi kolusi dan nepotisme dalam sistem rekrutmen. Selama ini dalam organisasi Polri ada empat sumber perekrutan. Yakni rekrutmen Tuntana (Khusus Brimob dan Polair), Bintara, Perwira Akademi Kepolisian dan Perwira Sumber Sarjana, dengan syarat dari umur 18 hingga 22 tahun.

Sistem rekrutmen SDM Polri berbasis empat nilai dasar yang menjadi pedoman berdasarkan universalitas watak peran dan fungsi dari institusi ini. Empat nilai dasar tersebut adalah integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya. Empat nilai dasar yang universal tersebut tentu harus dikontekstualisasikan dengan situasi empirik pemolisian di negeri ini.

"Merit System"
Agenda Kapolri Tito untuk memotivasi personel atau SDM Polri sebaiknya menerapkan Merit system. Selama ini Polri belum sepenuhnya menerapkan Merit System dalam pengembangan karir dan kompetensi. Hingga kini masih berlaku sistem *Time Based* atau sistem yang sangat konvensional. Dalam arti ada waktu tertentu yakni antara empat sampai dengan lima tahun di-
berlakukan kenaikan satu pang-

kat bagi setiap anggota Polri. Memang ada persyaratan tambahan untuk bisa naik pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas. Namun hal itu lebih bernuansa hanya formalitas belaka, bukan untuk peningkatan kompetensi yang esensial. Merit System memacu anggota Polri untuk selalu meningkatkan kompe-

nya jabatan Kaniit Lantas di Satlantas maka personil yang bersangkutan harus memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan dalam jabatan Kaniit Lantas tersebut. Hanya personil yang memenuhi standar kompetensi jabatan itulah yang dapat ditempatkan pada posisi tersebut.

Polri kini juga membutuhkan kerja sama dan pendidikan global bagi para perwira.

**« Sistem perekrutan di Polri mesti dibe-
nahi secara mendasar. Sistem perekrutan pada
berbagai jenjang sebaiknya dilakukan secara
transparan. »**



tenalnya, lebih berinovasi dan kreatif agar mempunyai kelebihan dibanding rekan lainnya.

Merit System seharusnya segera diterapkan secara sistemik di seluruh Polres sehingga mendorong terciptanya personil yang memiliki kinerja baik. Proses wanjak di Polres harus didasarkan pada pertimbangan yang matang sehingga setiap penempatan personil akan terwujud "the right man in the right job in the right time". Untuk menempatkan personil pada jabatan tertentu, misal-

lika hanya mengandalkan pendidikan dan kursus di dalam negeri saja tentunya tidak memadai. Selain masalah pembenahan integritas, personil kepolisian juga perlu pengembangan kompetensi dan profesionalitas untuk 400 ribu personil Polri.

Saat ini postur SDM Polri terkendala oleh komposisi struktur yang 90 persen terdiri dari kepangkatan bintara ke bawah yang memiliki kapasitas dan ketrampilan pemolisian yang minim dan dengan ting-

kat kesejahteraan yang kurang memadai. Sedangkan perwira Polri yang persentasenya sekitar 10 persen juga belum memiliki pola pengembangan profesi yang sesuai dengan tantangan jaman.

Level Perwira

Untuk mengatasi disparitas karir dan kompetensi itu perlu sistem pengembangan SDM Polri pada level perwira dengan berbagai program pendidikan di luar negeri. Untuk itu perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi di LN yang tepat untuk pendidikan para perwira Polri.

Kompetensi Kapolri Tito yang sarat pendidikan internasional dan kerjasama global tentunya menjadi pengalaman berharga untuk melakukan pengembangan SDM Polri.

Kapolri setiap saat perlu meningkatkan kemampuan Densus 88 yang menjadi ujung tombak personel anti teroris. Penanganan terorisme di negeri ini sangat membutuhkan kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam konteks global, Kapolri sebaiknya lebih proaktif dalam penguatan dan peningkatan kerjasama ASEANAPOL (Asean National Police) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang tangguh dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota ASEANAPOL dalam hal SDM kepolisian agar keamanan ASEAN dan pemertaklukan ASEAN Community bisa berlangsung dengan baik.

Postur dan kompetensi SDM Polri mesti ditingkatkan dalam waktu yang singkat karena modus terorisme telah berubah menjadi aksi individual yang lepas dari kelompok atau organisasi terorisme. Terorisme individual bisa tumbuh secara sporadis dan beraksi tiba-tiba tanpa bisa diantisipasi. ■

Penulis, Lulusan North Carolina State University, USA. Pendiri Euro Management Indonesia. Ketua Umum IABIE



Foto: Koran Jakarta / Ona

Oleh Elina Jaga Sekeloa

Tahun 2016, pemerintah menyiapkan langkah strategi untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa. Hal itu terlihat dari perintah Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor kepada semua pihak yang terlibat pengelolaan dana abadi pendidikan agar lebih produktif memiliki program terukur, dan tepat sasaran. Selama ini, dana pendidikan dipangkas lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sumbangnya dan inovasi dana abadi yang kini terkumpul sekitar 31 triliun rupiah. Diwujudkan, program LPDP yang mempunyai muatan di bidang SDM segera direstrukturisasi baik secara organisasi, operasional, maupun metode seleksi penerima beasiswa. Sebab operasinya murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan utang.

Mengingat pendaftar LPDP murni dari jajah payah rakyat Indonesia melalui pajak dan lain-lain, maka program LPDP semestinya harus mengedepankan asas pemerataan bagi seluruh daerah. Sejalan dengan peneraan Presiden, program LPDP juga harus tidak salah sasaran. Program jangan justru banyak dibuat orang kaya. Tahun ini LPDP menyiapkan dana sekitar 5 triliun rupiah untuk beasiswa 12 ribu pelajar mahasiswa. Restrukturisasi LPDP harus menyentuh aspek pengelolaan dan metode seleksi agar mencakup banyak negara tujuan penerima beasiswa. Selama ini pengirimannya mengelompok hanya untuk negara tertentu. Padahal pusat inovasi teknologi dan tenaga pendidikannya kini semakin menyebar.

Restrukturisasi program LPDP juga harus mengurutkan baik bagi perlu penyerapan alumni dengan lisan dinas atau dengan kondisi seram. Rencananya akan direvisi secara global, pihak swasta harus berkontribusi pada pihak kedua ataupun sebaliknya. Efisiensi mengikat dalam periode tertentu. Hal ini bisa diterapkan pada program beasiswa LPDP.

Kesepakatan

Dana ini perlu disiapkan sebelum para awardee berangkat ke luar negeri. Subsensi kustodian akan harus sangat jelas, termasuk penempatan dan keahlian sudah lulus pada lembaga pemerintah maupun BUMN. Sama sudah dirahatkan sangat detail dan asumsi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sebelumnya, konsep ini sudah direvisi perusahaan swasta agar sepuluh studi, para penerima beasiswa bekerja pada perusahaan tersebut. Mereka wajib mengikuti kelas dinas di sektor-sektor pemerintahan berdurasi minimal dua tahun. Mereka sebelumnya juga ditempatkan di institusi pendidikan agar kualitasnya merata di Tanah Air.

Penerapan konsep akan dinas di LPDP tentunya dapat meningkatkan efektivitas penyerapan tenaga kerja Indonesia. Apalagi para penerima beasiswa tersebut dapat memberi perubahan tidak menurut konvensional menjadi pegawai tetap. Selain mendapat tenaga kerja sesuai bidangnya, mereka akan sudah berpengalaman internasional. Langkah restrukturisasi LPDP juga mencakup elektivitas durasi beasiswa. Banyak yang dapat dipelajari para awardee selama kuliah di luar negeri. Misalnya, mempelajari budaya kerja setempat. Tetapi, melanjutkan studi di perguruan tinggi luar negeri tidak cukup efektif dalam waktu singkat karena perlu pengalaman bekerja juga. Selama ini durasi studi yang diterima para penerima beasiswa seragam cukup panjang, tapi sebelumnya disampingkan menjadi enam tahun. Para awardee sebelumnya juga pengalaman bekerja di luar negeri secara langsung di perusahaan-perusahaan ataupun lembaga internasional. Pembagian periode waktu antara studi dan bekerja pun harus disesuaikan dengan program kelajan.

Contoh, dalam program Inggris Bachelor Degree atau Strata 1, dalam jangka waktu belajar empat tahun, sebelumnya mereka dipelajari selama dua tahun untuk meningkatkan kapasitas yang diikuti. Begitu juga untuk mahasiswa program master degree atau strata 2. Ini biasanya diikuti mahasiswa yang ingin meningkatkan profesionalitas. Mereka perlu memiliki pengalaman bekerja minimal empat tahun, sebelum kembali ke tanah air. Untuk mahasiswa program tingkat doktor atau strata 3, disarankan menambah pengalaman postdoctoral selama tiga tahun agar dapat berkontribusi nyata terhadap lingkungan awardee secara umum. Secara khusus mendorong langkah kebijakan pemerintah. Dengan bekerja di luar negeri, para penerima beasiswa dapat mengaplikasikan ilmu secara langsung di perusahaan ataupun organisasi internasional. Mereka juga mendapat jaringan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa.

Perkembangan global menuntut agar LPDP meningkatkan durasi beasiswa hingga enam tahun, dengan tujuan agar para penerima beasiswa mampu mendapatkan nilai tambah dan siap menunjukkan kontribusi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Selama ini Indonesia masih kalah dari Malaysia yang telah mengirim 60 ribu mahasiswa dari 20 juta penduduk. Sementara itu, Korea Selatan telah mengirimkan 120 ribu anak muda kuliah di perguruan tinggi favorit di luar negeri dari jumlah penduduk 50 juta lebih. Tiongkok lebih hebat lagi jumlah anak tamatan SMA yang melanjutkan studi ke Eropa dan negara-negara maju mencapai satu juta.

Restrukturisasi LPDP harus memastikan satu kesatuan bagi seluruh rakyat. Program beasiswa haruslah pada mereka yang memiliki fasilitas dan dana untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri. Siswa yang kurang mampu atau dari desa kesulitan memperoleh LoA tersebut karena untuk mendapatkan prosesnya panjang dan membutuhkan dana serta kemampuan bahasa asing. Sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa optimal mengarahkan semua usaha guna mencetak pemimpin masa depan muda di berbagai bidang. Ini sesuai dengan misinya sebagai pengelolaan dana abadi pendidikan untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan bagi generasi mendatang.

Penulis Lufan North Carolina State University, Amerika Serikat

Pemerintah Serius Majukan Olahraga
Pemerintah Kirim Tim ke Asma
Pencapaian Dupes Tawad Seseu
Presiden Segera Ambil Tindakan Soal...

Selengkapnya >>

Populer Terbaru

Masyarakat Belum Melek PBK
Sabtu 21/6/2017 | 11:00

Pengadilan Tolak Pemohonan
Sunkit Mati Korban...
Sabtu 20/6/2017 | 16:20

Ormas Anti NGE Akan Dilindak
Sabtu 4/6/2017 | 08:00

Jangan Anggap Remeh Berak...
Mereka pada Tubuh
Sabtu 17/1/2016 | 11:00

Tanda bahwa Anda Sudah Tidak
Dibutuhkan lagi
Sabtu 20/6/2017 | 01:00

Pemilihan Puri Melebihi Dalam
Negeri yang...
Sabtu 21/7/2017 | 10:10

PERADA

Apa Korupsi Dan Bendera Nektar...
Memadukan Firman Tuhan Dan Tanta...

Toleransi Ala Masyarakat Desa...
Rakennan Pengristianan Suku Dalam...

Yang Tampak Sapele Sering Penah M...
Selengkapnya >>

CURHAT BUKUSA

7 Halahan Mengelola Keuangan Ya...
10 Tips Sukses Memulai Bisnis Untuk...

Pahami Dan Manifestasikan Tunjangan...
Alasan Mengapa Kuliah Wajib Untuk...

6 Tips Meningkatkan Mood Di Hari Hari...
Selengkapnya >>

LADIAN ARSWENDO

Penipu Tertipu, Dan Lucu...
Waktu Indonesia Keras...

2018: Tahun Tak Perlu Ransan...
Mata, Dengan Bintang Di Langit...

Selanjutnya, Monor Dan Istri...
Selengkapnya >>

Kehadiran Universitas Asing

Oleh BIMO JOGA
SASONGKO

Kehadiran universitas asing di Tanah Air merupakan keniscayaan karena tuntutan zaman. Namun begitu, perlu diantisipasi dan program studinya harus ditentukan secara tepat agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pro kontra telah terjadi. Forum Rektor Indonesia (FRI) minta pemerintah agar membatasi izin pembukaan universitas asing. FRI merekomendasikan agar yang diizinkan hanyalah *research university*. Apresiasi Resistensi juga datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi) yang bakal terkena dampak langsung universitas asing. Bahkan, Apresiasi akan melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah jika segala ketentuan terkait operasional universitas asing ditabrak. Penolakan Apresiasi didasarkan pada alasan saat ini terdapat sekitar 2.000 PTS kecil tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ini mestinya terlebih dulu ditingkatkan kualitasnya.

Kehadiran universitas asing merupakan bentuk investasi global berorientasi keuntungan. Inilah bentuk liberalisasi pendidikan tinggi sebagai konsekuensi Indonesia anggota World Trade Organization (WTO). Liberalisasi perguruan tinggi berlaku sejak ratifikasi atau kesediaan dalam menandatangani General Agreement on Trade and Services (GATS). Ini perjanjian mengenai perdagangan dan jasa anggota WTO.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengarahkan investasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat dalam meraih masa depan lewat proses perkuliahan. Jangan semata-mata orientasi masyarakat hanya memburu ijazah



universitas asing. Setelah Indonesia ratifikasi WTO, otomatis juga mengesahkan liberalisasi pendidikan tinggi. Hal itu terlihat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Contoh, UU Nomor 20 tahun 2003, peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, dan UU Nomor 12 Tahun 2012.

Ketentuan tersebut juga mencakup pendanaan pendidikan tinggi, ketutsertaan masyarakat, pengawasan pe-

laksanaan melalui: pengadaan lintas batas, konsumsi luar negeri, kehadiran komersial, dan kehadiran orang alami.

Metode konsumsi luar negeri, kebebasan bagi warga anggota untuk membeli layanan di wilayah anggota lain seperti jasa pendidikan atau luar negeri dan menerapkannya di negara asal. Metode kehadiran komersial, peluang bagi pemasok jasa asing untuk membangun, mengoperasikan atau memperluas kehadiran komersial di wilayah anggota. Contoh, cabang, lembaga, atau anak perusahaan seperti mem-

gota ini individu asing untuk menyediakan layanan. Contohnya menyediakan dosen dari luar negeri untuk mengajar.

Dengan dibukanya pintu liberalisasi pendidikan tinggi, muncul produk kebijakan yang mengarah pereduksian peran pemerintah. Di lain pihak terjadi pembesaran peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan otonomi penuh. Kemenristek Dikti mewajibkan universitas asing yang akan beroperasi di Indonesia berkolaborasi dengan PT Swasta (PTS) dalam negeri. Sejumlah PT asing akan beroperasi di Indonesia pada tahun ini, sekitar 10. Di antaranya,

tor krusial seperti industri dan transportasi. Inovasi disruptif membantu menciptakan pasar baru, dan akhirnya menggantikan teknologi lama.

Untuk itu, diperlukan *roadmap* atau antisipasi yang jauh ke depan. Misi universitas asing jangan hanya mengeruk keuntungan bisnis. Mereka juga harus membantu Indonesia menghadapi revolusi ilmu pengetahuan massif dari sektor *physics*, digital, dan *mathematics*. Begitu juga inovasi tentang aplikasi layanan jasa akan terus berkembang dan membutuhkan SDM kreatif terus menerus. Menurut ketentuan universitas asing harus bekerja sama de-



«Kemenristek Dikti mewajibkan universitas asing yang akan beroperasi di Indonesia berkolaborasi dengan PT Swasta (PTS) dalam negeri. Sejumlah PT asing akan beroperasi di Indonesia pada tahun ini, sekitar 10.»

Universitas Cambridge Inggris, Universitas Melbourne dan Universitas Queensland Australia.

Program Studi

Pemerintah juga sudah menentukan lokasinya sekaligus merumuskan ketentuan mengenai program studi prioritas seperti sains, teknologi, keinsinyuran, matematika, bisnis, teknologi, dan manajemen. Program studi prioritas sebaiknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan inovasi ke depan yang diwarnai berbagai disruptif. Prodi prioritas universitas asing sebaiknya inklusif dalam memajukan iptek Indonesia dan mampu meningkatkan kapasitas inovasi.

Universitas asing diharapkan bisa mencetak calon pemimpin unggul, khususnya dalam domain iptek dan korporasi. Postur dosen atau sebaiknya 50 persen dari dalam negeri dan para diaspora, sehingga ada *brain circulation* global. Penentuan prodi universitas asing harus tepat, agar bisa menjadi solusi menghadapi bermacam *disruptive innovation* pada beberapa sek-

ngan mitra lokal dapat membuka lembaga pendidikan di kota yang sudah diprioritaskan seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Medan.

Sejak berlakunya UU mengenai izin pendirian universitas asing, sudah beberapa yang sudah beroperasi. Ironisnya baru sekarang mencuat polemik. Menurut catatan Kemenristek Dikti sudah 26 universitas asing beroperasi. Salah satunya Jakarta International College, cabang Monash University Australia. Jumlah mahasiswa angkatan pertama tahun 2014 mencapai 1.600 orang.

Masyarakat harus memahami, tradisi ilmiah dan keunggulan riset universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia. Dia sudah berakar kuat dengan budaya bangsanya, juga sudah bersenyawa dengan karakter dan etos kerja bangsa maju. Dengan demikian, kualitas universitas asing yang beroperasi di Tanah Air tidak bisa sama dengan kualitas negara asal. ■

Penulis Lulusen North
Carolina State University,
Amerika Serikat



Cinta Motivasi Terbesar...
"Unen Unen" Pengujung Abad 20.
NU Mekawal Indonesia Sebagai Rahn...
Perjuangan Melawan Diskriminasi Ya...
Inovasi Untuk Memecahkan Masalah...
Selektipraya

7. Hiasan Yang Bisa Diukir...
8. Hal yang Harus Ditinggalkan untuk
jika Jenuh Di Kantor
Mengapa Tidak Bisa Menabung Dan ...
Trik Membangun Personal ...
Solenglaprta

CATATAN ARSWENDO

Berita Yang Diberi, Bukan Dibari
Sapa Cawapres Pilihanmu?
Liberal Untuk Mendapatkan Pemilu
CCTV Dari Garis Gelap
Hati Wayang Indonesia: Keren Ban...

[Jelajahi lainnya](#)

Tenaga Kerja Asing

Kamis
3 MEI 2018 9

OLEH BIMO JOGA SASONGKO

Peringatan Hari Buruh sedunia atau May Day pada 1 Mei baru lewat. Nasib buruh kini ditentukan perkembangan bisnis global yang sangat dinamis dan ditandai dengan terjadinya disruptif teknologi yang serba digital. Perkembangan bisnis global juga diwarnai migrasi tenaga kerja antar negara. Daya saing tenaga kerja asing (TKA) yang lebih kompetitif memaksa pekerja lokal meningkatkan kompetensi dan kemampuan berbahasa asing.

Saat ini, organisasi buruh sedang menentang Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA. Pasal-pasal dalam Perpres dinilai merugikan SDM nasional. Perpres juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasal yang dianggap merugikan antara lain tentang Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan izin yang sangat longgar. Pasal itu dibuat agar pemberi kerja/pengusaha bisa seakannya merekrut TKA kapan pun dan dari mana pun.

Sebaiknya terkait RPTKA harus benar-benar dievaluasi dan dinilai secara ketat dan melibatkan organisasi profesi seperti buruh dan perguruan tinggi. Pasal mengenai ketentuan tentang TKI pendamping TKA mestinya diatur supaya hasilnya lebih efektif. Kewajiban ahli teknologi dan keahlian kepada TKI pendamping harus terukur. Misalnya, mesti ada tes khusus terhadap TKA untuk mengukur tingkat keahlian. Dengan demikian, TKA yang hadir di Indonesia benar-benar kredibel, bukan tenaga kasar yang dibungkus label tenaga ahli.

Pemerintah harus membatasi serbuan TKA terutama pada proyek infrastruktur. Selama ini banyak penyimpangan kompetensi TKA, sehingga jenis-jenis pekerjaan kasar juga diambil TKA. Meningkatkan jumlah TKA yang merambah berbagai sektor negeri ini membuat berbagai pihak gusar.



Namun, kegusaran tersebut hendaknya tidak memicu kekacauan, tetapi harus diantisipasi secara adil dan langkah sistemik untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja lokal.

Buruh sebaiknya menekankan pembahasan masa depan terkait daya saing. Persoalan perburuhan masih menjadi bom waktu sosial yang siap meledak. Sebab hubungan industrial masih sepi buntut. Posisi advokasi dan peraturan perburuhan masih compang-camping. Portofolio kompetensi di kalangan buruh terus melesot dan kualitas hak-hak normatif buruh makin tipis.

« Tak pelak lagi, outsourcing lintas negara saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi global yang sangat besar dan sedang diperebutkan berbagai negara pemilik SDM tangguh, seperti India yang menyiapkan SDM dengan baik. »

Pemerintahan dituntut lebih efektif dalam meningkatkan daya saing buruh. Apalagi pada era 2020 hingga 2030 bakal ada banyak penduduk baru (bonus demografi) sebagai puncak usia produktif penduduk Indonesia. Situasi ini harus dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan SDM terutama kaum buruh.

Tak bisa dimungkiri gerakan buruh kini mudah eskalatif. Semua itu karena masih ada masalah ketenagakerjaan krusial yang tengah mengadang perlawanan mereka. Misalnya, soal outsourcing. Istilah outsourcing atau biasa disebut alih daya mengacu pada UU Ketenagakerjaan Pasal 65 dan

66 mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Hal ini tidak boleh menyebabkan pekerja kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja.

Lintas Negara

Perlu pengawasan ketenagakerjaan yang kredibel dan berintegritas dalam menyikapi outsourcing. Selama ini persoalan pengawasan ketenagakerjaan yang nota bene aparat sipil negara (ASN) daerah kurang optimal kinerjanya. Pengawasan ketenagakerjaan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait proses bisnis sekarang yang efektif luar biasa. Tingkatan ini bisa diraih, salah satunya, dengan faktor outsourcing.

Tak pelak lagi outsourcing lintas negara saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi global yang sangat besar dan sedang diperebutkan berbagai negara pemilik SDM tangguh seperti India yang menyiapkan SDM dengan baik. Utamanya dengan cara spesialisasi ketenagakerjaan dan penguasaan bahasa asing.

Untuk mengejar potensi dan berkah globalisasi Indonesia sebaiknya memiliki sistem disertai pengembangan SDM sejak sekarang. Sejak bangkit sekolah menengah para pelajar diperkenalkan dengan bidang-bidang andalan outsourcing global. Biasanya para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi luar negeri lebih adaptif dan menguasai potensi outsourcing perusahaan multinasional.

Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius terhadap pengusaha alih daya atau outsourcing. Pemerintah menyiapkan program untuk mengembangkan lebih luas industri jasa, termasuk outsourcing sebagai salah satu program unggulan tahun ini. Pelaku usaha outsourcing hendaknya menjalankan bisnis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Saatnya Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia membenahi standar kualifikasi perusahaan. Mereka perlu membentuk regulasi persyaratan



pengguna perusahaan outsourcing, membuat regulasi standar manajemen, dan teknis lainnya. Dengan demikian, sistem outsourcing Indonesia bebas dilewati bagi karyawan maupun perusahaan dari meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah bersama asosiasi dan organisasi buruh perlu membentuk program cepat untuk mengembangkan bisnis proses outsourcing agar tidak kalah dari tenaga seperti Filipina. Negara ini mampu mendapat peluang usaha terbesar hingga mencapai 20 miliar dolar AS setahun.

Publikasi UNCTAD terkait tingkat kesejahteraan buruh di negeri ini ternyata lebih rendah dari kesejahteraan buruh negara tetangga. Hal ini diteliti

dari aspek pendapatan perkapita berdasarkan Purchasing Power Parity atau kemampuan daya beli dan GNP. Ditinjau dari perubahan Tawak, di sini terdapat ke dalam bentuk pragmatis. Alih buruh sebagai gerakan reformasi daya dukungnya makin kuat, tetapi kurang efektif di sisi dari aspek tujuan kesejahteraan bersama. Banyak yang tidak sadar bahwa jika kita demotras buruh dengan jumlah massa banyak mereka kaya sangat banyak. Jika itu meyakini bisa untuk menambah dana pembangunan perumahan buruh dan pendidikan termasuk anak-anak.

Penalty Lufshan North
Carolina State University

GAGASAN

Kamis 9
31 MEI 2018

Hari Pancasila dan Mentorship

OLEH BIMO JOGA SASONGKO

Peringatan Hari lahir Pancasila tahun 2018 mengemukakan tema: "Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi". Selain menekankan persatuan, tema tersebut juga mengandung relevansi untuk berbagi dan berprestasi bagi segenap bangsa. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan program yang masif berbentuk mentorship.

Pada zaman Orde Baru peran mentorship diperankan oleh para penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ditingkat nasional para mentor itu disebut dengan istilah Manggala P4.

Menurut Lowenstein & Bradshaw, mentorship adalah suatu bentuk sosialisasi untuk peran profesional yang mendorong pencapaian program nasional. Karena perkembangan zaman bentuk penataran P4 tentunya berubah materi dan metodenya.

Para penatar atau mentor spesifikasi harus relevan dengan zaman yang tengah menginjak era Revolusi Industri 4.0. Mentorship dalam program pembinaan Ideologi Pancasila pada saat ini sebaiknya menekankan kepada pembentukan pendidikan karakter dengan pendekatan yang konkrit yakni penguatan profesionalitas anak bangsa.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebaiknya segera menjalankan program mentorship. Sayangnya menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2018 terjadi gugatan publik terkait dengan besaran gaji fantastis yang diberikan kepada pejabat BPIP. Sungguh sayang, masalah gaji BPIP telah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk evaluasi dan reinventing nilai kebangsaan yang mampu membentuk peradaban unggul. Apalagi tema peringatan



kali ini menekankan terwujudnya prestasi SDM bangsa.

Perjalanan bangsa saat ini diwarnai bermacam disrupti teknologi dan da-

tangnya era Industri 4.0. Generasi saat ini perlu navigasi dan pembekalan agar termotivasi dan mampu bersaing secara global.

Tema peringatan Hari Lahir Pancasila menekankan pembangunan karakter SDM bangsa. Pada hakikatnya memerlukan program nasional mentorship yang didukung peran sejumlah supermentor kekinian yang mampu menggerakkan masyarakat dan turut menguatkan pendidikan.

Supermentor kebangsaan pada saat ini bisa diperankan oleh mereka yang memiliki kapasitas pendidikan karakter dan budi pekerti. Selain itu juga didukung oleh para inovator, pelaku start-up nation maupun perorangan yang memiliki pengalaman luar biasa.

Era Industri 4.0 dan gelombang disrupti teknologi harus dipahami secara baik oleh generasi muda saat ini dalam

konteks nilai-nilai Pancasila. Banyak ragam profesi yang terkubur lalu muncul jenis profesi baru. Agar generasi muda memahami fenomena diatas lebih dini, dibutuhkan

sesuai kemajuan zaman yang mengedepankan daya imajinasi dan kapasitas inovasi.

BPIP sebaiknya terjun langsung ikut menangani reformasi pendidikan yang tengah dijalankan pemerintah. Reformasi sebaiknya dalam bentuk penataran yang metodenya disempurnakan agar tidak membosankan para siswa. Saatnya BPIP merekrut para supermentor secara masif. Warga negara yang memiliki kriteria sebagai

diberikan bekal pendalaman ragam profesi secara intens. Dalam persaingan global yang sangat sengit sekarang ini, sekolah dituntut untuk mengenaikan sikap profesionalisme dan ragam profesi yang relevan dengan perkembangan zaman sejak awal.

Lebih istimewa lagi jika supermentor bisa menunjukan ragam profesi yang akan lahir serta mampu reinventing atau memunculkan kembali ragam

« Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk evaluasi dan reinventing nilai kebangsaan yang mampu membentuk peradaban unggul. »

supermentor sebaiknya diterjunkan ke sekolah-sekolah secara berkesinambungan.

Para siswa sekolah pada saat ini perlu menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan metode yang lebih menarik. Yakni mengawinkan nilai Pancasila dengan aspek ragam profesi yang kelak akan digeluti oleh siswa. Program mentorship juga mengenalkan siswa terhadap ragam profesi masa depan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Tentunya hal ini perlu sistematis dan disiplin ilmu yang aktual.

Saat ini ada fenomena yang menyedihkan terkait sempitnya lapangan kerja yang tidak mampu lagi menyerap jumlah penduduk angkatan kerja. Para supermentor bisa mengatasi akar persoalan tersebut, yang sebenarnya menyangkut pendalaman dan penguasaan ragam profesi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itulah betapa mendesaknya program yang masif dan membumi guna mendalami berbagai ragam profesi sejak dini lewat penataran yang dijalankan BPIP.

Sejak duduk di bangku sekolah hingga perguruan tinggi sehanusnya seseorang sudah

profesi yang sudah menghilang dengan nuansa yang baru. Seperti misalnya profesi sebagai pengrajin tradisional dengan proses produksi dan model bisnis terkini sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Para supermentor bisa membantu memperbarui konsep penyelenggaraan Career Days di sekolah atau perguruan tinggi. Sehingga bentuk aktivitas diatas bisa lebih mencerahkan siswa akan arti profesionalisme. Serta pengenalan ragam profesi unggulan masa depan.

Penyelenggaraan career days skalanya bisa ditingkatkan lagi dengan membuat semacam workshop yang bisa mengelaborasi profil karier dan profesi pada era Industri 4.0. Yang bisa membuka cakrawala siswa serta mampu menjadi alternatif pilihan siswa dalam menapaki masa depannya. Sudah saatnya para pengambil keputusan di bidang pendidikan memikirkan format career days di sekolah yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Pemahaman terhadap ragam profesi idealnya mulai diberikan kepada para siswa sejak dini. ■

Penulis Ketua Umum IARIE,
Pendiri Biro Manajemen
Indonesia.



"Anak Juni" Presiden RI

OLEH RIMO JOGA SASONGKO



Bulan Juni sangat istimewa bagi Bangsa Indonesia. Juni sebagai bulan Pancasila karena lahirnya dasar negara, juga sangat istimewa karena empat dari Presiden RI lahir di bulan Juni, yakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Joko Widodo.

Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, lahir Rabu, 21 Juni 1961. Presiden pertama Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901. Presiden kedua, Soeharto, pun lahir pada bulan Juni, tepatnya 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Lalu, presiden ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie, dilahirkan pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

BJ Habibie menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan hanya 1 tahun 5 bulan menjabat presiden. Namun begitu, pemerintahan BJ Habibie yang singkat itu berhasil menumbuhkan demokratisasi segala bidang di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam diskusi dan orasi yang diselenggarakan pada 24 Juni 2018 di The Habibie Center yang bertajuk Demokratisasi tak boleh berhenti dalam rangka 82 tahun BJ Habibie.

Dalam usia yang ke-82, BJ Habibie masih bersemangat memikirkan masalah SDM bangsa. Presiden RI ketiga itu lebih senang dipanggil dengan sebutan Eyang Habibie. Itu sebagai manifestasi bahwa regenerasi bangsa merupakan keniscayaan dan harus dikelola penuh totalitas.

Meskipun fisiknya semakin melemah, namun jika berbicara tentang SDM bangsa, Eyang Habibie terdorong semangatnya dan mampu bicara lantang dan runtun selama berjam-jam. Sepanjang kariernya, Eyang Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat iptek serta mencetak ribuan SDM unggul untuk menjalankan berbagai bidang pembangunan.

Begitu detailnya mencetak SDM unggul untuk pembangunan nasional. Ketika menjabat Menristek, para penerima beasiswa luar negeri maupun beasiswa dalam negeri yang menjadi programnya mendapat perhatian setiap saat. Bahkan, Eyang Habibie selalu membaca dan membubuhkan tanda tangan dan memberikan catatan kaki pada setiap laporan semester dari para mahasiswa anak didiknya. Hal itu merupakan fenomena luar biasa mengingat kesibukan dirinya sebagai seorang menteri yang merangkap puluhan jabatan penting lainnya.

Dengan berbagai cara pembiayaan, Eyang Habibie berusaha mencetak SDM kelas dunia. Betapa ngototnya Eyang Habibie untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN hingga pembiayaan dengan caranya yang unik yakni melalui cara offset atau timbal balik bagi perusahaan asing yang mendapatkan proyek di Tanah Air. Selain offset produksi di dalam negeri, juga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi putra-putri bangsa ke luar negeri.

Film tentang Presiden

Kisah para Presiden RI telah diangkat dalam layar lebar. Salah satunya kisah tentang Presiden ketiga, BJ Habibie. Masyarakat luas telah menyaksikan film *Rudy Habibie* yang merupakan sekuel dari *Habibie & Ainun*. Film ini mengandung banyak pesan kebangsaan dan nilai perjuangan anak bangsa dalam menggapai cita-cita. Saat kuliah di RWTH Aachen, Jerman, kehidupan Habibie muda yang biasa dipanggil Rudy dalam kondisi penuh keprihatinan.

Di sana, dirinya tidak hanya belajar tentang teknologi penerbangan, tetapi juga menediami arti cinta, persahabatan, dan mengaji persoalan bangsanya bersama dengan para mahasiswa Indonesia lainnya yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Eropa.

Sejak PPI Jerman didirikan pada 1956, sebagai pengrus Rudy memiliki obsesi dan visi

pembangunan yang detail. Menurutnya, PPI sebaiknya jangan terlalu berpolitik praktis, tetapi harus mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Rudy memulai perjuangannya dari Kota Bandung sejak 1950 ketika masih duduk di bangku SMA. Rudy menginginkan



«Kepemimpinan transformatif harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan agar sesuai dengan semangat zaman.»

tas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, lalu berjuang keras menjadi mahasiswa RWTH Aachen. (Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen). Merupakan perguruan tinggi yang tertua di Jerman yang didirikan untuk menunjang tahapan revolusi industri di negeri tersebut.

Jika bangsa Indonesia konsisten menjalankan pengembangan iptek dan melakukan

industrialisasi sesuai yang telah digariskan oleh Eyang Habibie dalam strategi dan transformasi, niscaya negeri ini setara dengan Korea Selatan dan Tiongkok.

Indonesia telah memiliki strategi transformasi teknologi dan industri yang dirancang oleh Menristek BJ Habibie dengan membentuk sembilan wahana industrialisasi nasional serta Pusat Pengembangan Iptek (Puspiptek) di Serpong. Strategi itu boleh dibilang kongruen atau sebangun dengan langkah bangsa

Korsel dan Tiongkok.

infrastruktur sehingga prosentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) komponen elektronika terus meningkat dan diproduksi oleh industri nasional.

Kepemimpinan Transformatif

Warisan Eyang Habibie yang berupa wahana industri dan kader intelektual juga sangat berguna untuk menyelesaikan program nasional kelistrikan 35 ribu MW yang kini menjadi perhatian besar Presiden Jokowi. Wahana tersebut berupa PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang SDM-nya memiliki kemampuan setara dengan industri terkemuka dunia. Yakni General Electric (GE) yang selama ini memproduksi berbagai turbin untuk pembangkit listrik, industri dan turbin gas untuk mesin pesawat terbang.

Eyang Habibie menekankan perlunya langkah improvisasi dramatis atau dikenal dengan istilah lompatan katak. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Yakni kepemimpinan yang tidak sekedar kepemimpinan politik, tetapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas, pembangkit kreativitas dan daya inovasi.

Kepemimpinan transformatif harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan agar sesuai dengan semangat zaman. Perlu strategi pembangunan yang progresif dan transformatif yang disebut dengan istilah *leapfrogging* atau lompatan katak. Istilah tersebut diadopsi oleh Eyang Habibie dari kondisi dua negara yang kalah perang yakni Jerman dan Jepang. Setelah kalah perang ternyata dua negara tersebut mampu dengan cepat mengejar kemajuan teknologi dan industri lewat lompatan-lompatan yang sangat berani.

Dalam hal daya saing SDM bangsa, sejak awal 80-an Eyang Habibie telah melakukan investasi bangsa yang sangat berharga yakni pemberdayaan kapasitas otak manusia Indonesia. ■

Penulis Lulusan Aerospace Engineering, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA

Transformasi SDM TNI

OLEH BIMO JOGA
SASONGKO

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan peringatan hari ulang tahun ke-73 TNI diakhiri dari Sabang hingga Merak. Peringatan HUT tahun ini dilakukan secara sederhana, tidak besar-besaran. Sebab, tradisi TNI menggelar hari jadi bergantian antara perayaan besar dan biasa. Apalagi peringatan sekarang bertepatan dengan musibah gempa bumi Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Untuk mengatasi bencana tersebut sejumlah personel dan alutsista TNI dikerahkan membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pengiriman personel dan alutsista TNI saat ini disesuaikan dengan kemampuan operasi nonperang atau pertahanan nirmiliter seperti penanganan bencana alam. Kapabilitas personel dan alutsista bisa dialihfungsikan secara cepat untuk operasi keselamatan umum mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya.

Panglima tengah melaksanakan evaluasi secara berkala sumber daya manusia (SDM) TNI untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan. Keputusan tersebut dilandasi sistem merit yang merupakan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Tak pelak, TNI memerlukan cetak biru pengembangan SDM berkualitas. Pengembangan postur SDM TNI yang modern dan profesional mendesak guna mengantisipasi perubahan tatanan global dan dinamika nasional. Pengembangan SDM TNI searah dengan doktrin bela negara yang terus diperbarui.

Dalam konteks sekarang bela negara adalah sikap dan tindakan warga dijiwai kecintaan tanah air. Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar

berbangsa, dan bernegara. Kemudian percaya akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta menjaga kedaulatan wilayah.

Untuk menjawab tantangan ke depan perlu mengaktualisasikan bentuk-bentuk konkret bela negara sesuai dengan tantangan zaman. Karena tantangan dan bentuk ancaman terhadap negara telah berubah. Tantangan tak hanya berupa ancaman perang dengan senjata dan perang asimetrik lainnya, tetapi juga mengatasi dampak bencana alam. Contoh, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir dan longsor. Bahkan juga untuk antisipasi dan penanganan polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Contoh, operasi Citarum Harum untuk mengatasi pencemaran sungai Citarum. Maka, SDM TNI mesti belajar ilmu lingkungan sungai serta pengolahan sampah.

Perlu strategi pengelolaan SDM sebagai sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Kondisi sekarang menuntut TNI secepatnya membangun SDM masa depan didukung sistem pembinaan jati diri. Melihat tantangan global dan revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, diperlukan transformasi sistem pendidikan TNI yang lebih adaptif dimulai dari proses perekrutan.

Rekrutmen SDM harus terpadu, sehingga dalam pelaksanaan rekrutmen calon taruna Akademi Militer memiliki kualitas dengan standar sesuai dengan perkembangan iptek mutakhir bidang teknologi yang menjadi pilar Industri 4.0. Kemudian, harus menumbuhkan spirit mengembangkan alutsista dan industri pertah-

anan serta mengembangkan secara progresif SDM sesuai dengan rencana strategis ketiga angkatan.

Sudah Waktunya

Saatnya meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi pertahanan. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional

Peralatan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk merumuskan cetak biru pengembangan SDM perlu dibentuk *task force* yang memiliki kredibilitas dan kompetensi pertahanan ke depan. Dalam rencana strategis, pertahanan negara dinyatakan bahwa SDM TNI sebagai komponen utama harus disiapkan dari segi pemenuhan personel di tiap mata pelaksanaan latihan dan pendidikan



ke-
teram-
pilan
agar pro-
fesional
dalam pe-
laksanaan
tugasnya baik
maupun yang ber-
sifat operasi. Namun,
tuntutan kompetensi dan pro-
fesionalitas tersebut harus di-
imbangi dengan peningkatan
kesejahteraan prajurit.

Cetak biru pengembangan SDM TNI perlu sinkronisasi dengan aspek ekonomi pertahanan. Saatnya memperbarui platform ekonomi pertahanan mengingat geopolitik global terus berubah. Menurut *Britannica Encyclopedia*, ekonomi pertahanan adalah manajemen ekonomi nasional terkait dengan dampak ekonomi dari belanja militer.

Implikasi yang terkait dengan ekonomi pertahanan antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran

pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam atau luar negeri. Kemudian, pengaruh belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, serta efek stabilitas nasional global.

Platform atau cetak biru ekonomi pertahanan yang sesuai dengan kondisi sekarang sangat membantu agenda bela negara. Beberapa masalah yang masih mengganjel kedaulatan bangsa antara lain adanya kontrol sebagian ruang udara Indonesia oleh negara tetangga, Singapura.

Singapura hingga kini masih menguasai *Flight In-*

« Saatnya meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi pertahanan. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. »

formation Regional (FIR). Ini terkait penguasaan lalu lintas udara Indonesia bagian barat, di antaranya ruang udara Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna, dan perairannya. Masalah tersebut masih berlanjut-larut dan belum diambil alih otoritas Indonesia. Pemerintahan sudah sering berganti, tetapi masalah tersebut terus mengganjal. Ini harus menjadi agenda bela negara 2018 untuk dituntaskan.

Masalah FIR mestinya bisa segera dituntaskan karena semua infrastruktur dan SDM berkompeten sudah disiapkan, yakni dengan adanya Jakarta Automated Air Traffic Service yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan lalu lintas udara wilayah Indonesia bagian barat secara utuh. ■

Penulis Ludusan North
Carolina State University

Perluas Kerja Sama Uni Eropa

OLEH BIMO JOGA
SASONGKO

Tulisan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Vincent Guérin, di *Koran Jakarta* (6/11) berjudul "Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan Bangsa" patut diapresiasi. Konten kerja sama dengan UE perlu diperluas cakupannya. Dubes Vincent menyatakan UE sepenuhnya mendukung fokus pemerintah Indonesia yang tengah mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Perlu menyegarkan kembali bentuk kerja sama, utamanya terkait hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke UE. Gagasan dan inisiatif Dubes UE memiliki arti penting untuk meneguhkan persada Indonesia di jantung Eropa. Persada itu meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), produk, komoditas, dan kebudayaan.

Selama ini, Indonesia belum optimal meneguhkan semua itu. Kita masih kalah dibanding negara Asia lain seperti Korea Selatan, Tiongkok, atau India. Hal itu terlihat dari jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa masih kalah jumlahnya dari ketiga macan Asia tersebut.

Indonesia perlu lebih banyak lagi mengirimkan SDM ke jantung Eropa untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka maupun untuk mempelajari pengembangan profesi masa depan dan sistem ketenagakerjaan. Adanya PCA (*Partnership Cooperation Agreement*) antara Indonesia dan UE perlu dikongkretkan terutama terkait pengembangan SDM agar memiliki daya saing global.

UE sangat strategis bagi Indonesia sebagai tempat pengembangan mutu SDM, terutama SDM teknologi dan industri. UE juga sangat penting untuk dijadikan momentum pembelajaran ketenagakerjaan. Salah satu negara UE yang menjadi kiblat pendidikan vokasi adalah Jerman. Keberhasilan Jerman menata sistem ketenagakerjaan sehingga menjadi yang terbaik di Eropa dan dunia. Ini patut di-



contoh otoritas ketenagakerjaan Indonesia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman beberapa waktu lalu kini perlu dikongkretkan lewat kerja sama dengan perusahaan terkemuka.

Bentuk kerja sama itu terkait alih teknologi pembangkitan energi dan teknologi logistik kelautan dari Jerman yang selama ini unggul. Kerja sama seperti itu tentunya melibatkan pengembangan SDM.

Saatnya Indonesia mencontoh Jerman terkait pendidikan kejuruan dan penyelenggaraan balai latihan kerja untuk menopang sektor industri.

Model pendidikan kejuruan di Jerman yakni *dual system* telah sukses dan menjadi model ideal dunia. Sangat tepat agenda Presiden Jokowi yang meninjau pusat pendidikan keterampilan di Siemensstadt. Hal itu bisa dijadikan acuan bagi kementerian

pendidikan yang hebat karena memiliki sistem pendidikan kejuruan bernama *dual system*. Atau di kalangan internasional disebut sebagai *dual system*.

Pada prinsipnya, dalam sistem tersebut para siswa langsung belajar praktik di perusahaan. Pelajaran teori di sekolah dan praktik kerja di perusahaan mendapat bobot sama. Contoh, perusahaan otomotif Volkswagen telah sukses merekrut ribuan calon tenaga kerja dari seluruh dunia untuk mengikuti *dual system* pen-

didikan kejuruan regional.

Target kerja sama tadi sampai tahun 2020 diharapkan 80 persen anak muda UE bisa mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri di sana. Mestinya Indonesia juga tidak ketinggalan dengan hal tersebut. Perlu kerja sama baik oleh pemerintah maupun konsultan pendidikan internasional di Indonesia.

Jerman juga sangat terbuka dalam ketenagakerjaan. Ada kebijakan unik untuk mengundang pekerja asing ke Jerman dengan cara peng-

akuan ijazah di bidang pekerjaan tertentu. Juga dengan adanya undang-undang yang memberikan insentif kepada tenaga kerja asing berkualitas dari negara-negara non-UE.

Sistem

pe-

ngem-

ban-

pro-

fesi dan

ketenagakerjaan

di Jerman

sangat tepat

bagi Indonesia

menyongsong be-

nus demografi.

Jer-

man sangat teliti dalam

memproyeksikan angkatan

kerjanya. Apalagi ada ancaman

menurunnya jumlah pendu-

duk sampai tahun 2030 menja-

di sekitar 77 juta. Selanjutnya,

sampai tahun 2060 menjadi

65 juta. Dengan demikian, ini

dapat membahayakan pertum-

buhan ekonomi dan mem-

penit pembiayaan jaminan

sosial di Jerman.

Pemerintah Jerman sadar,

jika program ketenagakerjaan

tidak dikelola secara totalitas,

negerinya pada 2030 dipredik-

si akan kekurangan enam juta

tenaga kerja. Tentunya itu akan

mengancam pertumbuhan

ekonomi dan kapasitas inovasi

nasional di waktu mendatang.

Pertumbuhan *home indus-*

try di Jerman menyebabkan

pedu ratusan ribu tenaga kerja

berkualifikasi dari luar negeri setiap tahunnya. Bahkan, Menteri Tenaga Kerja Jerman, pada saat itu Ursula von der Leyen, sering mengeluh. Untuk memenuhi kondisi tadi ternyata membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi ini menunjukkan, pengembangan industri kecil di Jerman sangat berhasil sehingga bisa menjadi pilar perekonomian bersama perusahaan besar.

Adanya *Partnership Cooperation Agreement* antara Indonesia dan UE perlu disertai

« Pada prinsipnya, dalam sistem tersebut para siswa langsung belajar praktik di perusahaan. Pelajaran teori di sekolah dan praktik kerja di perusahaan mendapat bobot sama. »

langkah konkret. Salah satu langkah konkret itu sebaiknya terkait skema *offset* atau imbal balik dari perusahaan besar Eropa yang mendapatkan kontrak dari Indonesia, yakni memberikan beasiswa bagi pemuda Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi Eropa atas biaya perusahaan tersebut.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem *offset*. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi yang mumpuni. Belanja BUMN seperti PT Garuda Indonesia (Persero) yang setiap tahun menyiapkan belanja modal atau *Capex* (*Capital Expenditure*) sekitar 500 juta dollar AS setara 6,8 triliun rupiah untuk ekspansi bisnis perseroan dan anak usaha juga harus memakai skema *offset*. Belanja Garuda tersebut antara lain pembelian pesawat untuk Garuda dan Citilink dari Prancis, Airbus A330. ■

Penulis Lulusan
FH Pforzheim Jerman



KORAN JAKARTA/ONES

pendidikan dan kementerian ketenagakerjaan.

"Dual System"

Negara UE sedang menerapkan pendidikan kejuruan dengan sistem mutakhir untuk mengatasi pengangguran kaum muda. Jerman tidak pernah didera masalah pen-

didikan. Hingga kini Volkswagen siap menerapkan sistem itu di semua cabangnya negara lain.

Sejak 2012, Menteri Pendidikan Jerman Annette Shavan menandatangani kerja sama dengan berbagai negara untuk mengadopsi sistem tersebut. Kerja sama itu menjadikan ribuan pemuda ikut serta dalam program pertukaran magang. Di negara-negara mitra akan dibangun 30 jaringan

OLEH BIMO
JOGA SASONGKO

A cara debat Pilpres 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak lima putaran, yang dimulai hari ini, jangan sekadar tahapan pemilu. Biaya Pemilu 2019 yang mencapai 24,8 triliun rupiah harus bisa memberi nilai tambah yang berarti bagi masa depan bangsa berupa pemikiran strategis dan gagasan cemerlang dalam mendorong bangsa berdaya saing global.

Selain melancarkan transformasi demokratis, tahapan pemilu seperti acara debat mesti menghasilkan sesuatu yang sangat esensial bagi masa depan bangsa seperti gambaran dan gagasan bersama tentang purwarupa (wajah awal) Indonesia, setidaknya hingga tahun 2030. Cakrawala debat pilpres mesti menjangkau ekosistem Indonesia 2030 dengan berbagai tantangannya. Untuk itu, kandidat mesti mampu menyajikan purwarupa Indonesia ke depan. Hal itu bisa menyemangati bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemajuan dalam milestones yang cepat.

Visi-misi yang baik bisa dianalogikan sebagai purwarupa atau arketipe. Dalam bidang desain, produk otomotif purwarupa merupakan sebuah prototype (tipe perdana). Ini dibuat sebelum diproduksi massal atau khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala yang sebenarnya. Eksistensi prototype sangat menentukan kecepatan produksi dan keunggulan produk menghadapi pesaingnya. Kemampuan para capres dan cawapres mendiskripsikan purwarupa dalam bentuk lisan maupun tulisan menjadi tolak ukur setinggi apa visi seorang pemimpin.

Purwarupa Indonesia sangat penting karena dalam menjalankan pembangunan bangsa saat ini tidak ada lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka, visi-misi yang disertai purwarupa bisa menjadi acuan pembangunan nasional. Untuk itu, visi-misi capres harus sesuai dengan semangat zaman. Jadi, tidak sekadar menyusun dokumen pembangunan. Dia



harus juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Rumusan visi-misi sebagai apa pun, percuma tanpa sistem kekuasaan tidak efektif.

Visi-misi hendaknya mengena pada generasi muda dan jangan golput. Semua harus memilih pemimpin yang memiliki mental disiplin tinggi, ulet, dan gesit, meskipun menghadapi bermacam rintangan. Pemilu adalah pesta demokrasi yang harus dalam kondisi sukacita, bukan penuh ketegangan dan saling curiga. Kemenangan seyogianya menjadi milik bangsa yang bisa mengantarkan rakyat maju pada 2030.

Para cendekiawan dan beberapa lembaga dunia yakin dengan proyeksi Indonesia 2030 akan mampu menjadi negara maju berpendapatan per kapita 15 ribu dollar AS. Skenario itu berhasil jika segenap bangsa mampu mewujudkan disiplin tinggi dan kerja keras. Pelaksanaan pemilu harus disertai jiwa besar seluruh peserta demi

persatuan Indonesia yang telah digariskan para pendiri bangsa. Hubungan personal dan sosial harus lebih baik, bukan sebaliknya.

Dibutuhkan semangat dan nilai baru yang lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan bangsa bisa terwujud dengan mentalitas kerja keras dan terus-menerus berpikir cerdas. Semua itu demi berhasilnya proyeksi Indonesia

2030 sembari terus berinovasi.

Tidak Mudah

Mewujudkan tatanan kemajuan Indonesia 2030 tidaklah mudah. Lihat saja data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016 Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 12.496,8 triliun. Sementara itu, pendapatan per kapita baru mencapai 47,96 juta atau 3.605 dollar AS. Rilis BPS berikutnya menyatakan, perekonomian Indonesia 2017 yang diukur berdasarkan

« Dibutuhkan semangat dan nilai baru yang lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan bangsa bisa terwujud dengan mentalitas kerja keras dan terus-menerus berpikir cerdas. Semua itu demi berhasilnya proyeksi Indonesia 2030 sembari terus berinovasi. »

« Dibutuhkan semangat dan nilai baru yang lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan bangsa bisa terwujud dengan mentalitas kerja keras dan terus-menerus berpikir cerdas. Semua itu demi berhasilnya proyeksi Indonesia 2030 sembari terus berinovasi. »

PDB atas dasar harga berlaku mencapai 13.588,8 triliun dengan perkapita 51,69 juta atau 3.876 dollar AS.

Menurut kaidah Internasional, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2030 jika berpendapatan tinggi (high income country/HIC) per kapita 15 ribu dollar AS. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan dari sumber sektor manufaktur.

Ada sementara pihak yang kurang yakin dengan proyeksi Indonesia 2030 bisa terwujud karena melihat data yang mustahil bisa dicapai. Misalnya, memerikan keajaiban untuk mewujudkan

kan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 13 persen guna mencapai pendapatan perkapita 15 ribu dollar AS dengan pertumbuhan depresiasi rupiah 0,8 persen dan pertumbuhan penduduk 1,1 persen.

Kalangan yang pesimis ini menyatakan, angka-angka tadi amat sulit diwujudkan. Namun, sebagai bangsa pejuang, kita harus yakin terhadap skenario kemajuan Indonesia 2030. Hanya, memang segenap bangsa harus bekerja keras dan memeras pikiran agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap/MIT). Jebakan itu membuat Indonesia tidak bisa masuk sebagai negara industri maju berpendapatan tinggi. Sebab kehilangan sumber yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari laju inflasi.

Untuk lepas dan terbebas dari jebakan MIT tidak ada jalan, selain menyiapkan SDM yang inovatif dan berdaya saing iptek. SDM harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi bersumber pada industri manufaktur dengan mesin penggerak produktivitas yang tinggi. Platform nilai tambah produksi tinggi dan terwujudnya UMKM berorientasi ekspor merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan skenario Indonesia 2030.

Hasil pemilu sangat menentukan arah pendidikan yang mesti menghasilkan postur ideal SDM nasional berdaya saing global. Keberhasilan pendidikan kunci kebangkitan suatu bangsa. Lembaga Internasional PricewaterhouseCoopers (PwC) pada 2017 mengeluarkan hasil kajian dan prediksi bahwa Indonesia berdasarkan market exchange rate (MER) pada tahun 2030 akan berperingkat ke-9 PDB terbesar dunia. Itu berarti menjadi peringkat ke-8 berdasarkan purchase power parity (PPP).

Prediksi PwC tersebut bisa menjadi kenyataan jika ada strategi pembangunan tepat yang didukung jumlah SDM berdaya saing iptek. SDM tersebut tidak hanya berprofesi sebagai birokrat. Terpenting mereka mau terjun secara total sebagai pengusaha atau wiraswasta berbasis lokal. ■

Penulis Lulusan ETH Zurich, Jerman



KORAN JAKARTA/ONES

Gratis adalah harga radikal yang akan mengubah masa depan.

**Bimo Joga Sasongko, President
Director Euro Management Indonesia**

Kontan, Kamis, 24 Maret 2016

Taksi Berbasis Aplikasi dan Era Platform

Bimo Joga Sasongko,
President Director & CEO Euro Management Indonesia

Unjuk rasa menentang taksi ilegal berbasis aplikasi atau transportasi *online* terus berlangsung. Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang beranggotakan para sopir taksi dan angkutan umum mendesak pemerintah segera melarang taksi ilegal.

Model bisnis angkutan umum ilegal berbasis aplikasi teknologi informasi menimbulkan aksi unjuk rasa dan menjurus kepada konflik horizontal. Layanan transportasi *online* seperti Uber Taxi dan Grab Car jelas melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, aturan itu kurang sesuai dengan semangat zaman dan kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Pemerintah harus mencari solusi terkait irisan krusial antara aspek inovasi teknologi dengan aspek hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Otoritas hukum perlu memahami secara komprehensif tentang pengembangan teknologi dan proses inovasi yang berpotensi mengusik tatanan sosial dan ekonomi lokal. Tak pelak lagi, perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) akan terus mengubah model bisnis yang sudah ada, bahkan bisa mematikan usaha jika yang terkait tidak mau melakukan transformasi.

Pemerintah harus mengantisipasi sebaik mungkin terkait sistem *online* dan berbagai macam aplikasi berbasis Android yang menyuburkan berbagai macam modus ekonomi bawah tanah. Jenis ekonomi ini cenderung menghindari pajak dan kewajiban tertentu karena tidak terdaftar dalam lembaga resmi. Aktivitas ini memang tersembunyi atau disembunyikan, berbentuk ilegal seperti perjudian, prostitusi, *human trafficking*, hingga penyelundupan barang dan jasa. Ekonomi bawah tanah menyebabkan sulitnya membuat ukuran yang pasti mengenai transaksi dan nilai tambah yang harus dikenai pajak karena tidak tercatat.

Di sejumlah negara seperti di India, Jerman, dan Prancis, aplikasi Uber juga menimbulkan resistensi yang luar biasa karena menciptakan ketidakadilan bagi sopir taksi konvensional dan menyuburkan praktik ekonomi bawah tanah yang mengelap pajak. Di Tiongkok, Uber malah melaporkan kerugian hingga Rp

13,5 triliun karena kalah bersaing dengan layanan taksi lokal yang telah bertransformasi menggunakan aplikasi buatan pengembang lokal.

Tren layanan gratis

Pemerintah perlu menggalakkan difusi inovasi layanan *online* atau aplikasi terhadap perusahaan taksi atau angkutan umum. Aksesibilitas pada angkutan *online* akan menimbulkan perluasan dan diversifikasi pada usaha logistik lokal hingga nasional. Namun, aksesibilitas sangat tergantung pada daya inovasi suatu bangsa. Pemerintah perlu mendorong platform otentik khas Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai aplikasi untuk usaha dan konten lokal, sehingga ada nilai tambah dan daya saing bagi usaha dan bermacam profesi anak negeri.



Saatnya segenap SDM bangsa menyambut bangkitnya era platform dengan kondisi faktual di dalam negeri. Sebab, *platform* merupakan ekosistem yang sangat berharga dan berpengaruh, yang dengan cepat dan mudah bisa mengukur, mengubah dan menggabungkan *platform* atau fitur-fitur baru, pengguna, konsumen, vendor, dan rekanan.

Perusahaan raksasa seperti Google dan perusahaan-perusahaan UMKM mestinya bisa bersinergi dalam *platform* yang notabene merupakan model bisnis yang tak memandang ukuran dan jenis usaha atau industri. Sebuah keniscayaan bahwa *platform* telah menjadi model bisnis paling penting. Era platform muncul karena kesuksesan Amazon, Apple, Facebook dan Google. Dampaknya adalah semakin menjamurnya perusahaan rintisan atau *start-up* yang membangun

platform dan *platform* yang lebih kolaboratif dan efektif merangkul konsumen.

Para inovator negeri ini perlu mengatasi fenomena *application is eating the world*. Kapasitas inovasi juga perlu mengkaji lebih dalam fenomena *long tail economic*, yakni pergeseran ekonomi dari produk utama dan pemimpin pasar yang jumlahnya hanya beberapa menuju *niche-niche* kecil yang jumlahnya banyak. Pergeseran seperti itu diprediksi akan meningkat, berbanding lurus dengan waktu. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya biaya produksi dan distribusi, khususnya di bisnis *online*.

Dengan rendahnya biaya-biaya tersebut, ada kebebasan memasarkan produk-produk spesifik tanpa harus berpikir tentang *cost* yang tinggi. Teori *long tail* yang digagas oleh Chris Anderson menyatakan bahwa dengan melayani pasar minoritas, membuat dan menyediakan produk dan jasa (*low in demand*) yang sesuai secara konsisten akan dapat meningkatkan keuntungan yang besar dibandingkan jika harus bertarung dan hanya terfokus pada produk atau jasa yang sudah lebih dulu populer.

Inovasi tentang aplikasi layanan jasa akan terus berkembang dan membutuhkan kreativitas terus menerus. Bisa jadi inovasi angkutan *online* semacam Uber Taxi dan Grab Car akan tumbang dengan kreativitas model bisnis baru. Di kota Paris, ada model bisnis yang menyewakan sepeda secara gratis. Model bisnis yang dikenal dengan istilah *Velib* (kependekan dari *velo libre* atau sepeda gratis) itu beroperasi pada 1.451 stasiun dengan jumlah sepeda yang dioperasikan mencapai ratusan ribu. Model bisnis ini sangat menguntungkan masyarakat dan wisatawan. Operator sepeda juga memperoleh keuntungan dari sisi yang lain, seperti kerjasama *mutual* dengan pusat perbelanjaan atau restoran di sekitar pangkalan sepeda.

Platform usaha akan diwarnai dengan kondisi *free* atau gratis. Model bisnis ini menawarkan layanan gratis dan memetik keuntungan dari sisi yang lain. Chris Anderson menyebutkan bahwa gratis adalah harga radikal yang akan mengubah masa depan. Teori tersebut sebaiknya menjadi inspirasi bagi para pengembang aplikasi dan *platform* baru di negeri ini. Facebook dan Google menyediakan layanan gratis kepada warga dunia. Andai saja kedua raksasa internet tersebut sejak awal mensyaratkan pengguna membayar layanannya, mungkin kedua perusahaan tersebut tidak bisa berkembang seperti sekarang.

Kunjungan ke Eropa dan Sistem Offset

Bimo Joga Sasongko,
CEO Euro Management Indonesia

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki Comprehensive Partnership Agreement (CPA) dengan Uni Eropa.

Keberadaan CPA perlu segera disertai langkah konkret dan strategis. Salah satu langkah konkret itu sebaiknya terkait sistem *offset* untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkelas dunia untuk membangun Indonesia.

Pemerintah perlu mengelola sistem *offset* terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Terutama bagi pembelian dengan jumlah anggaran yang besar. Misalnya pembelian pesawat terbang untuk penerbangan sipil maupun keperluan militer.

Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Perlu lembaga pengelola *offset* yang diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga *offset* harus mengerti betul tujuan ekonomis dari *offset* yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri. Selanjutnya lembaga *offset* juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan.

Idealnya lembaga *offset* dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme *offset*. Begitu juga ada ketentuan *offset* tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan *offset* yang ideal.

Lembaga *offset* harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait *offset*. Kemudian memiliki data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima *offset*. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan *offset* serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema *offset* sebaiknya mencakup

transfer teknologi, *co-production* atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari *direct offset* dan *indirect offset*.

Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan *indirect offset* atau biasa disebut *offset* komersial biasanya berbentuk *buyback*, bantuan pemasaran/pembelian senjata yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan *transfer of technology* (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Apalagi kondisi SDM penerbangan saat ini seperti tergambar pada poster SDM pada PT Dirgantara Indonesia, sebagian besar sudah berusia menjelang pensiun.

masalah pelik ke depan. Sehingga perlu tenaga ahli anak negeri yang berhasil melakukan transfer teknologi dan industri.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem *offset*. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi yang mumpuni.

Belanja BUMN, misalnya PT Garuda Indonesia, yang tahun ini menyiapkan belanja modal atau *capital expenditure* (capex) sebesar US\$ 500 juta setara Rp 6,8 triliun untuk ekspansi bisnis juga harus memakai skema *offset*. Belanja Garuda tersebut antara lain pembelian sebanyak 23 pesawat terdiri dari 15 pesa-

wat untuk Garuda dan delapan pesawat untuk Citilink. Selain itu juga menambah lima Airbus A330 dan satu Boeing 777 untuk memenuhi kebutuhan penerbangan rute internasional.

Mestinya pembelian oleh Garuda harus disertai *offset*. Itu bisa saja dengan menggandeng industri dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia yang sebenarnya pernah membuat pesawat N-250. Dengan demikian langkah Garuda yang terus bertransformasi sejalan pertumbuhan positif industri penerbangan dan rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur transportasi udara dengan membuka bandara-bandara baru bisa berfungsi ganda.

Perlu juga transparansi pengadaan pesawat terbang, menyangkut masalah teknis pesawat, skema pembiayaan, pengembangan SDM, hingga jadwal penyerahan pesawat untuk dioperasikan.

Beberapa waktu lalu publik sempat tercengang oleh pengumuman Airbus yang mendapat pesanan dari maskapai Lion Air sebanyak 234 unit Airbus. Kontrak yang ditandatangani Lion Air pada 2013 dilakukan di Istana Elysee merupakan pemecah rekor. Nilai kontrak yang mencapai € 18,4 miliar atau sekitar Rp 230 triliun merupakan order terbanyak yang pernah diterima sepanjang sejarah Airbus.

Kontrak di atas menjadi *leverage* bagi Airbus dan juga Prancis untuk mengatasi kelesuan ekonomi di kawasan Eropa. Dengan nilai kontrak yang fantastis tersebut mestinya Presiden Prancis juga turut mendorong adanya *offset* SDM pembangunan untuk ratusan bahkan ribuan pemuda Indonesia untuk belajar perguruan tinggi dan pusat riset penerbangan di Prancis.



Kemandirian bangsa

Mereka itu kebanyakan adalah hasil didikan atau program pengembangan SDM teknologi nasional pada tahun 80-an yang dilakukan oleh BJ Habibie. Program di atas ditempuh dengan mengirimkan lulusan SMA untuk kuliah ke luar negeri lewat beasiswa. Program pengembangan SDM teknologi ini berhasil mengirimkan ribuan pemuda Indonesia untuk kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri hingga meraih gelar S-3.

Strategi pembangunan Presiden Jokowi mengedepankan kemandirian bangsa dan penguasaan teknologi oleh putra-putri bangsa sendiri. Untuk itu perlu memasukkan faktor pengembangan SDM teknologi dalam setiap perjanjian pembangunan infrastruktur dan pembelian teknologi canggih dari luar negeri. Baik yang dilakukan oleh kementerian, BUMN maupun swasta.

Pembangunan infrastruktur akan terus berkelanjutan dan mengalami berbagai

Semua pesawat militer mengandung kendala desain dan selalu disempurnakan kemudian.

**Bimo Joga Sasongko, President
Director & CEO Euro Management**

SURAT & OPINI 19

Kontan Sabtu, 13 Februari 2016

Program Zero Accident Pesawat TNI AU

Bimo Joga Sasongko,
President Director & CEO Euro Management Indonesia

Kecelakaan Pesawat TNI AU jenis Super Tucano EMB-314/A-29B di Malang sangat memprihatinkan segenap bangsa. Kecelakaan beruntun pesawat TNI AU menunjukkan bahwa kondisi dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu dibenahi secara mendasar.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi tentang program *zero accident* atau kecelakaan nihil bagi seluruh alutsista TNI. Tampaknya instruksi tersebut belum efektif. Dengan demikian, program *zero accident* alutsista TNI perlu segera disempurnakan. Program itu menyangkut berbagai aspek, yakni kompetensi SDM, penguasaan teknologi, ketersediaan suku cadang, dan dana perawatan berkala.

Super Tucano EMB-314 merupakan pesawat latih berkemampuan COIN (*Counter Insurgency*) atau pesawat anti perang gerilya buatan Embraer Defense System, Brasil. Pada 2010, pemerintah Indonesia membeli satu skuadron (16 Pesawat) dengan harga US\$ 143 juta atau Rp 1,3 triliun. Skuadron tersebut direncanakan sebagai pengganti pesawat COIN milik TNI AU yang umurnya sudah tua, yaitu jenis OV-10 Bronco.

Pembelian pesawat militer dari luar negeri sangat membutuhkan daya dukung SDM teknologi yang memadai, seperti teknisi atau tenaga ahli perawatan pesawat. Apalagi kini jenis profesi di atas masih kurang bahkan bisa dibilang langka, baik untuk keperluan penerbangan sipil maupun militer. Masalah tersebut kini menjadi perhatian serius oleh usaha perawatan pesawat terbang yang tergabung dalam Indonesia Aircraft Maintenance Shop Association (IAMSAs). Tak pelak lagi, Indonesia perlu mengirimkan SDM penerbangan keluar negeri untuk kuliah dan mengikuti pelatihan di negara yang memproduksi pesawat diatas. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya kebutuhan SDM penerbangan baik untuk sipil maupun militer di waktu mendatang. Apalagi postur SDM penerbangan nasional pada saat ini sebagian besar umurnya sudah memasuki masa pensiun.

Kekurangan *engineer* dan teknisi penerbangan yang berlisensi berpengaruh terhadap kondisi fasilitas Maintenance Repair Overhaul (MRO). Data dari Direktorat Kelangkaan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa sam-

pai saat ini, nomor registrasi teknisi yang memiliki lisensi sekitar 7.000 orang. Sayangnya hanya ada sekitar 3.000 teknisi untuk pesawat terbang jenis *fixed wing* yang beroperasi reguler. Sedangkan sisanya adalah teknisi helikopter dan *fixed wing carrier*. Kondisi serupa tentunya juga dialami oleh pihak yang mengoperasikan pesawat militer.

Perlu SDM yang kuasai desain

Kecelakaan Pesawat Super Tucano milik TNI AU yang jatuh di permukiman warga mencuatkan pentingnya evaluasi mendasar terhadap sistem pemeliharaan dan pengembangan alutsista TNI AU. Pesawat produksi Embraer Defence System sejak awal mengandung masalah dalam hal isi kontrak yang terkait pengiriman komponen atau suku cadang. Kelemahan kontrak juga terkait dengan *transfer of technology* (ToT) yang kurang melibatkan SDM

alih teknologi yang didapat pihak Indonesia masih minim. Padahal keputusan pembelian setelah melalui proses panjang penilaian dari berbagai aspek, baik oleh Kemenhan, Mabes TNI, dan TNI AU sebagai operator. Pesawat ini mengalahkan beberapa kompetitornya atau beberapa alternatif pesawat sejenis, yaitu L-159A (Ceko), M-346 (Italia), K8P (China), dan KO-1B (Korea).

Versi EMB-314 Super Tucano atau A-29 merupakan versi yang disempurnakan dari pesawat latih EMB-312 Tucano. Versi baru ini mempunyai kelebihan lebih cepat dan kemampuan terbangnya lebih tinggi. Pesawat ini dirancang untuk *light attack*, *counter insurgency* (COIN), *close air support*, dan *aerial reconnaissance missions*. Dirancang untuk dapat beroperasi di daerah dengan suhu tinggi, kondisi kelembaban yang tinggi. Dilengkapi dengan generasi ke-4 avionik yang menggabungkan dengan sistem senjata dalam memandu akurasi senjata.

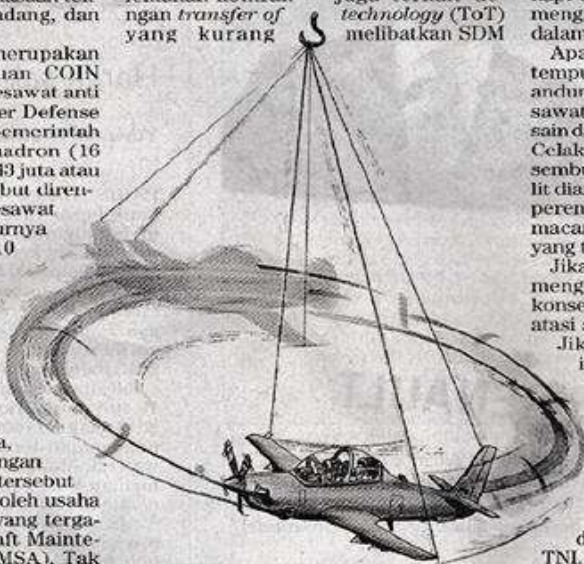
Apapun jenis pesawat militer, baik tempur maupun transpor, masih mengandung kendala desain. Semua jenis pesawat militer mengandung kendala desain dan selalu disempurnakan kemudian. Celakanya, kendala tersebut bersifat tersembunyi sedemikian rupa, sehingga sulit diamati atau dideteksi secara dini oleh perencana atau pembuatnya. Risiko semacam itu disebut dengan istilah risiko yang tersembunyi.

Jika pihak pembeli memiliki SDM yang menguasai atau memahami aspek dan konsep desainnya setidaknya bisa mengatasi atau meminimalkan risiko di atas.

Jika sebaliknya, risiko tersembunyi itu bisa berubah menjadi malapetaka. Misalnya kasus *initial crack* (retakan) pada struktur pesawat terbang setelah beroperasi selama kurun waktu tertentu.

Program *zero accident* pesawat TNI AU bisa efektif jika didukung oleh SDM yang benar-benar menguasai sistem dan aspek desain pesawat yang dimiliki oleh TNI. Apalagi, Super Tucano adalah pesawat *Light Attack Turboprop* yang sangat ideal untuk melaksanakan misinya sebagai *counter insurgency* dengan akurasi yang tinggi. Perlu juga uji coba yang lebih intens terkait dengan kemampuan pesawat yang sebetulnya mampu beroperasi di malam hari karena dilengkapi sistem FLIR & NVG Compatible. Selain itu, perlu pengembangan Super Tucano sebagai pesawat latih lanjut maupun transisi ke pesawat *fighter jet* generasi terakhir.

Super Tucano sangat tepat untuk ikut serta mengamankan perbatasan NKRI karena spesifikasi pesawat mampu memberikan dukungan terhadap personel garis depan dengan cepat.



dalam negeri.

Selama ini, TNI AU terpaksa bersusah payah mengirim komponen Super Tucano ke pabrik pembuatan jika terjadi masalah. Ini tentunya memakan waktu yang lama. Perlu perbaikan sistem perawatan dan program alih teknologi terkait pesawat Super Tucano. Sistem perawatan perlu ditunjang dengan berbagai peralatan dan *workshop* di Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang. Juga perlu pengembangan fasilitas simulator pesawat Super Tucano untuk pelatihan awak pesawat dan teknisi.

Sejak pengadaan Super Tucano, proses

Ada 10% perwira Polri yang belum memiliki pola pengembangan profesi sesuai tantangan zaman.

Bimo Joga Sasongko,
CEO Euro Management Indonesia

Kontan Selasa, 21 Juni 2016

Kapolri dan Lompatan Katak

Bimo Joga Sasongko,
President Director & CEO Euro
Management Indonesia

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri baru. Penunjukan Komjen Tito merupakan bentuk regenerasi *leapfrogging* atau lompatan katak di tubuh Polri, karena melompati empat angkatan dan tujuh jenderal senior.

Kapolri yang baru itu memiliki tantangan berat terkait dengan postur SDM Polri yang mesti ditransformasikan dengan lompatan katak sehingga profesionalitas dan kompetensinya bisa meningkat pesat. Lompatan katak terhadap SDM Polri merupakan keniscayaan karena tantangan dan kompleksitas kejahatan.

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu dibenahi karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih dan memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Prestasi Komjen Tito merupakan hasil dari sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri yang pernah dia tempuh. Antara lain pendidikan di University of Exeter di Inggris yang meraih gelar MA dalam bidang Police Studies.

Dia meraih PhD di Nanyang Technological University, Singapura. Hampir seluruh pendidikan dan kursus kepolisian yang terbaik di dunia pernah dilakukannya.

Tak pelak lagi, kepolisian kini membutuhkan kerjasama dan pendidikan global bagi para perwira. Jika hanya mengandalkan pendidikan dan kursus di dalam negeri saja tidak memadai.

Selain masalah pembenahan integritas, personel kepolisian juga perlu pengembangan kompetensi dan profesionalitas untuk 400.000 personel Polri. Saat ini postur SDM Polri terkendala komposisi struktur yang 90% terdiri dari pangkat bintang ke bawah yang memiliki kapasitas dan ketrampilan pemolisian yang minim dan dengan tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.

Ironisnya sekitar 10% perwira Polri juga belum memiliki pola pengembangan profesi yang sesuai dengan tantangan zaman. Untuk mengatasi disritas atau kesenjangan karier dan kompetensi itu perlu sistem transformasi lompatan katak bagi SDM Polri pada level perwira dengan berbagai program pendidikan di LN. Untuk itu, perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi di luar negeri yang tepat untuk pendidikan para perwira Polri.

Pembenahan postur SDM kepolisian perlu empat nilai dasar yang menjadi pedoman berdasarkan universalitas watak

peran dan fungsi dari institusi ini, yakni integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya. Empat nilai dasar yang universal tersebut tentu harus dikontekstualisasikan dengan situasi empirik pemolisian di negeri ini.

Empat kriteria nilai dasar itu untuk mengatasi masalah laten internal Polri yang masih sarat dengan perilaku korup, budaya kerja kekerasan (pelanggaran HAM), kegagahan menghadapi tindakan vigilante kelompok massa yang menggunakan identitas komunisme (agama/etnik), dan minimnya akuntabilitas untuk praktek penyalahgunaan kekuasaan.



Kerjasama internasional

Kapasitas Komjen Tito yang sarat pendidikan internasional dan kerjasama global tentunya menjadi modal penting untuk melakukan *leapfrogging* atau lompatan katak lembaga Polri. Antara lain mentransformasikan secara cepat aspek dan teknologi kepolisian untuk menunjang operasional dan proses penyidikan di tingkat satuan Polsek hingga Mabes Polri. Lompatan katak bagi bisa memperlancar proses *scanning, analysis, response*, dan akses organisasi kepolisian.

Kapolri yang baru juga memiliki misi yang strategis yakni melakukan *leapfrogging* untuk mengatasi hiperterorisme yang melanda dunia saat ini. Untuk itu perlu memperkuat keberadaan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Sekolah internasional yang

menyediakan pendidikan bagi para penegak hukum dalam kerangka penyidikan multi yurisdiksi dalam kejahatan transnasional ini memfokuskan pada kegiatan memerangi terorisme.

Kapolri baru juga harus setiap saat meningkatkan kemampuan Densus 88 yang menjadi ujung tombak personel anti teroris di Indonesia. Hiperterorisme harus dihadapi dengan lompatan katak yang mentransformasikan teknologi anti terorisme secara signifikan sehingga bisa meningkatkan kapasitas bangsa untuk menanggulangi aksi terorisme. Kerjasama regional dan internasional dalam berbagai aspek untuk membasmi kelompok teroris sebaiknya ditingkatkan.

Leapfrogging penanganan teroris juga menyangkut pentingnya standarisasi dan tata kelola peralatan deteksi dini terhadap objek vital dan infrastruktur publik. Kenaikan anggaran untuk menangani terorisme yang dialokasikan untuk BNPT mestinya disertai pendidikan personel yang sesuai perkembangan dunia.

Penanganan terorisme di negeri ini sangat membutuhkan kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam konteks global, Kapolri sebaiknya lebih proaktif dalam penguatan dan peningkatan kerjasama ASEAN National Police (ASEANAPOL) yang merupakan organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara dan sejak tahun 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Kerjasama internasional SDM Polri perlu diperluas hingga Europol. Europol adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara anggota. Markas besarnya di Den Haag Belanda. Europol bertugas mengumpulkan data kejahatan, menganalisis, berbagi informasi dan mengkoordinasikan operasi. Negara anggota Europol menggunakan informasi yang diberikan Europol untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran, dan kemudian menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan.

Para ahli dan analis Europol mengamati bagian dalam tim investigasi bersama yang membantu kasus kriminal di negara Uni Eropa. Europol merupakan pusat operasi *high security*, berurusan dengan lebih dari 9.000 kasus per tahun, dengan ciri analisis berkualitas tinggi yang menjamin keberhasilan operasional.

Diharapkan kemampuan ASEANAPOL bisa mendekati kapasitas Europol. Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang sekuat Europol dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota dalam hal SDM kepolisian agar keamanan ASEAN dan pemberlakuan ASEAN Community bisa berlangsung dengan baik. ■

SURAT & OPINI 19

Publik bakal menuntut ukuran kinerja dan bobot pekerjaan yang terukur bagi legislator.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia

Kontan Sabtu, 21 Juli 2018

Legislator Cendekiawan Semakin Langka

Partai politik telah menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) Pemilu 2019 untuk diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti sebelumnya postur caleg yang disodorkan banyak dari kalangan kader partai, artis, pengusaha dan mantan atlet. Parpol mengandaskan sederet selebritis yang gaya hidupnya super mewah untuk mendulang suara rakyat. Terjadi juga transaksi atau transfer artis antarpol dengan nilai cukup tinggi.

Melihat postur caleg yang disodorkan oleh parpol, terlihat postur legislatif mendatang mengalami kelangkaan legislator cendekiawan. Publik menyambut dingin daftar caleg dan merisaukan integritas serta kompetensi para legislator yang disodorkan parpol. Kerisauan publik itu pada pemilu legislatif yang lalu juga dinyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Proses penyusunan caleg belum sesuai dengan harapan rakyat luas. Padahal sosok legislator yang didambakan rakyat sangat kontradiktif dengan kepentingan pengurus parpol. Masih kuat dalam persepsi publik, moralitas, integritas dan kapasitas legislator masih jauh dari harapan. Moralitas dan integritas mereka hingga periode legislatif saat ini masih sarat dengan perilaku korup. Dengan mata telanjang publik melihat aktifitas dan gaya hidup para anggota DPR/DPRD masih penuh kemewahan dan boros.

Kompetensi dan kinerja anggota legislatif yang belum menggembirakan mestinya menjadi perhatian parpol. Sesuai dengan harapan rakyat, parpol seharusnya menekankan pentingnya sosok legislator cendekiawan nan bersahaja. Mereka adalah figur politisi cendekiawan yang artikulatif dan visioner pada zamannya. Pada kapasitas diri mereka telah bersejua antara aktivis politik dan kecendekiawanan secara utuh.

Sejarah negeri ini banyak menghadirkan sosok politisi cendekiawan yang kehidupan pribadinya bersahaja atau hidupnya penuh kesederhanaan, namun kiprah dan pemikirannya luar biasa. Mereka adalah politisi paripurna yang telah hadir dan menghiasi sejarah bangsa. Kini rakyat merindukan sosoknya pada saat negeri ini tengah mengalami kekeringan politisi cendekiawan.

Rakyat merindukan politisi cendekiawan seperti Agus Salim, Mohammad Natsir, atau Kasman Singodimedjo. Mereka itu sosok sederhana yang sikapnya lembut dan toleran, namun dia adalah cendekiawan dan organisator yang hebat.

Legislator pertama Indonesia yakni Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa memimpin



Bimo Joga Sasongko,
Pendiri Euro Management Indonesia

adalah menderita, sesuai dengan pepatah Belanda "*leiden is lijden*". Pepatah itu menjadi suatu keharusan jalan pengabdian, bagi mereka yang memahami bahwa kebahagiaan rakyat lebih utama ketimbang pemimpinnya. Ini sangat tepat jika kita meneropong sepak terjang para pahlawan bangsa yang notabene sebenarnya mereka itu adalah politisi cendekiawan.

Seharusnya parpol menjunjung kewajiban sejarah untuk mencetak dan menemukan kembali sosok-sosok politisi cendekiawan. Meminjam istilah Presiden ketiga RI BJ Habibie, sosok tersebut pada saat ini adalah SDM bangsa yang terbarukan dan unggul dalam profesinya. Biasanya kader pembangunan itu bukan aktivis ataupun pengurus parpol. Karena waktunya banyak tercurah untuk mengembangkan profesi dan memupuk karyanya. Mereka itu adalah sosok-sosok profesional non partai, tetapi memiliki visi, kompetensi dan karya inovasi yang sangat berguna bagi pembangunan.

Keniscayaan bagi parpol untuk memberikan porsi pencalgan kepada kader pembangunan. Namun, pengurus parpol kurang berminat menarik kader pembangunan agar mereka mau duduk di lembaga legislatif.

Kinerja yang terukur

Tak bisa dimungkiri, rakyat masih prihatin karena hingga kini negeri ini belum memiliki postur lembaga legislatif yang memiliki integritas dan bobot profesionalitas yang memadai. Tahapan pemilu legislatif semakin tidak kondusif untuk menjangkau anak-anak intelektual bangsa agar bersedia menjadi wakil rakyat. Spektrum tahapan pemilu tahun 2019 terlalu

luas karena pertama kalinya pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

Masyarakat banyak lah yang kuatir terkait dengan kecakapan, kompetensi dan kejujuran para legislator. Selama ini banyak legislator yang kurang memiliki kecakapan intelektual dalam membedakan berbagai persoalan nasional dan daerah. Padahal mereka diberi gaji besar dan fasilitas mewah.

Kecakapan intelektual legislator juga menyangkut manajemen aspirasi yang dikelola secara manual maupun digital. Hingga saat ini sistem informasi lembaga legislatif di Indonesia masih belum efektif. Buruknya sistem informasi legislatif yang ada sekarang ini juga menghambat peningkatan profesionalitas. Akibatnya, proses *check and balance* tidak berjalan dengan baik. Mestinya, sistem informasi legislatif bisa membantu para politisi untuk mengelola aspirasi. Juga merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dalam tugas legislasi seperti proses penyusunan undang-undang atau peraturan daerah, menyusun APBN/APBD dan lainnya.

Di masa mendatang publik terus menuntut adanya ukuran kinerja dan bobot pekerjaan bagi legislator yang tertata dan terukur dengan baik. Selama ini kinerja legislator tidak pernah terukur secara benar.

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, sudah dirumuskan standar kinerja legislator secara rinci. Perlu dicontoh Amerika Serikat yang sudah ada standardisasi profesi pekerja politik dan ukuran kinerja bagi legislator yang setiap tahun selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.

Di sana juga terdapat lembaga yang melakukan penilaian, yakni National Standards for Civics and Government. Lembaga tersebut mengukur kemampuan legislator dalam menjalankan tugasnya. Persaingan sengit untuk menggapai kursi legislatif dan besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan selama kampanye menyebabkan ketuluan dalam berpolitik sekarang ini semakin menipis. Pesta demokrasi berlangsung dengan biaya yang amat tinggi. Baik biaya yang harus ditanggung oleh negara, parpol, maupun yang dipikul individu politisi.

Akibatnya legislator cendekiawan semakin sulit terwujud. Risikonya, kedepan masih banyak legislator yang berkinerja buruk. Karena tingkatan problem solving para legislator juga masih rendah, utamanya yang menyangkut *thinking challenge*, yakni kemampuan berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah pembangunan.

Sister City dan Mencetak SDM Unggul

podium

Oleh **BIMO JOGA SASONGKO**
Alumni SMAN 3 Bandung,
Sekjen Pengurus Pusat
IABIE (Ikatan Alumni
Program Habibie)



PENGEMBANGAN Kota Bandung dengan bermacam produk dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) membutuhkan kerja sama internasional. Kerja sama itu khususnya antarpemerintahan kota. Hal itu tidak hanya terkait dengan bagaimana mencari ruang atau infrastruktur untuk memasarkan produk Kota Bandung di luar negeri.

Seperti misalnya langkah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang memboyong puluhan produk industri kreatif ke pusat promosi bernama Little Bandung di Korea Selatan. Pusat promosi berwujud restoran ini terletak di Hongdae, Seoul, Korea Selatan. Di sana produk-produk industri kreatif tersebut dipasarkan.

Langkah Wali Kota Bandung di atas spektrumnya perlu ditingkatkan dengan kelembagaan yang lebih kokoh dan relevan, yakni dengan *reinventing program sister city* yang selama ini telah dilaksanakan.

Program *sister city* perlu revitalisasi sehingga kegiatannya tidak sekadar monumental dan seremonial belaka. Tetapi lebih relevan dan konkret dengan kondisi kekinian. Tidak bisa dimungkiri, otonomi daerah dan globalisasi telah mendorong peningkatan perhatian dan kapasitas pemerintah daerah untuk membuka jalinan kerja sama yang lebih luas.

Perlu mendorong berkembangnya kerja sama *sister city* yang dijadikan instrumen bagi kota dan komunitas untuk membantu satu sama lain dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan kotanya dengan berbagi sarana pengetahuan, sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian antarkota.

Hingga saat ini Kota Bandung telah menjalin kemitraan dengan 5 kota di dunia. Kota Braunschweig, Jerman menjadi *sister city* terlama Kota Bandung. Pada tanggal 24 Mei 1960 telah ditandatangani Piagam Ikatan Persahabatan Bandung-Braunschweig oleh Duta Besar RI Dr Zairin Zain dan Hans Gunther Weber (Direktur Kota) dan Oberbürgermeister (Wali Kota Braunschweig) Martha Fuchs. Piagam tersebut disempurnakan oleh Wali Kota Bandung R Priatna-kusumah serta utusan Braunschweig Prof Dr George Eckert pada 2 Juni 1960 di Bandung.

Sejalan warga Kota Bandung boleh bangga bahwa kerja sama Braunschweig merupakan kerja sama yang paling tua di Tanah Air. Bidang kerja sama meliputi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertukaran pemuda, pelatihan, kesenian dan olahraga.

Sister city berikutnya adalah Kota Fort Worth di Texas, Amerika Serikat. Latar belakang kerja sama dengan Fort Worth terjadi karena perjanjian kerja sama antara



IPTN (PT Dirgantara Indonesia) dengan pabrik helikopter BELL. Ini terjadi pada saat BJ Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Direktur Utama PT DI. Yang lain adalah *sister city* Kota Bandung dengan Kota Suwon, Korea Selatan ditandatangani tanggal 27 Agustus 1997. Dan dua kota dari Tiongkok yakni Liuzhou dan Yingkou yang juga menjadi *sister city* dari Kota Bandung.

Salah satu aspek penting terkait dengan revitalisasi *sister city* adalah wahana strategis untuk mengembangkan atau mencetak SDM unggul. Sebaiknya pemkot membuat program pengirimannya ke luar negeri untuk seleksi secara terbuka. Para lulusan SMA atau sekolah kejuruan terbaik dikirim ke luar negeri atas biaya pemerintah melalui seleksi secara terbuka.

Pemkot Bandung sebaiknya bekerja sama dengan lembaga atau konsultan pendidikan internasional seperti Euro Management Indonesia (EMI). Itu adalah lembaga profesional yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan konsultasi pendidikan internasional secara terpadu dan terintegrasi untuk calon mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi di negara maju. Khususnya perguruan tinggi di Eropa.

Perlu kerja sama antara Pemkot Bandung dengan EMI terkait langkah untuk mencetak SDM unggul yang nantinya menjadi aset yang sangat berharga bagi Pemkot Bandung dalam memenangkan persaingan global. Kerja sama di atas sangat strategis untuk menangkap peluang dan memberikan jalan untuk kaum belia warga kota yang kuliah di luar negeri.

Sudah saatnya kaum belia Kota Bandung tidak hanya puas kuliah di perguruan tinggi dalam negeri. Mereka juga harus dimotivasi agar bisa mewujudkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Apalagi di sana banyak kesempatan emas seperti keunggulan studi di Jerman yang biaya kuliahnya gratis. Dengan masa studi delapan semester (S1) yang tergolong 300 universitas negeri terbaik di dunia. Di sana ada sekitar 2.000 pilihan program studi. Dengan biaya

hidup yang hanya sekitar 400 - 650 euro per bulan. Peluang seperti di atas seharusnya segera ditangkap oleh kaum belia Kota Bandung dengan bantuan Wali Kota yang memiliki langkah dan strategi dalam konteks *sister city*.

Program revitalisasi *sister city* sebaiknya juga melibatkan BUMN yang ada di Kota Bandung. Apalagi di kota ini banyak terdapat BUMN dalam berbagai sektor. Dari BUMN sektor transportasi dan logistik yakni PT KAI dan PT Pos Indonesia. BUMN industri strategis, yakni PT DI, PT Pindad, PT Inti, PT LEN, PT Telkom dan lain-lainnya.

Saatnya Wali Kota Bandung mengkonkretkan kerja sama untuk mencetak SDM unggul. SDM tersebut nantinya akan membantu wali kota untuk mewujudkan visinya. Seperti visi Kota Bandung Teknopolis yang diproyeksikan menjadi pusat industri elektronika dan perangkat lunak terkemuka, ini tentunya perlu disiapkan SDM unggul sedini mungkin.

Sebenarnya usaha untuk menjadikan Bandung sebagai Kota Teknopolis pernah dirintis oleh BJ Habibie. Pada era 70-an sebenarnya Habibie telah menyiapkan wahana untuk pengembangan jenis industri di atas, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti), Lembaga Elektronika Nasional (LEN), dan berbagai macam laboratorium serta didukung oleh SDM teknologi lulusan luar negeri yang termasuk ikatan dinas.

Perlu membangkitkan industri nasional seperti PT INTI dan LEN sehingga tidak hanya menjadi penonton dan pemain kecil-kecilan dalam hal pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pasar elektronika di Indonesia. Kita perlu belajar dari Samsung dalam mengelola dan mengembangkan SDM. Selama lima tahun terakhir Samsung menekankan pentingnya program spesialis regional yang merupakan unsur pokok dalam upaya globalisasi Samsung. Program tersebut meliputi pelatihan SDM dengan wawasan internasional agar memahami situasi di pasar-pasar luar negeri. Pelatihan tersebut dengan cara mengirimkan ribuan karyawan ke berbagai negara untuk belajar dan memahami potensinya. ***

Panjang tulisan maksimum 5.000 karakter. Materi dikirim via e-mail opini@tribunjabar.co.id, tribunjabar@yahoo.com, atau kirim langsung ke redaksi *Tribun Jabar* di Jalan Sekeloa Utara 2-4 Bandung menggunakan CD atau disket. Sertakan foto diri, fotokopi identitas yang masih berlaku, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Hari Santri dan Jihad Produktivitas

podium

Oleh: **BIMO JOGA SASONGKO**

Alumnus FH Pforzheim Jerman, Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE).



HARI Santri diperingati secara nasional setiap 22 Oktober. Tema Hari Santri tahun ini adalah "Dari Pesantren untuk Indonesia". Para santri yang jumlahnya jutaan adalah kaum muda belia yang sangat menentukan masa depan bangsa.

Latar belakang ditetapkan Hari Santri terkait dengan esensi bela negara yang bertajuk Resolusi Jihad yang pernah diserukan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari pascaproklamasi kemerdekaan. Konteks jihad yang tepat dan sangat relevan pada saat ini adalah berjihad untuk menggenjot produktivitas. Para santri saat ini berjihad produktivitas untuk mewujudkan kemakmuran di perdesaan.

Santri memiliki potensi besar untuk memajukan Indonesia setara dengan bangsa lain. Para santri patut diberi kesempatan untuk berwirausaha dan menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi. Jutaan santri setiap tahun silih berganti mengisi kelas pesantren di seluruh pelosok negeri ini. Mereka harus diberi bekal agar nantinya tidak hanya pandai berakhlak, tetapi juga mampu berniaga dan menciptakan nilai tambah berbagai produk.

Hari Santri relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang kekurangan jumlah wirausahawan. Dibandingkan dengan negara lain, prosentase jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,65 persen dari jumlah penduduk saat ini. Padahal suatu negara dikatakan berdaya saing global jika jumlah wirausahawannya melampaui 2 persen. Para santri yang jumlahnya jutaan perlu didorong untuk menjadi pelaku usaha di perdesaan. Perlu menanamkan budaya berwirausaha di kalangan santri untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Para santri merupakan segmen yang

sangat ideal untuk diarahkan menjadi pengusaha di perdesaan.

Perlu cara yang efektif untuk mencetak santri wirausaha. Saat ini para santri didorong untuk menjadi pelaku UMKM yang kreatif dan ulet. Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap ekonomi bangsa-bangsa di dunia sangat luar biasa.

Hal itu ditunjukkan oleh Prof Herman Simon dengan mengambil kajian ekonomi di beberapa negara. Ternyata UMKM merupakan jagoan tidak kentara yang mampu menjadi penyelamat ekonomi nasional. Hermann Simon adalah pemikir manajemen yang sangat berpengaruh setelah Peter Drucker. Dia pernah menjadi kepala European Marketing Academy.

Eksistensi UMKM yang menjadi jagoan menunjukkan mengapa Jerman selama ini mampu menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Ternyata kekuatan ekspor Jerman tidaklah terletak pada korporasi raksasanya seperti Volkswagen, Siemens, dan BOSCH. Melainkan pada peran ribuan jagoan UMKM. Sekadar catatan, separo dari jagoan UMKM di dunia adalah perusahaan dari Jerman. Perkembangan serupa juga terjadi di negara-negara pengekspor besar lainnya.

Saat ini pesantren menjadi entitas yang memikirkan dan proaktif untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas nasional tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi perlu perjuangan plus strategi dan tahapan. Tingkat produktivitas bangsa yang hingga kini masih rendah adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Untuk itulah jihad produktivitas sangat relevan untuk dijalankan. Pesantren sebaiknya mulai mengkaji berbagai ajaran keagamaan yang bisa menimbulkan *ghitroh* atau gregat untuk memacu usaha dan produktivitas.

Hakikat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja menghasilkan produk dan jasa. Berbagai faktor mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, termasuk juga faktor keagamaan dan sosial ketenagakerjaan. Search dengan itu pesantren diharapkan memakai strategi yang lebih tepat dan mendunia yakni strategi *global reverse innovation*. Strategi tersebut juga bisa memperluas lapangan kerja karena berbasis inovasi dan teknologi tepat guna.

Jihad produktivitas juga bisa memperluas

lapangan kerja. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80 % di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih. Perlu penataan kompetensi ketenagakerjaan bagi para santri. Kompetensi terkait erat dengan kondisi lapangan kerja yang cocok untuk perdesaan utamanya pada sektor usaha pertanian.

Apalagi produktivitas sektor pertanian di negara maju dengan negara berkembang seperti halnya Indonesia masih sangat timpang. Sejak tahun 2000 kesenjangan produktivitas pertanian tersebut berkisar 50 banding 1. Banyak faktor yang menyebabkan produktivitas pertanian masih terpuruk, antara lain faktor inovasi dan mekanisasi usaha pertanian.

Indonesia kini membutuhkan banyak pahlawan masa kini, yakni tokoh yang mampu menggenjot produktivitas bangsa. Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja di Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia. Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar 121,9 dolar AS, sementara Indonesia hanya sekitar 21,9 dolar AS. Posisi Indonesia pada 2015, juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand bahkan Sri Lanka.

Sungguh prihatin melihat fenomena gap produktivitas (*productivity gap analysis*) antara Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Di mana produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dari produktivitas Indonesia. Produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%) dari produktivitas Indonesia. Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 2,17 kali (217%) dari produktivitas Malaysia.

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, tak ada kata lain yang lebih penting, selain memperbaiki secara totalitas produktivitas dan nilai tambah lokal. Sektor pertama yang mesti dibenahi adalah sektor industri pengolahan agar bisa memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Saat ini sektor industri pengolahan berkontribusi untuk mendorong perekonomian dan menyediakan sumber pekerjaan yang berkualitas bagi angkatan kerja nasional. ***

HOTLINE Tribun Jabar siap membantu Anda mulai soal air, listrik, telepon, KTP, paspor, pajak, izin usaha, layanan rumah sakit, bank, sampai layanan taksi. Wartawan kami dengan senang hati akan menuliskan di halaman yang sudah menjadi bacaan wajib pejabat ini. Cukup fax (022) 7530655, e-mail: redaksi@tribunjabar.co.id, tribunjabar@yahoo.com, atau sms: ketik hl (spasi) pesan kirim ke 08157 3000 100. Bisa juga melalui surat.

Membumikan Hakteknas

RABU, 10 AGUSTUS 2016 , 11:29:00 WIB

RMOL. Tantangan kebangkitan teknologi di negeri ini masih dihadap oleh persoalan klasik, yakni belum membaiknya sistem inovasi. Untuk memperkuat sistem inovasi nasional maupun daerah dibutuhkan regulasi yang ketat tentang teknologi impor baik yang masuk secara komersial, kerjasama investasi, maupun hibah.

Langkah tersebut sesuai dengan UU Nomor 18/2002 ayat c yakni penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan dengan penguatan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri.

Untuk lebih membumikan Hakteknas, Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) merekomendasikan pentingnya reinventing teknologi tepat guna.

Definisi tepat guna yang selama ini telah dibiarkan dan terdegradasi perlu dirumuskan kembali sesuai dengan semangat jaman. Teknologi tepat guna tidak harus berkonotasi kuno dan sepele. Bisa saja tepat guna mengandung tingkat teknologi yang canggih.

Dalam tataran sosio-engineering, tepat guna lebih menekankan solusi jitu terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini. Teknologi tepat guna harus cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada rentang waktu tertentu sesuai dengan kondisi budaya dan ekonomi serta penggunaannya harus ramah lingkungan.

Sejarah membuktikan bahwa konsistensi terhadap pengembangan teknologi tepat guna yang diikuti jiwa atau semangat berdikari telah mengantarkan sebuah

bangsa mengalami kebangkitan teknologi yang luar biasa.

Untuk membumikan Hakteknas perlu mengedepankan kreativitas masyarakat. Kreativitas pada prinsipnya melekat pada individu warga bangsa, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.

Benih-benih kreativitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai dengan penguatan sistem inovasi. Sayangnya sistem inovasi di negeri ini masih belum progresif dan masih terjerat birokrasi sehingga sulit terserap oleh masyarakat luas.

Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation atau inovasi terbuka. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah. Apalagi akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat produk baru memiliki daur hidup yang semakin singkat.

Di sisi lain, jika ingin survive maka perusahaan harus terus mengeluarkan produk baru. Implikasinya varian dari biaya riset yang semakin besar dan periode waktu yang lebih singkat untuk meraih keuntungan. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak mampu mengembangkan produk-produk inovatif.***

Bimo Sasongko BSAE MSEIE MBA

Pendiri Euro Management Indonesia, penggagas Program Beasiswa Gerakan Indonesia 2030 dan ketua Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

